

LAPORAN TAHUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN 2017



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JALAN BAJIMINASA NO. 12 TELP 0411-873002 FAX 0411-88779

Website: www.dkp.sulselprov.go.id

MAKASSAR

2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 dapat tersusun. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan gambaran dan informasi sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan diselama tahun 2017.

Secara umum program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan Kelautan dan Perikanan ditahun 2017 dan masa mendatang.

Disadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hasil kerjasama yang baik dan terpadu antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu terbitnya Buku Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 diucapkan terima kasih.

Makassar, Oktober 2018

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. SULKAF.S.LATIEF, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19630424 198903 1 010

RINGKASAN

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota Makassar terletak antara 0°12' - 8° LS dan diantara 116°48' - 112° 36' BT dengan luas wilayah sekitar 45.764,53 Km², panjang garis pantai 1.937 Km yang terdiri dari 24 kabupaten/kota, 304 kecamatan.

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan tahun 2017 tercatat sebanyak 8.771.970 jiwa atau meningkat 1,9 % dari tahun 2016. Diantara jumlah penduduk tersebut terdapat tenaga kerja yang mengelola sumberdaya Kelautan dan Perikanan (nelayan, pembudidaya, sebanyak 441.630 orang atau 5,03 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 279.748 orang (63,3%), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 161.882 orang (36,7%).

Untuk mengorganisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik non teknis maupun teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan staf yang cukup dan memiliki integritas yang handal. Pada tahun 2017 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki staf pegawai negeri sipil sebanyak 210 orang.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengacu pada Visi Dinas yaitu Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat.

Pelaksanaan masing-masing sub program dibiayai melalui dana Dekonsentrasi (APBN) sebesar Rp. 4.765.362.000, APBD (Belanja Langsung) sebesar **Rp. 79.687.654.229 yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 17.523.377.000** dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp.550.000.000

Hasil pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan selama tahun 2017 tercatat total produksi sebesar 4.262.553,5 ton, sedangkan pada tahun 2016 produksi perikanan sebesar 3.941.648,8 ton dimana mengalami peningkatan sebesar 320.904,7 ton atau 8,1 %. Pada tahun 2017 total volume ekspor sebesar 126.245 ton naik 6,8 % dari tahun 2016 dan nilai sebesar US \$ 251,8 juta naik 19,7 % dari tahun 2016.

Sejalan dengan peningkatan produktivitas usaha, maka tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan pada berbagai usaha sebagai berikut: Budidaya KJA Air Laut Rp. 14.630.344, Budidaya Laut (Rumput Laut) Rp. 33.023.980, Budidaya Tambak Rp. 26.167.835, Budidaya Kolam Rp. 16.347.289, Budidaya KJA Air Tawar Rp. 6.307.236 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 19.262.468 dan nelayan perairan umum Rp. 28.918.360.

Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2017 tercatat sebanyak 55,2 kg/kapita/tahun (naik 5,1%).

Sekaitan dengan pelayanan baik dalam memanfaatkan asset pemerintah maupun bentuk jasa yang dilakukan, maka dengan mengacu pada perda-perda yang ada, besarnya pendapatan asli daerah sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 tercatat Rp. 2.239.460.000 (123,1%) dari target Rp. 1.818.930.000,—



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN.....	3
2.1. Keadaan Geografis	3
2.2. Demografi	3
2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan	4
a. Perikanan Tangkap	4
b. Perikanan Budidaya	4
c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan.....	4
d. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut.....	4
e. Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.....	5
f. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Kapal Perikanan.....	7
g. Pembinaan dan Perbenihan Ikan Air Tawar.....	8
h. Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Udang dan Kesehatan Lingkungan.....	11
III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	15
3.1. Struktur Organisasi.....	15
3.2. Kepegawaian.....	18
3.3. Keuangan.....	20
a. Belanja Aparatur	20
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI SULAWESI SELATAN	21
4.1. Tujuan dan Sasaran	21
a. Tujuan.....	21
b. Sasaran.....	21
4.2. Kebijakan dan Program Strategis	21
a. Kebijakan	21
b. Program Strategis	22
4.3. Sumber Pembiayaan	33
4.3.1. Dana Dekonsentrasi	33
4.3.2. Dana Tugas Pembantuan	34
4.3.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	34
4.3.4. Dana Daerah	35

a. Belanja Langsung.....	35
b. Belanja Tidak Langsung	36
4.4. Kegiatan Pembangunan	36
4.4.1. Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.....	36
a. Pengembangan Kawasan dan usaha Budidaya Laut.....	36
b. Pengembangan Kawasan dan usaha Budidaya Air Payau dan Tawar.....	39
c. Pengembangan Daya saing dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	42
4.4.2. Perikanan Tangkap.....	55
a. Seksi Kepelabuhan Perikanan.....	55
b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan.....	64
c. Seksi Kenelayanan dan Sarana Penangkapan Ikan.....	70
4.4.3. Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	83
a. Seksi Konservasi dan keanekaragaman Sumberdaya Hayati Laut.....	83
b. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	98
c. Seksi Tata Ruang Laut dan Jasa Kelautan.....	104
4.4.4. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.....	115
a. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan.....	115
b. Seksi Pengawasan Sumberdaya kelautan.....	164
c. Seksi Penanganan Pelanggaran.....	182
4.4.5. UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	195
4.4.6. UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Selat Makassar.....	205
4.4.7. UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Teluk Bone.....	217
V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN	232
5.1. Ekonomi	232
5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.....	232
5.1.2. Produksi Perikanan.....	232
a. Budidaya	232
b. Penangkapan.....	235
5.1.3. Konsumsi Ikan	235
5.1.4. Pemasaran.....	235
5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya.....	235
5.1.6. Tenaga Kerja	236
5.2. Proyek dan Pembiayaan	236
5.2.1. Dekonsentrasi (APBN).....	236

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan oleh UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	6
2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	7
3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017.....	15
4. Susunan Organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017.....	16
5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dan 2017.....	18
6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2017.....	18
7. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2017.....	19
8. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2017.....	19
9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	20
10. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2017.....	34
11. Laporan Hasil Produksi Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	37
12. Pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Tahun 2017.....	56
13. Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan.....	58
14. Data Hasil Pengawasan/Pemantauan Terhadap Armada Kapal Perikanan di kabupaten Luwu Periode Februari 2017.....	219
15. Data Hasil Pengawasan/Pemantauan Terhadap Armada Kapal Perikanan di Kota Palopo Periode Bulan Agustus 2017.....	220
16. Data Hasil Pengawasan/Pemantauan Terhadap Armada Kapal Perikanan di Kecamatan Angkona-Malili Kab. Luwu Timur Periode Oktober 2017.....	221
17. Kegiatan Operasional Patroli PSDKP Selama Onboat di Perairan Kota Palopo 27 Maret 2017.....	221
18. Data Hasil Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pengawasan SDKP selama onboat di Perairan Kota Palopo 27 – 30 Maret 2017.....	222
19. Pelaksanaan Operasional Patroli Gabungan Kegiatan Pengawasan SDKP selama Onboat di wilayah Perairan Pedalaman Kepulauan Kab. Bone Tanggal 25 – 28 April 2017.....	222
20. Hasil Pelaksanaan Operasional Patroli Gabungan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Perairan Kab. Bone tanggal 25-28 April 2017.....	223
21. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat di Wilayah Perairan Pedalaman Kab. Bone Periode Tanggal 3-5 Mei 2017.....	223

22. Hasil Pelaksanaan Operasional Patroli Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan diWilayah Perairan Pedalaman Kab. Bone Periode 3-5 Mei 2017.....	224
23. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat diPerairan pedalaman, Kab. Luwu Utara Periode 24 – 27 Juli 2017.....	224
24. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat diPerairan pedalaman, Kab. Wajo Periode 22 - 25 Agustus 2017.....	225
25. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat diPerairan pedalaman, Kab. Bone Periode 7-10 September 2017.....	225
26. Hasil Pelaksanaan Operasional Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Diwilayah Perairan Kab. Luwu Utara Periode 7-10 September 2017.....	226
27. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat diPerairan pedalaman, Angkona-Malili Kab. Luwu Timur Periode 21-24 November 2017.....	226
28. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat diPerairan pedalaman, Kota Palopo periode 28 November – 1 desember 2017.....	227
29. Hasil Pelaksanaan Operasional Patroli Pengawasan SDKP diwilayah Perairan, Kota Palopo Periode 28 November – 1 Desember 2017.....	227
30. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat diPerairan pedalaman, Kab.Luwu Periode 5-8 Desember 2017.....	228
31. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat diPerairan pedalaman, Kab.Wajo Periode 12 – 15 Desember 2017.....	228
32. Kegiatan Operasional Patroli Pengawasan SDKP selama Onboat diPerairan pedalaman, Kab.Bone Periode 19-22 Desember 2017.....	229
33. Perkembangan Produksi Perikanan, dari Kegiatan usaha di Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2017.....	232
34. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja ,Tahun 2017.....	236

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Wilayah Peta Penangkapan Udang, Tuna, dan Rumput Laut.....	238
2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Subsidi Pengembangan SDM Pengawasan KP Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	239
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2017.....	240
4. Daftar Usaha pengolahan Ikan/udang dan Rumput laut Skala kecil dan Menengah di Sulawesi Selatan.....	241
5. Data Tindak Pidana Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	258
6. Rekapitulasi Hasil Monitoring Formalin Tahun 2017.....	262
7. Rekapitulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2017.....	267
8. Data produksi Pembenihan Udang Windu pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya laut dan Payau Tahun 2017.....	273
9. Daftar Unit Pengolahan Ikan/Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	275



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah pula memberikan kewenangan otonomi bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai kebutuhan serta sumberdaya yang dimiliki demi kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonomi telah membenahi diri untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diantaranya adalah sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan kedepan tetap diarahkan pada visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu **“Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat”** sedangkam Misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu “ 1) Meningkatkan Kualitas Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, 2) Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan, 3) Meningkatkan Daya Saing daerah dan Sinergitas Regional, Nasional dan Global, 4) Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan serta Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Hal ini untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu *Pro-Poor* (Pengentasan kemiskinan), *Pro-Job* (Penyerapan Tenaga Kerja), *Pro-Growth* (Pertumbuhan) dan *Pro-Sustainability* (Keberlanjutan), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi dibidang kelautan dan perikanan (*Pro-Business*).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan melalui pendekatan sektor kegiatan yang meliputi (1) Perikanan Budidaya dan Daya Saing hasil Produk Perikanan, (2) Perikanan Tangkap (3) Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (4) Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap

diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan (Laut & Perairan Umum) dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan upaya penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu optimalisasi dan pengembangan kegiatan produksi, peningkatan daya saing melalui penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan, dan pengembangan mekanisme dan jaringan pemasaran. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Sejalan dengan Arah dan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2017 yaitu **Percepatan Peningkatan Usaha Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan melalui Penguatan Koordinasi Daerah**. Fokus pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan 2017 diarahkan kepada : Pengembangan Sarana produksi mendukung kedaulatan pangan (Pangan Laut), Bantuan paket Bibit, Penyusunan Dokumen Tata Ruang Laut Pesisir dan PPK, Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan , Pengembangan usaha garam rakyat dan jasa kelautan, Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penanganan IUU Fishing, dan Peningkatan daya saing dan promosi produk hasil perikanan.

II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

2.1. Keadaan Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota di Makassar terletak antara $0^{\circ} 12' - 8'$ Lintang Selatan dan di antara $116^{\circ} 48' - 122^{\circ} 36'$ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sulawesi Barat
Sebelah Timur	: Teluk Bone dan Prov. Sulawesi Tenggara
Sebelah Selatan	: Laut Flores
Sebelah Barat	: Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah $46.083,94 \text{ Km}^2$, secara administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 Kabupaten dan 3 kota yang terdiri dari 304 kecamatan. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas $7.365,51 \text{ Km}^2$ atau luas kabupaten tersebut merupakan 15,98 % dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 sungai. Aliran sungai terbanyak terdapat di kabupaten Luwu, yaitu 25 aliran sungai. Sungai Saddang adalah sungai terpanjang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 Km.

Di Sulawesi Selatan terdapat 5 (lima) danau yakni Danau Tempe, Sidenreng dan Lapompak yang masing-masing berada di Kabupaten Wajo, Sidrap dan Soppeng serta Danau Matano dan Towuti di Kabupaten Luwu Timur.

2.2. Demografi

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2017 tercatat sebanyak 8.771.970 jiwa, dimana dari total jumlah penduduk Sulawesi selatan tersebut sekitar 441.630 jiwa yang terdiri dari 161.882 jiwa adalah nelayan, 279.748 jiwa adalah pembudidaya ikan.

2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah prasarana perikanan tangkap yang berfungsi untuk menunjang kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Pada prasarana

tersebut terdapat sarana penunjang yakni tempat pemasaran ikan, tempat kapal bersandar, perkantoran, gedung pertemuan dan tempat perbengkelan.

Di Sulawesi Selatan sampai tahun 2017 terdapat 21 unit PPI yang terdapat di 18 Kabupaten/kota yang masih sementara kondisinya rata-rata baik, namun pembangunan prasarana pelabuhan perikanan /pangkalan pendaratan ikan terus menerus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nelayan, yang merupakan kelanjutan pemasaran hasil tangkapan dan distribusi untuk mendukung kegiatan agribisnis pada sektor kelautan dan perikanan.

b. Perikanan Budidaya

Prasarana utama pada kegiatan budidaya adalah saluran irigasi baik untuk irigasi tambak maupun irigasi kolam/Mina Padi (sawah). Selama ini Dinas Perikanan dan Kelautan baru menangani irigasi tambak sedangkan untuk irigasi kolam/Mina Padi (sawah) dilakukan oleh Dinas Pengairan.

c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan

Di Sulawesi Selatan ada dua jenis sarana pengolahan/pengawetan hasil perikanan yakni bersifat modern dan tradisional (konvensional), kedua jenis usaha tersebut memiliki segmen pasar yang hampir sama. Untuk pengolahan modern hampir sebagian besar dipasarkan ke luar negeri (ekspor), sedangkan yang konvensional pasarnya dalam negeri dan luar negeri.

Pengolahan modern meliputi produk segar (udang, ikan dan kepiting), beku (Udang, ikan, kepiting, paha kodok), kering (sirip ikan hiu, rumput laut, telur ikan terbang dan teripang), olahan (rumput laut dan kepiting), sedangkan tradisional meliputi produk asap (ikan), kering (cumi, ikan dan rumput laut), pindang (ikan), terasi (ikan) dan peda (ikan). Unit pengolahan yang mendukung dapat dilihat pada lampiran 9.

d. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut

Indonesia adalah Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, salah satunya adalah kekayaan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dari sector perikanan budidaya, potensi lahan budidaya laut seluas 11, 8 juta ha, lahan budidaya payau seluas 2,3 juta ha dan lahan budidaya air tawar seluas 2,5 juta ha, baru sebagian kecil dimanfaatkan. Potensi pengembangan perikanan budidaya yang masih luas,

mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan dari produksi perikanan budidaya.

Pengembangan perikanan budidaya kedepan, akan di dorong dengan menerapkan 3 (tiga) Prinsip *Ecosystem Approach for Aquaculture (EAA)* yaitu 1) Fungsi Keseimbangan ekosistem dan jasa-jasa lingkungan, 2) Fungsi social, yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan stake holders dan 3) fungsi integrasi, yaitu mengikutkan sector lain dalam pengembangannya. Namun demikian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut telah melakukan kegiatan operasional / pelayanan dengan dukungan fasilitas yang ada terhadap masyarakat perikanan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani yang berada didekat lokasi.

Kendala yang dihadapi pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut Pangkep antara lain :

- a. Kemampuan SDM Aparatur dan Non Aparatur (PNS dan Honorer) yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga lebih professional dan permanen.
- b. Kesadaran masyarakat perikanan yang masih kurang untuk memanfaatkan keberadaan UPT sebagai satu-satunya lembaga dinas perikanan dan kelautan Provinsi Sulawesi selatan yang siap selalu memberikan pembinaan tentang pengembangan budidaya laut.
- c. Masih rendahnya koordinasi dan konsolidasi terhadap lembaga terkait tentang budidaya laut di Sulawesi Selatan, karena masih terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi.
- d. Kurangnya dukungan dana untuk kegiatan surveillance.

e. Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

UPTD Balai Pembinaan, Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan merupakan Unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi selatan yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengujian dan pengembangan mutu produk hasil kelautan dan perikanan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Gubernur

LAPORAN TAHUNAN 2017

Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembinaan, Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Tahun 2017 UPT BP3MPHKP Makassar melakukan Pengujian Sampel sebanyak 7.377 Parameter Uji, Menerbitkan Sertifikat Hasil Uji sebanyak 655 sertifikat, mengeluarkan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 198. Rekomendasi dan Capaian Pendapatan Asli daerah Tahun 2017 sebesar Rp 535.950.000,- dengan capaian sebesar 133,99 %.

Tabel 1. Rekapitulasi Volume Pengujian yang dilakukan Oleh UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Parameter	Jenis Pengujian		
		Test Result (TR)	Monitoring	Total Pengujian Tahun 2017
	Kimia			
1	- Histamin	421	0	421
2	- Chloramphenicol	159	0	159
3	- Logam Berat (Pb)	164	0	164
	(Hg)	164	0	164
	(Cd)	165	0	165
4	- Tetracyclin	96	0	96
5	- Formalin	5	276	281
6	TVB-N	96	0	96
7	Nitrofurantoin	270	0	270
	Mikrobiologi			
8	- ALT	1168	0	1168
9	- ALT (kualitas Air)	215	0	215
10	- E. coli	337	120	457
11	- Coliform	179	0	179
12	- E.coli dan coliform (kualitas air)	392	0	392
13	- Salmonella	349	120	469
14	- Vibrio Cholerae	890	120	1010
15	- Vibrio parahaemolyticus	371	0	371
16	- Staphylococcus aureus	440	0	440
17	- Listeria monocytogenes	245	0	245
18	- Kapang dan Khamir	43	0	43
19	Enterococci	170	0	170
	Organoleptik			
20	- Uji Sensori	402	0	402
Total				7.377

Sumber : UPTD BP3MPHKP

Ket : Test Result: Pengujian berdasarkan permintaan Pelanggan

Monitoring

: Pengujian Monitoring Formalin dan Bakteri Pathogen di Kab/Kota

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Target	Bulan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	500.000.000	Januari	50.157.404	10,03
2		Februari	60.650.000	12,13
3		Maret	21.250.000	4,25
4		April	20.300.000	4,06
5		Mei	22.750.000	4,55
6		Juni	34.300.000	6,86
7		Juli	26.900.000	5,38
8		Agustus	71.800.000	14,36
9		September	18.100.000	3,62
10		Oktober	25.350.000	5,07
11		November	17.250.000	3,45
12		Desember	47.200.000	9,44
TOTAL			416.007.404	83,20

Sumber : UPTD BP3MPHPK

f. Pembinaan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Dan Kapal Perikanan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Kapal Perikanan yang bernaung di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi pada Tahun Anggaran 2017 secara nyata telah menunjukkan kegiatan yang berbasis kemasyarakatan dengan tujuan menyentuh masyarakat nelayan skala usaha kecil sampai menengah sehingga peningkatan usaha dapat tercapai dan secara langsung akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan sebagai ujung tombak dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan Dan kelautan.

Secara spesifik tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan dan Pengembangan Teknologi penangkapan Ikan dan kapal Perikanan yaitu menyelenggarakan tugas teknis dinas dibidang pembinaan dan pengembangan mekanisasi perikanan tangkap. Tupoksi ini selanjutnya dijabarkan dengan kegiatan meliputi :Melaksanakan kajian dan rekayasa teknologi penangkapan ikan, pembinaan dan pemantauan peralatan mesin perikanan, melaksanakan pembinaan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jarak jauh untuk penangkapan ikan, melaksanakan pembinaan standarisasi kelayakan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara priodik.

Permasalahan

- Dukungan biaya operasional nelayan dalam menjalankan usahanya masih minim sehingga perlu adanya stakeholder
- Masih banyak masyarakat nelayan yang enggan menerapkan pasca panen yang baik pada saat mendapatkan hasil tangkapan sehingga mutu hasil tangkapan tidak sesuai yang diharapkan oleh stakeholder
- Masih banyak nelayan yang mengambil jalan pintas dengan melakukan penangkapan ilegal fishing (bom dan bius)
- Pengadaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Pulau Harapan, Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai tidak terealisasi karena tidak melampirkan proposal dan berkas lainnya tidak lengkap.

Upaya Pemecahan

- Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang diberikan secara bertahap setiap tahun agar diawasi pendistribusiannya agar penerima benar-benar pelaku usaha perikanan
- Nelayan lebih proaktif menggalang dana, agar tidak terfokus mengharapkan bantuan modal dari pemerintah dengan berkoordinasi dengan KKMB Kabupaten
- Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat oleh instansi terkait
- Perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari pihak pemerintah untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada nelayan

g. Pembinaan dan Perbenihan Ikan Air Tawar

Berdasarkan peraturan gubernur provinsi sulawesi selatan no. 49 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja UPTD pembinaan dan perbenihan air tawar dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan tupoksi berkaitan dengan perbenihan ikan air tawar. Adapun tugas pokok dan fungsi dari UPTD PPAT lajoa pada tahun 2017 adalah menyelenggarakan tugas teknis dinas di bidang pembinaan dan perbenihan air tawar dengan fungsi sebagai berikut a.) menyiapkan bahan informasi teknologi perbenihan air tawar b.) merumuskan pola pembinaan perikanan budidaya ikan air tawar c.) promosi dan kaji terap/rekayasa teknologi perbenihan dan budidaya d.) serta merumuskan rekomendasi teknologi perbenihan dan budidaya air tawar.

Disamping tugas dan fungsi sebagai pembinaan dan pengembangan budidaya ikan air tawar di Sulawesi Selatan, juga diberikan tugas perbantuan sebagai pengumpul PAD berupa retribusi penjualan benih ikan air tawar. Pada Tahun 2017 UPTD BPPBAT diberikan target PAD sebesar Rp.160.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 120.150.000.

Kegiatan budidaya ikan air tawar yang dilaksanakan oleh UPTD PPBAT meliputi:

- a. Penyediaan bahan bibit dan induk yang terdiri dari bahan dan peralatan berupa pakan ikan, kantong plastik, kapur, kakaban, hapa, pupuk dan obat-obatan dalam rangka memperlancar operasional perbenihan.
- b. Pengembangan induk unggul ikan air tawar meliputi pengadaan calon induk ikan mas sebanyak 400 kg, pengadaan pakan calon induk ikan mas sebanyak 12.000 kg.
- c. Kaji terap teknologi perbenihan ikan
- d. pengadaan sarana produksi perbenihan air tawar berupa calon induk ikan nila sebanyak 200 kg dan pakan ikan larva sebanyak 2.000 kg yang diserahkan kepada unit pembenihan rakyat Allu Jaya dengan alamat Kelurahan Baji Pamai Kecamatan Maros Baru Kabupaten maros.
- e. Bimtek Pengembangan Induk Unggul Ikan Air Tawar

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh UPTD PPAT Lajoa Soppeng selama tahun 2017 adalah :

1. Masih adanya ketidaksinkronan perencanaan kegiatan baik antara unit kerja dalam lingkup DKP Sulsel maupun internal UPTD PPAT dari tahun ketahun berikutnya.
2. Manajemen penegelolaan UPTD PPAT terutama yang terkait dengan administrasi pemasaran hasil pembenihan Ikan belum menunjukkan proses yang baik dan benar.
3. Sistem pencatatan pelaksanaan teknis perbenihan ikan dan pembesaran belum dilakukan dengan baik.
4. Produksi benih dihasilkan cenderung pada spesies ikan mas dan nila.

5. Permintaan pasar benih cenderung berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap pemasukan PAD.
6. Penerapan teknologi perbenihan dan budidaya air tawar masih lemah.
7. Masih kurangnya kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan swasta dalam penerapan teknologi perbenihan ikan air tawar.
8. Kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan air tawar masih rendah.
9. Kinerja Personil masih rendah pada pengelolaan perbenihan air tawar.

3.2. Upaya Pemecahan

1. Perencanaan kegiatan sebaiknya dilakukan dengan waktu yang lebih awal dari perencanaan yang sudah ada, informasi ke masing-masing penanggung jawab kegiatan agar lebih di intensifkan sehingga sinkronisasi kegiatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan waktu yang lebih efisien.
2. Perlunya dibuatkan mekanisme penegelolaan sistem pemasaran/penjualan produk benih maupun budidaya pada UPTD PPAT sebagai unit kerja pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya diterapkan dengan penuh komitmen yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Sebaiknya setiap tahapan teknis kegiatan perbenihan dan budidaya mulai dari penentuan lokasi kegiatan, proses pemilihan induk sampai pada penjualan benih dilakukan pencatatan dengan mengisi format isian yang sudah dibuat.
4. Diversifikasi jenis ikan dalam pengembangan perbenihan ikan sangat penting dilakukan agar masyarakat mempunyai pilihan yang lebih banyak untuk memilih sesuai dengan seleranya.
5. Perlunya penataan kembali sistem perbenihan ikan di UPTD PPAT terutama yang berkaitan dengan penggunaan calon induk maupun induk yang unggul untuk menghasilkan benih/bibit yang unggul sehingga mempunyai daya saing dengan produk lainnya.
6. Secara berkala dilakukan pengiriman personil ke UPT pusat untuk melakukan magang perbenihan agar dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru tentang perbenihan ikan air tawar yang untuk selanjutnya diterapkan.

7. Perlu menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta. Pemerintah untuk melaksanakan kaji terap/rekayasa di bidang perbenihan maupun pembesaran.
8. Perlu kerjasama antara petani ikan air tawar, pembenihan ikan dengan usaha pengolahan ikan air tawar skala kecil dalam rangka menghasilkan produk olahan perikanan ikan air tawar untuk menarik selera masyarakat untuk mengkonsumsi ikan air tawar.
9. Diperlukan pelatihan kepada ibu-ibu istri petani kolam air tawar tentang beberapa jenis olahan yang bahan-bahannya dari ikan air tawar sehingga dapat memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga petani ikan air tawar.

h. Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Udang dan Kesehatan Lingkungan

UPT. Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Udang dan Kesehatan Lingkungan berperan sebagai pilar untuk pengembangan usaha Perbenihan udang dan Kesehatan Lingkungan serta mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengoptimalkan produksi dan keterampilan.

Selain itu monitoring dan evaluasi dapat memberikan gambaran lengkap tentang implementasi program/kegiatan dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang terjadi sehingga dapat membantu aparaturnya mengambil keputusan untuk penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaannya. Selain tupoksi yang diemban oleh UPT. Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Udang dan Kesehatan Lingkungan, UPT P3UKL juga dituntut dengan memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berasal dari penjualan Benur dan nener serta serta pengujian PCR.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT. Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Udang dan Kesehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 bersumber dari hasil penjualan Benur Udang Windu dan Vannamei sebanyak 2.721.000 ekor dan induk Udang windu yang afkir seberat 17,5 Kg dengan total PAD sebesar Rp. 78.730.000 dan Biaya Pengujian PCR sebesar Rp. 2.000.000

Adapun beberapa permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh UPT. Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Udang dan Kesehatan Lingkungan selama Tahun 2016 yaitu :

1.1. Permasalahan

- a. Pada kegiatan sertifikasi induk ikan laut UPTD PPAPKL anggarannya tidak bisa direalisasikan karena Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak dibenarkan mengeluarkan/menerbitkan sertifikat CPIB selain Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- b. Kegiatan Kaji Terap Teknologi Budidaya Payau sedianya direncanakan panen pada umur pemeliharaan udang selama 2 (dua) tidak dapat terealisasi karena kondisi alam yang tidak mendukung (bencana alam) yaitu terjadi pematang tambak jebol dan banjir.
- c. Kegiatan Penyediaan bahan Bibit dan Induk serta Operasional Sistem Perbenihan Air Payau dalam memproduksi benur tidak sesuai target yang diinginkan dikarenakan oleh sumber air laut kurang baik akibat adanya perubahan cuaca dari pergantian musim kemarau ke musim hujan yang menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit baik virus maupun bakteri. Selain itu belum adanya jaminan induk bebas virus dan penyakit sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas nauplius yang dihasilkan, akibatnya tidak dapat memproduksi post larva (PL) dengan baik yang berimplikasi terhadap target produksi yang tidak maksimal atau tidak tercapai. Pada bulan Oktober, November sampai dengan Desember, produksi benih sangat kurang disebabkan oleh adanya penyakit yang menyerang baik pada larva udang pada stadya PL 6 ke atas yaitu Bakteri/kunang-kunang, dengan ciri-ciri menyerang pada tubuh larva tersebut yaitu jika diamati pada malam hari pada saat kondidisi gelap pada bak pemeliharaan larva maka terlihat menyala pada tubuh larva tersebut, maupun pada induk udang windu.
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan sampel produk perikanan budidaya yang bebas residu belum memadainya SDM petugas pengambil contoh yang bersertifikat dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Budidaya KKP RI, alokasi anggaran monitoring residu terbatas sehingga tidak mencukupi untuk seluruh wilayah kerja Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, peralatan yang belum memadai dalam menunjang kegiatan monitoring residu serta tidak adanya kendaraan khusus pengambil sampel monitoirng residu.

- e. Kurangnya PNS tenaga administrasi, tenaga kesehatan lingkungan budidaya dan tenaga teknis perbenihan udang sehingga tenaga tersebut dimonopoli oleh tenaga honorer.
- f. Dalam operasional perbenihan udang masih belum adanya jaminan induk bebas penyakit sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas nauplius sampai dengan post larva (PL) dan berdampak gagalnya produksi PL serta berimplikasi terhadap target produksi yang tidak maksimal atau tidak tercapai.

1.2. Upaya Pemecahan

- a. Anggaran tersebut dikembalikan ke kas negara dan dalam penyusunan rencana kerja anggaran berikutnya agar bisa tepat sasaran sesuai target yang diinginkan.
- b. Diharapkan dalam pembuatan konstruksi tambak ,khususnya yang berlokasi di daerah pinggi laut agar membuat pematang yang terbuat dari tanah/tanah liat sehingga tidak mudah tergerus oleh arus gelombang yang tinggi dan pada kondisi tertentu sebaiknya melakukan penebaran/pemeliharaan pada waktu yang tidak bersamaan dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim, seperti curah hujan sangat tinggi sehingga bisa terhindar dari kondisi alam yang sangat merugikan.
- c. Air yang digunakan untuk pemeliharaan larva agar dilakukan penyaringan berulang kali baik dengan menggunakan saringan pasir kwarsa, menggunakan saringan ultraviolet, menggunakan filter bag, serta mengadakan klorinasi air sebelum digunakan pada bak pemeliharaan larva. Disamping sumber induk udang baik *vannamae* maupun induk udang windu belum ada jaminan bahwa induk tersebut bebas dari berbagai macam penyakit sehingga tidak ada jaminan untuk menghasilkan Nauplius yang berkualitas, selain kondisi perairan yang sangat berpengaruh, tidak terlepas juga dari ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan produksi, sarana yang baik sangat membantu selama dalam proses produksi.
- d. Penambahan SDM untuk diikuti dalam pelatihan petugas pengambil contoh bersertifikat dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Budidaya KKP RI, penambahan anggaran perjalanan dinas monitoring residu agar semua wilayah kerja Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat terpenuhi, pengadaan

- peralatan dalam menunjang monitoring residu, serta pengadaan kendaraan khusus pengambil sampel monitoring residu.
- e. Perlunya penambahan PNS bagian administrasi, kesehatan lingkungan budidaya dan PNS teknis perbenihan yang berpengalaman. Selain itu untuk kegiatan perbenihan udang perlunya magang bagi PNS dalam rangka peningkatan SDM perbenihan baik dari segi peningkatan pengetahuan maupun keterampilan dalam mendukung peningkatan produksi benih udang.
 - f. Perlunya pengadaan induk udang yang betul-betul bebas penyakit sehingga bisa menjamin ketersediaan nauplius sampai post larva (PL) dan perlunya juga pengadaan Nauplius Vannamaei dan windu serta sarana dan prasarana produksi perbenihannya.



III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 89 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016 Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan susunannya sebagai berikut :

Tabel 3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	Kepala Dinas	Ir. Sulkaf S. Latief, MM	19630424 198903 1 010	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Sekretaris	Ir. A.Chairil Anwar, MM	19620925 198903 1 015	Pembina Tk. I (IV/b)
	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	Ir. Rosdiana, MM	19670116 199503 2 002	Pembina (IV/a)
	Ka. Subag Keuangan			
	Ka. Subag Program	Muhammad Ridha, S.Pi, M.Si	19680615 199804 1 002	Pembina (IV/a)
3	Ka. Subdin Perikanan Budidaya & Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Ir. Hardi Haris, MM	19650816 199403 1 008	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie. Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Air Payau Dan Air tawar	Ir. Ibrahim Rumbi, MM	19670223 199803 1 005	Pembina (IV/a)
	Kasie. Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Laut	Andi mallombasang, S.Pi, M.Si	19720908 200003 1 007	Pembina (IV/a)
	Kasie Pengembangan dayasaing produk dan pemasaran hasil perikanan	Ir. Arni Mahmud, MM	19640316 199203 2 004	Pembina (IV/a)
4	Ka. Subdin Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil	Dr. Ir. Muh. Natsir Mallawi, M.Si	19620327 199103 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie. Tata Ruang laut dan Jasa Kelautan	Ir. Abd. Azis, MM	19661231 199903 1 030	Pembina (IV/a)
	Kasie. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Muhammad Noer Fajri, S.Pi	19840505 200604 1 016	Penata (III/c)
	Kasie Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Abdul Kadir, S.Pi, M.Si	19671231 199903 1 031	Penata Tk. I (III/d)
5	Kasubdin Perikanan Tangkap	Ir. Safaruddin, MM	19640625 199103 1 007	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie Kenelayanan dan Sarana Penangkapan Ikan	Ir.IGN Eko Susetiyo, MM	19660101 199503 1 005	Pembina (IV/a)
	Kasie. Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Febrianto Budianto, S.Pi, MM	19730201 199903 1 006	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie. Kepelabuhanan Perikanan	Moh. Gemuruh, S.Pi	19600531 198303 1 006	Penata Tk. I (III/d)

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	2	3	4	5
6	Kasubdin Pengawasan Sumberdaya Kelautan & Perikanan	Ir. Miftahuddin	19630531 198903 1 015	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie. Penanganan Pelanggaran	Ir. Abd. Khalik, MM	19650509 199903 1 004	Pembina (IV/a)
	Kasie. Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Ir. Masnia T, M.Si	19620313 199101 2 001	Pembina (IV/a)
	Kasie. Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Ir. Andi Mustamin, M.Si	19651231 199803 1 033	Pembina (IV/a)

Sumber : Subag Kepegawaian

Susunan organisasi tersebut di atas juga dilengkapi dengan 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana langsung kegiatan teknis di daerah. UPTD dalam melaksanakan tugas berbeda dengan subdinas teknis dan dibawah pimpinan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun UPTD yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Susunan Organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	2	3	4	5
1	Kepala UPT Balai Pembinaan, Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk hasil Kelautan dan Perikanan	DR. St. Zaleha Soebarini, S.Pi, M.Si	19670913 199103 2 016	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Sukmawati Gaffar, S.ST.Pi	19730331 199803 2 009	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Pembinaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	Ir. Nurdjihad, S.Pi, MP	19690823 199903 2 005	Pembina (IV/a)
	Kasie Pengujian Hasil Kelautan dan Perikanan	Taufik, S.Pi, MM	19690416 199203 1 013`	Penata, III/c
2	Kepala UPT Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Udang dan Kesehatan Lingkungan	Ir. Amri Tjoneng, MM	19640421 199102 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata usaha	Muh. Thamrin Nour, A.Pi	19750704 200701 1 013	Penata, III/c
	Kasie. Pengembangan Teknologi Perbenihan Udang	Deppalanna, S.Pi, MM	19740605 199803 1 007	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Pembinaan Kesehatan Lingkungan Budidaya	Rosliawati Arfah, S.Pi	19680308 200701 2 022	Penata, III/c
3	Kepala UPT Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut	Ir. Basri Hamal, MP	19650508 199103 1 017	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Sahabuddin, S.Pi	19681119 200003 1 004	Pembina (IV/a)
	Kasie Teknologi Budidaya laut	Andi Awaluddin Burhan, S.St.Pi	19781114 200502 1 002	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Sarana dan Prasarana Budidaya laut	Ir. Wahyuni, MM	19641005 199104 2 012	Pembina (IV/a)

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/ Golongan
1	2	3	4	5
4	Kepala UPT Pembinaan & Perbenihan Air Tawar	Ir. Abd. Hafid Mallewa	19611102 198903 1 012	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Dra. Andi ST. Nurkhaerani	19621229 198702 2 002	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Sarana dan Prasarana Perbenihan Air tawar	Nursalam, S.Pi	19710601 200003 1 006	Penata, III/c
	Kasie Teknologi Perbenihan Air Tawar	Handayani Pratiwi, S.Pi	19700621 200701 2 019	Penata, III/c
5	Kepala UPT Pembinaan & Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan & Kapal Perikanan	Ir. H. Bachtiar Lewa, MT	19640816 199903 1 013	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Hamsinah, S.Pi	19681208 200701 2 014	Penata, III/c
	Kasie. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan	Ir. Husni Husain	19651112 199212 1 001	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie. Teknologi Penangkapan Ikan	Ir. Muh. Usman, MM	19660418 199803 1 009	Pembina (IV/a)
6	Kepala UPT Pengembangan & Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan Wilayah Perairan Teluk Bone	Ir. Adhy Cahya Slamet, M.Si	19650907 199312 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Herimisniaty, S.Pi	19730923 199303 2 006	Penata, III/c
	Kasie. Pengembangan Sarana & Prasarana Pengawasan	Nursalam, S.Pi, M.Si	19680904 200502 1 001	Penata, III/c
	Kasie. Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Perairan Teluk Bone			
7	Kepala UPT Pengembangan & Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan Wilayah Perairan Selat Makassar	Ir. Moh. Maja	19640507 199303 1 008	Penata Tk. I (III/d)
	Kasubag Tata Usaha	Andi Ashurni SL, MH	19710419 199303 1 003	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie. Pengembangan Sarana & Prasarana Pengawasan	Solichin, S.Pi	19630618 198202 1 002	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie. Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Perairan Selat Makassar	Syaiful Islam S.Pi	19630824 198503 1 006	Penata Tk. I (III/d)
8	Kepala UPT Pengembangan & Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan Wilayah Perairan Laut Flores	Ir. Alimuddin	19660908 199903 1 004	Penata Tk. I (III/d)
	Kasubag Tata Usaha	Amir, S.Sos	19681231 198903 1 033	Penata, III/c
	Kasie. Pengembangan Sarana & Prasarana Pengawasan	Syamsuddin Nur, S.Pi	19630903 198603 1 027	Penata, III/c
	Kasie. Pembinaan & Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Perairan Laut Flores	Andi Yusneri, S.St.Pi	19761111 200302 2 009	Penata Tk.I (III/d)

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/ Golongan
1	2	3	4	5
9	Kepala UPT Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau Kecil	Andi Mei Agung, S.St.Pi	19780530 200312 1 006	Penata Tk.I (III/d)
	Kasubag Tata Usaha	Suhartono Nurdin, S.Pi.,MP.,Ph.D	19820707 200803 1 001	Penata, III/c
	Kasie. Pengembangan Sarana & Prasarana Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Emirat Mayassir, S.St.Pi	19771103 200312 1 008	Penata Tk.I (III/d)
	Kasie. Pengembangan & Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Ir. Sitti Syahtirah Syam	19650617 199803 2 002	Penata Tk.I (III/d)

Sumber : Subag Kepegawaian

3.2. Kepegawaian

Pada tahun 2017 tercatat jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 210 orang naik 3,9 % bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Adapun jumlah komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016 dan 2017

Tingkat/Gol	Tahun				(%)
	2016	%	2017	%	
IV	29	14,5	28	13,3	(3,5)
III	141	70,1	151	72,3	7,1
II	28	13,9	28	13,5	-
I	3	1,5	3	1,4	-
Jumlah	201	100	210	100	4,5

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian

Tabel 6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2017

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama/ IV e	0	0	0
2	Pembina Utama Madya/ IV d	0	0	0
3	Pembina Utama Muda / IV c	1	0	1
4	Pembina Tingkat I / IV b	10	1	11
5	Pembina/ IV a	11	6	17
6	Penata Tingkat I/ III d	21	20	41
7	Penata/ III c	30	37	67
8	Penata Muda Tingkat I / III b	12	15	27
9	Penata Muda / III a	7	9	16
10	Pengatur Tingkat I / II d	5	0	5
11	Pengatur / II c	13	5	17

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
12	Pengatur Muda Tingkat I / II b	3	0	3
13	Pengatur Muda / II a	1	0	1
14	Juru Tingkat I / I d	0	0	0
15	Juru / I c	0	1	1
16	Juru Muda Tingkat I / I b	2	0	2
17	Juru Muda / I a	0	0	0
Total		116	94	210

Sumber : Subag Kepegawaian

Tabel 7. Rekapitulasi PNS Berdasar Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2017.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	2	1	3
2	S2	27	16	43
3	S1	44	62	106
4	D.IV	10	7	17
5	D.III	8	1	9
6	D.II	1	0	1
7	D.I	0	0	0
8	SMA	22	6	27
9	SMP	0	1	1
10	SD	2	0	2
Total		116	94	210

Sumber : Subag Kepegawaian

Tabel 8. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2017

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	25	27	52
2	Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8	12	20
3	Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	10	9	19
4	Bidang Perikanan Tangkap	14	6	20
5	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan & Perikanan	12	8	20
6	UPT Balai Pembinaan, Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk hasil Kelautan dan Perikanan	6	12	18
7	UPT Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Udang dan Kesehatan Lingkungan	4	3	7
8	UPT Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut	7	2	9
9	UPT Pembinaan & Perbenihan Air Tawar	6	4	10
10	UPT Pembinaan & Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan & Kapal Perikanan	9	6	15
11	UPT Pengembangan & Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan Wilayah Perairan Teluk Bone	2	1	3
12	UPT Pengembangan & Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan Wilayah Perairan Selat Makassar	6	0	6
13	UPT Pengembangan & Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan & Perikanan Wilayah Perairan Laut Flores	3	2	5
14	UPT Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau Kecil	3	2	5
TOTAL		115	94	209

3.3. Keuangan

a. Belanja Aparatur

Belanja aparatur digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tambahan Penghasilan dan Intensif Pungutan Retribusi Daerah pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar Rp. 18.158.440.138,38,- terjadi penurunan sebesar 0,2 % bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 18.188.149.265,-,- Realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 16.645.117.669,- (91.67%),

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga menangani PAD, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa obyek pajak.

Untuk tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 1.818.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.239.460.000 atau 123,1 %. Adapun sumber dan target besarnya PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017

No	Uraian	Dasar Hukum	Target	Realisasi
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perda No. 1 Tahun 2013	673.930.000	810.230.000
	- Sertifikat Mutu Eksport dan Surat Keterangan Asal			
	➤ UPTD LPPMHP Makassar		400.000.000	535.950.000
	➤ Lab. Kesehatan Ikan Pangkep		20.000.000	2.100.000
	➤ Hasil Uji Laboratorium Barru			2.000.000
	- Kerjasama Sewa Tambak		131.625.000	167.565.000
	- Sewa Rumah Dinas		20.000.000	23.075.000
	- Kerjasama Depo Pemasaran Ikan		100.000.000	75.000.000
	- Kantin Pegawai		900.000	-
	- Koperasi Pegawai		1.005.000	1.005.000
2	Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Prov. Sulsel	Perda No. 4 Tahun 2008	800.000.000	1.146.850.000
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perda No. 3 Tahun 2008	345.000.000	282.380.000
	- Penjualan Benih Ikan dan Udang, RL		345.000.000	282.380.000
TOTAL			1.818.930.000	2.239.460.000

Sumber : Subag Keuangan

IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Sesuai dengan Visi dan Misi, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan sesuai dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi (Penguatan Kelembagaan dan kesejahteraan Sosial)
2. Meningkatkan kelestarian lingkungan
3. Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global
4. Meningkatkan lapangan pekerjaan usaha perikanan yang berkeadilan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
5. a. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa
b. Mewujudkan pemerintahan yang baik

b. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya infrastruktur dasar dan layanan dasar pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan
4. Meningkatnya iklim investasi berkualitas pada sektor kelautan dan perikanan yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar jawa.

4.2. Kebijakan dan Program Strategis

a. Kebijakan

Pada tahun 2017 prioritas diberikan kepada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian. Sementara kebijakan yang target kinerjanya sudah mendekati pencapaian maka percepatan dilakukan untuk menuntaskan pencapaian tersebut.

b. Program Strategis

Dengan memperhatikan Analisis lingkungan strategis asumsi dan faktor penentu keberhasilan disamping visi, misi dan kebijakan dengan tetap berpedoman kepada program pembangunan pusat, maka Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
4. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur
8. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan Program Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan beberapa kegiatan yang dananya bersumber dari dana Dekonsentrasi dan APBD.

Dana Dekonsentrasi

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

- Pengelolaan Keuangan KKP
 - Layanan manajemen keuangan
- Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan pelaporan KKP
 - Layanan Perencanaan
 - Pengelolaan data statistik dan informasi KP

2. Program Pengembangan dan Pengeloan Perikanan Tangkap

- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
 - Awak kapal perikanan yang teridentifikasi
- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan perikanan yang melaksanakan tugas kesyahbandaran
 - Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional

- Pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan Konstruksi
- Pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan
- Pelabuhan perikanan (termasuk dukungan untuk sentra perikanan terpadu) yang teridentifikasi dan disiapkan pembangunannya.
- Pengendalian penangkapan ikan
 - Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi
- Pengelolaan Kenelayan
 - Nelayan yang terlindungi
 - Rumah tangga perikanan yang melakukan diversifikasi usaha
 - Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya
 - Sistem informasi kenelayan yang termanfaatkan
 - Pengelolaan sumberdaya ikan
 - Perairan yang dipantau & dievaluasi pengelolaan sumberdaya ikannya
 - Laut teritorial & perairan kepulauan yg terkelola sumberdaya ikannya
 - Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan
 - Perairan pedalaman yang terkelola sumberdaya ikannya
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
 - Layanan dukungan manajemen eselon I

3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

- Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan
 - Kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dilakukan survailan dan monitoring penyakit
 - Kawasan budidaya yang mendapat penanganan mutu lingkungannya
 - Sampel produk perikanan budidaya yang bebas residu
- Pengelolaan sistem perbenihan ikan
 - Produksi benih yang dihasilkan UPT dan UPTD
- Pengelolaan kawasan perikanan budidaya
 - Kawasan budidaya yang prasarananya mampu dioperasikan secara Tepat guna
- Pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya ikan
 - Kelompok masyarakat yang tingkatkan skala usahanya
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
 - Layanan dokumen manajemen Eselon I

- Pengelolaan satker
- Pengelolaan pakan
 - Lokasi produsen pakan mandiri yang mendukung kawasan/sentra produksi perikanan budidaya
 - Kelompok produsen pakan mandiri yang dibina

4. Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

- Penguatan logistik hasil kelautan dan Perikanan
 - Sarana dan prasarana logistik yang dibangun dan dimanfaatkan
- Akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan
 - Lokasi promosi dan kerjasama peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan
- Bina mutu dan diversifikasi produk perikanan
 - Sertifikat kelayakan pengolahan (SKPO yang diterbitkan bagi UPI
- Bina mutu dan diversifikasi produk kelautan
 - Rancangan standar nasional indonesia (RSNI) produk kelautan yang disusun dan jumlah standar nasional indonesia produk kelautan yang diterapkan
- Investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan
 - Sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang tersedia
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DJPDSPK
 - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada satker daerah

5. Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

- Pengoperasian kapal
 - Operasional speed boat pengawas 6 M
- Pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan
 - Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan P3K yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan berlaku
- Pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan
 - Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yg aktif dlm pengawasan SDKP
- Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PSDKP
 - Perencanaan
- Layanan dukungan manajemen eselon I
 - Layanan administrasi persuratan, keuangan dan BMN

6. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

- Penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan
 - Sarana dan prasarana logistik yang dibangun dan dimanfaatkan
- Akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan
 - Lokasi promosi dan kerjasama peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan
- Bina mutu dan diversifikasi produk perikanan
 - Sertifikat kelayakan pengolahan (SKPO yang diterbitkan bagi UPI
- Bina mutu dan diversifikasi produk kelautan
 - Rancangan standar nasional indonesia (RSNI) produk kelautan yang disusun dan yang disusun dan jumlah standar nasional indonesia produk kelautan yang diterapkan kelautan yang diterapkan
- Investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan
 - Sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang tersedia
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DJPDSPK.
 - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada satker daerah

7. Program Pengelolaan Ruang Laut

- Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut
 - Kawasan konservasi baru yang diterapkan/dicadangkan di tingkat nasional dan daerah
 - Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif
- Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan
 - Luas lahan garam yang difasilitasi
- Perencanaan ruang laut
 - Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundang
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dirjen pengelolaan ruang laut
 - Layanan dokumen manajemen eselon I

Dana APBD

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pengembangan Induk Unggul Ikan Air Laut (UPTD PPBL)
- Pembinaan POKDAKAN Budidaya Laut (UPTD PPBL)
- Pengembangan Induk Unggul Ikan Air Tawar (UPTD PPAT)
- Kaji Terap Teknologi Perbenihan Ikan Air Tawar (UPTD PPAT)
- Bimtek Pengembangan Induk Unggul Ikan Air Tawar (UPTD PPAT)
- Kaji Terap Teknologi Budidaya Payau (UPTD PPPUKL)
- Operasional Sistem Perbenihan Air Payau (UPTD PPPUKL)
- Pengembangan Kelompok Pembenihan Udang (UPTD PPPUKL)
- Sertifikasi Induk Ikan Laut (UPTD PPPUKL)
- Workshop Pengembangan Budidaya Air Tawar
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Air Tawar dan Payau
- Penerapan Sertifikasi Perbenihan Budidaya (CPIB)
- Penerapan Sertifikasi CBIB
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut
- Temu Lapang Budidaya Udang Bandeng
- Temu Lapang Budidaya Rumput Laut
- Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar dan Payau
- Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut

2. Program Perikanan Tangkap

- Penyusunan Profil Pelabuhan Perikanan
- Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelabuhan Perikanan
- Koordinasi Kesyahbadaran
- Pelayanan Penertiban Rekomendasi Perizinan Pelabuhan Perikanan
- Pertemuan Teknis Penandaan dan Pendaftaran Kapal Perikanan 5 - 30 GT
- Pembinaan Pengendalian dan Penangan Konflik Nelayan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan
- Identifikasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan

- Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
- Workshop Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan dan Penanganan
- Hasil Tangkapan di Atas Kapal (UPTD PPTPIKP)
- Workshop Rancang Bangunan Alat Bantu Penangkapan Ikan (UPTD PPTPIKP)
- Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap (UPTD PPTPIKP)
- Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Manajemen Teknis Perikanan Tangkap

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil Serta Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Sosialisasi Pesisir Bersih, Sehat dan Lestari
- Penyusunan Dokumen Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Penerbitan Pertimbangan Teknis Terkait Izin Pengelolaan Wilayah Pasisir dan Konservasi
- Identifikasi & Inventarisasi Biota Terancam Punah di Wilayah Perairan SulSel
- Workshop Transplantasi Terumbu Karang
- Monitoring dan Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan
- Rehabilitasi Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi
- Workshop Evaluasi Terumbu Karang di Perairan Sulawesi Selatan
- Pembinaan Usaha Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- Inventarisasi Data Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Workshop Pengembangan Usaha Garam Rakyat
- Pembinaan Perlindungan Biota Terancam Punah (UPTD PPMPPK)
- Pembinaan Kawasan Potensi Wisata Bahari (UPTD PPMPPK)
- Workshop Mata Pencarian Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir (UPTD PPMPPK)
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan (DAK) (UPTD PPMPPK)
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) (UPTD PPMPPK)

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Penyusunan Peta Rawan Illegal Fishing
- Workshop SISWASMAS Kelautan
- Sosialisasi SISWASMAS
- Inventarisasi Data Siswasmas Perikanan
- Penyusunan Profil POKMASWAS Perikanan
- Sosialisasi Perundangan Undangan Dalam Rangka Perlindungan SDI
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Produk Perikanan
- Pertemuan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- Publikasi Data Pengawasan dan Pengendalian SDKP
- Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Pengawasan Perikanan
- Monitoring, Evaluasi dan Penangan Kasus di Wilayah Laut Kewenangan Provinsi
- Patroli Terpadu Pengawasan Sumberdaya Kelautan
- Patroli Pengawasan SDKP di Wilayah Teluk Bone (UPTD)
- Pemantauan Kapal Perikanan di Wilayah Teluk Bone (UPTD)
- Patroli Pengawasan Pengelolaan SDK dan Lingkungan di Wilayah Laut Flores (UPTD)
- Pemantauan Kapal Perikanan di Wilayah Laut Flores (UPTD)
- Patroli Pengawasan Pengelolaan SDK dan Lingkungan di Wilayah Selat Makassar (UPTD)
- Pemantauan Kapal Perikanan di Wilayah Selat Makassar (UPTD)
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan (DAK)

5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

- Bimtek Teknis Pengolahan dan kemasan produk hasil perikanan (UPTD BP3MPHKP)
- Workshop Inovasi Pengolahan Produk Hasil Perikanan (UPTD BP3MPHKP)
- Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD BP3MPHKP)
- Workshop Standar Produk Hasil Perikanan (UPTD BP3MPHKP)

- Bimtek pengendalian Bahan Berbahaya pada Produk Perikanan (UPTD BP3MPHKP)
- Bimtek Penerapan SNI Produk Hasil Perikanan (UPTD BP3MPHKP)
- Pembinaan Standar Mutu Hasil Perikanan (UPTD BP3MPHKP)
- Workshop Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (UPTD BP3MPHKP)
- Peningkatan Kapasitas Laboratorium UPTD (UPTD BP3MPHKP)
- Identifikasi Produk Hasil Perikanan pada UMKM (UPTD BP3MPHKP)
- Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Pembinaan Teknis Kelembagaan Pembudidaya, Pengolah dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan
- Pembinaan Daya Saing Usaha Perikanan
- Promosi Hasil Kelautan Perikanan
- Pembinaan Teknis Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Daya Saing
- Worskhop Manajemen Usaha Perikanan

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Pameran Pembangunan dan Event Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan makan minum rapat
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
- Penyediaan Jasa Sopir
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas
- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

- Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Perlengkapan Kantor UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Makan Minum Rapat UPTD BP3MPHKP
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah UPTD BP3MPHKP
- Penyediaan Bahan Pengujian Laboratorium UPTD BP3MPHKP
- Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD PPBL
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD PPBL
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PPBL
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik UPTD PPBL
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan UPTD PPBL
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional UPTD PPBL
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPTD PPBL
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor UPTD PPBL
- Penyediaan Perlengkapan Kantor UPTD PPBL
- Penyediaan makan minum rapat UPTD PPBL
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah UPTD PPBL
- Penyediaan Bahan, Bibit dan Calon Induk Kantor UPTD PPBL
- Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD PPAT
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD PPAT
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PPAT
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik UPTD PPAT
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional UPTD PPAT
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPTD PPAT
- Penyediaan Perlengkapan Kantor UPTD PPAT

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan UPTD PPAT
- Penyediaan makan minum rapat UPTD PPAT
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah UPTD PPAT
- Penyediaan Bahan Bibit dan Induk UPTD PPAT
- Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD PPPUKL
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD PPPUKL
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD PPPUKL
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional UPTD PPPUKL
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik UPTD PPPUKL
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPTD PPPUKL
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja UPTD PPPUKL
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan UPTD PPPUKL
- Penyediaan Perlengkapan Kantor UPTD PPPUKL
- Penyediaan Peralatan Kantor UPTD PPPUKL
- Penyediaan Makan Minum Rapat UPTD PPPUKL
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah UPTD PPPUKL
- Penyediaan Bahan Pengujian Laboratorium UPTD PPPUKL
- Penyediaan Bahan Bibit dan Induk UPTD PPPUKL
- Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Perlengkapan Kantor UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Peralatan Kantor UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Makan Minum Rapat UPTD PPTPIKP
- Penyediaan Bahan Pengembangan Teknologi Kapal Perikanan UPTD PPTPIKP
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah UPTD PPTPIKP*
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD PPMPPK

- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD PPMPPK
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PPMPPK
- Penyediaan Perlengkapan Kantor UPTD PPMPPK
- Penyediaan Makan Minum Rapat UPTD PPMPPK
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah UPTD PPMPPK*
- Penyediaan Bahan Pengembangan UPTD PPMPPK
- Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD PPSKPWSM
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD PPSKPWSM
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PPSKPWSM
- Penyediaan Makan Minum Rapat UPTD PPSKPWSM
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah UPTD PPSKPWSM
- Penyediaan Bahan Pengembangan UPTD PPSKPWSM
- Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD PPSKPWLF
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD PPSKPWLF
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PPSKPWLF
- Penyediaan Makan Minum Rapat UPTD PPSKPWLF
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah UPTD PPSKPWLF
- Penyediaan Bahan Pengembangan UPTD PPSKPWLF
- Penyedia Jasa Surat Menyurat Kantor UPTD PPSKPWTB
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD PPSKPWTB
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PPSKPWTB
- Penyediaan Makan Minum Rapat UPTD PPSKPWTB
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah UPTD PPSKPWTB
- Penyediaan Bahan Pengembangan UPTD PPSKPWTB

7. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

- Peningkatan Kapasitas SDM
- Peningkatan Kapasitas SDM UPTD BP3MPHKP
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dinas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor UPTD PPTPIKP
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor UPTD PPAT
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor UPTD BP3MPHKP

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion BP3MPHKP
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion PPBL
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion PPAT
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion PPPUKL
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion PPTPIKP
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Bimtek/Workshop Kepegawaian
- Bimtek/Workshop Keuangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

- Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik
- Pertemuan Forum SKPD
- Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan Berbasis Gender
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Monev
- Publikasi dan Informasi Data Pembangunan KP
- Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- Penyusunan Perencanaan Dokumen SKPD
- Validasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan
- Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

4.3. Sumber Pembiayaan

4.3.1. Dana Dekonsentrasi

Pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana sebesar Rp. 4.765.362.000 atau terjadi penurunan sebesar 52,1 % dari

LAPORAN TAHUNAN 2017

tahun anggaran 2016 Rp. 9.947.549.000. Anggaran tersebut dialokasikan pada satuan kerja yaitu :

- 4.3.1. Sekretaris Jenderal (01) Rp. 792.750.000
- 4.3.2. Ditjen Perikanan Tangkap (03) Rp.1.145.235.000
- 4.3.3. Ditjen Perikanan Budidaya (04) Rp.1.127.935.000
- 4.3.4. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05) Rp.400.428.000
- 4.3.5. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) (06) Rp.444.290.000
- 4.3.6. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (07) Rp.304.724.000

4.3.2. Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 550.000.000 dengan realisasi Rp. 542.860.000 (98,7 %) yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan budidaya

4.3.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah penerima dana DAK untuk Tahun Anggaran 2017 sebanyak 20 kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 57,972,917,273 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 60.390.103.595,- mengalami penurunan sebesar 4 %, sedangkan untuk DKP Provinsi mendapatkan dana DAK pada tahun 2017 sebesar Rp. 17,523,377,000 dengan realisasi dana DAK sebesar Rp. 16,612,407,000 (94,8 %).

Tabel II. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2017

No	Kabupaten	DAK (Rp)	Realisasi	%
1	Bantaeng	2,000,209,000	1,984,209,000	99.20
2	Barru	2,261,883,000	2,256,666,686	99.77
3	Bone	2,620,459,000	2,619,876,000	99.98
4	Bulukumba	2,478,733,000	2,446,204,600	98.69
5	Gowa	1,476,030,000	1,462,700,000	99.10
6	Jeneponto	2,022,155,000	2,010,961,000	99.45
7	Luwu	2,211,888,000	2,197,045,900	99.33
8	Luwu Utara	1,812,282,000	1,527,856,150	84.31
9	Luwu Timur	1,837,793,000	1,458,000,000	79.33
10	Makassar	1,914,474,000	1,813,842,265	94.74
11	Maros	2,093,494,000	2,047,191,000	97.79
12	Pangkep	1,972,900,000	1,964,769,000	99.59
13	Pare-pare	1,712,291,000	1,708,165,000	99.76
14	Palopo	1,945,041,000	1,939,221,000	99.70

15	Pinrang	1,906,410,000	1,906,410,000	100.00
16	Selayar	1,975,167,273	1,900,856,364	96.24
17	Sidrap	1,606,253,000	1,473,007,438	91.70
18	Sinjai	2,267,692,000	2,212,709,600	97.58
19	Soppeng	1,808,521,000	1,807,271,000	99.93
20	Wajo	2,525,865,000	2,512,036,000	99.45
Jumlah		57,972,917,273	55,861,405,003	96.36

Sumber : Subag Perencanaan

4.3.4. Dana Daerah

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selain di danaai dekonsentrasi juga didukung pendanaan APBD, untuk tahun 2017 total anggaran sebesar Rp. 97.846.094.367,38,- dengan rincian belanja langsung Rp. 79.687.654.229,- dan belanja tidak langsung Rp. 18.158.440.138.38,- ini berarti terjadi kenaikan sebesar 11,3 % dari tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 87.935.891.420,78

a. Belanja Langsung

Belanja langsung yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 79.687.654.229,- dengan realisasi Rp. 74.228.979.393,- (93,15%).

Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan. Alokasi dana tersebut terdapat pada delapan program kegiatan yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 10.025.171.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.052.273.658 (90,30%)
- Program Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD sebesar Rp. 7.529.343.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 7.391.753.848,- (98,17%)
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja sebesar Rp. 1.994.117.929,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.954.378.009,- (98.0%)
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 16.965.924.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 14.213.065.640,- (83.77%)

- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan sebesar Rp. 9.677.751.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 9.227.468.732,- (95,35%)
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan sebesar Rp. 15.323.566.000,- dan realisasi keuangan Rp 14.857.751.725,- (96,9%)
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp.13.447.281.800,- dan realisasi keuangan Rp 12.812.243.650,- (95,3%)
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan sebesar Rp. 13.447.281.800,- dan realisasi keuangan Rp 12.812.243.650,- (95,3%)

b. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan rutin dan gaji Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2017 dialokasikan dana sebesar Rp. 18.158.440.138,38,- dengan realisasi Rp. 16.645.117.669,- (91,67%).

4.4. Kegiatan Pembangunan

4.4.1. Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

a. Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Laut

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan kedepan lebih diarahkan kepada pengembangan agribisnis dengan sasaran utamanya adalah pemberdayaan masyarakat pembudidaya, melalui pengembangan kerjasama antara pembudidaya dan dunia usaha.

Sebagai salah satu komoditi unggulan ekspor non migas dari sektor Kelautan dan Perikanan yaitu udang dan rumput laut. Untuk dapat mewujudkan usaha budidaya udang sebagai penghasil devisa negara, dimana budidaya udang merupakan salah satu kegiatan perikanan terbesar yang dapat dikatakan sebagai suatu industri karena telah ditunjang oleh sebagian besar industri hulu hingga hilir dan identik dengan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya, disamping itu, dengan tidak mengabaikan masalah sosial ekonomi.

Beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan telah terlaksana pada Tahun Anggaran 2017 melalui Anggaran Pokok dan setelah mengalami proses perubahan anggaran melalui Anggaran Perubahan TA. 2017, yakni:

A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut

A1. Honorarium Tenaga Teknis budidaya rumput laut.

- a. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Laut.
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Makassar.
- d. Hasil yang dicapai : Terlaksananya kegiatan para tim teknis budidaya rumput laut serta terbayarnya honorarium tim teknis sampai triwulan IV.

A2. Belanja yang diserahkan ke Masyarakat.

- a. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Laut.
- b. Waktu Pelaksanaan : Maret - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Jeneponto, Takalar, Barru, Pinrang, Wajo dan Luwu Utara dan Kota Makassar (KJA).
- d. Hasil yang dicapai : Tersalurkannya kegiatan belanja yang diserahkan kemasyarakat,

Total Realisasi Keuangan sebesar Rp.1,501,396,250,- atau 92,40% Sedangkan realisasi fisik sebesar 95,08 %.

Tabel 12. Laporan Hasil Produksi Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut Diprovinsi SulSel Tahun 2017

B. Komoditas Rumput Laut

No	Kab/Kota	Jml Klip	Jml Paket	Bibit (Kg)	Tali No. 9 (Kg)	Tali No. 5 (Kg)	Tali No. 1 (Kg)	Produksi (kering)	Ket
1	Takalar		200	84.775	500	800	100	47.231	
2	Jeneponto		357	170.637,5	250	400	50	73.018,8	
3	Luwu Utara		25	4.887,5	250	400	50	6.762	
4	Pinrang		25	4.887,5	250	400	50	21.219,7	
5	Barru		20	3.910	200	320	40	1.654	
6	Wajo		29	5.669,5	290	464	58	6.122,1	
			656	274.767	1.740	2.784	348	155.971,1	

Sumber : Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Laut

B. Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Teknis Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya Laut.

B1. Jasa Tenaga Pendamping Budidaya Rumput Laut

- a. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Laut.
- b. Waktu Pelaksanaan : Maret - Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Jeneponto, Takalar, Barru, Pinrang, Wajo dan Luwu Utara.
- d. Hasil yang dicapai :

- Teridentifikasinya CPCL di masing-masing kabupaten oleh Tenaga Pendamping budidaya.
- Pendampingan penyaluran paket bantuan rumput laut di kabupaten Takalar.
- Pelaporan kegiatan selama proses budidaya dalam kurun waktu tugasnya serta pelaporan produksi.

B2. Identifikasi Petani dan Lokasi Pengembangan Budidaya Rumput laut.

- a. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Laut.
- b. Waktu Pelaksanaan : Januari – Maret.
- c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Jeneponto, Takalar, Barru, Pinrang, Wajo dan Luwu Utara.
- d. Hasil yang dicapai:
 - Teridentifikasi dan terverifikasinya petani dan lokasi calon penerima paket bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut.

B3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring dan Pengembangan Budidaya Laut, Monev Pengembangan Budidaya Rumput Laut dan Monitoring Pembinaan Pembudidaya KJA)

- a. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Laut.
- b. Waktu Pelaksanaan : Februari – Desember
- c. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Pinrang, Jeneponto, Takalar, Barru, Sinjai, Bulukumba.
- d. Hasil yang dicapai :
 - Termonitoringnya Pengembangan budidaya di Kabupaten Kabupaten Pinrang, Jeneponto, Takalar, Barru, Sinjai, dan Bulukumba khususnya kelompok-kelompok pembudidaya laut yang telah dikunjungi.

B4. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Konsultasi Luar Provinsi)

- a. Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan DSKP.
- b. Waktu Pelaksanaan : September
- c. Tempat Pelaksanaan : Bogor, Jawa Barat dan D.I. Yogyakarta.
- d. Hasil yang dicapai :

- Terlaksananya konsultasi ke Kota Bogor dalam rangka Pertemuan Workshop Perbenihan Ikan Nasional Tahun 2017.
- Terlaksananya Konsultasi ke Kota Yogyakarta dalam rangka pengembangan budidaya laut.

b. Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Air Payau dan Tawar

Pada Tahun 2017, Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Air Payau dan Tawar mengelola kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :

APBD

I. Pengembangan Budidaya Air Tawar dan Payau (Paket Bibit)

Bantuan paket budidaya air tawar kepada kelompok pembudidaya berupa benih ikan air tawar dan pakan pellet, dengan total kelompok yang dibantu 140 Kelompok atau 1.564 paket yang tersebar pada 18 Kab./kota di Sulawesi Selatan.

Bantuan paket budidaya air Payau kepada kelompok pembudidaya berupa benih ikan air payau dan pakan, dengan total kelompok yang dibantu 118 Kelompok atau 4.793 paket yang tersebar pada 8 Kab./kota di Sulawesi Selatan.

No	Kabupaten/Kota	Kinerja		
		Input (Rp.)	Out Put (Benih Ikan)	Outcome
	Budidaya Ikan Air Tawar			
1	Luwu	230.000.000	115 Pkt	Meningkatnya hasil produksi budidaya air tawar
2	Luwu Timur	30.000.000	15 Pkt	
3	Luwu Utara	40.000.000	20 Pkt	
4	Palopo	90.000.000	45 Pkt	
5	Enrekang	122.000.000	61 Pkt	
6	Toraja Utara	170.000.000	85 Pkt	
7	Sidrap	100.000.000	50 Pkt	
8	Sinjai	30.000.000	15 Pkt	
9	Pangkep	140.000.000	70 Pkt	
10	Pinrang	60.000.000	30 Pkt	
11	Barro	30.000.000	15 Pkt	
12	Bulukumba	40.000.000	20 Pkt	
13	Gowa	700.000.000	311 Pkt	
14	Maros	400.000.000	200 Pkt	
15	Makassar	230.000.000	115 Pkt	
16	Wajo	45.000.000	22 Pkt	
17	Soppeng	150.000.000	75 Pkt	
18	Takalar	600.000.000	300 Pkt	

Sumber :Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Air Payau dan Tawar

LAPORAN TAHUNAN 2017

No	Kabupaten/Kota	Kinerja		
		Input (Rp.)	Out Put (Benih Ikan)	Outcome
	Budidaya Udang Bandeng :			
1.	Bulukumba	200.000.000	200 Pkt	Meningkatnya hasil produksi budidaya air payau
2.	Takalar	1.500.000.000	1.500 Pkt	
3.	Pinrang	705.000.000	705 Pkt	
4.	Pangkep	96.000.000	96 Pkt	
5.	Maros	1.300.000.000	1.300 Pkt	
6.	Bone	200.000.000	200 Pkt	
7.	Sinjai	190.000.000	142 Pkt	
	Budidaya Udang Vannamae :			
1.	Pangkep	100.000.000	50 Pkt	Meningkatnya hasil produksi budidaya air payau
2.	Maros	400.000.000	200 Pkt	
3.	Pinrang	400.000.000	200 Pkt	
4.	Barru	400.000.000	200 Pkt	

Sumber :Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Budidaya Air Payau dan Tawar

II. Pembinaan Pembudidaya Ikan Air Tawar dan Payau

- a. Kegiatan : Workshop Pengembangan Budidaya Air tawar
Waktu : 3 X Pelaksanaan
Lokasi : Sulawesi Selatan
- b. Kegiatan : Temu Penerapan sertifikasi CPIB
Waktu : 4 X Pelaksanaan
Lokasi : Makassar, Maros, Bulukumba, Gowa
- c. Kegiatan : Temu Penerapan sertifikasi CBIB
Waktu : 3 X Pelaksanaan
Lokasi : Sinjai, Bulukumba, Bone
- d. Kegiatan : Temu Lapang Budidaya Udang-Bandeng
Waktu : 3 X Pelaksa
Lokasi : Pinrang, Maros, Takalar

APBN

Kegiatan APBN dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 berupa :

- **TP (Tugas Pembantuan)**

Kegiatan melalui TP adalah berupa pengadaan Sarana Prasana dan Pembinaan di UPTD Pengembangan Perbenihan Air Tawar dan UPTD Pengembangan Perbenihan Air Payau meliputi :

- Pengadaan Pakan 10.000 kg
- Sarana Perbenihan (kantong benih) ... Roll
- Pembayaran Honor
- Perjalanan Dinas

- **DK (Dekon)**

Kegiatan melalui DK seluruhnya adalah bersifat pembinaan dan pengawasan bantuan dari pusat adalah bentuk perjalanan dinas.

Masalah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan

a. Permasalahan

Secara umum pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya di Sulawesi Selatan Tahun 2017 sudah berjalan dengan baik, namun hal itu juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala yang ada. Adapun hal-hal yang menjadi kendala yang dialami adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya dana yang teralokasi untuk pengembangan budidaya air tawar dan payau
- Banyaknya Pokdakan yang tidak bersedia memenuhi Kelengkapan Administrasi berupa SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
- Ketidaksesuaian musim budidaya di tingkat kelompok dengan waktu pengadaan di tingkat satker sehingga pelaksanaan kegiatan budidaya di lapangan sering mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya.

b. Tindak Lanjut Permasalahan

- Untuk mengatasi terbatasnya dana yang teralokasi untuk pengembangan budidaya air tawar dan Payau, maka seksi pengembangan kawasan budidaya air tawar dan payau melakukan seleksi yang ketat terhadap usulan/proposal yang masuk.

- Mengatasi permasalahan ketidaksesuaian musim budidaya di tingkat kelompok dengan waktu pengadaan di tingkat satker sehingga pelaksanaan kegiatan budidaya di lapangan sering mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya, telah diupayakan penyesuaian jadwal kegiatan dengan musim tanam di kab./kota.

C. Pengembangan Daya Saing dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

A. Kegiatan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan

Pada kegiatan ini telah dilakukan berbagai sub kegiatan antara lain :

I. Pertemuan Kontes dan Promosi Ikan Hias

Pelaksana Kegiatan : Seksi Pengembangan Daya Saing
Prodak dan Pemasaran Hasil Perikanan
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 10 s/d 12 Februari 2017
Tempat Pelaksanaan : GTC Makassar
Peserta : Pelaku Ikan/Pengusaha Ikan Hias Se Sulawesi Selatan
Hasil yang dicapai : Terpromosinya ikan hias ke masyarakat

II. Menghadiri Misi Dagang dan Pameran/Komoditi Unggulan Sulawesi Selatan di Provinsi Maluku Kota Ambon, tanggal 29 Juli - 01 Agustus 2017

Pelaksana Kegiatan : Seksi Pengembangan Daya Saing Prodak dan Pemasaran Hasil Perikanan
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 Juli s/d 01 Agustus 2017
Tempat Pelaksanaan : Provinsi Maluku Kota Ambon
Peserta : Pelaku Usaha Perikanan/pertanian Se Indonesia
Hasil yang dicapai : Terpromosinya Hasil Olahan UKM ke masyarakat

III. Pameran Bulan Mutu Nasional di Hotel Clarion Makassar pada tanggal 24 - 26 Oktober 2017

Pelaksana Kegiatan : Seksi Pengembangan Daya Saing Prodak dan Pemasaran Hasil Perikanan
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s/d 16 Oktober 2017
Tempat Pelaksanaan : Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar)
Peserta : Pelaku Usaha Perikanan/Pertanian Se Indonesia
Hasil yang dicapai : Terpromosinya Hasil Olahan UKM ke masyarakat

IV. Pameran "INA FISHTECH, AQUACULTURE DAN TRADE EXPO 2017" di Jogja City Mall pada tanggal 16 - 19 November 2017

Pelaksana Kegiatan	: Seksi Pengembangan Daya Saing Prodak dan Pemasaran Hasil Perikanan
Waktu Pelaksanaan	: Tanggal 16 s/d 19 November 2017
Tempat Pelaksanaan	: Provinsi Yogyakarta
Peserta	: Pelaku Usaha Perikanan/Pertanian Se Indonesia
Hasil yang dicapai	: Terpromosinya Hasil Olahan UKM ke masyarakat

B. Kegiatan Pembinaan Teknis Kelembagaan Pembudidaya, Pengolah Dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan Perikanan

Pelaksanaan kegiatan ***"Pembinaan Teknis Kelembagaan Pembudidaya, Pengolah dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan"*** dilaksanakan di Makassar selama 2 (Dua) hari oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulawesi Selatan.

Waktu pelaksanaan pada :

Hari / Tanggal : Rabu-Jumat, 02- 04 Agustus 2017

Tempat : Hotel D'Maleo Jl. Pelita Raya 8 No. 01 Makassar

Setelah mengikuti dan mendengar arahan narasumber serta diskusi berkembang pada kegiatan ***Pembinaan Teknis Kelembagaan Pembudidaya, Pengolah dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan*** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Arahan dan sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengembangan UMKM/Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi setelah sektor pertanian. untuk mewujudkan program tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel menjadi pengendali utama penambahan pendapatan (income) rakyat dan tentunya Peranan UMKM/POKDAKAN/ POKLAHSAR sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Sulawesi selatan merupakan salah satu daerah penghasil produk perikanan yang potensial dan tentunya produksi

hasil perikanan sebagian besar masih diolah UMKM/Kelompok Pengolah. Oleh sebab itu sangat diperlukan UMKM/UKM yang solid dalam kelembagaan sehingga dapat terwujud kelompok potensial yang sejahtera dan mandiri. Senada dengan materi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Perikanan, Ir. Hardi Harris, MM. dan Kepala Seksi Pengembangan Daya Saing dan Pemasaran Produk Perikanan, Ir. Armni Mahmud, MM. dijelaskan bahwa Kelembagaan adalah entry point dalam menggerakkan sistem akuabisnis, karena itu sejumlah permasalahan yang terjadi pada kelompok tentunya akan sangat mengganggu terciptanya kelembagaan kelompok yang solid. Senantiasa diperlukan pendampingan kelompok pelaku utama perikanan agar konsep pemberdayaan dapat dilaksanakan secara sadar dan sungguh-sungguh sehingga posisi tawar masyarakat meningkat.

2. Narasumber dari Fungsional Penyuluh Rachmady Aziz, A.Pi.MM. dan Ir. Indotang, M.Si. menjelaskan pentingnya berkelompok untuk mewujudkan pemberdayaan. Dengan berkelompok, informasi dapat dengan mudah diakses, dapat terjadi interaksi antara individu dan terjadi kondisi sosial antar individu dapat saling membantu. Selain itu dijelaskan pula unsur pengikat yang kuat bagi kelembagaan pelaku utama perikanan yang mandiri berdasarkan Kepmen KP Nomor KEP.14/MEN/2012. Materi mengenai kelompok yang disampaikan juga berupa pentingnya manajerial kelompok. Terdapat beberapa administrasi teknis dalam menjalankan kelompok, salah satunya adalah buku administrasi yang mencatat segala hal yang berhubungan dan administrasi dan keuangan kelompok.
3. Selanjutnya BPOM Wilayah Sulsel menjelaskan mengenai Persyaratan yang harus dipenuhi produk pangan sebelum diregistrasi yang bertujuan untuk menghasilkan pangan yang aman, bermutu, layak dikonsumsi dan terdaftar (MD, ML, P-IRT). Selain secara langsung, registrasi/Sertifikasi secara online juga sudah dapat dilakukan oleh User melalui www.pom.go.id

4. Transmart/Carrefour sebagai perwujudan Corporate Social Responsibility memiliki Program Pengembangan UMKM. Tercatat $\pm 70\%$ supplier PT. Trans Retail Indonesia adalah UMKM. PT. Trans Retail menyediakan pojok rakyat, yang merupakan tenant khusus yang disediakan untuk memasarkan olahan dari UMKM/UKM. Selain itu dijelaskan bahwa produk yang akan dipasarkan harus memenuhi unsur kualitas, kuantitas dan kontinuitas, khas, inovatif, unik, tradisional dan dibutuhkan masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh Carrefour dalam mendukung dan mengembangkan UMKM yang menjadi mitra adalah promosi, akses pasar, peningkatan kapasitas, serta pemantauan dan evaluasi kinerja penjualan.
5. Kanwil BRI yang diwakili oleh Ibu Emmy Wijayanti, SE. menjelaskan mengenai KUR RITEL, sasaran KUR RITEL, Syarat-syarat dan ketentuan kredit, suku bunga, plafond dan jenis kredit.
6. Succses story Kelompok Wanita Nelayan Fatimah Az-Zahrah, disampaikan langsung oleh Ketua Kelompok Ibu Dra. Nuraeny. Kelompok yang sukses dalam memberdayakan perempuan pesisir di sekitar wilayahnya. Kelompok yang didirikan pada tahun 2007, memproduksi Abon ikan tuna, otak-otak tenggiri, batari, badeng isi, nugget ikan dan aneka panganan dan telah tersertifikasi P-IRT, BPOM dan memiliki sertifikat halal.
7. Pemasaran secara online dibawakan oleh Narasumber yang mewakili AKUMANDIRI (Asosiasi IUMKM Indonesia Sulawesi Selatan). Materi ini menjelaskan mengenai alternatif pemasaran yang saat ini menjadi trend setter yaitu pemasaran secara online. Pemasaran melalui social media yang merupakan media pemasaran yang sangat mudah dan murah, hanya dibutuhkan kelihaian untuk melihat pangsa pasar. Media yang dapat digunakan dapat melalui Facebook, Twitter dan Instagram.

C. Pembinaan Daya Saing usaha Perikanan

Pelaksanaan kegiatan *“Pertemuan Pembinaan Daya Saing Usaha Perikanan”* dilaksanakan di Makassar selama 2 (Dua) hari oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Daya

Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulawesi Selatan.

Waktu pelaksanaan pada :

Hari / Tanggal : Kamis-Jumat, 26- 27 Oktober 2017
Tempat : Hotel Grand Town (Jl. Pengayoman Kompleks Pasar
Segar Blok E. 9 B (Depan Grand Toserba) Makassar
Sulawesi Selatan Makassar

Peserta "*Pertemuan Pembinaan Daya Saing Usaha Perikanan* " adalah UMKM, UKM dan Pendamping Teknis dari Kabupaten Bone Pangkep, Bulukumba, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Kota Makassar, sebanyak 50 Orang.

Setelah mengikuti dan mendengar arahan narasumber serta diskusi berkembang pada kegiatan *Pertemuan Pembinaan Daya Saing Usaha Perikanan* dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Arahan dan sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengembangan UMKM/Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi setelah sektor pertanian. untuk mewujudkan program tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel menjadi pengendali utama penambahan pendapatan (income) rakyat dan tentunya Peranan UMKM/POKDAKAN/ POKLAHSAR sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Sulawesi selatan merupakan salah satu daerah penghasil produk perikanan yang potensial dan tentunya produksi hasil perikanan sebagian besar masih diolah UMKM/Kelompok Pengolah. Oleh sebab itu sangat diperlukan UMKM/UKM yang solid dalam kelembagaan sehingga dapat terwujud kelompok potensial yang sejahtera dan mandiri.
2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Perikanan, Ir. Hardi Harris, MM. memaparkan materi mengenai Penerapan Standar Mutu Hasil Perikanan. Standar mutu adalah : persyaratan yang harus dipenuhi oleh

produsen sesuai dengan ketentuan spesifikasi. Standar mutu produk perikanan terdiri dari :

- a) identitas
- b) higienis, mikrobiologis
- c) kimiawi, organoleptik
- d) keseragaman ukuran, berat atau isi, dan label

Tujuan Penerapan Standar Mutu adalah Untuk menjamin keamanan dan melindungi kenyamanan konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, serta membina produsen untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

- 3. Narasumber selanjutnya adalah Kepala Seksi Pengembangan daya saing dan pemasaran produk perikanan, Ir. Arni Mahmud, MM. Materi menjelaskan tentang Diversifikasi Produk Rumput Laut. Materi ini berisi penjelasan mengenai Species Rumput Laut dan berbagai macam olahan yang dihasilkan. Dijelaskan pula manfaat rumput laut sebagai sumber pangan, untuk kesehatan dan sebagai hidrokoloid. Materi ini berisi aneka ragam resep olahan rumput laut.
- 4. Narasumber selanjutnya adalah Ir. Nurlaila Abdullah, MS. Yang merupakan praktisi industri dan Dosen Universitas Hasanuddin. Materi menjelaskan mengenai Penerapan GMP Pada Industri Hasil Laut dan Perikanan Untuk Peningkatan Daya Saing Produk. Dijelaskan mengenai pengawasan pada rantai produksi yang merupakan materi dasar pengelola kelompok usaha produksi makanan dan minuman hasil laut dan perikanan untuk memulai usaha yang memenuhi standar masuk pasar retail moderen.
- 5. Selanjutnya LPPOM MUI Wilayah Sulsel yang diwakili oleh Direktur LPPOM MUI menjelaskan mengenai persyaratan sertifikasi halal, kebijakan dan prosedur. Materi berisi kebijakan dan prosedur sertifikasi halal dalam proses sertifikasi halal.

D. Kegiatan Pembinaan Teknis Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan

Pelaksanaan kegiatan *“Pertemuan Pembinaan Teknis Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan”* dilaksanakan di Makassar selama 2 (Dua) hari oleh Bidang Perikanan

Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan pada :

Hari / Tanggal : Rabu-Jumat, 13- 15 September 2017
Tempat : Hotel Grand Town (Jl. Pengayoman Kompleks Pasar Segar Blok E. 9 B (Depan Grand Toserba) Makassar Sulawesi Selatan Makassar

Peserta *“Pertemuan Pembinaan Teknis Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan”* adalah POKLAHSAR, UMKM, UKM dan Pendamping Teknis dari Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Kota Pare-Pare, Takalar, Bantaeng dan Kota Makassar, sebanyak 50 Orang.

Setelah mengikuti dan mendengar arahan narasumber serta diskusi berkembang pada kegiatan *Pertemuan Pembinaan Teknis Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan* dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- **Langkah sederhana strategi bisnis UKM terbaru pemasaran yang efektif untuk UKM:**
1. Membuat produk yang unik dan memiliki kelebihan dibandingkan produk lain yang sejenis. Pesaing ada dimana-mana, jika produk atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki kelebihan, maka akan sulit bersaing. Produk yang berkualitas saja tidak cukup, produk juga harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tentunya kebutuhan konsumen pun ikut berubah, jika produk kita lambat berinovasi maka akan tertinggal dengan produk pesaing.
 2. Dekat dengan pelanggan yang sudah ada dan terus menerus mendapatkan pelanggan yang baru. Dalam mengembangkan usaha kecil, harus terus menerus mencari pelanggan baru, sekaligus juga bagaimana membuat suasana yang menyenangkan bagi pelanggan yang sudah ada. Jadilah sahabat pelanggan, layani dengan keramahan, jika tidak mereka akan membicarakan hal negatif mengenai produk kita. Me-maintain pelanggan yang sudah ada (existing) bisa dilakukan dengan cara memberikan sesuatu secara gratis kepada pelanggan existing, sebagai imbalan agar mereka tetap mengontak kita, dengan cara ini kita dapat selalu berhubungan dengan pelanggan. Manusia memiliki ingatan terbatas, setelah kita

mengadakan kontak awal, sebaiknya kita melakukan follow up kontak secara teratur. Jika dalam sebulan kita tidak melakukan kontak, kemungkinan besar pelanggan akan melupakan produk kita. Menemukan cara yang paling baik untuk menarik pelanggan baru dalam usaha kecil dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. Bergabung dengan jaringan sosial b. Menawarkan produk gratis sebagai tester produk c. Dorong calon pelanggan kita supaya memberikan informasi kontak mereka. Berikan alasan supaya mereka mengontak kita, misalnya e-book gratis. Ketika calon pelanggan telah memberikan informasi kontak mereka, follow up secara reguler untuk membangun kredibilitas perusahaan kita dan memperjelas nilai produk atau jasa kita.

3. Melakukan publikasi di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh calon pembeli potensial. Mini display merupakan tempat yang tepat untuk melakukan promosi produk yang dihasilkan oleh UKM, dengan memamerkan contoh produk dilengkapi informasi tentang harga, bahan baku dan lain-lain. Setelah melakukan publikasi produk, sebaiknya kita telusuri dari mana para pelanggan mengetahui produk atau jasa kita. Informasi ini penting, untuk mengetahui program pemasaran mana yang efektif dan mana yang kurang efektif, sehingga kita dapat menentukan perubahan strategi berdasarkan hasil temuan tersebut.
4. Memanfaatkan e-commerce dalam pemasaran produk UKM
E-commerce atau internet marketing merupakan sarana promosi produk melalui internet, dengan memanfaatkan e-commerce, bisnis memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang luas bahkan global. E-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi, sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga murah. Contoh perusahaan-perusahaan yang sukses dengan memanfaatkan e-commerce antara lain Dell computer, Wall-mart dan sebagainya. Pemasaran produk dengan e-commerce memiliki beberapa manfaat antara lain, murah dan efisien, memiliki akses tanpa batas, dan memperpendek jarak distribusi produk.
5. Menyusun “pesan pemasaran” yang tepat saat mempromosikan produk. Pesan pemasaran yang tepat sangat penting untuk mendapatkan atensi dari calon

pelanggan,yaitu:

- a) Buatlah pesan pemasaran yang menggambarkan keunikan dan daya tarik produk dan yang membuat calon pelanggan mengontak kita.
- b) Sesuaikan pesan pemasaran dengan masalah yang dihadapi calon pelanggan sehingga mereka akan memperhatikan.
- c) Gunakanlah pesan pemasaran yang cerdas, baik dalam meeting, bertelfon, surat menyurat maupun dalam website.

TIPS STRATEGI BISNIS UKM TERBARU

Menjalankan bisnis apapun itu, persaingan bisnis sudah pasti ada. Untuk itulah para pelaku bisnis membutuhkan strategi pemasaran yang jitu untuk bisa menerobos ketatnya persaingan. Berikut ini adalah beberapa strategi pemasaran bisnis untuk bisnis yang masih baru yang dapat Anda lakukan untuk memasarkan produk Anda.

1. Perkuat Nama Brand Bisnis

Strategi pemasaran bisnis yang pertama bukan tentang seberapa besar keuntungan yang dapat Anda raih maupun seberapa banyak laba yang bisa Anda rengkuh dalam jangka waktu dekat. Namun, yang penting disini adalah seberapa besar brand dan kekuatan produk yang sedang Anda jalankan sehingga dapat berpotensi untuk menghasilkan penghasilan dalam jangka waktu yang panjang.

2. Pelajari Banyaknya Kompetitor Anda

Tidak ada hal lain yang lebih sulit dan juga lebih mudah selain Anda mencoba untuk mendalami dan mengetahui lebih dalam mengenai kompetitor yang menjadi saingan Anda dalam berbisnis. Mengetahui disini artinya mengetahui apa kelebihan dan kelemahan kompetitor tersebut. Jika Anda mengetahui apa yang menjadi kelebihan dari kompetitor tersebut maka Anda bisa mencontohnya, dan sebaliknya jika Anda mengetahui kelemahan kompetitor tersebut maka jauhilah.

3. Aktif Dalam Berpromosi

Promosi erat kaitannya dengan penguatan brand produk dan peningkatan nilai dimata para konsumen. Semakin efektif nilai pemasaran dan promosi yang Anda jalani serta di aplikasikan maka akan semakin besar pula peluang keuntungan yang akan Anda dapatkan.

4. Pelajari Kebiasaan Konsumen

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik maka Anda perlu untuk mengetahui layanan dan juga kebiasaan dari konsumen dalam membeli produk yang Anda jual. Dengan mempelajari kebiasaan dari konsumen dan menyerap hasil transaksi maka secara tidak langsung Anda bisa merangkul konsumen Anda menjadi lebih erat lagi agar lagi sehingga lebih loyal dan nyaman. Kondisi seperti itulah yang berpotensi untuk menghasilkan keuntungan lebih banyak dalam jangka waktu yang lebih lama lagi.

E. Workshop Manajemen Usaha Perikanan

Pelaksanaan kegiatan *“Workshop Manajemen Usaha Perikanan”* dilaksanakan di Makassar selama 3 (tiga) hari oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan pada :

Hari / Tanggal : Kamis-Sabtu, 30 November-02 Desember 2017
 Tempat : Hotel Grand Town (Jl. Pengayoman Kompleks
 Pasar Segar Blok E. 9 B (Depan Grand Toserba)
 Makassar Sulawesi Selatan

Peserta *“Workshop Manajemen Usaha Perikanan”* adalah UMKM, UKM/POKDAKAN/POKLAHSAR dan Pendamping Teknis dari Kabupaten di Sulawesi Selatan sebanyak 60 Orang.

Hal-hal yang sangat penting dipahami oleh UKM/UMKM/Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan usahanya terkait dengan manajerial usaha, adalah :

- ❖ SWOT adalah singkatan dari **S**trength, **W**eakness, **O**pportunity dan **T**hreats atau kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Analisis SWOT berusaha menentukan metoda guna memanfaatkan secara maksimal semua kekuatan yang ada serta peluang-peluang yang terbuka, sekaligus menekan atau meminimalkan semua kelemahan serta ancaman yang dihadapi sebagai kondisi awal organisasi. Analisis SWOT didasari oleh suatu logika bahwa keberhasilan suatu organisasi akan ditentukan oleh situasi dan kondisi internal maupun eksternal organisasi.

- ❖ **Strengths** (faktor kekuatan). Kekuatan internal organisasi/bisnis menyangkut situasi dan kondisi, yaitu potensi yang dimiliki, seperti:

- Cita-cita, kebijakan
- Filosofi dan tata nilai
- Jumlah karyawan, keterampilan dan pengalaman
- Tingkat kesetiakawanan personel
- Teknologi yang dimiliki
- Dll

- ❖ **Weaknesses** (faktor kelemahan)
Berbagai kondisi internal yang melemahkan atau kurang kondusifnya mewujudkan cita-cita bisnis, seperti:

- Lemahnya sdm karyawan
- Produk belum dikenal
- Teknologi masih kurang
- Kualitas produk masih lemah

- ❖ **Opportunities** (faktor peluang)

Merupakan faktor eksternal yaitu tersedia pada lingkungan yang harus dimanfaatkan oleh organisasi/bisnis, seperti :

- Daya beli pelanggan yang tinggi
- Perkembangan informasi yang pesat
- Dukungan dari pemerintah
- Dll

- ❖ **Threats** (faktor ancaman)

Berupa ancaman eksternal yang mungkin membahayakan kelancaran aktifitas organisasi/bisnis, seperti:

- Kenaikan harga bahan baku
- Kelangkaan pemasok material dan peralatan
- Bencana alam
- Tingginya tingkat inflasi
- Kekuatan pesaing

- ❖ Business Plan adalah DOKUMEN TERTULIS yang merinci seluk-beluk usaha/bisnis atau menguraikan ide dasar yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis & hal yang berhubungan dengan pendirian bisnis tersebut yang mencakup informasi STATUS SAAT INI, KEBUTUHAN MENDATANG, dan HASIL YANG DIHARAPKAN dari usaha/bisnis baru tersebut. Pentingnya Rencana bisnis adalah :
 - MENENTUKAN; MULAI ATAU TIDAK?
 - SEBAGAI PETA BISNIS
 - MENGELOLA IDE AGAR DAPAT MEMULAI DAN MENJALANKAN DENGAN BENAR
 - SEBAGAI INFO BAGI DONATUR/ LKU UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN
 - MEMBANDINGKAN HASIL DENGAN RENCANA
- ❖ *Inovasi* adalah Tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan .
- ❖ Teknik dan cara berinovasi adalah :
 - Meningkatkan/ memperbaiki yang sudah ada
 - Dengan memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai
 - Dengan menciptakan hal-hal baru dan berbeda
 - Dengan merubah sesuatu bahan menjadi sumber daya
 - Dengan menggabungkan sumber daya sumber daya itu menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif
- ❖ BERFIKIR KREATIF : Adalah : Kemampuan untuk menghasilkan idea baru dan asli. Ide tersebut bersumber dari imajinasi atau gabungan idea yang ada. Seseorang individu yang berfikiran kreatif menggunakan kemahiran mengembangkan ide, menghubungkan, membuat inferens, meramal, membuat hipotesis, mensintesis, menganalogikan dll.
- ❖ Akuntansi atau Pembukuan Keuangan Kelompok merupakan kegiatan MENCATAT, MENGGOLONGKAN, MERINGKAS, dan MELAPORKAN semua transaksi / kejadian keuangan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu.
- ❖ Tujuan akuntansi pembukuan adalah ; a.Menyediakan informasi keuangan kepada semua pihak yang membutuhkan baik intern Kelompok, maupun pihak ekstern.

(pendamping, Deptan RI, Dinas Koperasi, dll) b. Pertanggungjawaban keuangan yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak. c. Agar terciptanya kerapian dan ketertiban dalam tata administrasi terutama dalam aspek keuangan. d. Agar dapat diperoleh informasi yang sistematis, lengkap, benar dan tepat waktu tentang perubahan dan posisi akhir yang sesungguhnya dari setiap kekayaan, UTANG, MODAL, PENDAPATAN DAN BIAYA.

❖ **KAIDAH PEMBUKUAN :**

1. RUNTUT; setiap kejadian (transaksi) dicatat berdasarkan urutan waktu kejadian.
2. SISTEMATIS; pembukuan, penggolongan, periwayatan, dan ikhtisar dilakukan dengan urutan proses yang jelas, jernih dan masuk akal.
3. JELAS; proses pembukuan harus menghasilkan informasi keuangan usaha secara benar; lengkap, rinci, tepat waktu, dan kondisi yang senyatanya.
4. BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN; dimana informasi yang dihasilkan bisa diperiksa kebenarannya, dengan penelusuran proses, pemeriksaan alat-alat bukti dan dokumentasi transaksi keuangan asli yang disimpan secara benar dan rapi.

❖ Inti dari Kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (create new and different) melalui berpikir kreatif dan inovatif

F. Workshop Pengolahan Hasil Perikanan

Pelaksanaan kegiatan *“Workshop Pengolahan Hasil Perikanan”* dilaksanakan di Makassar selama 2 (Dua) hari oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulawesi Selatan.

Waktu pelaksanaan pada :

Hari / Tanggal : Kamis-Jumat, 14- 15 Desember 2017
Tempat : Hotel Grand Town (Jl. Pengayoman Kompleks
Pasar Segar Blok E. 9 B (Depan Grand Toserba)
Makassar Sulawesi Selatan Makassar

4.4.2. Perikanan Tangkap

a. Kegiatan Seksi Kepelabuhan Perikanan

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dinyatakan bahwa penetapan lokasi pembangnan serta pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan kewenangan provinsi, sehingga perlu dilakukan percepatan Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).

Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ke depan, selain berfungsi sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendaparatkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan juga diarahkan untuk pengembangan Industrialisasi Pengembangan Perikanan Tangkap untuk mendukung pengembangan sentra ekonomi perikanan berbasis kawasan.

Peningkatan peran dan fungsi pelabuhan perikanan di masa yang akan datang mutlak diperlukan. Disamping menciptakan iklim usaha yang kondusif, pelayanan yang cepat, juga harus memberikan rasa aman bagi setiap pelaku usaha dan dalam pelakasanaannya menuntut partisipasi aktif segenap stakeholder.

Kegiatan APBN

1. Pelaksanaan Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan

a. Target OutPut Kegiatan :

Pelayanan Kesyahbandaran pada 3 lokasi yaitu : Pelabuhan Perikanan Paotere Makassar, Pelabuhan Perikanan Untia Makassar dan Pelabuhan Perikanan Birea Bantaeng.

b. Realisasi OutPut Kegiatan :

Pelaksanaan Pelayanan Kesyahbandaran pada 3 (tiga) lokasi yaitu : Pelabuhan Perikanan Paotere Makassar, Pelabuhan Perikanan Untia dan Pelabuhan Perikanan Birea Bantaeng telah dilaksanakan kegiatan meliputi :

- Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan
- Kedatangan Kapal Perikanan
- Kedatangan Keberangkatan Kapal Perikanan

Tabel 13. Pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

NO	NAMA PELABUHAN	TELAH MENGIKUTI DIKLAT KESYAHBANDARAN TAHUN 2017
1	PP Pontap Palopo	Irwan Yasin, SE
2	PP Lonrae Bone	Agusalim, S.IP
3	PP Lappa Sinjai	Amal Ahsan, S.Pi
4	PP Malili - Luwu Timur	
5	PP Beba Takalar	Safaruddin Musyakkir
6	PP Tanru Sampe Jenponto	
7	PP Paotere Makassar	Asep Suparman, S.Pi,M.Si
8	PP BoneHalang Selayar	Muhammad Ridwan, S.Pi
9	PP Benteng Somba Upu Gowa	
10	PP Cempae Pare Pare	Sarman, A.Md
11	PP Birea Bantaeng	Taufik Akbar
12	PP Bonto Bahari Bulukumba	Andi Supriadi, S.Pi
13	PP Kajang Bulukumba	
14	PP Labuang Maros	Jamaluddin, S.Pi.M.Si
15	PP Bonto Bahari Maros	
16	PP Polejiwa Barru	
17	PP Sumpang Binange Barru	
18	PP Siwa Wajo	
19	PP Bone Pute Luwu	
20	PP Ulo- Ulo Luwu	Agung Jaya
21	PP Balambang Luwu	
22	PP Lero Pinrang	Muhammad Ali
23	PP Maccini Baji Pangkep	

Sumber : Seksi Kepelabuhan Perikanan

2. Peningkatan Pelayanan SHTI di Pelabuhan Perikanan

- a. Target OutPut Kegiatan :
Pelayanan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) pada 1 Lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Paotere Makassar.
- b. Realisasi OutPut Kegiatan :
Pelaksanaan Pelayanan pemberian Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) telah dilaksanakan di Pelabuhan Paotere Makassar sebagai salah satu syarat ekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Hal ini dilaksanakan untuk mengatur pelarangan masuknya produk perikanan yang berasal dari kegiatan *IUU Fishing* ke Uni Eropa.

Tujuan Penerapan SHTI di Indonesia untuk mendukung komitmen nasional dalam mengimpletasikan ketentuan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan, memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan ke luar negeri, membantu dalam pemberantasan *IUU Fishing* dan *traceability* hasil perikanan laut Indonesia.

3. Rapat Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka Rekomendasi Pemberian BBM Bagi Nelayan

a. Target OutPut Kegiatan :

Tersedianya informasi jumlah kebutuhan BBM (solar & premium) untuk nelayan skala kecil dan mikro/ pembudidaya ikan dan Petambak Garam.

b. Realisasi OutPut Kegiatan :

Pengelolaan SPDN dimaksudkan untuk menyediakan bahan bakar sesuai standar dan mutu dengan harga terjangkau bagi masyarakat, mengurangi subsidi BBM dengan mengutamakan masyarakat ekonomi lemah dan atau daerah terpencil serta meningkatkan konservasi dan efisiensi penggunaan BBM dan meningkatkan diversifikasi penggunaan BBM ke bahan bakar lain.

Pengelola SPDN diharapkan dapat melayani nelayan yang membutuhkan pasokan solar untuk operasional penangkapan ikan, berdasarkan jumlah batas pasokan (Kuota) yang diberikan oleh Pertamina.

4. Identifikasi Penataan Kelembagaan Pelabuhan Perikanan

a. Target OutPut Kegiatan : Penataan Kelembagaan Pelabuhan Perikanan

b. Realisasi OutPut Kegiatan :

Penataan Kelembagaan Pelabuhan Perikanan meliputi : penataan kelas pelabuhan perikanan. Untuk saat baru pelabuhan perikanan Birea yang telah ditetapkan Kelasnya sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 12/KEPMEN-KP/2017 Tanggal 30 Maret 2017.

Mekanisme Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :

- Identifikasi ketersediaan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan.

- Pernyataan tertulis yang berisikan kesiapan beroperasinya pelabuhan perikanan kepada Menteri.
- Laporan operasional pelabuhan perikanan minimal 6 bulan setelah operasional.
- Foto copy SK Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan.
- Selanjutnya dokumen persyaratan penetapan kelas pelabuhan perikanan diperiksa oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap., untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan Kelasnya.

Tabel 14. Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan

NO	NAMA PELABUHAN	STATUS
1	PP Pontap Palopo	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
2	PP Lonrae Bone	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
3	PP Lappa Sinjai	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
4	PP Malili - Luwu Timur	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
5	PP Beba Takalar	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
6	PP Tanru Sampe Jenponto	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
7	PP Paotere Makassar	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
8	PP BoneHalang Selayar	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
9	PP Benteng Somba Upu Gowa	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
10	PP Cempae Pare Pare	—
11	PP Birea Bantaeng	Penetapan PP Birea sebagai Pangkalan
		Pendaratan Ikan berdasarkan
		KEPMEN No 12/KEPMEN-KP/2017
		Tanggal 30 Maret 2017
12	PP Bonto Bahari Bulukumba	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
13	PP Kajang Bulukumba	Berkas Usulan Penetapan Kelas Sdh Terkirim
14	PP Labuang Maros	—
15	PP Bonto Bahari Maros	—
16	PP Polejiwa Barru	—
17	PP Sumpang Binangae Barru	—
18	PP Siwa Wajo	—
19	PP Bone Pute Luwu	—
20	PP Ulo- Ulo Luwu	—
21	PP Balambang Luwu	—
22	PP Lero Pinrang	—
23	PP Maccini Baji Pangkep	—

5. Pelaksanaan Pengendalian Konstruksi Pelabuhan Perikanan

a. Target OutPut Kegiatan :

Pengendalian Konstruksi Pelabuhan Perikanan

b. Realisasi OutPut Kegiatan :

Paket kebijakan peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan meliputi : (1) Peningkatan kualitas pelayanan ; (2) Revitalisasi pelabuhan perikanan; dan (3) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana. *"Starting Point"* pembangunan pelabuhan perikanan merupakan titik awal dari tahapan (urutan prioritas) mana pembangunan perikanan dimulai. Starting point merupakan titik kritis operasional pelabuhan perikanan. Starting point tiap pelabuhan perikanan berbeda-beda, terutama ditentukan oleh kondisi geografis dan kondisi social perikanan. Berdasarkan amanat UU No 23 Tahun 2014, maka dalam rangka pengembangan pelabuhan perikanan harus dilakukan percepatan pelaksanaan P3D. Dan Untuk saat ini sudah ada 6 (Enam) kabupaten Kota yang telah melaksanakan Proses P3D urusan Pelabuhan Perikanan Yaitu :

- Bulukumba
- Jeneponto
- Bantaeng
- Takalar
- Bone
- Luwu

6. Pelaksanaan Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan

a. Target OutPut Kegiatan :

Laporan operasional pelabuhan perikanan

b. Realisasi OutPut Kegiatan :

Sistem informasi Operasional Pelabuhan Perikanan yang meliputi :
pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, penyebaran dan informasi Data.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelabuhan oleh Direktorat Pelabuhan Perikanan DJPT KKP melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Opeasional Pelabuhan Perikanan

(EVKIN-PP) berbasis Sistem PIPP yang terintegrasi dengan Data Sharing System (DSS) Ditjen Perikanan Tangkap terhadap 148 Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari 22 UPT Pusat, 124 UPT Daerah dan 2 Pelabuhan Swasta, maka sampai dengan bulan Agustus 2018, untuk Sulawesi Selatan ada 9 (Sembilan) pelabuhan perikanan yang aktif dan hasil evaluasinya sbb :

- PP Paotere Makassar : Nilai 40 (Sedang)
- PP Pontap Palopo : Nilai 34,25 (kurang)
- PP Cempae ParePare : Nilai 24,25 (kurang)
- PP Birea Bantaeng : Nilai 72 (Baik)
- PP Lonrae Bone : Nilai 53,25 (Sedang)
- PP Bonto Bahari Bulukumba : Nilai 24,75 (kurang)
- PP Kajang Bulukumba : Nilai 20 (Kurang)
- PP Lappa Sinjai : Nilai 27,25 (Kurang)
- PP Beba Takalar : Nilai 43,5 (Sedang)

Kegiatan APBD

1. Penyusunan Profil Pelabuhan Perikanan.

A. Penyusunan Buku Profil Pelabuhan Perikanan

Buku profil pelabuhan perikanan adalah buku yang menyediakan informasi kondisi pelabuhan perikanan di wilayah kewenangan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017.

Keberadaan buku profil pelabuhan perikanan, disamping sebagai sarana informasi khususnya bagi pemerintah dan kalangan usaha serta stakeholder bidang kelautan dan perikanan, juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat disekitar lokasi pelabuhan perikanan.

B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

a. Pengambilan Data Pelabuhan Perikanan

Untuk kegiatan penyusunan profil pelabuhan perikanan, telah dilakukan pengambilan data beberapa pelabuhan perikanan, di antaranya, pelabuhan perikanan Bonto Bahari dan pelabuhan perikanan Kajang kabupaten

Bulukumba, pelabuhan perikanan Lero kabuapten Pinrang, Pelabuhan Perikanan Lappa Sinjai, Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo Kabupaten Luwu, Pelabuhan Perikanan Birea Kabupaten Bantaeng, Pelabuhan Perikanan Lonrae Kabupaten Bone, Pelabuhan Perikanan Beba Kabupaten Takalar Dan telah dilakukan beberapa pengumpulan data terkait kondisi pelabuhan perikanan di Sulawesi Selatan.

2. Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelabuhan Perikanan.

A. Pertemuan Koordinasi

Kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan perikanan secara profesional, sesuai dengan peran dan fungsi pelabuhan perikanan.

Kegiatan Pertemuan “**Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelabuhan Perikanan** ” di laksanakan pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2017 di Grand Imawan Hotel Makassar Jalan Pengayoman Panakkukang Makassar.

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :

- Masih maraknya kegiatan perikanan khususnya kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan, tidak diatur, dan melanggar hukum (*IUU Fishing*).
- Sebaran pelabuhan perikanan masih terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat, sementara potensial SDI yang tersedia ada di Indonesia bagian Timur.
- Masih kurang memadainya sarana dan sarana terkait system konektivitas pelabuhan perikanan, termasuk system transportasi, sehingga distribusi produk perikanan kurang efisien.
- Beberapa potensi hambatan dalam pencapaian progress pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut :
 - Penyiapan status lahan yang clean & clear
 - Penyiapan dokumen lingkungan hidup (Amdal, DELH,UKL/UPL,SPPLH)

- Penetapan status asset Daerah (Prov/Kab/Kota) dalam masa transisi penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Adanya konektivitas antar pelabuhan perikanan.
- Dalam rangka penguatan data dan penerapan system informasi di pelabuhan perikanan, semua pelabuhan perikanan wajib melaporkan kegiatan secara rutin melalui system aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).
- Perlunya diciptakan iklim investasi di pelabuhan perikanan.
- Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi harus membentuk lembaga pengelola pelabuhan perikanan.
- Lembaga pengelola pelabuhan perikanan perlu dibentuk oleh penyelenggara pelabuhan perikanan agar ada yang bertanggungjawab dalam :
 - Pengelolaan asset pelabuhan perikanan
 - Operasional pelabuhan perikanan
 - Pelaksana tugas dan fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pelabuhan Perikanan
 - Koordinasi pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan.
- Percepatan pelaksanaan P3D harus segera dilaksanakan berdasarkan amanat UU No 23 Tahun 2014.
- Bagi Pelabuhan Perikanan yang telah dilakukan proses Serah Terima P3D, sebaiknya dilakukan inventarisasi (pendataan asset) untuk pengembangan pelabuhan dimasa yang akan datang.
- Menyiapkan anggaran pemeliharaan yang memadai dan berkelanjutan untuk tahun tahun mendatang.
- Perlu adanya penanggungjawab pengelola Pelabuhan Perikanan, dengan tujuan :
 - Ada yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Aset
 - Tanggungjawab Operasional
 - Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Pelabuhan Perikanan.

3. Koordinasi Kesyahbandaran.**A. Cetak Blanko Kesyahbandaran**

Telah dilakukan cetak blanko kesyahbandaran meliputi :

- Surat Persetujuan Berlayar
- Blanko STBLKK keberangkatan
- Blanko STBLKK kedatangan

B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Koordinasi Kesyahbandaran di Kabupaten/Kota Meliputi : Kota Pare-Pare, Bulukumba, Maros, Barru, Takalar dan Bantaeng

C. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Koordinasi Kesyahbandaran di Pusat

4. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pelabuhan Perikanan.**A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Perdin dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pelabuhan Perikanan.

Meliputi : Kota Pinrang, Bantaeng, Takalar, Jeneponto, Pangkep, Luwu, dan beberapa kabupaten lainnya telah dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kelayakan teknis pengembangan pelabuhan perikanan.

Hasil yang di peroleh berdasarkan evaluasi terhadap pelabuhan perikanan di kabupaten/kota adalah terdapat 5 rekomendasi pelabuhan perikanan yang memiliki kelayakan teknis untuk dikembangkan yaitu :

- PP Lappa Kabupaten Sinjai
- PP Banto Bahari Kabupaten Bulukumba
- PP Pontap Kabupaten Palopo
- PP Birea Kabupaten Bantaeng
- PP Beba Kabupaten Takalar
- PP Tanru Sampe Kabupaten Jeneponto

5. Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Manajemen Teknis Perikanan Tangkap.

A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perdin dalam rangka Monev Kepelabuhanan Meliputi : Kabupaten Pangkep, Barru, Pinrang, Bone, kabupaten Luwu, Bantaeng, Takalar dan Kabupaten Maros.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PENCEGAHAN

1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Sulawesi Selatan adalah :

- Masih banyaknya pelabuhan perikanan yang belum operasional.
- Masih ada pelabuhan perikanan yang belum memiliki pengelola.
- Syahbandar perikanan masih kurang.
- Pelaporan hasil kegiatan operasional pelabuhan perikanan belum optimal.
- Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum melakukan serah terima P3D.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

2. Upaya Pencegahan

- Identifikasi permasalahan pelabuhan perikanan yang belum operasional/ penetapan kelas pelabuhan perikanan secara nasional.
- Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi harus membentuk lembaga pengelola pelabuhan perikanan/ penetapan penanggungjawab/pengelola pelabuhan perikanan.
- Perlunya penambahan syahbandar perikanan/ syahbandar perikanan pembantu.
- Pelaksanaan (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) PIPP di Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan *Data Sharing System (DSS)* Ditjen Perikanan Tangkap.
- Percepatan P3D.

b. Kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan,

alokasi sumber dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan (FAO, 1997). Sementara Widodo dan Nurhakim (2002) mengemukakan bahwa secara umum, tujuan utama pengelolaan sumberdaya ikan adalah untuk :

- 1). Menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan (enhancement).
- 2). Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social para nelayan serta
- 3). Memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut.

Pengelolaan sumberdaya perikanan umumnya didasarkan pada konsep “hasil maksimum yang lestari” (*Maximum Sustainable Yield*) atau juga disebut dengan “MSY”. Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli Biologi bernama Schaefer pada tahun 1957. Inti dari konsep ini adalah menjaga keseimbangan biologi dari sumberdaya ikan, agar dapat dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang panjang. Pendekatan konsep ini berangkat dari dinamika suatu stok ikan yang dipengaruhi oleh 4 (empat) factor utama, yaitu *rekrutment*, *pertumbuhan*, *mortalitas* dan *hasil tangkapan*. Pengelolaan sumberdaya ikan seperti ini lebih berorientasi pada sumberdaya (resource oriented) yang lebih ditujukan untuk melestarikan sumberdaya dan memperoleh hasil tangkapan maksimum yang dapat dihasilkan dari sumberdaya tersebut. Dengan kata lain, pengelolaan seperti ini belum berorientasi pada perikanan secara keseluruhan (fisheries oriented), apalagi berorientasi pada manusia (social oriented).

Kelompok sumberdaya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan Sulawesi Selatan yaitu Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone terdiri dari 9 (sembilan) kelompok yaitu :

1. Ikan Pelagis Kecil
2. Ikan Pelagis Besar
3. Ikan Demersal
4. Ikan Karang
5. Udang Penaeid
6. Lobster

7. Kepiting
8. Rajungan
9. Cumi - Cumi

Kegiatan APBD

1. Cetak format blanko logbook

Dalam rangka menanggulangi data stok sumberdaya ikan diperlukan strategi pengelolaan sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan melalui beberapa upaya diantaranya penerapan logbook di Sulawesi Selatan. Pengumpulan data logbook penangkapan ikan tidak hanya diperlukan dalam pengelolaan perikanan saja, tetapi juga dalam pemasaran hasil perikanan dimana lembar logbook kedepan akan digunakan dalam perdagangan internasional begitu juga Uni Eropa yang telah mengadopsi resolusi RMFOs seperti pada EC 1005 / 2008 dan di Indonesia dikenal dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Dalam rangka penerapan logbook penangkapan ikan untuk nahkoda kapal perikanan diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang dokumen kapal, jenis alat tangkap, jenis ikan, produksi, dan wilayah penangkapan. Dalam penerapan ini banyak kendala dan masalah dihadapi oleh seksi pengelolaan sumberdaya ikan diantaranya lemahnya nelayan dalam mengetahui lintang dan bujur daerah penangkapan, terbatasnya sarana dan prasarana, tidak ada honor bagi petugas kab/kota yang melaksanakan logbook ini.

Penerapan logbook yang dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan pada tahun 2017 yaitu di pelabuhan yang berada di wilayah kab/kota antara lain **PPI Paotere di Kota Makassar, PPI Beba di Kabupaten Takalar, PPI Lappa di Kabupaten Sinjai, PPI Lonrae di kabupaten Bone dan PPI Bontobahari di Kabupaten Bulukumba.** dimana hanya di PPI Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang sampai saat ini belum melaporkan penerapan logbook tahun 2017.

2. Identifikasi Kelompok Usaha Bersama Sumberdaya Ikan di Sulawesi Selatan

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN	REALISASI OUTPUT KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Identifikasi Kelompok Usaha Bersama Sumberdaya Ikan	18 lokasi	22 lokasi	4 lokasi tambahan KUB

Sumber : Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Kelompok Usaha Bersama (KUB) sumberdaya ikan adalah bada usaha hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan / musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Pembentukan KUB SDI dapat dilakukan atas dasar kesamaan jenis usaha maupun bersifat multi usaha yang saling terkait sedapat mungkin perlu diupayakan KUB tersebut dapat diakomodasikan. dimana KUB SDI merupakan bentuk kelembagaan perikanan yang bergerak bidang usaha penangkapan ikan, penanganan dan pengolahan produk perikanan, pemasaran hasil perikanan maupun usaha pendukung kegiatan sumberdaya ikan.

Dimana KUB SDI merupakan wadah dan sarana untuk meningkatkan kegiatan perikanan dan sebagai wahana dalam penyerapan teknologi dan informasi yang bermanfaat bagi anggotanya dimana setelah seksi pengelolaan sumberdaya ikan yang direncanakan 10 kabupaten dengan 18 KUB yang telah dilakukan pembinaan maka dalam perjalanannya hanya dapat dilakukan sebanyak 4 kabupaten (Bone, Sinjai, Makassar dan Takalar) dengan 22 KUB SDI yang telah dibina pada tahun 2017.

3. Pertemuan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan di Sulawesi Selatan

Adapun tujuan pertemuan teknis pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan di propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data data perairan umum daratan yang terdiri dari danau, sungai, rawa, waduk dan genangan air lainnya
2. Identifikasi permasalahan dan upaya pemecahan terhadap data data perairan umum daratan yang terdiri dari danau, sungai, rawa, waduk dan genangan air lainnya

3. Memahami model pengelolaan perairan umum daratan yang terdiri dari danau, sungai, rawa, waduk dan genangan air lainnya.

Pelaksanaan pertemuan teknis pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan di propinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 November 2017 di Hotel LYNT Makassar Sulawesi Selatan.

Peserta pertemuan teknis pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan di provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 35 orang dari kab/kota di Sulawesi Selatan dan staf perikanan tangkap DKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan APBN

1. Penebaran bibit / benih ikan di Perairan Umum Daratan di Sulawesi Selatan

NO.	KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN	REALISASI OUTPUT KEGIATAN
1.	Penebaran bibit / benih ikan di perairan umum daratan	Ikan Nila dan Ikan Mas Ukuran 5 – 8 cm Jumlah 34.923 ekor	Ikan Nila dan Ikan Mas Ukuran 5 – 8 cm Jumlah 34.923 ekor

Upaya penebaran bibit / benih ikan di perairan umum daratan di Sulawesi Selatan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dana Dekonsentrasi APBN Sulawesi Selatan tahun 2017 dimana diharapkan dengan penebaran ikan dapat bertambah produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan di kabupaten Sidrap, PPL kab. Sidrap, Kepala Desa kab. Sidrap dan Ketua kelompok nelayan Danau Sidenreng selaku penerima bantuan.

Adapun bibit yang didapatkan dari Balai Benih Ikan di Kabupaten Sidrap dimana ikan yang ditebar sebanyak 34.923 cm dengan ukuran 5 – 8 cm dimana ikan yang ditebar di Danau Sidenreng adalah Ikan Mas dan Ikan Nila dengan Kelompok Penerima Danau Sidenreng.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Adapun permasalahan yang kami dapatkan dalam seksi pengelolaan sumberdaya ikan adalah sebagai berikut :

1. Masih belum dilaksanakannya analisis produktifitas hasil tangkapan di wilayah perairan hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia pada seksi pengelolaan sumberdaya ikan sangat terbatas yang dilakukan hanya pengumpulan data jenis ikan dan produksi berdasarkan data tahun yang masuk dari statistik.

2. Masih belum dilaksanakannya analisis produktifitas hasil tangkapan di wilayah laut sampai dengan 12 mill dan perairan umum daratan lintas kabupaten hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia pada seksi pengelolaan sumberdaya ikan sangat terbatas yang dilakukan hanya pengupulan data jenis ikan dan produksi berdasarkan data tahun 2016 yang masuk dari statistik.
3. Masih belum dilaksanakannya evaluasi pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan lintas kabupaten karena di perlukan kajian yang mendalam tentang potensi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum daratan tetapi karena keterbatasan dana hal ini belum dapat terealisasi.
4. Pada pelaksanaan logbook penangkapan tidak ada honor bagi petugas yang ada di PPI dan yang direncanakan 5 kab/kota (Makassar, Takalar, Sinjai, Bone dan Bulukumba) hanya 4 kab/kota yang memasukkan data logbook di Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone) minus Kab. Bulukumba karena tidak adanya honor bagi mereka pengambil data logbook dan petugas kab. bulukumba tidak ada di PPI.
5. Belum maksimalnya logbook di kab/kota yang seharusnya sudah ada di pelabuhan dan tempat pendaratan ikan untuk mengetahui potensi dan stok sumberdaya ikan yang ada dilaut tetapi keterbatasan petugas, terbatasnya sarana dan prasarana serta honor yang tidak ada yang menyebabkan tidak ada datanya.
6. Untuk di APBD belum dilakukan pengkayaan sumberdaya ikan yang mengalami penurunan populasi baik di laut maupun di perairan umum daratan karena keterbatasan dana hal ini belum dapat terealisasi.
7. Belum dilaksanakan pembinaan pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pendekatan ekosistem dan pengembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya ikan karena keterbatasan anggaran yang ada.

Adapun upaya pemecahan yang kami dapatkan dalam seksi pengelolaan sumberdaya ikan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan kajian dan analisis serta anggaran untuk mendapatkan produktifitas hasil tangkapan di wilayah perairan pada seksi pengelolaan sumberdaya ikan.

2. Diperlukan kajian dan analisis serta anggaran produktifitas hasil tangkapan di wilayah laut sampai dengan 12 mill dan perairan umum daratan lintas kabupaten pada seksi pengelolaan sumberdaya ikan.
3. Diperlukan kajian dan serta anggaran evaluasi pengeloaan sumberdaya ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan lintas kabupaten karena di perlukan kajian yang mendalam tentang potensi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum daratan.
4. Pelaksanaan logbook penangkapan seharusnya ada di semua kab/kota yang ada dipelabuhan dan periran umum daratan.
5. Belum maksimalnya logbook di kab/kota yang seharusnya sudah ada di pelabuhan dan tempat pendaratan ikan uuntuk mengetahui potensi dan stok sumberdaya ikan yang ada dilaut tetapi keterbatasan petugas ada SK dari provinsi, pengadaan sarana dan prasarana serta adanya honor bagi petugas kab/kota.
6. Untuk pengkayaan sumberdaya ikan yang mengalami penurunan populasi baik di laut maupun di perairan umum daratan karena keterbatasan dana hal ini belum dapat terealisasi.

C. Kegiatan Seksi Kenelayanan dan Sarana Penangkapan Ikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perikanan tangkap antara lain tentang kapal penangkap ikan, nelayan dan alat penangkap ikan. Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas yang salah satunya adalah Seksi kenelayanan dan sarana Penangkapan Ikan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kenelayanan dan sarana penangkapan ikan untuk melakukan usaha penangkapan. Untuk melaksanakan tugas seksi kenelayanan dan sarana penangkapan ikan, melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan seksi kenelayanan dan sarana penangkapan ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi kenelayanan dan sarana penangkapan ikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- Melakukan pengumpulan data,identifikasi dan melaksanakan cek fisik kapal penangkapan ikan ukuran 5 GT sampai dengan 30 Gt
- Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan 5 GT sampai 30 GT,dan pembuatan alat tangkap perikanan
- Melakukan pembinaan teknis penggunaan kapal dan alat penangkapan ikan pada wilayah sampai dengan 12 mil
- Melakukan analisis jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar kelayakan melaut,menangkap dan penyimpanan hasil tangkapan
- Melakukan pembinaan dalam rangka penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran 5 GT sampai 30 GT
- Melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan konflik nelayan
- Melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas nelayan
- Melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut sampai dengan 12 mil
- Melakukan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin surat izin usaha perikanan (SIUP),surat izin penangkapan ikan (SIPI),dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI),hasil tagkapan,surat izin pemasangan rumpon,serta izin pengadaan kapal penangkap ikan serta pengangkut ikan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin dibidang kenelayanan dan sarana penangkap ikan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi kenelayanan dan sarana penangkapan ikan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

Di tahun 2017 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Perikanan Tangkap Seksi Kenelayanan dan Sarana Penangkapan Ikan dibagi berdasarkan sumber anggaran yaitu APBN dan APBD, sebagai berikut :

Kegiatan APBD

1. Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan

Produksi dan produktivitas perikanan tangkap dapat ditingkatkan melalui peningkatan sarana dan prasarana di bidang perikanan tangkap. Salah satunya adalah pembenahan sarana penangkapan ikan, baik itu alat tangkap, alat bantu penangkapan maupun kapal perikanan. Untuk menunjang kegiatan sektor perikanan dan kelautan sarana dan prasarana Perikanan tangkap yang di salurkan untuk nelayan adalah sebagai berikut :

➤ **Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap**

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap meliputi :

- Pengadaan Alat Tangkap di Kabupaten Selayar (KUB Tanaera Kec. Bontomate'ne; KUB Sinar Laut dan KUB Laut Biru Kabupaten Selayar)
- Pengadaan Mesin Perahu (Kel. Sinar Laut Ds Mappasalle Kec. Pangkajene Kab. Pangkep)
- Perahu, Mesin dan Pukat Selayar (KUB Karya Sipaklebbi Ds. Paonjalae Kota Palopo; KUB Sardinella Desa Ponta Kec. Wara Timur Kota Palopo)
- Pengadaan Peralatan Penangkap Ikan (KUB Abulosibatang Bissapu Kabupaten Bantaeng)
- Pengadaan Sampan Fiber dan Alat Tangkap Rawai (Kel. Nelayan Lintas Bahari P. Barrang Caddi Kota Makassar)
- Pengadaan Kapal Jolloro (Kel. Elang Laut Kab. Selayar, KUB Batu Luaraka Salenrang Ds Salenrang Kec. Bontoa Laut Kab. Maros)
- Pengadaan Perahu dan Mesin (KUB Cinta Laut Kec. Ujung Tanah Kota Makassar)
- Pengadaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan (KUB Rajawali Kab. Selayar)

- Bantuan Perahu Katinting : (KUB Pammase Ds Waetuwo Kec. Lanrisang Kab. Pinrang)
- Pengadaan Perahu dan Mesin Katinting : (KUB Kaisar Kec. Ujung Tanah Kota Makassar)
- Bantuan Perahu Jolloro dan Alat Tangkap (KUB Jales Veva Jayamahe Kec. Bontomate'ne Kab. Selayar)
- Bagan Perahu (KUB Merpati Putih Kec. Bontoharu Kab. Selayar)
- Pengadaan Sampan Fiber dan Mesin (KUB Satria Bahari Ds Bungaya Kec. Bonto Te'ne Kab. Selayar)
- Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (KUB Jaya Samudra Ds. Karumpa Kab. Selayar, KUB Bahari Tarupa Dsn Karumpa Kab. Selayar)
- Pengadaan Sampan dan Perahu Katinting (Klp Laut Biru Ds Manara Indah Kab. Selayar)
- Pengadaan Mesin Genset untuk Nelayan (KUB Pammase Ds Waetuwo Kab. Pinrang)
- Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan (KUB Laut Biru Bontomanai Kec. Barugayya Kab Selayar)
- Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (KUB Jaya Samudra Ds. Karumpa Kab. Selayar)
- Rumah Ikan (Kel. Karang Indah Kab. Selayar, Pokwasms Batu Maccini Ds Buhung Pitue Kab. Sinjai, Kel. Alae Kale Kec. Bacukiki Kota Pare-pare)
- Pengadaan Cool Box (Kelompok Camar Utara Kab. Selayar)
- Pengadaan Mesin Katinting (KUB P. Libukkung Ds. Pombakka Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara)
- Bantuan Mesin Katinting di Kab. Barru (KUB Karya Nelayan Ds Cilelang Kec. Mallusetasi, KUB Restu Ds Kupa Kec. Mallusetasi, KUB Losa-losa Ds. Kupa Kec. Mallusetasi, KUB Karya Bersama Ds Bojo Baru Kec. Mallusetasi, KUB Macollieloloe Ds Lampoko Kec. Mallusetasi Kab. Barru)

- Bantuan Perahu dan Mesin Katinting (KUB Nelayan Bulan Sabit Dsn Banri Manurung, KUB Nelayan Baji Gau Batu Le'leng Dsn Dsn Mallosoro Kab. Jeneponto)
- Pengadaan Alat Tangkap Purse Seine (PDL Kel. Tanah Lemo Kab. Bulukumba)
- Pengadaan Perahu Jukung di Kab. Luwu (Kel. Bise-bise Ds. Cimpu Suli Kab. Luwu, Kel. Sampang Ds. Cimpu Kab. Luwu dan Kel. Ikhlas Ds Cimpu Kab. Luwu).

Dari jumlah dana Rp. 5.675.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.299.961.000,- dimana ada sisa anggaran sebesar Rp. 375.039.000. Anggaran yang tersisa adalah dari anggaran pengadaan alat tangkap jaring kepiting sebesar Rp. 100.000.000; bantuan alat tangkap di Kab. Maros sebesar Rp. 50.000.000 dan pembangunan dermaga di Kelurahan Cambayya Kota Makassar sebesar Rp. 150.000.000. Anggaran ini tidak terealisasi dan tidak terserap karena kontrak yang tidak dapat dipenuhi. Apaun sisa anggaran lain merupakan akumulasi dari sisa kontrak seluruh kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan.

2. Pertemuan Teknis Penandaan dan Pendaftaran Kapal Perikanan 5 – 30 GT

➤ Pertemuan Teknis Penandaan dan Pendaftaran Kapal Perikanan 05 - 30 GT

Kapal Perikanan milik orang Indonesia atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di WPP-RI dan atau di laut lepas wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 36 dan Pasal 37 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 36/DJ-PT/2010 tentang Spesifikasi, Kodefikasi, dan Tata Cara Penulisan Tanda Pengenal Kapal Perikanan. Hal - hal terkait dengan Pendaftaran Kapal Perikanan adalah :

1. Pendaftaran kapal perikanan adalah Pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.

2. Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.
3. Tanda pengenal kapal perikanan adalah tanda atau notasi tentang identitas kapal perikanan berupa wilayah operasional, fungsi atau jenis kapal (penangkap ikan, pengangkut ikan, kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan) dan nomor registrasi tempat kapal didaftarkan sebagai kapal perikanan.
4. Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.

Pendaftaran kapal perikanan ini digunakan untuk persyaratan penerbitan SIPI/SIKPI kecuali untuk kapal perikanan yang berukuran dibawah 5 GT dimana khusus kapal yang memiliki ukuran dibawah 5 GT dilakukan pencatatan kapal perikanan. Karena adanya perubahan regulasi terutama Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan penerbitan ijin kapal perikanan berukuran 5-10 GT yang awalnya di lakukan di kabupaten, saat ini dilakukan di Provinsi. Dimana ada beberapa aturan tambahan yang diterapkan untuk memudahkan nelayan kecil dalam memperoleh SIUP/SIPI. Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan Buku Kapal Perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan.

Penandaan dan pendaftaran kapal perikanan kewenangan daerah (0-5 untuk kabupaten/kota, 10-30 GT untuk Provinsi) merupakan kegiatan yang dilakukan lintas sektor dan lintas kementerian, dimana pengukuran dan penerbitan Surat Ukur, Gross Akta, Pas Kecil dan Pas Besar merupakan kewajiban dari Kementerian Perhubungan, sedangkan rekomendasi untuk penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI merupakan tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI yang merupakan kewenangan dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Satu Atap (PTSP) BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu bagi kapal perikanan berukuran diatas 10 GT diwajibkan memiliki kelengkapan Buku Kapal Perikanan. Adapun kewajiban bagi pemegang buku kapal perikanan adalah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam buku kapal perikanan; mengajukan permohonan perubahan buku kapal perikanan kepada pemberi ijin dalam hal akan melakukan perubahan identitas pemilik kapal perikanan dan kapal perikanan; mengajukan permohonan penggantian buku kapal perikanan dalam hal buku kapal perikanan hilang atau rusak; mengajukan permohonan penghapusan buku kapal perikanan dalam hal buku kapal perikanan berhenti bendera, tenggelam, hilang, rusak dan atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan. Apabila tidak melaksanakan pendaftaran dan pencatatan kapal perikanan maka akan ada sanksi administrative maupun sanksi pidana. Kegiatan Penandaan dan pendaftaran kapal dilaksanakan di Hotel Quality Makassar tanggal 16-18 Oktober 2017 dengan 35 Orang Peserta dari 18 Kabupaten/Kota.

➤ **Bimtek Cek Fisik Kapal Perikanan Kewenangan Daerah (0 – 30) GT.**

Kapal perikanan merupakan armada yang digunakan oleh nelayan dalam melakukan usaha penangkapan ikan ataupun usaha pengangkutan ikan dari laut menuju pelabuhan perikanan. Kapal perikanan merupakan kapal yang secara spesifik berbeda dengan kapal angkutan barang maupun kapal pengangkut manusia, oleh karena itu berlaku aturan khusus bagi kapal perikanan.

Urgensi pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan merupakan amanat Permen KP No. 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran Kapal Perikanan dimana Pasal 6 Ayat (2) yang mensyaratkan permohonan izin kapal baru dan perpanjangan harus melakukan cek fisik kapal perikanan dan Alat Penangkap Ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan, serta Peraturan Menteri KP Nomor PER.26/MEN/2013 jo. Peraturan Menteri KP Nomor PER.30/MEN/2012 jo. Peraturan Menteri KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI dimana Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : (1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI, perubahan spesifikasi kapal, perubahan spesifikasi alat penangkapan ikan, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri; (2)

Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat permohonan SIKPI, perubahan spesifikasi kapal, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri; (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di dalam negeri oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan. Selain itu karena banyaknya praktek *mark down* ukuran kapal dengan alasan yang beragam, maka untuk smuan kapal perikanan yang melakukan usaha di WPP NRI wajib melaksanakan cek ulang fisik kapal perikanan seperti tercantum pada Permen KP No. 11 Tahun 2016 tentang Standar Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dimana didalamnya mensyaratkan Pengukuran ulang/cek fisik terhadap kapal-kapal perikanan.

Kegiatan cek fisik ulang kapal perikaan dilaksanakan karena kondisi di lapangan dimana tidak ada kesesuaian kondisi dan data aktual dengan usulan dan dokumen dimana banyak terjadi penyimpangan, tidak adanya kesesuaian kondisi kapal & API dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, pencegahan terhadap “*IUU fishing*” serta dan merupakan alat kendali terhadap keberlanjutan Sumber Daya Ikan dan Usaha Perikanan Tangkap di Indonesia.

Maraknya praktek *mark down* kapal perikanan menyebabkan tidak adanya data valid ukuran kapal perikanan yang ada di Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya. Terbatasnya tenaga pemeriksa fisik kapal perikanan/cek fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan menjadi kendala tersendiri bagi Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 46.717 km² dan 24 jumlah kabupaten/kota menyebabkan kegiatan cek fisik kapal perikanan menjadi sangat lambat karena terbatasnya petugas yang telah bersertifikasi dan dapat melakukan cek fisik kapal perikanan. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan banyaknya kapal baru maupun kapal yang telah lama yang belum dilakukan cek fisik dan pemeriksaan dokumen kapal. Penambahan petugas pemeriksa kapal dan dokumen kapal khususnya bagi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini di Sulawesi Selatan.

3. Pembinaan Pengendalian dan Penanganan Konflik Nelayan

Konflik nelayan merupakan hal yang sering terjadi baik dalam pemanfaatan ruang, penggunaan alat tangkap dan dikarenakan hal lain. Penyelesaian konflik harus didasarkan pada akar masalah terjadinya konflik tersebut. Penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan ruang wilayah penangkapan ikan di Sulawesi selatan bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik yang telah dilakukan dan yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik nelayan. Adapun penyelesaian konflik nelayan yang perlu dilakukan adalah :

- Meningkatkan pengawasan terhadap alat tangkap yang digunakan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan dengan mematuhi jalur jalur penangkapan yang telah ditetapkan pemerintah.
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan lepas pantai dengan mengarahkan perahu yang memiliki daya jelajah besar
- Mengoptimalkan peran PPNS perikanan dan polisi air dalam melakukan pengawasan terhadap alat tangkap yang tidak selektif ,produktif dan merusak lingkungan
- Meningkatkan ukuran tonase perahu yang telah memiliki mesin
- Mengembangkan teknologi alat tangkap yang telah ada dengan memperhatikan kepentingan stakeholder
- Petugas PPNS perikanan dan polisi air harus aktif memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan tentang jenis alat tangkap yang di ijinakan beserta wilayah operasinya.

Masalah yang seringkali memicu Konflik antar nelayan di Sulawesi Selatan adalah masalah wilayah administrasi dan jalur penangkapan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan bagi sebahagian nelayan yang menyebabkan nelayan lainnya tidak atau kurang hasil tangkapannya, bantuan sarana dan prasarana penangkapan serta hal lain. Kabupaten yang rawan terjadi konflik adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Selayar, Kabupaten Buukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo. Pemecahan konflik yang dilakukan adalah dengan mediasi

dan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan langsung mendatangi wilayah konflik.

4. Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Manajemen Teknis Perikanan Tangkap/ Monev Kenelayanan dan Sarana Perikanan Tangkap

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Dukungan Manajemen Teknis Perikanan Tangkap meliputi ;

- Identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan antara lain di Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kota Pare-pare dan Kabupaten Bantaeng.
- Monitoring dan penyerahan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Adapun tujuan perjalanan dinas tersebut adalah pada Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

KEGIATAN APBN

1. Kegiatan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Di Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Cellino Jl.Lanto Dg.Pasewang No.57 Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk : Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan mengenai cara penanganan ikan diatas kapal yang baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan; Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan mengenai cara penangkapan ikan yang baik agar mutu ikan tetap bertahan hingga waktu yang ditentukan; Memberikan pengetahuan kepada nelayan mengenai regulasi dan peraturan perundang undangan tentang alat tangkap yang dilarang dan penggantian alat tangkap ramah lingkungan.

Kegiatan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di daerah di hadir 30 orang peserta yang terdiri dari nelayan yang akan atau telah diberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan di Sulawesi Selatan. Materi dan Narasumber kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas kelautan dan perikanan Prov.Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Kenelayanan dan Sarana Penangkapan Ikan

dan Petugas Teknis (Operator) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan. Output dari kegiatan ini adalah Sertifikat Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Subdit Sertifikasi awak Kapal Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

2. Identifikasi dan Sosialisasi Calon Peserta Sehat Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil

■ **Sertifikasi Hak Atas Tanah nelayan (Sehat) Nelayan di Kab. Jeneponto , Pinrang, Bulukumba Luwu Utara, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Pangkep, Takalar dan Kota Palopo.**

- Tujuan Pertemuan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan yaitu memberikan status hukum atas kekayaan (asset) milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil,serta meningkatkan kepastian nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat di gunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil, member jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemungkiman yang layak,permanen dan sehat.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepstian hukum tanan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat di dayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

3. Pertemuan Penataan Basis Data Kenelayanan

Basis data dapat diartikan sekumpulan file yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk data dan informasi yang komperensif untuk mengimpormasikan pada suatu instansi mengenai tujuan atau maksud tertentu.

Adapun tujuan kegiatan ini yaitu (1) Mengurangi data yang tidak penting sehingga integritas data dapat selalu terjaga (2) Berbagai data dapat dilakukan

oleh setiap user dimana penggunaan data lebih muda dan konsisten data dapat selalu terjaga.

4. Diversifikasi Usaha

Kemiskinan di kawasan pesisir, selalu menjadi permasalahan yang menuntut perhatian banyak pihak. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkap fenomena kemiskinan masyarakat pesisir yang umumnya didominasi oleh masyarakat nelayan. Hasil dari pembangunan selama ini, belum dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Masyarakat diletakkan sebagai objek pembangunan dan bukan sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian dibutuhkan perhatian dan keinginan yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan keluarganya sebagai pengelola sumberdaya hasil laut.

Ketergantungan nelayan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya ikan di laut, dihadapkan juga pada keadaan musim yang tidak setiap saat berpihak kepada perekonomian nelayan. Musim paceklik yang biasa disebut sebagai musim baratan oleh nelayan, merupakan permasalahan tersendiri dari nelayan. Pada musim tersebut, nelayan tidak dapat melakukan kegiatan melaut karena ombak yang sangat tinggi. Sumberdaya ikan dalam tekanan yang sangat tinggi, menjadikan sumberdaya ikan semakin rusak, ditambah keadaan musim yang tidak setiap saat berpihak kepada perekonomian nelayan, sehingga kondisi nelayan baik secara sosial maupun ekonomi rentan. Untuk itu, maka perlu adanya upaya perbaikan terhadap sumberdaya ikan dan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi nelayan terhadap sumberdaya ikan di laut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi keluarga nelayan dari sumber-sumber pendapatan yang lain. Secara umum upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan satu kebijakan yaitu diversifikasi usaha penangkapan ikan.

Kegiatan diversifikasi usaha penangkapan ikan dilaksanakan dalam rangka mengurangi tekanan terhadap sumberdaya ikan sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan pada saat terjadinya musim barat.

Diversifikasi usaha penangkapan ikan adalah kegiatan penganeekaragaman usaha yang dilakukan oleh nelayan dan keluarganya selain menangkap ikan di laut. Apabila nelayan mempunyai sumber pendapatan lain selain menangkap ikan di laut, maka harapannya pendapatan keluarga nelayan meningkat.

Namun dalam kenyataannya keterampilan yang dimiliki oleh keluarga nelayan sangat terbatas, nelayan tidak mempunyai pilihan mata pencaharian lain kecuali menangkap ikan di laut. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga nelayan untuk melakukan diversifikasi usaha penangkapan ikan, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat nelayan itu sendiri, yaitu melalui proses penyuluhan dan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat setempat, kegiatan ini diupayakan untuk mengubah perilaku sasaran dalam mengembangkan keterampilan teknologi tepat guna untuk menumbuhkan mata pencaharian alternatif, baik di dalam sub sektor perikanan tangkap mulai hulu sampai dengan hilir, maupun sub sektor budidaya. Penyuluhan tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi nelayan dan keluarganya.

5. Penyusunan/Penyempurnaan Pedoman Kelembagaan Usaha Nelayan

Pelaku Utama dan motor penggerak di sektor Perikanan dan kelautan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan beserta keluarga intinya. Pada dasarnya, kelembagaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya.

Penyuluhan Perikanan merupakan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan para pelaku utama dan/atau pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan bisnis perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan

hidup. Dalam implementasinya telah ditempuh berbagai kebijakan salah satunya melalui revitalisasi penyuluhan perikanan dengan menata kembali sistem kelembagaan penyuluhan perikanan. Kelembagaan usaha perikanan dan kelautan yang baik merupakan cikal bakal berkembangnya kelompok usaha nelayan dan Koperasi Nelayan dimana penyaluran bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap harus melalui KUB dan koperasi nelayan.

4.4.3. Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Kegiatan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya hayati Laut

Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut meliputi keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem. Pengertian keanekaragaman hayati dan nilai manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, budaya, dan estetika perlu memperoleh perhatian serius agar strategi pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu sumberdaya hayati yang beranekaragam, diantaranya adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove dan berbagai jenis ikan, serta potensi jasa lingkungan kelautan yang sangat prospektif mendukung perekonomian masyarakat pesisir yaitu pengembangan pariwisata bahari dan jasa perhubungan laut.

Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Berbagai permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan dan kelautan, yang terkait dengan kelestarian sumberdaya hayati laut sebagai masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perairan antara lain: adanya pemanfaatan berlebih (*over exploitation*) di beberapa wilayah terhadap sumber daya hayati pesisir dan laut, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, perubahan dan degradasi fisik habitat, pencemaran, introduksi spesies asing, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, dan perubahan iklim global serta bencana alam. Upaya-upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat telah dilakukan guna

pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan APBD

1. Bimbingan Teknis Transplantasi Karang dalam Rangka Pelestarian dan Pengelolaan

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa – Kamis, 11-13 April 2017 bertempat di Hotel Mulia Indah Jl. Mangga No. 47, dan di perairan Desa Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
- Tujuan kegiatan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia dalam teknik transplantasi karang sebagai upaya pengelolaan terumbu karang berkelanjutan; Menyebarluaskan berbagai informasi tentang teknik transplantasi karang; dan Peningkatan perekonomian masyarakat wilayah pesisir dalam rangka menciptakan objek wisata bahari bawah laut.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pelestarian dan Pengelolaan pesisir kepada masyarakat pesisir sebanyak 40 (Empat puluh) orang.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 40 (Empat Puluh) peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat Pengawas dan Masyarakat dari Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan dan Arah Pembangunan Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; Kebijakan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Sulawesi Selatan oleh Abdul Kadir, S.Pi., M.Si; Peranan dan Fungsi Ekosistem WP3K dalam Aspek Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat oleh Dr. Syafyudin Yusuf, ST. M.Si; Bimbingan Teknis Transplantasi Karang oleh Faizal Kamaruddin, S.Pi., M.Si; Praktek Transplantasi Karang oleh Muhammad Sofyan.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu pengembangan kegiatan transplantasi karang dan juga monitoring dan evaluasinya sebagai upaya menyediakan tempat bagi biota-biota perairan.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.

- Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ekosistem terumbu karang yang ada di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya meningkatkan fungsi ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bimbingan Teknis Transplantasi Karang dalam Rangka Pelestarian dan Pengelolaan

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu – Jum’at, 26 - 28 April 2017 bertempat di Hotel Grand Celino Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 27, dan Pulau Samalona, Kota Makassar.
- Tujuan kegiatan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia dalam teknik transplantasi karang sebagai upaya pengelolaan terumbu karang berkelanjutan; Menyebarkan berbagai informasi tentang teknik transplantasi karang; dan Peningkatan perekonomian masyarakat wilayah pesisir dalam rangka menciptakan objek wisata bahari bawah laut.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pelestarian dan Pengelolaan pesisir kepada masyarakat pesisir sebanyak 40 (Empat puluh) orang.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 40 (Empat puluh) peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat Pengawas dan Masyarakat dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan dan Arah Pembangunan Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; Kebijakan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Sulawesi Selatan oleh Abdul Kadir, S.Pi., M.Si; Peranan dan Fungsi Ekosistem WP3K dalam Aspek Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat oleh Dr. Syafyudin Yusuf, ST. M.Si; Bimbingan Teknis Transplantasi Karang oleh Faizal Kamaruddin, S.Pi., M.Si; Praktek Transplantasi Karang oleh Muhammad Sofyan.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu pengembangan kegiatan perlindungan terumbu karang yang diikuti kegiatan transplantasi karang dan

juga monitoring dan evaluasinya sebagai upaya memperbaiki ekosistem terumbu karang sebagai tempat bagi biota-biota perairan.

- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ekosistem terumbu karang yang ada di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya meningkatkan fungsi ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Workshop Transplantasi Karang

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Senin – Kamis, 21 - 24 April 2017 bertempat di Hotel Grand Kalampa Jl. Jenderal Sudirman, Kabupaten Takalar.
- Tujuan kegiatan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia dalam teknik transplantasi karang sebagai upaya pengelolaan terumbu karang berkelanjutan; Menyebarkan berbagai informasi tentang teknik transplantasi karang; dan Peningkatan perekonomian masyarakat wilayah pesisir dalam rangka menciptakan objek wisata bahari bawah laut.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dalam Rangka Pelestarian dan Pengelolaan pesisir kepada masyarakat pesisir sebanyak 40 (Empat puluh) orang.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 40 (Empat puluh) peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat Pengawas dan Masyarakat dari Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar oleh Drs. H. Asbar, M.Si; Kebijakan dan Arah Pembangunan Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; Pengelolaan Pesisir dalam Mendukung Kawasan Konservasi oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; Pengelolaan Beberapa Ekosistem Pesisir oleh Ir. Basse Siang Parawansa, MP; Efektivitas KKPD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat WP-3-K oleh Dr. Ir. Ahmad Bahar, M.Si; Contoh Kasus Pengelolaan Terumbu Karang WP-3-K oleh Dr. Ir. Ahmad Bahar, M.Si; Peranan dan Fungsi

Ekosistem WP3K dalam Aspek Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat oleh Dr. Syafyudin Yusuf, ST. M.Si; Teknik dan Metode Transplantasi Karang dalam Restorasi Ekosistem Terumbu Karang oleh Dr. Syafyudin Yusuf, ST. M.Si; dan Praktek Transplantasi Karang oleh Muhammad Sofyan.

- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu pengembangan kegiatan perlindungan terumbu karang yang diikuti kegiatan transplantasi karang dan juga monitoring dan evaluasinya sebagai upaya memperbaiki ekosistem terumbu karang sebagai tempat bagi biota-biota perairan.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ekosistem terumbu karang yang ada di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya meningkatkan fungsi ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

- Pertemuan dilaksanakan pada dilaksanakan pada hari Senin – Rabu, Tanggal 08 – 10 Mei 2017 bertempat di Hotel Grand Celino Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 27, Makassar.
- Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia terkait mitigasi rawan bencana dan adaptasi perubahan iklim; Menyebarkan informasi mengenai mitigasi rawan bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan Meningkatkan Sumberdaya Manusia terkait mitigasi rawan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 50 (Lima puluh) peserta dalam 1 paket pertemuan Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim yang meningkat pemahamannya dalam upaya mitigasi terhadap ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayahnya.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 50 (Lima puluh) peserta yang terdiri dari UPTD Pusat, Instansi terkait tingkat Provinsi, DKP Provinsi, DKP Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; Pengendalian Erosi / Abrasi Pantai, Banjir dan Badai sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dr. Mahatma Lanuru, ST., M.Si; Mitigasi Bencana dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil secara Terpadu oleh Dr. Ir. Rijal Idrus, M.Sc; Pengendalian Perubahan Iklim sebagai Upaya Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir oleh TB. M. Hargel.
- Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan ini adalah perlu secepatnya melakukan pengadaan system informasi mitigasi bencana di provinsi, kabupaten/kota hingga di tingkat desa.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya perekonomian masyarakat wilayah pesisir dalam rangka menciptakan objek wisata bahari bawah laut selain itu memberikan fungsi mitigasi bencana dalam mencegah terjadinya abrasi pantai.

5. Sosialisasi Rehabilitasi Kawasan yang Terdegradasi

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 bertempat di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Tujuan kegiatan antara lain Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian suatu ekosistem; Membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang bertanggung jawab; dan Memberi motivasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan yang berbasis masyarakat terhadap praktek yang sifatnya “destructive”.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersosialisasinya kegiatan Rehabilitasi Kawasan yang Terdegradasi kepada masyarakat pesisir sebanyak 35 (tiga puluh Lima) orang, yang selanjutnya mengambil peran dalam upaya penyelamatan terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi; dan terehabilitasinya

kawasan pesisir seluas $\pm 1,2$ Ha dengan penanaman mangrove sebanyak 12.000 batang dengan sistem berbaris.

- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 35 (Tiga puluh Lima) peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat Pelestari Mangrove dan pemuda pesisir.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan Pembangunan Perikanan Kab. Pinrang oleh H. Luthfi, S.Pi., M.Si; Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; dan Teknik Penanaman Mangrove oleh Ir. Muh. Usman, MM.
- Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholders terkait dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang sifatnya merusak.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini terciptanya ketahanan lingkungan di wilayah pesisir karena meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

6. Sosialisasi Rehabilitasi Pesisir

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 bertempat di Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
- Tujuan kegiatan antara lain Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian suatu ekosistem; Membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang bertanggung jawab; dan Memberi motivasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan yang berbasis masyarakat terhadap praktek yang sifatnya “destructive”.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersosialisasinya kegiatan Rehabilitasi Kawasan yang Terdegradasi kepada masyarakat pesisir sebanyak 35 (tiga puluh Lima) orang, yang selanjutnya mengambil peran dalam upaya penyelamatan terhadap

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi; dan terehabilitasinya kawasan pesisir seluas $\pm 0,8$ Ha dengan penanaman mangrove sebanyak 8.200 batang dengan sistem berbaris.

- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 35 (Tiga puluh Lima) peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat Pelestari Mangrove dan pemuda pesisir.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan Pembangunan Perikanan Kab. Maros oleh Ir. Martina Buntan; Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; dan Teknik Penanaman Mangrove oleh Ir. Muh. Usman, MM.
- Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholders terkait dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang sifatnya merusak.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini terciptanya ketahanan lingkungan di wilayah pesisir karena meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

7. Workshop Evaluasi Terumbu Karang di Perairan Sulawesi Selatan

- Pertemuan dilaksanakan pada Hari Senin - Rabu, Tanggal 18 – 20 September 2017 bertempat di Hotel Continent Centrepont Jl. Adhyaksa No. 15, Kota Makassar.
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi dan menginventarisasi kondisi juga luasan terumbu karang yang terdapat di wilayah perairan Sulawesi Selatan guna memaksimalkan upaya pelestariannya ke depan, dan menjalin kesinambungan dalam pemanfaatannya dengan tetap berpedoman pada asas manfaat dan kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya alam.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 paket pertemuan Workshop Evaluasi Terumbu Karang di Perairan Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 50 (Lima

Puluh) Peserta yang memiliki komitmen dalam upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang ada khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari UPTD KKP, DKP Provinsi Sulawesi Selatan, Instansi terkait di tingkat provinsi, DKP Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir, Perguruan Tinggi dan LSM.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Metode Pemantauan Evaluasi Terumbu Karang oleh Dr. Syafyudin Yusuf, ST., M.Si; Implementasi Monitoring dan Evaluasi Terumbu Karang di Kawasan Taman Wisata Perairan Kapoposang dan Laut Sekitarnya oleh Ilham, S.Kel; oleh Program Monitoring Terumbu Karang Dr. Syafyudin Yusuf, ST., M.Si; Biologi dan Ekologi Terumbu Karang di Sulawesi Selatan oleh Ir. Hj. Basse Siang Parawansa, MP; dan Pemantauan Sebaran Terumbu Karang Sulawesi Selatan melalui Citra Satelit oleh Dr. Muhammad Banda Selamat, ST., MT.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah agar kegiatan monitoring dan evaluasi ekosistem terumbu karang menjadi agenda tetap untuk dilakukan setiap tahun.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ekosistem terumbu karang yang ada di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya meningkatkan fungsi ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Sosialisasi Rehabilitasi Kawasan yang Terdegradasi

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 27 September 2017 bertempat di Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Tujuan kegiatan antara lain Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian suatu ekosistem; Membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang bertanggung jawab; dan Memberi motivasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan yang berbasis masyarakat terhadap praktek yang sifatnya “destructive”.

- Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersosialisasinya kegiatan Rehabilitasi Kawasan yang Terdegradasi kepada masyarakat pesisir sebanyak 30 (Tiga puluh), yang selanjutnya mengambil peran dalam upaya penyelamatan terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi; dan terehabilitasinya kawasan pesisir seluas $\pm 1,2$ Ha dengan **penanaman mangrove sebanyak 12.000 batang dengan sistem berbaris.**
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 30 (Tiga puluh) peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat Pelestari Mangrove dan pemuda pesisir
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur oleh Ir. Nursih Hariyani; Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove di Kabupaten Luwu Timur oleh Ir. Anton Saranga; Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; dan Teknik Penanaman Mangrove oleh Ir. Muh. Usman, MM.
- Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholders terkait dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang sifatnya merusak.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini terciptanya ketahanan lingkungan di wilayah pesisir karena meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

9. Pelatihan Teknis Penanaman Bakau kepada Kelompok Masyarakat (Desa Tokke)

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 bertempat di Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Tujuan kegiatan antara lain Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian suatu ekosistem; Membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang bertanggung jawab; dan Memberi motivasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya

pengawasan yang berbasis masyarakat terhadap praktek yang sifatnya “destructive”

- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan Teknis Penanaman Bakau kepada Kelompok Masyarakat bagi 40 (Empat puluh) orang, yang selanjutnya mengambil peran dalam upaya penyelamatan terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ekosistem mangrovenya mengalami kerusakan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 40 (Empat puluh) peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat Pelestari Mangrove dan pemuda pesisir.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain akan Pembangunan Perikanan di Kabupaten Luwu Utara oleh Muharwan, S.Pi., M.Si; Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Luwu Utara oleh Muh. Khalis, ST., M.Si; Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; dan Teknik Penanaman Mangrove oleh Ir. Muh. Usman, MM.
- Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholders terkait dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang sifatnya merusak.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini terciptanya ketahanan lingkungan di wilayah pesisir karena meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

10. Pelatihan Teknis Penanaman Bakau kepada Kelompok Masyarakat (Desa Poreang)

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 bertempat di Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Tujuan kegiatan antara lain Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian suatu ekosistem; Membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang bertanggung jawab; dan

Memberi motivasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan yang berbasis masyarakat terhadap praktek yang sifatnya “destructive”

- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan Teknis Penanaman Bakau kepada Kelompok Masyarakat bagi 40 (Empat puluh) orang, yang selanjutnya mengambil peran dalam upaya penyelamatan terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ekosistem mangrovenya mengalami kerusakan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 40 (Empat puluh) peserta yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat Pelestari Mangrove dan pemuda pesisir.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain akan Pembangunan Perikanan di Kabupaten Luwu Utara oleh Muharwan, S.Pi., M.Si; Kondisi Mangrove Luwu Utara oleh Sofyan Zubair; Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; dan Teknik Penanaman Mangrove oleh Ir. Muh. Usman, MM.
- Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholders terkait dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang sifatnya merusak.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat kegiatan ini terciptanya ketahanan lingkungan di wilayah pesisir karena meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

11. Monitoring dan Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan

- Pertemuan dilaksanakan pada Hari Kamis, Tanggal 23 dan 24 November 2017 bertempat di Hotel Grand Palace Jl. Tentara Pelajar No. 50, Makassar.
- Tujuan kegiatan adalah melakukan pertemuan sebagai upaya koordinasi, monitoring juga evaluasi terhadap keberadaan/kondisi kawasan konservasi yang telah ada maupun telah dicadangkan, dan juga potensial di kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di

Provinsi Sulawesi Selatan adalah melakukan pertemuan sebagai upaya koordinasi, monitoring juga evaluasi terhadap keberadaan/kondisi kawasan konservasi yang telah ada maupun yang telah dicadangkan, dan juga potensi di kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Sulawesi Selatan

- Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 40 (empat puluh) peserta dalam 1 paket kegiatan Monitoring dan Evaluasi KKP yang selanjutnya melahirkan kesepahaman dan komitmen bersama untuk meningkatkan keberadaan KKP di perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, DKP Provinsi Sulawesi Selatan, Instansi terkait Tingkat Provinsi, DKP Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan LSM.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Mendukung Kawasan Konservasi oleh Dr. Ir. M. Natsir Mallawi, M.Si; Metodologi Monitoring Kawasan Konservasi oleh Dr. Syafyudin Yusuf, ST., M.Si; Konsep Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan oleh Prof. Dr. Ir. Chair Ran, M.Si.; Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan oleh Andi Muh. Ibrahim, M.Sc.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah agar kegiatan monitoring dan evaluasi ekosistem terumbu karang menjadi agenda tetap untuk dilakukan setiap tahun.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ekosistem terumbu karang yang ada di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya meningkatkan fungsi ekosistem yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

12. Identifikasi dan Inventarisasi Biota Terancam Punah

- Pertemuan dilaksanakan pada Hari Jum'at, Tanggal 24 November 2017 bertempat di Hotel Grand Palace Jl. Tentara Pelajar No. 50, Makassar

- Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan biota yang terancam punah di wilayah Perairan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya sehingga akan ada persamaan persepsi dalam meningkatkan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian jenis ikan yang terancam punah, endemik dan langka.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 25 (dua puluh lima) peserta dalam 1 paket kegiatan pertemuan Identifikasi Biota Terancam Punah yang selanjutnya melahirkan kesepahaman dan komitmen bersama untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian jenis ikan terancam punah, endemik dan langka di perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta yang terdiri dari BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, DKP Provinsi Sulawesi Selatan, Instansi Terkait Tingkat Provinsi, DKP Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan LSM.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Singkronisasi Data Base Biota Laut yang Dilindungi di Perairan Provinsi Sulawesi Selatan (Informasi Data Jenis Ikan Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar) oleh Andi Ramlan, S.Pi; Potensi Ikan yang Dilindungi (Hiu, Pari Manta dan Mamalia Laut) di Perairan Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Ir. Aidah Ambo Ala, M.Sc; Peredaran dan Kuota Perdagangan Biota Laut CITES di Perairan Sulawesi Selatan (Identifikasi dan Inventarisasi Biota Terancam Punah di Perairan Sulawesi Selatan) oleh Hariadi Siswanto, S.Si., M.Si (BKSDA Provinsi Sulawesi Selatan).
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu untuk melakukan pantauan terhadap hasil-hasil tangkapan nelayan di pasar-pasar untuk mengidentifikasi jenis-jenis ikan yang dilindungi, selain itu sosialisasi terus diupayakan kepada masyarakat khususnya nelayan terkait jenis ikan yang terancam punah dan dilindungi.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.

- Manfaat dari kegiatan ini adalah akan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pelestarian terhadap jenis ikan yang terancam punah, endemic dan langka.

Kegiatan APBN

1. Review Status dan Fasilitasi Penetapan Kawasan Konservasi

- Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Juli 2017 bertempat di Hotel Grand Imawan, Jl. Pengayoman No. 36, Makassar.
- Tujuan kegiatan adalah untuk melakukan pembaharuan terhadap informasi terakhir keberadaan KKPD/KKLD yang telah ada ataupun yang telah dicadangkan.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 25 (Dua Puluh Lima) peserta dalam 1 paket pertemuan Review Status dan Fasilitasi Penetapan Kawasan Konservasi yang akan mendukung terciptanya KKP di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 25 (Dua Puluh Lima) peserta yang terdiri dari UPTD KKP, Instansi Terkait Tingkat Provinsi, UPTD DKP Provinsi Sulsel, DKP Kabupaten/Kota, Instansi terkait, Kelompok Konservasi Masyarakat, Perguruan Tinggi dan LSM.
- Materi dan Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan ini antara lain Kebijakan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Sulawesi Selatan Oleh Dr. Ir. Muh. Natsir Mallawi, M.Si; Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan, Oleh Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, MM; Review Status dan Fasilitasi Penetapan Kawasan Konservasi oleh Dr. Ir. H.A. Tamzil, M.Si.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah Untuk segera membuat matriks kondisi terkini dari potensi konservasi yang ada, adalah melengkapi dokumen untuk diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan KKP/KKP3K di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah 100%.

- Manfaat dari kegiatan ini adalah berkembangnya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara bijaksana dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

1.1. Permasalahan

Pada pelaksanaan program kerja di tahun 2017, berbagai permasalahan yang didapatkan antara lain:

- Masih Belum maksimalnya target peserta yang diharapkan kehadirannya di beberapa pertemuan
- Keterlambatan beberapa proses administrasi kegiatan yang di pihak ketigakan
- Adanya perubahan anggaran pada akhir semester pertama kegiatan

1.2. Upaya Pemecahan

Dalam memaksimalkan pencapaian target program kerja yang telah di rencanakan, beberapa upaya pemecahan permasalahan yang dilaksanakan antara lain:

- Memaksimalkan kehadiran peserta pertemuan dengan mendatangkan stakeholder yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan
- Memantau pelaksanaan untuk kegiatan yang di pihak ketigakan untuk memkasimalkan target yang diinginkan

Memaksimalkan output yang diinginkan dalam perencanaan kegiatan tambahan yang ada setelah perubahan anggaran.

b. Kegiatan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Wilayah pesisir dan laut memiliki arti yang strategis dan penting bagi masa depan Indonesia mengingat sebagai negara Kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, wilayah ini mendominasi total wilayah Indonesia. Panjang pantai Indonesia adalah 81.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada atau yang pertama di dunia dalam konteks panjang pantai yang produktif (catatan: panjang pantai Kanada didominasi oleh panjang pantai wilayah Greenland yang berupa lahan kurang produktif karena berupa gurun).

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di indonesia yang secara geografis merupakan daerah berbasis kelautan yang sangat besar. Provinsi sulawesi

selatan memiliki garis pantai sepanjang 1.937 Km dan luas perairan laut 266.877 Km². Itu dikarenakan Dari 24 kabupaten yang terdapat di provinsi sulawesi selatan, 2/3 diantaranya adalah kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Selain itu provinsi sulawesi selatan memiliki 263 pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa kabupaten diantaranya Makassar, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bone, Dan Kabupaten Pangkep (Pangkajene Dan Kepulauan).

Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan pendayagunaan pesisir dan laut, meliputi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, pengendalian, dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan laut mempunyai fungsi:

a). pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pendayagunaan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil.; b). Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil.; c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan d). pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Kegiatan APBD

1. Kegiatan Inventarisasi Data Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan inventarisasi data pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu upaya untuk menyediakan data dan informasi potensi sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil sekaligus memberikan informasi awal mengenai arah pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang rasional dan berkelanjutan, sebagaimana termaktub dalam UU 27 Tahun 2007 bagian ketujuh pasal 15 mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan data dan informasi. Pentingnya penyediaan data dan informasi ini termaktub juga dalam UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, diamanatkan dalam PP 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, Perpres Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional, Permen Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Permen No 16 tahun 2008 pasal 22 dan 23 yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Permen No 20 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan disekitarnya. Tersedianya data dan peta potensi pulau-pulau kecil yang akurat akan memberikan

kemudahan bagi pemangku kepentingan dan stakeholder dalam pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan pengembangan pulau-pulau kecil tersebut.

Maksud yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah menyusun dan menginventarisasi data potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan Inventarisasi Data Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi sumberdaya yang terdapat di pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan
2. Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang aktual dan sistematis yang dapat digunakan sebagai acuan menyusun kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan.

Keluaran (output) dari Inventarisasi Data Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peta citra satelit Kepulauan Tanakeke, album peta dan laporan hasil survey dan tersosialisasinya data potensi sumberdaya Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Data Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tersedianya data potensi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar.

2. Kegiatan Pembinaan Usaha Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Terdiri dari 2 sub kegiatan /pertemuan :

A. Pertemuan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

- Tujuan dari pertemuan Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah mengatasi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, teratasinya permasalahan konflik pemanfaatan ruang melalui partisipasi masyarakat dunia usaha
- Sasaran dari pertemuan pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Masyarakat Pesisir dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Sulawesi Selatan

- Pertemuan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 Oktober 2017 di Hotel Continent Jl. Adiyaksa Makassar
- Kegiatan Pertemuan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu diikuti oleh 60 (Enam puluh) orang peserta yang terdiri dari Instansi terkait dan masyarakat pesisir 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu sebanyak orang.
- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pertemuan tersebut adalah terkelolanya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan

B. Pertemuan Pembinaan Usaha Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Kegiatan Pembinaan Usaha Masyarakat Pesisir Penduduk Sulawesi Selatan banyak juga yang bermukim di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana tingkat kehidupan pada umumnya masih miskin. Kesejahteraan mereka memerlukan program terobosan yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen, teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan. Citra kemiskinan nelayan sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia wilayah laut yang sangat luas.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya alam kawasan pesisir yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang tangguh dan sejahterah 2. Memberikan motivasi kepada masyarakat pesisir untuk membangun jiwa kewirausahaan menuju pasar komersil ; 3. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya membentuk suatu wadah/kelembagaan dalam berusaha; 4. Memberikan informasi cara mengakses permodalan ke perbankan untuk pengembangan usahanya.

- Kegiatan Pertemuan Pembinaan Usaha Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diikuti oleh 50 (Lima puluh) peserta yang terdiri dari Instansi terkait dan kelompok usaha masyarakat pada 6 (enam) Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pertemuan Pembinaan Usaha Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai upaya untuk meningkatkan usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Rabu – Kamis, 25 – 26 Oktober 2017 bertempat di Hotel Hotel Kenari Tower, Jalan Yosef Latumahina No.34 Makassar.
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan Usaha Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka untuk meningkatkan usaha masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 50 (Lima puluh) orang.
- Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan kelompok usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam pesisir dalam meningkatkan perekonomiannya dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan yang menghasilkan produk yang komersil serta terhimpun dalam suatu wadah/kelompok yang dapat mempermudah untuk mengakses pembiayaan ke perbankan untuk mengembangkan usahanya yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Kegiatan Sosialisasi Pesisir Bersih, Sehat dan Lestari

- Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : 1). Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak limbah terhadap kualitas biota perairan ; 2). Meningkatkan pemahaman, kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam pengendalian pencemaran di wilayah pesisir ; 3). Memberikan motivasi kepada masyarakat tentang penanganan limbah secara mandiri; 4). Memberikan informasi tentang kesehatan Lingkungan Laut yang berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.
- Kegiatan Pertemuan Pembinaan Usaha Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diikuti oleh 50 (Lima puluh) peserta yang terdiri dari Instansi terkait

dan kelompok usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada 6 (enam) Kabupaten/Kota.

- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pesisir Bersih, Sehat dan Lestari dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menanggulangi pencemaran dan menjaga kelestarian wilayah pesisir sebanyak 50 (Lima puluh) orang.
- Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam mengurangi terjadinya pencemaran dan menjaga kelestarian wilayah pesisir sehingga biota perairan yang ada tetap terjaga kualitasnya yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Permasalahan

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah : 1). Belum adanya data dan informasi terkait potensi yang dimiliki oleh sebagian besar pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengembangannya ke depan. Sektor unggulan yang harus dikembangkan berdasarkan sumberdaya yang dimiliki, interaksi antar pulau serta interaksi gugusan pulau dengan pulau induknya, interaksi masyarakat setempat, kelembagaan lokal, perlu digali dan diteliti sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. 2). Modal juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi kelompok usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengembangkan usahanya 3). Pasar adalah merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh kelompok usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terutama kelompok hasil perikanan 9 seperti olahan abon , bakso ikan dan sebagainya). Ada beberapa kelompok/UMKM yang memproduksi kalau ada pesanan, ada yang menitipkan di warung/toko dimana pembayaran setelah barang laku terjual sehingga memproduksi kadang-kadang sekali dalam dua minggu. Pemasaran pada

umumnya masih lokal. 4). Kesadaran dari masyarakat memelihara pesisir bersih dari sampah rumah tangga masih sangat minim. Sehingga menjadi faktor penghambat pengembangan wilayah pesisir.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan : 1). Melakukan kegiatan inventarisasi data potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, potensi ekonomi) telah dilaksanakan di Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar. Walaupun masih terbatas wilayahnya 2). Melakukan pembinaan melalui kegiatan pertemuan pembinaan usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menghadirkan narasumber dari perbankan dan akademisi dengan harapan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. 3). Melakukan kegiatan sosialisasi Pesisir, Bersih dan Lestari kepada masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, untuk senantiasa menjaga kebersihan wilayah pesisir dan laut, sehingga sumberdaya wilayah pesisir dan laut tetap terjaga kelestariannya.

C. Seksi Tata Ruang Laut dan Jasa Kelautan

Penanganan terhadap berbagai isu dan permasalahan dalam pengelolaan wilayah laut merupakan aspek penting dalam kaitan dengan pengaturan terhadap batas- batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan ruang pada wilayah laut yang sampai saat ini belum secara keseluruhan memiliki kepastian hukum. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya laut dan pesisir yang selama ini dijalankan masih bersifat sektoral dan cenderung berorientasi pada daratan sehingga berdampak pada aspek penataan ruang itu sendiri. Padahal karakteristik dan alamiah ekosistem pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain mensyaratkan bahwa pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan menyeluruh.

Faktor pertumbuhan penduduk dan eksploitasi terhadap sumber daya alam secara terus menerus menyebabkan wilayah laut dan pesisir memerlukan pengelolaan, perlindungan terhadap sumber daya alamnya dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya untuk keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalkan kepentingan

antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan jasa-jasa kelautan, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan.

Kegiatan APBD

1. Sosialisasi / FGD Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) I

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 di Hotel Grand Imawan Jl. Pengayoman Makassar.
- Tujuan kegiatan memperbaiki substansi dokumen draf ranperda RZWP3K sehingga dapat menjadi suatu keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah yang dapat menciptakan keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 30 (tiga puluh) peserta dalam 1 paket kegiatan Sosialisasi / FGD Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam upaya mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir secara mandiri dan berkelanjutan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda provinsi dan kab/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Prov. SulSel, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- Rekomendasi dari agar lembaga dan instansi terkait dapat memberikan informasi terkini dalam upaya penyempurnaan Dokumen RZWP-3-K Sulsel.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan

sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

2. Sosialisasi / FGD Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) II

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 di Hotel Grand Imawan Jl. Pengayoman Makassar.
- Tujuan kegiatan memperbaiki substansi dokumen draf ranperda RZWP3K sehingga dapat menjadi suatu keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh masing-masing sektor dan daerah yang dapat menciptakan keharmonisan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 30 (tiga puluh) peserta dalam 1 paket kegiatan Sosialisasi / FGD Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam upaya mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir secara mandiri dan berkelanjutan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda provinsi dan kab/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Prov. SulSel, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Rekomendasi yang diberikan Tim Teknis dan Penyusun akan melakukan perbaikan sesuai masukan dari peserta pertemuan dan selanjutnya Tim Teknis dan Penyusun akan melakukan koordinasi dalam persiapan untuk tanggapan dan saran RZWP-3-K Sulsel di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan

sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

3. Sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Sejahtera (KLHS)

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 – 12 Agustus 2017 di Hotel Grand Town Jl. Pengayoman Komp Pasar Segar Makassar.
- Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan penyusunan dan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memperkuat dan mempertegas bahwa RZWP3K yang dibuat benar-telah memenuhi konsep pembangunan berkelanjutan.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 50 orang yang meningkat pemahamannya terkait KLHS dari suatu perencanaan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 50 (lima puluh peserta) terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda provinsi dan kab/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DPLHD) Prov. SulSel, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Prov. SulSel, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi.
- Rekomendasi yang diberikan agar seluruh stakeholders terkait KLHS RZWP-3-K Sulsel untuk mendukung percepatan penyusunan Dokumen KLHS RZWP-3-K Sulsel sebagai kelengkapan Dokumen RZWP-3-K Sulsel.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

4. FGD Kajian Lingkungan Hidup Sejahtera (KLHS)

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 bertempat di Hotel Grand Town, Jalan Pengayoman, Kompleks Pasar Segar Blok E No. 9B, Makassar.
- Tujuan kegiatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai stakeholders dalam upaya penyusunan dokumen KLHS dalam hal ini untuk melengkapi dokumen RZWP-3-K Provinsi Sulsel.
- Keluaran dari kegiatan ini ikut sertanya 30 (tiga puluh) peserta dalam 1 paket pertemuan FGD Perumusan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat membantu dalam upaya penyelesaian RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari instansi terkait di tingkat provinsi, DKP Kabupaten/Kota, UPTD Pusat, Perguruan Tinggi dan LSM.
- Rekomendasi yang diberikan agar stakeholders terkait dapat memberikan masukan/isian quisioner terkait dengan K/R/P pembangunan berkelanjutan sebagai bahan Dokumen KLHS RZWP-3-K Sulsel.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

5. Fasilitasi Kemitraan Usaha Garam Industri

- Pertemuan dilaksanakan pada Hari Senin – Selasa, Tanggal 9 – 10 Oktober 2017 bertempat di Mattampa Inn - Bungoro, Kabupaten Pangkep.
- Tujuan kegiatan untuk mengembangkan industri garam, teknologi produksi garam bahan baku, dan pemasarannya berdasarkan asas kemanfaatan yang berkeadilan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.
- Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya pertemuan Fasilitasi Kemitraan Usaha Garam yang diikuti oleh 50 (Lima Puluh) Peserta yang memiliki komitmen dalam

upaya peningkatan produksi garam dan kerjasama dalam menciptakan produksi garam industri khususnya di wilayah Kabupaten Pangkep.

- Kegiatan Pertemuan diikuti diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, Petambak garam, Pengurus Koperasi dan Tenaga Pendamping Masyarakat.
- Rekomendasi yang diberikan perlunya meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan usaha garam dari garam konsumsi menjadi garam industri, selain itu dukungan dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang usaha garam dapat ditingkatkan.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam industri maupun garam konsumsi yang terintegrasi.

6. Workshop Pengembangan Usaha Garam

- Pertemuan dilaksanakan pada Hari Senin – Selasa, Tanggal 16 – 17 Oktober 2017 bertempat di Hotel Grand Imawan Jl. Pengayoman No. 36, Kota Makassar.
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para peserta dalam upaya peningkatan produksi garam yang memiliki kualitas terbaik dengan peluang pasar yang luas dengan nilai jual yang tinggi, serta mendorong terciptanya kerjasama yang baik antar petambak garam sehingga memudahkan dalam mendapatkan akses terkait produksi garam mereka.
- Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya 1 paket pertemuan Workshop Pengembangan Usaha Garam yang diikuti oleh 50 (Lima Puluh) Peserta yang memiliki komitmen dalam upaya peningkatan produksi garam baik itu garam konsumsi maupun garam industri di Sulawesi Selatan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Kabupaten Pangkep, Takalar, Jeneponto dan Selayar) Petambak dan Kelompok Petambak garam dari Kabupaten Pangkep, Takalar, Jeneponto dan Selayar.

- Rekomendasi yang diberikan yaitu perlu dukungan perguruan tinggi dan pengusaha dalam menjembatani pengembangan usaha petambak garam untuk menghasilkan produksi yang memiliki nilai jual tinggi.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam industri maupun garam konsumsi yang terintegrasi.

7. Pertemuan Saran dan Tanggapan RZWP-3-K

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 di Ruang Rapat Cakalang Gedung Mina Bahari III Lt. 2 Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta.
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan saran dan tanggapan atas Dokumen RZWP-3-K Prov. Sulawesi Selatan dari Kementerian lain untuk menyempurnakan Dokumen yang telah ada.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pertemuan Pemberian Tanggapan dan Saran Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 75 orang.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) orang yang berasal dari Unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (SKPD Terkait) dan Pemerintah Pusat (Kementerian Terkait).
- Rekomendasi yang diberikan untuk segera melakukan perbaikan terhadap tanggapan dan saran yang telah diberikan pada pertemuan Tanggapan dan Saran RZWP-3-K.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

8. Sinkronisasi dan Integrasi Penataan Ruang Laut, P3K

- Tujuan kegiatan untuk menyiapkan data arus dan gelombang laut serta suhu dan salinitas air laut di perairan Provinsi Sulawesi Selatan untuk keperluan

penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan bantuan model numerik oseanografi. Data yang dihasilkan selanjutnya akan digambarkan dalam bentuk peta skala 1:50.000 untuk keperluan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan.

- Keluaran dari kegiatan ini Laporan Sinkronisasi dan Integrasi Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peta tematik bulanan untuk 4 (empat) parameter oseanografi, yaitu arus laut (kecepatan dan arah), gelombang laut (tinggi gelombang signifikan dan arah dominan), suhu permukaan air laut, dan salinitas permukaan air laut. Peta disajikan dengan skala 1:50.000 dalam format digital.
- Rekomendasi yang diberikan bahwa mengingat sifat laut yang dinamis maka diharapkan pemuktahiran data oseanografi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat dihasilkan data yang lengkap dan berkualitas untuk menunjang percepatan pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya informasi data tematik yang mendukung Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mengartahkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

9. Sosialisasi Penataan Tata Ruang Laut

- Pertemuan dilaksanakan pada Hari Kamis - Sabtu, Tanggal 16 - 18 November 2017, bertempat di Hotel Kenari Tower, Jalan Josep Latumahina No. 30, Makassar.
- Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman stakeholders terkait tentang penataan ruang laut (zonasi) dan memberikan informasi tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam proses pembuatan Perdanya.

- Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 100 (seratus) peserta dalam 1 paket kegiatan Sosialisasi Penataan Tata Ruang Laut yang meningkat pemahamannya akan penting adanya Perda RZWP-3-K.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 100 (tseratus) peserta yang terdiri dari instansi terkait di tingkat Provinsi, DKP Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi.
- Rekomendasi yang diberikan agar stakeholders yang hadir dapat memberikan informasi dilingkungan kerjanya
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

10. Konsultasi Publik KLHS

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa - Kamis tanggal 5 – 7 Desember 2017 bertempat di Hotel Grand Palace, Jalan Tentara Pelajar No. 50, Makassar.
- Tujuan kegiatan untuk memberikan informasi ke berbagai stakeholders dalam upaya mendapatkan perbaikan terhadap penyusunan dokumen KLHS dalam hal ini untuk melengkapi dokumen RZWP-3-K Provinsi Sulsel.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah ikut sertanya 60 (enam puluh) peserta dalam 1 paket pertemuan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP-3-K dapat membantu dalam upaya penyelesaian RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 60 (enam puluh) peserta yang terdiri dari instansi terkait di tingkat provinsi, DKP Kabupaten/Kota, UPTD Pusat, Perguruan Tinggi dan LSM.
- Rekomendasi yang diberikan agar Tim KLHS dapat menindaklanjuti masukan dari peserta sebagai bahan perbaikan terhadap dokumen KLHS yang telah dibuat.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan

sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

11. Penyempurnaan Peta Tematik dan Peta Alokasi Ruang RZWP-3-K Sulsel Berbasis Geografi Informasi System (GIS)

- Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyempurnaan Peta Tematik dan Peta Alokasi Ruang yang sesuai dengan perundang-undangan sebagai bagian dari Dokumen RZWP-3-K.
- Keluaran dari kegiatan ini adanya Peta Dasar, Data / Informasi, dan Analisis Overlay Peta dan Permodelan
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

Kegiatan APBN

1. Bimbingan Teknis Industrialisasi Garam Rakyat

- Pertemuan Bimbingan Teknis Industrialisasi Garam Rakyat dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 18 April 2017 bertempat di Hotel Grand Palace, Jl. Tentara Pelajar No. 50 Makassar.
- Tujuan kegiatan adalah Meningkatkan mutu dan kualitas garam rakyat, produktivitas lahan, mendorong pembentukan kelembagaan usaha berbadan hukum serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petambak garam.
- Keluaran ikut sertanya 23 (Dua PuluhTiga) orang peserta dalam 1 paket kegiatan Bimbingan Teknis Industrialisasi Garam Rakyat.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh 30 (Tiga puluh) peserta yang terdiri dari Petambak Garam, pendamping Dinas kelautan dan Perikanan 5 Kabupaten yaitu Kab. Jeneponto, Selayar, Takalar, Pangkep dan Kota Makassar, serta stake holders terkait
- Rekomendasi yang diberikan agar dukungan pemerintah terhadap petambak garam baik itu sarana dan prasarana serta pendampingan dapat dimaksimalkan, selanjutnya perlu kerjasama yang baik setiap stakeholders terkait dengan

produksi dan pengembangan usaha garam yaitu pemerintah, petambak garam dan swasta.

- Manfaat kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam yang memiliki kemampuan dalam memproduksi garam industri maupun garam konsumsi yang terintegrasi.

2. Pertemuan Saran dan Tanggapan RZWP-3-K

- Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 di Ruang Rapat Cakalang Gedung Mina Bahari III Lt. 2 Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta.
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan saran dan tanggapan atas Dokumen RZWP-3-K Prov. Sulawesi Selatan dari Kementerian lain untuk menyempurnakan Dokumen yang telah ada.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pertemuan Pemberian Tanggapan dan Saran Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 75 orang.
- Kegiatan Pertemuan diikuti oleh sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) orang yang berasal dari Unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (SKPD Terkait) dan Pemerintah Pusat (Kementerian Terkait).
- Rekomendasi yang diberikan untuk segera melakukan perbaikan terhadap tanggapan dan saran yang telah diberikan pada pertemuan Tanggapan dan Saran RZWP-3-K.
- Manfaat kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K Sulsel yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya P3K.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Permasalahan

Pada pelaksanaan program kerja Seksi Tata Ruang Laut dan Jasa Kelautan di Tahun 2017, berbagai permasalahan yang didapatkan antara lain:

- Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan standar pedoman pelaksanaan (Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS)
- Masih Belum maksimalnya target peserta yang diharapkan kehadirannya di beberapa pertemuan, utamanya kegiatan di Triwulan ke IV karena keterbatasan anggaran di Kabupaten/Kota
- Adanya keterlambatan perubahan anggaran yang keluar pada Triwulan ke IV.

Upaya Pemecahan

Dalam memaksimalkan pencapaian target program kerja yang telah di rencanakan, beberapa upaya pemecahan permasalahan yang dilaksanakan antara lain:

- Memaksimalkan waktu pelaksanaan kegiatan yang terencana untuk melaksanakan beberapa point kegiatan sesuai standar pedoman yang ditetapkan.
- Memaksimalkan kehadiran peserta pertemuan dengan mendatangkan stakeholder yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- Memaksimalkan output yang diinginkan dalam perencanaan kegiatan tambahan yang ada setelah perubahan anggaran.

4.4.4. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

a. Kegiatan Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Secara administrasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kawasan maritim di bagian timur Indonesia yang kaya dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Wilayah pengelolaan perairan laut dan pulau - pulau kecil Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI-713) dengan garis pantai sepanjang 1.937 Km. Wilayah Pengelolaan Perikanan 713 mencakup empat wilayah zona potensial penangkapan ikan yaitu Teluk Bone, Selat Makassar, Laut Flores dan Laut Bali. Zona perairan tersebut dikenal sebagai perairan yang subur dan telah menjadi daerah penangkapan ikan bagi masyarakat nelayan secara nasional. Selain memiliki potensi perikanan tangkap yang prospektif juga memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan usaha budidaya air payau, budidaya laut, budidaya air tawar dan kegiatan ekowisata pada beberapa kabupaten/kota.

Seiring dengan peluang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang didominasi bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan, yang memiliki prospek pengembangan menjanjikan juga terdapat sejumlah potensi ancaman yang sangat rentan terhadap kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang perlu diwaspadai. Salah satu diantara beberapa ancaman berbahaya tersebut adalah masih maraknya peraktek *illegal fishing* atau lebih spesifik dikenal dengan nama *destructive fishing*.

Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan-DKP Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memberikan solusi melalui tugas pokok dan fungsi teknis yang diemban selama tahun 2017. Seksi tersebut bertanggung jawab melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan lebih khusus lagi melaksanakan kegiatan Pengawasan sumberdaya perikanan, PPNS dan Masyarakat Pengawas yang bebabankan oleh organisasi (DKP Provinsi Sulsel). Pelaksanaan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung peningkatan peran dan kemampuan operasional aparat pengawasan di bidang perikanan agar dapat mewujudkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

A. Kegiatan Sosialisasi SISWASMAS

1. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Jeneponto

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 5 April 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Sekretariat Pokmaswas Bahari Kel. Pantai Bahari Kab. Jeneponto
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto dengan jumlah peserta 40 orang.
 2. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam

- mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
3. Tahun 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto memfokuskan pada pemberdayaan kelompok nelayan sehingga target untuk memproduksi hasil perikanan, terutama dari perairan umum yang ada di Jeneponto. Untuk perairan umum telah dilakukan restocking ikan yang diharapkan dapat menambah populasi dan jenis ikan, sedangkan nelayan tangkap difasilitasi bantuan gill net yang mana diharapkan dengan bantuan tersebut dapat menghilangkan aktivitas nelayan melakukan pemboman dan pembiusan. Selain itu, nelayan difasilitasi mendapatkan asuransi jiwa yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan pada saat mereka melakukan aktivitas usaha perikanannya.
 4. Kabupaten Jeneponto memiliki 11 Pokmaswas aktif yang sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan SDKP di wilayahnya masing-masing, terutama pengawasan terhadap aktivitas pengeboman dan pembiusan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut usaha budidaya rumput laut dan tambak garam yang merupakan komoditi andalan Kabupaten Jeneponto.
 5. Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan, yang mana keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, kelompok nelayan, serta masyarakat maritim.
 6. Pokmaswas dalam melakukan pengawasan SDKP diharapkan bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi, serta instansi penegak hukum lainnya yang ada di wilayahnya.
 7. Pengurus Pokmaswas berharap pelaku destruktif fishing dikenakan sanksi hukuman maksimal karena dampak yang ditimbulkan sangat besar. Diharapkan Pokmaswas dapat difasilitasi bantuan perlengkapan

Pokmaswas guna menunjang pelaksanaan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

2. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Bulukumba

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 6 April 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : PPI Bonto Bahari Kel. Tanah Lemo Kab. Bulukumba
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba dengan jumlah peserta 40 orang.
 2. Tahun 2017, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba telah mengukuhkan 19 Pokmaswas aktif yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan pesisir, yaitu Bonto Tiro, Ujung Loe, Kajang, Bonto Bahari, Gantarang, Herlang dan Ujung Bulu.
 3. Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan, yang mana keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, kelompok nelayan, serta masyarakat maritim.
 4. Pokmaswas dalam melakukan pengawasan SDKP diharapkan bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Jeneponto, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi, serta instansi penegak hukum lainnya yang ada di wilayahnya.
 5. Di wilayah perairan Bulukumba marak terjadi penggunaan cantrang yang berakibat terjadinya konflik sosial sehingga memerlukan penanganan serius. Diharapkan Pokmaswas dapat difasilitasi bantuan perlengkapan Pokmaswas guna menunjang pelaksanaan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

3. Sosialisasi Siswasmas di Kota Palopo

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 Juli 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Aula Dinas Perikanan Kota Palopo

c. Hasil yang dicapai :

1. Peserta Sosialisasi SISWASMAS terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kota Palopo dengan jumlah peserta 40 orang.
2. Kota Palopo memiliki 6 (enam) Pokmaswas yang aktif, yaitu Salo Tompotika, Sipatuo, Retona, Salo Tanga, Salo Karo dan Baja Pole. Kelompok ini sangat diharapkan membantu menjalankan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayahnya masing-masing seperti pengawasan terhadap aktivitas pengeboman dan pembiusan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut terhadap usaha budidaya rumput laut yang menjadi komoditas unggulan di Kota Palopo.
3. Dalam pertemuan ini, Sekretaris Dinas Kota Palopo mengharapkan terbentuknya sinergitas antara Pokmaswas dengan pemerintah setempat, serta instansi terkait lainnya, seperti Laut dan Perguruan Tinggi di Kota Palopo karena peran serta masyarakat dalam pengawasan sangat berpengaruh bagi kelestarian sumberdaya alam, khususnya habitat ikan dan kelangsungan ekosistem ikan yang ada di perairan. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan dan ikan akan sangat berpengaruh, dan akan sangat berpengaruh, dan masyarakat pun menjadi lebih memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya.
4. Hamrudin (Pokmaswas Baja Pole) meminta kepada Dinas Perikanan Kota Palopo untuk melibatkan Perguruan Tinggi Andi Jemma untuk bersama-sama membantu pengawasan SDKP.
5. Awaluddin (Pokmaswas Salo Karo) menyampaikan bahwa mangrove di Kecamatan Wara Selatan tidak mengalami pertumbuhan, malah didapatkan mangrove dalam kondisi rusak, sehingga diharapkan adanya dukungan dari instansi terkait untuk dapat mengatasi kondisi tersebut.

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

4. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Luwu Utara

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 Juli 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Aula Kantor BAPPEDA Kab. Luwu Utara

c. Hasil yang dicapai :

1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah peserta 40 orang.
2. Kabupaten Luwu Utara memiliki 13 Pokmaswas yang aktif berperan membantu menjalankan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, yaitu Pokmaswas Bajak Laut, Mamminasae, Bone Pute, Pao Raja, Pulau Indah, Mantalinga Indah, Pombakka, Affair, Bunga Karang, Mappatunru, Sipatuo, Harapan Baru, Teluk Bone dan Kuda Laut.
3. Dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Kabupaten Luwu Utara menyampaikan tentang pentingnya Sosialisasi SISWASMAS dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan, hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam membangun
4. Tahun 2017, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba telah mengukuhkan 19 Pokmaswas aktif yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan pesisir, yaitu Bonto Tiro, Ujung Loe, Kajang, Bonto Bahari, Gantarang, Herlang dan Ujung Bulu.

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

5. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Wajo

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 September 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kantor Lurah Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo

c. Hasil yang dicapai :

1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Wajo dengan jumlah peserta 40 orang.
2. Kabupaten Wajo memiliki Pokmaswas sebanyak 13 kelompok, terdiri dari 7 (tujuh) Pokmaswas penangkapan ikan di laut dan 6 (enam) Pokmaswas penangkapan ikan di perairan umum/perairan darat. Secara keseluruhan jumlah anggota Pokmaswas mencapai 240 orang.
3. Ketua Pokmaswas Siwa Bahari, Bapak Gunawan menyampaikan bahwa dalam hal pengawasan SDKP dibutuhkan komitmen bersama dari level atas/pengambil kebijakan sampai level bawah/pemangku kepentingan, pada kesempatan ini disarankan Dinas Perikanan Kabupaten Wajo untuk sekali-kali melakukan pengawasan SDKP dan pembinaan Pokmaswas aktif di wilayahnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa anggota Pokmaswas yang intens melakukan laporan pelanggaran mendapatkan kebencian dari masyarakat dan keluarga pelaku pelanggaran.

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya

destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

6. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Enrekang

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 26 September 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Ruang Pertemuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pinrang
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Enrekang dengan jumlah peserta 40 orang.
 2. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
 3. Kabupaten Enrekang memiliki 4 (empat) Pokmaswas aktif yang berperan membantu menjalankan tugas pengawasan sumberdaya perikanan, yaitu Pokmaswas Salu Sa'dang, Pokmaswas Samata, Pokmaswas Anggeraja dan Pokmaswas Baraka.
 4. Dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang mengutarakan tentang pentingnya Sosialisasi Siswasmas dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga sumberdaya perikanan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam membangun perairan dan menjaga potensi perikanan Kabupaten Enrekang. Selain itu, dibutuhkan sinergitas semua stakeholders yang ada karena potensi perikanan air tawar yang berlimpah.
 5. Strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang untuk menggerakkan perekonomian melalui sektor yang akan dicanangkan di tahun 2018, yaitu :

- Meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Kabupaten Enrekang yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli untuk menunjang kesejahteraan hidup.
 - Menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai sumber bibit perikanan air tawar di wilayah Ajatappareng. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan cara menyediakan bibit perikanan air tawar bernilai unggul yaitu **“Grand Parent Stock (GPS)”** yang merupakan hasil persilangan induk jenis unggul.
 - Menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kamaruddin (Pokmaswas Baraka) mengharapkan bahwa perlunya pembuatan kolam ikan di pinggiran sungai agar aliran sungai tidak hanya sekedar mengalir saja tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Pokmaswas Baraka berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi usaha budidaya ikan sebagai mata pencaharian alternatif dengan memberikan bibit ikan.
7. Sudirman (Nelayan Koali) menyatakan bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan akar tuba yang marak dilakukan oleh beberapa nelayan di perairan umum mengakibatkan semakin berkurangnya jumlah ikan diperoleh nelayan. dikemukakan juga bahwa salah satu upaya untuk mengurangi pelanggaran di wilayah perairan Enrekang adalah dengan memperbanyak penebaran benih di kawasan perairan umum sehingga stok ikan melimpah.
8. Apabila Pokmaswas menemukan pelanggaran di lapangan, maka Pokmaswas dapat melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu PPNS, pengawas perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan aparat kepolisian setempat.

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

7. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Luwu

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 3 Oktober 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Desa Tembo'e Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu

c. Hasil yang dicapai :

1. Peserta Sosialisasi SISWASMAS terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kab. Luwu dengan jumlah peserta 40 orang.
3. Kabupaten Luwu memiliki 8 (delapan) Pokmaswas aktif, yaitu Pokmaswas Pasir Putih, Pokmaswas Kou, Pokmaswas Peduli Laut, Pokmaswas Antasari, Pokmaswas Bunga Karang, Pokmaswas Teluk Mekar, Pokmaswas Bahari dan Pokmaswas Bilonga.
4. Dalam pertemuan ini, Ir. Baharudin Gau (Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Luwu) menyampaikan tentang pentingnya sosialisasi Siswasmas melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga sumberdaya perikanan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam membangun perairan dan menjaga potensi perikanan Kabupaten Luwu, diharapkan juga ada sinergitas semua stakeholders. Pokmaswas merupakan ujung tombak pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mana kelompok masyarakat ini yang paling dekat dengan daerah pesisir dan laut sehingga memiliki akses terhadap segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi di perairan masing-masing.
5. Asnawi (Masyarakat Kelurahan Bonepute) mengemukakan bahwa keberhasilan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan

tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah kelompok, melainkan dari besarnya rasa tanggung jawab dari anggota kelompok ini dalam melakukan pengawasan. Di Kelurahan Bonepute belum terbentuk Pokmaswas akan tetapi kegiatan pengawasan tetap terselenggara oleh masyarakat secara perseorangan yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut.

6. Abdul Rahman (Pokmaswas Bilongka) menyampaikan bahwa tergerak untuk bergabung dalam Pokmaswas karena merasakan langsung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan illegal fishing terhadap ketersediaan sumberdaya kelautan dan perikanan, khususnya yang terdapat di daerahnya.

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

8. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Sinjai

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 6 Oktober 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Aula Desa Tongke Tongke Kab. Sinjai
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah peserta 40 orang.
 2. Kabupaten Sinjai merupakan wilayah perairan yang strategis karena berada di bibir Teluk Bone dan adanya kawasan Pulau Sembilan yang dilalui arus dari Laut Flores menuju Teluk Bone, demikian pula sebaliknya. Daerah ini merupakan kawasan yang potensial dijadikan sebagai area penangkapan ikan pelagis maupun demersal ditambah lagi sarana PPI di Lappa. Oleh

karena itu, dalam upaya pembangunan di sektor kelautan, Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan persiapan kelembagaan masyarakat agar mampu memanfaatkan sumberdaya kelautan seoptimal mungkin dan secara bertahap memposisikan sebagai alternatif basis utama pembangunan daerah.

3. Kabupaten Sinjai memiliki 11 Pokmaswas aktif, yaitu Bahari, Tunreng Tellue, Adapi Nagau, Mabbulo, Sipeppa, Mattiro Deceng, Sipakainge, Mattiro Walie, Batu Maccidong, Karang Merah, Siaserri, dan Mamminasae. Pokmaswas ini diharapkan dapat membantu menjalankan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah masing-masing seperti pengawasan terhadap aktivitas pengeboman dan pembiusan.
4. Kegiatan sosialisasi siswasmas dimaksudkan terwujudnya sistem pengawasan sumberdaya ikan yang melibatkan peran serta masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terlaksananya kerjasama pengawasan antara aparat perikanan, penegak hukum dan masyarakat

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

9. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Kepulauan Selayar

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 17 Oktober 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Aula Kantor Badan Permusyawaratan Desa Parak
Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar
- c. Hasil yang dicapai :

1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Wajo dengan jumlah peserta 40 orang.
 2. Salah satu sasaran pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bidang Pengawasan SDKP adalah terwujudnya tertib pelaksanaan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang bebas illegal fishing dan destructive fishing.
 3. Muh. Nasir (Ketua Pokmaswas Babasahang) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan semangat dan partisipasi Pokmaswas dalam melaksanakan pengawasan berbasis masyarakat, maka perlu dipikirkan bersama adanya regulasi dan kebijakan agar pemerintah provinsi dapat melimpahkan atau mendelegasikan kembali kewenangan tersebut kepada kab/kota demi terlaksananya fungsi pengawasan SDKP bersama Pokmaswas.
- d. Rekomendasi :
1. Untuk memperkuat kelembagaan pengawasan di daerah, maka perlu dibangun jejaring kerja antar Pokmaswas sebagai mitra pemerintah yang dapat memberi saran atau pendapat baik ke pusat maupun ke jajaran instansi pemerintah daerah dan instansi penegak hukum lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.
 2. Guna meningkatkan pembinaan Pokmaswas dan sinergitas kerjasama pengawasan antar Pokmaswas dan aparat Dinas Perikanan kab/kota, maka perlu adanya regulasi atau kebijakan dari pemerintah provinsi dalam hal melimpahkan atau mendelegasikan kewenangan terkait pengawasan SDKP.
 3. Perlu adanya pembinaan SDM anggota dan kelembagaan Pokmaswas, khususnya dalam aspek teknis, sosial dan manajemen kelompok.

10. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Soppeng

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 6 Desember 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Aula Kantor Kelurahan Limpomajang Kec.
Marioriawa Kab. Soppeng
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas Salomate, Pokmaswas Lasimpo, Pokmaswas Bintang 27, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dengan jumlah peserta 40 orang.
 2. Tujuan pengawasan berbasis masyarakat adalah terwujudnya sistem pengawasan sumberdaya ikan yang melibatkan peran serta masyarakat.
 3. Sudirman (anggota Pokmaswas Salomate) menyampaikan bahwa pada dasarnya pengurus dan anggota Pokmaswas di Kabupaten Soppeng berkeinginan untuk mengawasi sumberdaya perairan yang ada di Danau Tempe, namun keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan khususnya ketersediaan perahu Pokmaswas sehingga Pokmaswas kurang berperan aktif dalam pengawasan, diharapkan dalam kesempatan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana pengawasan bagi Pokmaswas yang ada. Disarankan juga agar pengurus dan anggota Pokmaswas diberikan intensif atau honor atas peran mereka dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayahnya masing-masing.

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing

11. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Bone

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 7 Desember 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Aula Kantor Desa Mallari Kec. Awangpone
Kab. Bone

c. Hasil yang dicapai :

1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Bone dengan jumlah peserta 40 orang.
2. Pada kesempatan ini Kepala Desa Mallari menyampaikan bahwa untuk tahun 2018 akan mengalokasikan anggaran pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi Pokmaswas dan melaksanakan kegiatan pelatihan teknis bidang perikanan bagi Pokmaswas.
3. A. Marewangeng, S.TP.,MP (Kabid Jasa Usaha Pembudidaya Ikan dan Pengelolaan Penyelenggara TPI) menyampaikan bahwa pada tahun 2018 tidak mengganggu kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, namun Dinas Perikanan Kabupaten tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan nelayan.
4. Mahyuni (Pokmaswas Mallari Ade), menyampaikan keberatannya karena perairan laut Cempalage tidak pernah berhenti aktivitas bom dan telah melapor ke Polair Bone tapi tidak pernah ditindaklanjuti sehingga menimbulkan pertanyaan sebenarnya ada apa dengan penindakan terhadap pelaku bom ikan. Jika Pokmaswas yang bertindak terhadap pelaku pelanggaran akan beresiko dibom oleh pelaku.

5. Supriadi (Kelompok Teluk, pembudidaya rumput laut), menyampaikan bahwa pelaku pukat trawl, pukat tongkang dan bom berada di Lemuru sehingga diharapkan petugas mendatangi daerah tersebut yang mana pelaku tersebut berasal dari Lajoa dan Bajoe. Pada kesempatan ini juga dipertanyakan tentang unsur keanggotaan Pokmaswas, apakah bisa berasal dari pembudidaya, petani dan nelayan tangkap yang telah mendapatkan bantuan dari koperasi nelayan.

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

12. Sosialisasi Siswasmas di Kabupaten Pangkep

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 7 Desember 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Aula Kantor Desa Mallari Kec. Awangpone
Kab. Bone

c. Hasil yang dicapai :

1. Peserta Sosialisasi Siswasmas terdiri dari pengurus dan anggota Pokmaswas, nelayan, pengumpul ikan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep dengan jumlah peserta 40 orang.
2. Abdul Rahman (Anggota Pokmaswas Mappideceng) menanyakan sanksi yang diberikan apabila pelaku pelanggaran ditangkap.
3. Menanggapi hal tersebut di atas, Ir. Miftahuddin (Kabid Pengawasan SDKP) menyampaikan bahwa Pokmaswas untuk melapor setiap pelanggaran di wilayah masing-masing yang mana laporan dapat disampaikan melalui sms gateway. Pelaku pelanggaran bom ikan hanya dapat ditangkap ketika tertangkap tangan sehingga tidak dapat dilakukan penangkapan di rumah pelaku (pada saat pelaku tidak

melakukan pemboman). Sanksi yang diberikan berdasarkan undang-undang perikanan dan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Rekomendasi :

Sosialisasi Siswasmas diharapkan dapat secara rutin dilaksanakan di wilayah yang rawan destruktif fishing guna meminimalkan dan mencegah terjadinya destruktif fishing, serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam melaksanakan pengawasan SDKP di wilayah masing-masing.

B. Inventarisasi Data SISWASMAS Perikanan

1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Inventarisasi Data Pengawas/SISWASMAS Perikanan di Kab. Barru, Pare Pare dan Pinrang

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 22 s/d 24 Februari 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Barru, Pare Pare dan Pinrang
- c. Biaya : Perdin dalam daerah
- d. Hasil yang dicapai :
 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah, dimana dijelaskan bahwa pengelolaan laut 0 – 12 mil menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dengan tersebut, maka pada tahun 2017 telah dibentuk UPT P3SKP – WP Selat Makassar, UPT P3SKP – WP Teluk Bone dan UPT P3SKP – WP Laut Flores.

2. Data pengawas perikanan di Kabupaten Barru, Pare Pare dan Pinrang :

No.	Kab/Kota	Nama	Ket.
1.	Barru	- Ibrahim, S.Sos - Ir. Andi Sidda - Hamra, S.Pi.	Aktif Mutasi Aktif
2.	Pare Pare	- Ir. Hj.. Damilah Husain - Hj. Mardianawati, S.Pi.,M.Si - Iswahyudin, S.Pi - A. Abdillah, S.Pi	Mutasi Pengawas Pos PSDKP Pengawas Pos PSDKP Pengawas Pos PSDKP
3.	Pinrang	- Ir. Budaya - Lutfi, S.Pi.,M.Si - Pahmi, S.Pi	Aktif PPNS/Pengawas Perikanan PPNS/Pengawas Perikanan

3. Data Pokmaswas aktif di Kabupaten Barru, Pare Pare dan Pinrang

No.	Kab/Kota	Pokmaswas	Alamat (Desa/Kec.)	Ketua	Jumlah Anggota
1.	Barru	1. Batu Loange	Kupa/Mallusetasi	Suardi	37
		2. Nirwana Bahari	Mallawa/Mallusetasi	Haruna	25
		3. Balanak	Lasitase/Tanete	Bowo rihanto	20
		4. Bahari Polejiwa	Rilau	Usman	10
			Tellupanua/Tanete	Hamzah	
		5. Bunga Nelayan	Rilau		7
		6. Sipakalebbi	Palanro	Udin Basri	9
		7. Mattiro Deceng	Madello/Balusu	M. Idris	11
			Lampoko/Balusu	Dg.Punna	
				A. Muh Jafar	
					99
2.	Pare Pare	1. Bagan Lolo	Soreang	Ali Hafid	16
		2. La’Balesse	Bacukiki Barat	Ahmad Yani	11
					27
3	Pinrang	1. Bina Bahari	Karaeng/Lembang	Muh. Basir	23
		2. Bina Bahari	Sabang	Syarifuddin	17
		3. Bina Taruna	Paru/Lembang	Ir. Saifuk	27
		4. Lotang Salo	Langnga/MT. Sompe	Abidng	19
		5. Siamassei	Suppa	Erwin Daming	19
		6. Sahabat Pesisir	Suppa	H. Akib Sidda	26
					131

e. Rekomendasi :

1. UPT P3SKP – WP Selat Makassar dalam melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melibatkan tenaga pengawas perikanan kabupaten/kota.
2. Melakukan pembinaan Pokmaswas aktif, terutama dalam meningkatkan kemampuan dan penguatan kelembagaan.

2. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Inventarisasi Data Pengawas/SISWASMAS Perikanan di Kab. Bantaeng

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 17 s/d 18 Mei 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Bantaeng
- c. Hasil yang dicapai :

1. Data pengawas perikanan di Kabupaten Bantaeng :

No.	Nama	Ket.
1.	Faisal, S.Pi	Aktif
2.	Ahmad Fahmi, S.Pi	Aktif
3.	Ahmad Arfan Fahrudin, A.Md.Pi	Aktif

2. Data Pokmaswas aktif di Kabupaten Bantaeng

No	Pokmaswas	Alamat (Desa/Kec.)	Ketua	Jumlah Anggota
1	Pantai Batunu	Bissapu	Subhan Yusuf	10
2	Sikamaseang	Bissapu	Syahrir	25
3	Pinang Raya	Pa'jukukang	M. Yunus	10
4	Pantai Gading	Pa'jukukang	Ahmad	10
5	Biangkeke Berkarya	Pa'jukukang	Ismail	12
6	Lumpangang Raya	Pa'jukukang	Hasan	7
7	Kuda laut	Pa'jukukang	Nasir	9
8	Pajukukang Raya	Pa'jukukang	Baso Pali	9
9	Marina Indah	Pa'jukukang	H. Nurung	12
10	Papanloe Bersinar	Pa'jukukang	H. Arif	10
11	Timur Laut	Bantaeng	Adi Wijayanto	7
				121

d. Rekomendasi :

Kegiatan inventarisasi data pengawas/Siswasmas diharapkan dapat mengupdate data pengawas/kelompok masyarakat pengawas di daerah yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kegiatan yang akan datang.

3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Inventarisasi Data Pengawas/SISWASMAS di Kab. Bulukumba

a. Tempat Pelaksanaan : Kab. Bulukumba

b. Hasil yang dicapai :

1. Data pengawas perikanan di Kabupaten Bulukumba :

No.	Nama	Ket.
1.	Fachry Amal, S.Pi	Aktif
2.	Taufik, S.Pi	Aktif
3.	Syarifuddin. R	Aktif
4.	Arwan	Aktif
5.	Junaidi	Aktif

2. Data Pokmaswas aktif di Kabupaten Bulukumba

No	Pokmaswas	Alamat (Desa/Kec.)	Ketua	Jumlah Anggota
1	Cakalang	Bonto Tiro	Badorra	12
2	Lombok	Kajang	Muh. Arif	10
3	Lumba-Lumba Putih	Kajang	H. Muh. Judar	21
4	Katinroang Jangan-Jangan	Herlang	Sangkali	9
5	Batu Mesu	Bonto Bahari	Nurdin Patta	15
6	Ujung Baru	Bonto Bahari	H.Ali Imran	9
				76

c. Rekomendasi :

Kegiatan inventarisasi data pengawas/Siswasmas diharapkan dapat mengupdate data pengawas/kelompok masyarakat pengawas di daerah yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kegiatan yang akan datang.

4. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Inventarisasi Data Pengawas/SISWASMAS di Kab. Maros

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 30 s/d 31 Mei 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Maros

c. Hasil yang dicapai :

1. Kabupaten Maros tidak memiliki pengawas perikanan.
2. Data Pokmaswas Aktif di Kabupaten Maros

No	Pokmaswas	Alamat (Desa/Kec.)	Ketua	Jumlah Anggota
1	Minasa Bahari	Marusu	M. Ruslan Manye	10
2	Minasa Baji	Maros Baru	Supriadi	10
3	Sejahtera	Lau	Arsyad Rauf	10
4	Sipakatau	Bontoa	H. Syarifuddin P. Ngesa	10
				40

d. Rekomendasi :

Kegiatan inventarisasi data pengawas/Siswasmas diharapkan dapat mengupdate data pengawas/kelompok masyarakat pengawas di daerah yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kegiatan yang akan datang.

5. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Inventarisasi Data Pengawas/SISWASMAS Perikanan di Kab. Luwu Utara

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 12 s/d 14 September 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Luwu Utara

c. Hasil yang dicapai :

1. Terdapat seorang Pengawas Perikanan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu Naharuddin Nabaing, S.Kel yang bertugas di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Utara.
2. Akibat adanya UU No. 23 Tahun 2017, dimana kewenangan pengawasan telah beralih menjadi kewenangan provinsi, maka pengawas di kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran illegal fishing. Pengawas yang kemudian

melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang yakni Kepolisian setempat atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam hal ini UPT P3SKP WP Teluk Bone.

3. Data Pokmaswas aktif di Kabupaten Luwu Utara

No	Pokmaswas	Alamat (Desa/Kec.)	Ketua	Jumlah Anggota
1	Bajak Laut	Malangke	Jasmin S	17
2	Mamminasasae	Malangke	Syamsuddin	15
3	Bone Pute	Malangke	Juswan	15
4	Teluk Bone	Malangke	Bahar	9
5	Pao Raja	Malangke Barat	Marsuki	18
6	Pulau Indah	Malangke Barat	Jisman	16
7	Mantalinga Indah	Malangke Barat	H.Annas	13
8	Pombakka Afair	Malangke Barat	Mursalim	15
9	Bunga Karang	Tanalili	Aksan Siswali	11
10	Kuda Laut	Tanalili	Bahtiar Baso	15
11	Mappatunru	Bone-Bone	Hafid Hasan	14
12	Sipatuo	Bone-Bone	M.Arif	9
13	Harapan Barau	Sukamaju	Darwis	9
				176

d. Rekomendasi :

1. Perlu pembinaan kelembagaan dan SDM.
2. Bantuan sarana dan prasarana terutama sarana perahu untuk lebih mengaktifkan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan.
3. Koordinasi Pokmaswas dengan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi maupun kabupaten perlu ditingkatkan.

6. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat di DKI Jakarta

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s/d 27 Oktober 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : DKI Jakarta
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Pada tahun 2018, Ditjen PSDKP melalui Dit Penanganan Pelanggaran akan melaksanakan diklat PPNS perikanan.
 2. Pada kesempatan ini, diusulkan pelatihan teknis Pengawas Perikanan bagi aparat DKP Sulsel mengingat jumlah Pengawas Perikanan Sulsel masih sangat kurang dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi.

3. Target PSDKP di tahun 2018, yaitu penanggulangan illegal fishing dan ketaatan bagi pelaku usaha perikanan.

d. Rekomendasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan SDKP disarankan mengusulkan tenaga PNS untuk mengikuti diklat PPNS perikanan.

7. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Inventarisasi Data Pengawas/Siswasmas di Kab. Takalar

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 15 s/d 16 Desember 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Takalar
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Pada tahun 2018, Ditjen PSDKP melalui Dit Penanganan Pelanggaran akan melaksanakan diklat PPNS perikanan.
 2. Pada kesempatan ini, diusulkan pelatihan teknis Pengawas Perikanan bagi aparat DKP Sulsel mengingat jumlah Pengawas Perikanan Sulsel masih sangat kurang dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi.
 3. Target PSDKP di tahun 2018, yaitu penanggulangan illegal fishing dan ketaatan bagi pelaku usaha perikanan.
- d. Rekomendasi :

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan SDKP disarankan mengusulkan tenaga PNS untuk mengikuti diklat PPNS perikanan.

C. Penyusunan Profil POKMASWAS Perikanan

1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan Data Profil Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 12 s/d 14 Juli 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Maros, Pangkep dan Barru
- c. Hasil yang dicapai :

1. Kabupaten Maros memiliki 4 (empat) Pokmaswas aktif, yaitu :

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota
1.	Sipakatau Desa Pa'jukukang Kec. Bontoa	SK Bupati Maros No. 55 / KPTS / 523.1 / I / 2008 tgl. 7 Januari 2008	H. Saripuddin B	10
2.	Minasa Baji Desa Borimasunggu Kec. Maros Baru	SK Bupati Maros No. 55 / KPTS / 523.1 / I / 2008 tgl. 7 Januari 2008	H. Sangkala	10
3.	Sejahtera Desa Soreang Kec. Lau	SK Bupati Maros No. 55 / KPTS / 523.1 / I / 2008 tgl. 7 Januari 2008	Safaruddin	10
4.	Mina Bahari Desa Nisombalia Kec. Marusu	SK Bupati Maros No. 55 / KPTS / 523.1 / I / 2008 tgl. 7 Januari 2008	M. Ruslan Manye	10
				40

2. Kabupaten Pangkep memiliki 16 Pokmawas aktif, yaitu :

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota (org)
1	Mattiro Baji Ds. Mattiro Baji Kec. Liukang Tuppabiring Utara	No. 08/I/Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Hamirullah	11
2	Mattiro Bintang Ds. Mattiro Bintang Kec. Liukang Tuppabiring Utara	No. 08/I/Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Nasir	12
3	Mattiro Sompe Ds. Mattiro Sompe Kec. Liukang Tuppabiring Utara	No. 08/I/Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Makmur	10
4	Mattiro Langi Ds. Mattiro Langi Kec. Liukang Tuppabiring Utara	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Rahimi	19
5	Mattiro Kanja Ds. Mattiro Kanja Kec. Liukang Tuppabiring Utara	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Abd. Rahman	7
6	Mattiro Walie Ds. Mattiro Walie Kec. Liukang Tuppabiring Utara	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Jamaluddin	10
7	Mattiro Bombang Ds. Mattiro Bombang Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Jumardi	9
8	Mattiro Matae Ds. Mattiro Matae Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Sarifuddin	10

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota (org)
9	Mattiro Ulang Ds. Mattiro Ulang Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Dg. Mitu	5
10	Mattiro Adae Ds. Mattiro Adae Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Ali Ansar, S.Pd	8
11	Mattiro Bulu Ds. Mattiro Bulu Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	H. Anwar	5
12	Mattiro Labangeng Ds. Mattiro Labangeng Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Syarifuddin Dg. Takka	12
13	Mattiro Dolangeng Ds. Mattiro Dolangeng Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	M. Ilyas	7
14	Mattiro Ujung Ds. Mattiro Ujung Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Safaruddin	9
15	Komando Pulau Bontosua Ds. Mattiro Bone Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	M. Ridwan	15
16	Sinar Bahari Ds. Mattiro Deceng Kec. Liukang Tuppabiring	No. 08 / I / Tahun 2015 tgl. 2 Januari 2015	Muh. Haris	10

3. Kabupaten Barru memiliki 7 (tujuh) Pokmaswas aktif, yaitu :

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota (orang)
1.	Batu Loange Ds. Kupa Kec. Mallusetasi	No. 426 / DKP / XII / 2014 tgl. 5 Desember 2014	Suardi Haruna	37
2.	Nirwana Bahari Ds. Mallawa Kec. Mallusetasi	No. 426 / DKP / XII / 2014 tgl. 5 Desember 2014	Bowo Prihanto	25
3.	Balanak Ds. Lasitae Kec. Tanete Rilau	No. 426 / DKP / XII / 2014 tgl. 5 Desember 2014	Usman	20
4.	Bahari Polejiwa Ds. Tellumpanua Kec. Tanete Rilau	No. 426 / DKP / XII / 2014 tgl. 5 Desember 2014	Hamzah	10
5.	Bunga Nelayan Ds. Palanro Kec. Palanro	No. 426 / DKP / XII / 2014 tgl. 5 Desember 2014	Udin	7
6.	Sipakalebbi Ds. Madello Kec. Balusu	No. 426 / DKP / XII / 2014 tgl. 5 Desember 2014	M. Idis Dg. Punna	9
7.	Mattiro Deceng Ds. Lampoko Kec. Balusu	No. 426 / DKP / XII / 2014 tgl. 5 Desember 2014	A. Muh. Jafar	11
				99

d. Rekomendasi :

Diharapkan ke depan semua Pokmaswas ada baik di Kabupaten/kota pro aktif dan melaporkan setiap kejadian, gerak gerik yang menjurus ke arah kerusakan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan karena sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengawasan .

2. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan Data Profil Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Gowa

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 11 Juli 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Gowa

c. Hasil yang dicapai :

Kabupaten Gowa memiliki 3 (tiga) Pokmaswas aktif, yaitu :

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota (orang)
1.	Jeneberang Ds. Lanna Kec. Parangloe	No. 800 / 08 / DPKP / V / 2011 tgl. 5 Mei 2011	Hadi Mile	37
2.	Beroanging Ds. Bonto Parang Kec. Parangloe	No. 800 / 07 / DPKP / V / 2011 tgl. 5 Mei 2011	Muh. Hasyim	26
3.	Sinar Moncongloe Ds. Moncongloe Kec. Parangloe	No. 800 / 154 / DPKP / IX / 2014	Johannis	14
				77

d. Rekomendasi :

1. Dengan adanya kegiatan pengambilan data profil Pokmaswas di Kabupaten Gowa, maka dapat terbentuk gambaran mengenai Pokmaswas di kabupaten tersebut sehingga dapat dijadikan acuan dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
2. Diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mendukung pengembangan pembentukan Pokmaswas selanjutnya.

3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan Data Profil Pokmaswas Perikanan di Kabupaten Takalar

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 3 s/d 4 Agustus 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Takalar

c. Hasil yang dicapai :

Kabupaten Takalar memiliki 18 Pokmaswas aktif dengan jumlah anggota 377 orang.

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota (orang)
1.	Sipakatau Ds. Aeng Batu Batu Kec. Galesong Utara	SK Bupati Takalar Tahun 2016	Ibnu Hajar	15
2.	Veri Sejahtera Ds. Tamalate Kec. Galesong Utara	No. 401 Tahun 2006 tgl. 29 September 2006	Saharuddin Dg. Tunru	20
3.	Sitalassi Ds. Tamasaju Kec. Galesong Utara	No. 523.2 / 023 / I / 2011 tgl. 11 Januari 2011	Aswandi Dg. Duni	10
4.	Sanrobengi Ds. Galesong Baru Kec. Galesong Kota	No. 523.2 / 15.a / I / 2008 tgl. 24 Januari 2008	Ripai Nai	15
5.	Hunter Ds. Bontokanang Kec. Galesong Selatan	No. 523.2 / 15.a / I / 2008 tgl. 24 Januari 2008	M. Ramli Liong	30
6.	Perintis Bahari Ds. Bontomarannu Kec. Galesong Selatan	No. 523.2 / 309.c / XII / 2008 tgl. 4 Desember 2008	Mustari Tantu	30
7.	Tottalassa Kel. Takalar Kec. Mappakasunggu	No. 523.2 / 15.a / I / 2008 tgl. 24 Januari 2008	Amaluddin Dg. Pasang	30
8.	Mattiro Baji Ds. Mattiro Baji Kec. Mappakasunggu	No. 523 / 120.c / IV / 2010 tgl. 21 April 2010	Abdul Rahim	13
9.	Macini Baji Ds. Macini Baji Kec. Mappakasunggu	No. 523 / 120.c / IV / 2010 tgl. 21 April 2010	Rusli Dg. Sutte	12
10.	Rewataya Ds. Rewataya Kec. Mappakasunggu	No. 523 / 14.c / I / 2013 tgl. 8 Januari 2013	Abdul Azis Dg. Tunru	11
11.	Balang Datu Ds. Balang Datu Kec. Mappakasunggu	No. 523 / 14.c / I / 2013 tgl. 8 Januari 2013	Abd. Malik Dg. Ngewa	13
12.	Tompo Tanah Ds. Tompo Tanah Kec. Mappakasunggu	No. 523 / 14.c / I / 2013 tgl. 8 Januari 2013	Haris Dg. Nangga	13
13.	Garudayya Ds. Laikang Kec. Mangararombang	No. 523.2 / 15.a / I / 2008 tgl. 24 Januari 2008	Hasanuddin Sila	30
14.	Intel Bahari Ds. Topejawa Kec. Mangararombang	No. 523.2 / 309.c / XII / 2008 tgl. 4 Desember 2008	Saifulla Epe	30
15.	Buser Bahari Ds. Galesong Kota Kec. Galesong	No. 523.2 / 309.c / XII / 2008 tgl. 4 Desember 2008	Sayye Dg. Ngampa	30

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota (org)
16.	Lestari Bahari Ds. Boddia Kec. Galesong	No. 523.2 / 309.c / XII / 2008 tgl. 4 Desember 2008	Saharuddin Dg. Tayang	30
17	Bahari Bersatu Kec. Sanrobone	No. 523.2 / 309.c / XII / 2008 tgl. 4 Desember 2008	Jamaluddin Sutte	30
18	Lestari Alam Samudra Kec. Sanrobone	No...../...../III/2014 tanggal 10 Maret 2014	Achmad Yusuf Mile	15
				377

Pokmaswas penerima bantuan sarana dan prasarana pengawasan melalui anggaran DAK 2017 di Kabupaten Takalar, yaitu :

1. Pokmaswas Intel Bahari (1 paket perlengkapan Pokmaswas)
2. Pokmaswas Sitalassi (1 paket perlengkapan Pokmaswas)
3. Pokmaswas Perintis Bahari (1 paket perlengkapan Pokmaswas dan 1 unit Handphone SMS Gateway)
4. Balang Datu (1 unit perahu Pokmaswas)
5. Lestari Bahari (1 unit Handphone SMS Gateway)

d. Rekomendasi :

1. Diperlukan pembinaan kelembagaan dan SDM Pokmaswas.
2. Bantuan sarana dan prasarana, terutama sarana perahu untuk lebih mengefektifkan kegiatan pengawasan SDKP.
3. Koordinasi Pokmaswas dengan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan Data Profil Pokmaswas Perikanan di Kota Pare Pare

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 3 s/d 4 Agustus 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kota Pare Pare

c. Hasil yang dicapai :

1. Kota Pare memiliki 2 (dua) Pokmaswas aktif yang dikukuhkan sejak tahun 2014 dengan jumlah anggota 27 orang, yaitu :

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota (org)
1.	Bagan Lolo Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang	No. 523 / 25.a / Tahun 2014	Ali Hafid	16
2.	La'Balesse Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat	No. 523 / 35 / Tahun 2014	Ahmad Yani	11
				27

2. Tahun 2017, kedua Pokmaswas tersebut mendapatkan bantuan perlengkapan Pokmaswas dan handphone sms gateway melalui alokasi DAK berupa rompi Pokmaswas, senter, GPS, kamera digital, HT dan handphone sms gateway

d. Rekomendasi :

1. Diperlukan penambahan Pokmaswas di Kota Pare Pare guna membantu mengawasi aktivitas yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Dengan adanya kegiatan pengambilan data profil Pokmaswas di Kota Pare Pare dapat memberi gambaran Pokmaswas sehingga dapat menjadi salah satu acuan dalam merencanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di masa mendatang.

D. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Produk Perikanan

1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka monitoring pengawasan perdagangan produk perikanan di Kota Palopo

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 29 s/d 31 Maret 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kota Palopo
- c. Hasil yang dicapai :

1. Kota Palopo memiliki sarana dan prasarana pelabuhan perikanan tipe D guna menunjang pemasaran hasil penangkapan ikan, yaitu PPI Pontap. Dimana pelabuhan perikanan ini memiliki pabrik es yang memproduksi es balok dan es curah dengan volume produksi 2.500 m³.
2. Unit usaha pengolahan produk perikanan skala kecil yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu :
 - Kecamatan Wara : ikan segar

- Kecamatan Wara Selatan : pengolahan ikan (Kel. Bunga Karang)
- Kecamatan Wara Utara : abon (Kel. Bina Perempuan Pesisir), dendeng ikan (Kel. Prima Mandiri), amplang (Kel. Tenggiri), kepiting beku (Kel. Matutui), olahan rumput laut (Kel. Kamboja) dan pemasaran ikan (Kel. Samudra Atlantik dan Kel. Arung Samudera).
- Kecamatan Wara Timur : teri gurih (Kel. Cakalang Mas), olahan rumput laut (Kel. Sango-sango), pengeringan ikan (Kel. Melati, Kel. Karya Sipatuo, Kel. Tri Karya mandiri), pemasaran ikan (Kel. Karya Bahari, Kel. Usaha Rezeki Bersama, Kel. Tentram Jaya, Kel. Bintang Laut Timur, Kel. Kembali Mekar, Kel. Anugrah Laut, Andi Tadda, Kel. Kebersamaan, Kel. Sipatui, Wisnu, Kel. Surya Mandiri dan Kel. Sejahtera).
- Kecamatan Bara : olahan rumput laut (Kel. Sea Sells) dan pemasaran ikan (Kel. Kakap dan TB7).

d. Rekomendasi :

1. Diharapkan usaha pengolahan produk perikanan memiliki ijin usaha dan Dinas Perikanan Kota Palopo secara aktif melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha tersebut.
2. Diperlukan pengawasan terhadap usaha pengolahan produk perikanan, terutama terhadap pembuangan limbahnya.

2. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pengawasan Perdagangan Produk Perikanan di Kab. Bone dan Sinjai

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 11 s/d 13 April 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Bone dan Sinjai
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Kabupaten Bone memiliki 76 kelompok pengolahan hasil perikanan, dimana 22 diantaranya adalah kelompok yang masih aktif melakukan pengolahan dan sisanya melakukan pengolahan tergantung pada musim produk bahan baku.

2. Jenis usaha pengolahan yang dominan di Kabupaten Bone adalah pengolahan ikan (pengeringan, pengasapan, bakso ikan, abon ikan dll), pengolahan rumput laut dan beberapa pengolahan kepiting.
 3. Kabupaten Sinjai memiliki 23 kelompok pengolahan hasil perikanan, 20 diantaranya berstatus tidak aktif atau berjalan kurang dari setahun dan sisanya adalah kelompok pengolahan hasil perikanan yang masih aktif.
 4. Terdapat beberapa komoditi yang dikembangkan oleh pengusaha pengolahan hasil perikanan, diantaranya pengeringan dan pengasapan ikan, berbagai produk olahan seperti kerupuk ikan, abon ikan dan bakso ikan.
 5. Kendala yang dihadapi pelaku usaha pengolahan perikanan di Kabupaten Bone dan Sinjai adalah masalah pemasaran produk yang masih berskala lokal tanpa promosi dan pengemasan yang belum memadai.
- d. Rekomendasi :
- Dalam rangka monitoring pengawasan perdagangan produk perikanan terkhususnya di Kabupaten Bone dan Sinjai, hal yang perlu diperhatikan adalah pendampingan dan pengawasan dalam proses produksi untuk menjaga mutu produk, serta pemasaran hasil olahan perikanan yang lebih luas agar dapat mendatangkan hasil penjualan yang lebih maksimal.
- 3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka monitoring pengawasan perdagangan produk perikanan di Kab. Takalar**
- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 6 s/d 7 September 2017
 - b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Takalar
 - c. Hasil yang dicapai :
1. Kegiatan pengolahan produk hasil perikanan terkait dengan pengawasan perdagangan produk perikanan di Kabupaten Takalar dengan jumlah pengolah ikan sebanyak 8 unit skala kecil dan 5 unit skala besar dengan tujuan pemasaran dalam dan luar negeri, jenis komoditi kepiting, bakso ikan, kakap, cumi cumi, katombo, cakalang, laying, baronang, nila, lamuru, ikan pari, katamba, sunu, telur ikan terbang, rumput laut, tenggiri dan sotong yang mana hasil pengolahan berupa ikan segar dan beku.

2. PT. Giwang Citra Laut yang mengolah rumput yang mengolah produk rumput laut berupa chips ATC dan powder carrageenan. Dilihat dari aspek legalitas yang dimiliki oleh perusahaan khususnya izin SKP masih berlaku, sementara Izin Usaha Perikanan sudah mendekati masa aktif November 2017, serta ditemukan hanya memiliki surat rekomendasi terkait penerapan Gmp dan SOP, sementara penggunaan sertifikat HACCP sebagai salah satu syarat ekspor ke Negara mitra tidak ada. Dari aspek lingkungan terhadap penanganan limbah pabrik, dimana pihak pengelola pabrik belum melakukan penanganan limbah secara baik.

d. Rekomendasi :

Disarankan agar pihak perusahaan segera melakukan permohonan perpanjangan pengurusan Izin Usaha Perikanan dan HACCP yang belum dimiliki sebagai salah satu syarat ekspor dan diharapkan agar lebih memperhatikan legalitas perizinan yang terkait dengan produk-produk perikanan yang akan diperdagangkan baik secara lokal maupun ekspor, serta menindaklanjuti penanganan limbah pabrik yang belum ditangani secara maksimal.

4. Perjalanan Dinas Dalam Rangka monitoring pengawasan perdagangan produk perikanan di Kab. Maros

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 7 s/d 8 September 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Maros
- c. Hasil yang dicapai :

1. Di Kabupaten Maros terdapat beberapa unit pengolahan ikan baik skala UKM, UMKM dan skala besar yang mengelola produk perikanan baik berupa bahan baku/raw material maupun olahan-olahan hasil perikanan. Data kelompok pengolahan/UPI skala UKM di Kabupaten Maros yang telah dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9 (sembilan) kelompok UPI skala menengah berupa kerupuk ikan, kepiting, bakso ikan, abon, bandeng cabut duri dan nugget, 10 unit UPI skala besar dengan produk perdagangan berupa udang beku, tuna beku,

kerapu beku, kerapu hidup, kepiting, rumput laut kering (ATC chips dan powder carrageenan), bandeng beku dan lain-lain.

2. CV. Atops Makassar dan UD. Lima Satu melakukan proses pengolahan ikan berupa ikan demersal, pelagis, telur ikan terbang, cumi cumi dan bandeng beku yang dipasarkan atau diperdagangkan ke Jakarta, Surabaya dan Jepang. Terkait dengan kegiatan pengawasan perdagangan produk perikanan ditemukan masa keaktifan izin sertifikat kelayakan pengolahan sudah mendekati masa berlakunya sehingga diharapkan segera mengurus perpanjangan, dimana dapat menghambat pengiriman barang/ekspor. Dilihat dari aspek penanganan limbah pabrik, pengelola pabrik melakukan penanganan limbah secara baik atau bekerja sama dengan instansi terkait, yang mana jika limbah belum ditangani atau diproses/penetralisasi maka nantinya limbah tersebut akan berdampak buruk terhadap lingkungan utamanya masyarakat yang ada di sekitarnya.

d. Rekomendasi :

Diharapkan pimpinan UPI lebih memperhatikan legalitas perizinan yang terkait dengan produk-produk perikanan yang akan diperdagangkan baik lokal maupun ekspor berupa izin sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan penanganan limbah pabrik yang belum ditangani secara maksimal agar segera menindaklanjuti dengan instansi terkait.

5. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi di DKI Jakarta

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s/d 27 Oktober 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : DKI Jakarta
- c. Hasil yang dicapai :
 1. Diharapkan komitmen untuk meningkatkan sinergi pengawasan dokumen perizinan dengan berbagai instansi pengawasan di laut, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum operasional kapal perikanan.

2. Stakeholders senantiasa mendorong pembangunan kedaulatan kelautan untuk menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan SDKP yang berkelanjutan.

d. Rekomendasi :

Sinergitas dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan untuk menuju perikanan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan meningkatnya sistem pengawasan SDKP yang terintegrasi untuk memberantas illegal fishing, unregulated dan unreported fishing (IUUF).

6. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pengawasan Perdagangan Produk Perikanan di Kab. Kepulauan Selayar

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 14 s/d 17 November 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Kepulauan Selayar

c. Hasil yang dicapai :

1. Di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 17 kelompok pengolah perikanan, yang terdiri dari 2 kelompok pengolahan abon ikan, 1 kelompok pengolahan terasi, dan 13 kelompok pengolahan ikan kering.
2. Jenis usaha pengolahan yang dominan adalah pengolahan ikan kering.
3. Kendala yang dihadapi pelaku usaha pengolahan ikan adalah pengemasan dan pemasaran olahan hasil perikanan yang masih berskala lokal.

d. Rekomendasi :

Pendampingan dan pengawasan dalam proses produksi untuk menjaga mutu produk serta pemasaran hasil olahan perikanan yang lebih luas agar dapat mendatangkan hasil penjualan yang maksimal.

7. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Produk Perikanan di Jakarta

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 14 s/d 17 November 2017

b. Tempat Pelaksanaan : DKI Jakarta

c. Hasil yang dicapai :

1. Masalah keamanan produk perikanan bukan hanya menjadi perhatian konsumen, tetapi juga menentukan fungsi pasar yang sangat mendasar. Keamanan produk perikanan merupakan syarat untuk melindungi kesehatan konsumen yang juga memperlihatkan perhatian produsen serta berbagai pihak yang terkait dalam pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
2. Pengawasan perikanan mencakup seluruh kegiatan yang menjamin kualitas dan keamanan hasil perikanan. Aktivitas pengawasan dimulai pada tahap produksi awal sampai tahap pengolahan, penyimpanan, pemasaran dan konsumsi. Secara umum, tujuan pengawasan perikanan adalah untuk memberikan pendekatan yang sistematis pada seluruh aktivitas pengawasan dan pengujian produk perikanan melalui program yang dikelola berdasarkan prinsip ilmiah yang tepat dan penilaian resiko (*risk assesment*) yang tepat, sehingga mampu mengarahkan pada aktivitas pengawasan dan pengujian yang baik dan benar.

d. Rekomendasi :

Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan berpedoman pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP 294/DJ-PSDKP/2010 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan.

8. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pengawasan Perdagangan Produk Perikanan di PT. Kemilau Bintang Timur Makassar dan PT. Ocean Champ Seafood Makassar, dan Kab. Pangkep

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 s/d 22 Desember 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Pinrang

c. Hasil yang dicapai :

1. Produk perikanan yang dihasilkan PT. Kemilau Bintang Timur adalah kepiting kaleng, udang, octopus, ikan demersal dan ikan pelagis. Dengan rata-rata produksi 50 – 100 ton/bulan. Bahan baku yang digunakan berasal dari wilayah perairan Makassar, Maros, Pangkep dan Barru. Peralatan yang digunakan untuk menyimpan produk (cold storage) rata-rata kapasitas 100

– 200 ton/unit. Produk diekspor sejumlah 100 – 150 ton/bulan dengan tujuan Amerika dan Asia.

2. Produk perikanan yang dihasilkan PT. Ocean Champ Seafood adalah kepiting kaleng beku yang dipasarkan/diekspor 150 – 200 ton/bulan dengan tujuan Amerika. Bahan baku berasal dari Maros, Pangkep dan Takalar.

3. Pengolahan produk perikanan di Kab. Pangkep berskala Rumah Tangga, diantaranya pengeringan dan pengasapan ikan, berbagai produk olahan seperti kerupuk ikan, abon ikan dan bakso ikan.

d. Rekomendasi :

Pendampingan dan pengawasan dalam proses produksi untuk menjaga mutu produk serta pemasaran hasil olahan perikanan yang lebih luas agar dapat mendatangkan hasil penjualan yang maksimal.

9. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Pengawasan Perdagangan Produk Perikanan di Kab. Pinrang

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 s/d 22 Desember 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Pinrang

c. Hasil yang dicapai :

1. Tujuan monitoring pengawasan perdagangan produk perikanan adalah memastikan pelaku usaha di sektor perikanan khususnya dalam bidang pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di kab/kota kegiatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dari hasil monitoring didapatkan data bahwa Kabupaten Pinrang terdapat 17 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang telah dibina Dinas Perikanan setempat dengan produk perikanan berupa ikan bandeng tanpa duri, ikan kering, tik tik tulang ikan bandeng, amplang bandeng, abon ikan, permen rumput laut, bakso ikan, bandeng presto dan pengasapan.

d. Rekomendasi :

Pelaku usaha perikanan, khususnya pengolahan hasil perikanan diharapkan dapat difasilitasi pengurusan TDP, PIRT dan SIUP sehingga menjadi motivasi bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dibutuhkan

pembinaan rutin dari instansi terkait dalam hal penggunaan bahan tambahan dalam produk perikanan guna menghasilkan produk perikanan yang aman bagi konsumen.

E. Publikasi Data Pengawasan dan Pengendalian SDKP

1. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data pengawasan sumber daya kelautan di Kab. Pangkep dan Barru

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 16 s/d 17 Maret 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Pangkep dan Barru
- c. Hasil yang dicapai :

1. Data sumber daya kelautan di Kabupaten Pangkep

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove	-	-	-	1,627	164.6	67	1,395	89.9	
2	Terumbu Karang	-	-	-	37,400	7,480	11,220	18,700	80.0	
3	Padang Lamun	-	-	-	3,857	1,721	323	1,813	55.4	
Luas Total					42,884	9,366	11,610	21,908		

2. Data sumber daya kelautan di Kabupaten Barru

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Terumbu Karang		Tanete Rilau	-	68.61	67.89	-	-	0.72	-
			Barru	-	164.25	163.89	-	-	0.36	-
			Balusu	-	439.66	429.67	-	-	9.99	-
			Soppeng Riaja	-	66.96	66.51	-	-	0.45	-
			Mallusetasi	-	154.94	133.10	-	-	21.84	-
Luas Total					894.42	861.06	96.3	33.36		

- d. Rekomendasi :

Diperlukan pengawasan sumber daya kelautan secara rutin dengan melibatkan aparaturnya kabupaten/kota.

2. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data pengawasan sumber daya kelautan di Kab. Pinrang dan Pare Pare

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 16 s/d 18 Maret 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Pinrang dan Kota Pare Pare
- c. Hasil yang dicapai :

1. Data sumber daya kelautan di Kabupaten Pare Pare

No	Objek	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrove	-	-	-	3,5	3,5	-	-	-	
2	Terumbu Karang	-	-	-	35,3	21,3	-	14	-	
3	Pasir Laut	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	

2. Data sumber daya kelautan di Kabupaten Pinrang

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrov	-	-	-	54,6	23,	13,5	17,4		
2	Terumbu Karang	-	-	-	14,2	10,6	0,3	3,3		
3	Padang Lamun	-	-	-	69,1	14,5		54,6		
Luas Total					137,9	48,8	13,8	75,3		

d. Rekomendasi :

Diperlukan pengawasan sumber daya kelautan secara rutin dengan melibatkan aparaturnya kabupaten/kota

3. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data pengawasan sumber daya kelautan di Kab. Takalar

- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 16 s/d 17 Maret 2017
- Tempat Pelaksanaan : Kab. Takalar
- Hasil yang dicapai :

1. Data sumber daya kelautan di Kabupaten Takalar

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrov				1.776,8	843,7	97,9	835,2		
2	Terumbu Karang									
3	Padang Lamun									

2. Illegal fishing yang masih marak terjadi di Kabupaten Takalar, yaitu pembusukan dan pengeboman yang dilakukan oleh nelayan setempat.

3. Jumlah kapal yang diterbitkan surat keterangan andon sampai dengan April 2017 tercatat 103 buah kapal dengan kapasitas 3 – 10 GT.

d. Rekomendasi :

Diperlukan pengawasan sumber daya kelautan secara rutin dengan melibatkan aparaturnya kabupaten/kota.

4. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Tindak Pidana Perikanan di Kab. Jeneponto

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 30 s/d 31 Agustus 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Jeneponto
- c. Hasil yang dicapai :
 - 1. Satker PSDKP Takalar telah menempatkan 1 (satu) orang Pengawas Perikanan di Kabupaten Jeneponto.
 - 2. Tahun 2017 tidak ditemukan pelanggaran tindak pidana perikanan yang dilaporkan secara resmi oleh masyarakat walaupun pada kenyataan masih sering masyarakat mengeluhkan adanya kegiatan pemboman di wilayah perairan Kabupaten Jeneponto.
- d. Rekomendasi :

Diharapkan kepada aparat terkait untuk lebih pro aktif melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Jeneponto

5. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Takalar

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21 s/d 22 Agustus 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Takalar
- c. Hasil yang dicapai :

Tahun 2017 tidak terdapat kasus tindak pidana perikanan yang ditangani oleh Satker PSDKP Takalar maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan, walaupun banyak laporan masyarakat yang secara tidak resmi dilaporkan namun tidak bisa ditindaklanjuti oleh aparat.
- d. Rekomendasi :

Diharapkan aparat terkait untuk lebih pro aktif melakukan pengawasan SDKP tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

6. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Kota Palopo

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 29 s/d 31 Agustus 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kota Palopo

c. Hasil yang dicapai :

1. Sarana dan prasarana pengawasan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Speed Boat	Wara Utara	Kel. Penggoli	2013	-	-	-	-	Baik	
2	Perahu Kayu	Wara Timur	Kel. Pontap	2014	-	-	-	-	Rusak	

2. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

No.	Pokmaswas	SK Pengukuhan	Ketua	Anggota (org)
1.	Salu Tompotikka Kel. Benteng Kec. Wara Timur	SK Kadis Kp. No. 523/692/DKP/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015	Idris	25
2.	Sipatuo Desa Penggoli Kec. Wara Utara	SK Kadis KP No. 523/1664/DKP/2013	Usman S	27
3.	Retona Kel. Sampoddo, Kec. Wara Selatan	SK Kadis KP No. 523/688/DKP/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015	Basmi	15
4.	Salotangnga Kel. Songka Kec. Wara Selatan	SK Kadis KP No. 523/688/DKP/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015	Sabil	25
5.	Salu Karo Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan	SK Kadis KP No. 523/688/DKP/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015	Awaluddin	24
6.	Baja Pole Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur	SK Kadis Kp. No. 523/692/DKP/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015	Drs. Hamruddin, SE	25
7.	Wahana Lingkungan Kec. Wara Timur		Bachri	19
				141

d. Rekomendasi :

1. Perlunya penambahan sarana dan prasarana pengawasan dan Pokmaswas di Kota Palopo guna membantu pengawasan SDKP.
2. Pengumpulan data pengawasan perikanan harus dilakukan sebagai implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dimaksudkan sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan pengawasan di Sulawesi Selatan.

7. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Maros

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 28 s/d 29 Agustus 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Maros
- c. Hasil yang dicapai :
 - 1. Menurut informasi dari Bapak Bahar anggota Pokmaswas Sipakatau Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa bahwa akhir-akhir ini sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, yaitu trawl dan cantrang.
 - 2. Penangkapan ikan dengan cantrang dilakukan di sekitar Muara Marusu sampai ke sebelah Barat dan Timur Pulau Balang Caddi, sedangkan trawl beroperasi di sebelah Timur dan Utara Pulau Balang Caddi.
- d. Rekomendasi :

Masyarakat diharapkan untuk melaporkan kejadian pelanggaran di wilayahnya kepada aparat terkait atau melalui group WA Forum Pokmaswas Sulsel untuk ditindaklanjuti oleh Polair atau pengawas perikanan/PPNS.

8. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Tindak Pidana Perikanan di Kab. Bulukumba

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 8 s/d 10 November 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Bulukumba
- c. Hasil yang dicapai :
 - 1. Pada tahun 2017, di Kabupaten Bulukumba tidak terdapat kasus TPP yang ditangani oleh Satuan Polair Polres Bone.
 - 2. Meskipun tidak ada kasus tindak pidana yang ditangani, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di wilayah ini masih marak terjadi aktivitas penangkapan ikan yang mana kapal perikanannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.

d. Rekomendasi :

Dengan adanya kegiatan pengumpulan data TPP di Kabupaten Bulukumba dapat menjadi salah satu baan acuan dalam perencanaan pengawasan SDKP di wilayah tersebut.

9. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Bone

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21 s/d 23 November 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Bone

c. Hasil yang dicapai :

Pada tahun 2017, di Kabupaten Bone telah terjadi 3 (tiga) kasus TPP yang ditangani oleh Satuan Polair Polres Bone, yaitu :

No.	Laporan Polisi	Jenis Kasus	Identitas Tersangka	Barang Bukti	Ket.
1.	LP/01/III/2017 /Sulsel/Res Bone tgl. 20 Maret 2017	Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak jenis bom ikan	Baco Tang Alias Cotang Bin Manire, 67 thn, nelayan, Lingkungan Kampung Bajo Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone	<ul style="list-style-type: none"> - 1 unit kapal speed boat warna biru - 3 buah jergen warna putih yang berisi serbuk warna perak - 14 buah botol warna bening yang berisikan serbuk warna hijau - 5 lingkaran obat nyamuk - 1 buah korek api - 13 batang detonator rakitan - 1 unit kompresor warna merah 	Tahap II
2.	LP/02/III/2017 /Sulsel/Res Bone tgl. 23 Maret 2017	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, SIPI dan izin berlayar	Kundarwanto bin Raufung, 38 thn, Nahkoda KMN. Addam Jaya, Ling. Awangsalo Kel. Panyula Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone	<ul style="list-style-type: none"> - 1 unit KMN. Addam Jaya 	Tahap II
3.	LP/04/V/2017/ Sulsel/Res Bone tgl. 19 Mei 2017	Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak jenis bom ikan	Dahar bin Imbani, 35 thn, nelayan, Ling. Kampung Bajo Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone	<ul style="list-style-type: none"> - 3 buah jergen berisi serbuk abu-abu - 2 botol kaca warna hijau berisi serbuk abu-abu - 11 buah detonator terangkai dengan sumbu api - 3 bungkus plastik bening berisi serbuk abu-abu - 1 bungkus plastik bening berisi bongkahan dan serbuk kuning - 1 unit kapal warna biru putih bis merah 	

d. Rekomendasi :

Dengan adanya kegiatan pengumpulan data TPP di Kabupaten Bone dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam perencanaan pengawasan SDKP di wilayah tersebut.

10. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Pengawasan Sumberdaya Kelautan di Kabupaten Jeneponto

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21 s/d 22 November 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kabupaten Jeneponto

c. Hasil yang dicapai :

1. Kabupaten Jeneponto memiliki luas administratif 74.979 km² dengan garis pantai sepanjang 114 km, jumlah armada perikanan tangkap 2.338 unit, kawasan mangrove seluas 1.560 Ha, dan jumlah Pokmaswas 10 kelompok.

2. Dilaporkan masih marak terjadi pemboman di wilayah perairan Pantai Bahari Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Ditenggarai pelakunya berasal dari luar Kabupaten Jeneponto, akibat aktivitas pemboman sumberdaya kelautan di wilayah ini mengalami degradasi dan rusak.

d. Rekomendasi :

Diperlukan tindakan tegas terhadap aktivitas pemboman yang berakibat terhadap degradasi sumberdaya kelautan di kab/kota sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

11. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Data Pengawasan Sumberdaya Kelautan di Kabupaten Sinjai

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 13 s/d 15 Desember 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Sinjai

c. Hasil yang dicapai :

No	Objek Pantauan	Lokasi			Luas (ha)	Kondisi (ha)				Ket
		kel	kec	desa		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Mangrov				169,1	94,	65,4	9,2		
2	Terumbu Karang				3.819,9	1.739,3	1.259,5	821,1		
3	Padang Lamun				1.042	811	157	7		

d. Rekomendasi :

Perlu diperhatikan pemuktahiran data yang dapat dikumpulkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi kebijakan pengelolaan, khususnya kegiatan pengawasan SDKP.

F. Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Pengawasan Perikanan

1. Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana SDKP di Kab. Kepulauan Selayar

- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 22 s/d 24 Maret 2017
- Tempat Pelaksanaan : Kab. Kepulauan Selayar
- Hasil yang dicapai :

1. Data sarana dan prasarana pengawasan SDKP di Kab. Kepulauan Selayar

NO.	KABUPATEN/KOTA	WILAYAH KERJA	DATA			KET.
			SAPRAS PENGAWASAN SDKP	JUMLAH POKMASWAS	KASUS PELANGGARAN	
18.	Kepulauan Selayar	Laut Flores	- Pos pengawasan (3 unit) - Kapal Pokmaswas (7 unit)	7 kelompok		

d. Rekomendasi :

Diharapkan data yang diperoleh dalam identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya perikanan di Kab. Jeneponto

- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 29 s/d 30 Maret 2017
- Tempat Pelaksanaan : Kab. Jeneponto
- Hasil yang dicapai :

Data sarana dan prasarana pengawasan SDKP di Kab. Jeneponto

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	LOKASI SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (UNIT/ BUAH)	SUMBER ANGGARAN/TAHUN PENGADAAN				KONDISI SARANA DAN PRASARANA	KET
		KEC	KEL/DESA		DAK	APBN	APBD I	APBD II		
1	Motor Pengawasan (Yamaha Vixion)	Binamu	Pabiringan	1 unit	2014	-	-	-	Baik	
2	Motor Pengawasan (Honda CBR 125)	Binamu	Pabiringan	1 unit	2014	-	-	-	Baik	
3	Pos Pengawasan	Binamu	Pabiringan	1 buah	-	2010	-	-	Rusak	
4	Garasi Speed	-	-	1 buah	-	-	-	-	Rusak	
5	Kapal Pokmaswas	-	-	1 unit	2015	-	-	-	Baik	Belum selesai (masuk dalam daftar hutang 2016)
6	Speed Boat Pengawas	Binamu	Pabiringan	1 unit	-	2009	-	-	Hilang	
7	Handy Talkie	-	-	2 buah	2015	-	-	-	Baik	
8	Mega 1/2 Bino	Binamu	Pabiringan	1 buah	-	-	-	-	Baik	Pengadaan
9	Kursi Kantor	Binamu	Pabiringan	1 buah	-	-	-	-	Baik	Pengadaan
10	Komputer PC	-	-	1 unit	-	-	-	-	Baik	
11	Printer	-	-	1 unit	-	-	-	-	Baik	

d. Rekomendasi :

Dengan adanya kegiatan identifikasi dan inventarisasi sarana prasarana pengawasan sumber daya perikanan di Kabupaten Jeneponto diharapkan dapat mengupdate sarana prasarana pengawasan sumber daya perikanan di daerah.

3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana SDKP di Kab. Pangkep

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 14 s/d 15 Agustus 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Pangkep

c. Hasil yang dicapai :

1. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP di Kabupaten Pangkep terdiri dari speedboat 2 unit, pelampung 25 buah, GPS 4 buah, alat diving 10 unit, teropong 1 buah dan kantor Pos PSDKP 1 unit.
2. Pada tahun 2017, Pokmaswas di Kabupaten Pangkep mendapatkan bantuan perlengkapan Pokmaswas, adapun Pokmaswas yang diberikan adalah Pokmaswas Mattiro Bone, Pokmaswas Mattiro Deceng, Mattiro Ujung dan Mattiro Dolangeng. Selain itu, diberikan juga handphone SMS gateway untuk 4 (empat) Pokmaswas, yaitu Pokmaswas Mattiro Langi, Pokmaswas Mattiro Bintang, Pokmaswas Mattiro Labangeng dan Pokmaswas Mattiro Sompe.

d. Rekomendasi :

Diharapkan data yang diperoleh dalam identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

4. Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya perikanan di Kab. Bone dan Kota Makassar

a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 21 s/d 23 Agustus 2017

b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Bone dan Kota Makassar

c. Hasil yang dicapai :

1. Kabupaten Bone

No.	Sarana dan Prasarana	Penerima/Lokasi	Sumber Dana
1.	Handphone sms gateway, masing-masing 1 unit	1. Pokmaswas Palette Ds. Palette Kec. TR Timur 2. Pokmaswas Kel. Panyula Kec. TR Timur 3. Pokmaswas Angkue Ds. Angkue Kec. Kajuara 4. Pokmaswas Pattiro Sompe Kel. Pattiro Sompe Kec. Sibulue 5. Pokmaswas Bintang Laut Ds. Bajoe Kec. TR Timur	DAK DKP Sulsel 2017
2.	Perlengkapan Pokmaswas : rompi Pokmaswas, senter, GPS, kamera digital dan teropong, masing-masing 1 (satU) paket	1. Pokmaswas Sipatokkong Kel. Ujung Salangketo Kec. Mare 2. Pokmaswas Bahari Kel. Bulu Bulu Kec. Tonra 3. Pokmaswas Mallare Ade Kel. Mallare Kec. Awangpone 4. Pokmaswas Mabbarakkae Kel. Lamuru Kec. Tellu	APBN DKP Sulsel 2015
3.	Perahu Pokmaswas	1. Pokmaswas Mattiro Deceng Kel. Kajuara Kec. Awangpone 2. Kel. Lonrae Kec. TR Timur	DAK DKP Sulsel 2017
4.	Pos/Gedung Pengawasan, 1 unit	Kel. Lonrae Kec. TR Timur	DAK DKP Sulsel 2017
5.	Pos Pokmaswas, 1 unit	Pokmaswas Palatte Ds. Palette Kec. TR Timur	DAK DKP Bone 2015
6.	1 Unit Radio komunikasi SSB	Kel. Lonrae Kec. TR Timur	DAK DKP Bone 2010
7.	1 Unit Sepeda motor pengawas	Kel. Lonrae Kec. TR Timur	DAK DKP Bone 2010
8.	1 Unit Rel pengangkat/greed speedboat	Kel. Lonrae Kec. TR Timur	DAK DKP Bone 2010

2. Kota Makassar

No.	Sarana dan Prasarana	Penerima/Lokasi	Sumber Dana
1.	Handphone sms gateway, masing-masing 1 unit	1. Pokmaswas Bahari Kel. Barrang Lompo Kec. Ujung Tanah 2. Pokmaswas Panjis Kel. Kodingareng Kec. Ujung Tanah 3. Pokmaswas Cinta Bahari Pulau Lae Lae Kec. Ujung Pandang	DAK DKP Sulsel 2017
2.	Handy Talky, 1 unit	Pokmaswas Bahari Kel. Barrang Lompo Kec. Ujung Tanah	
3.	Perlengkapan Pokmaswas : rompi Pokmaswas, senter, GPS, kamera digital dan teropong, masing-masing 1 paket	1. Pokmaswas Cinta Bahari Pulau Lae Lae Kec. Ujung Pandang 2. Pokmaswas Baracuda Kel. Mariso Pulau Samalona 3. Pokmaswas Bahari Kel. Barrang Lompo Kec. Ujung Tanah	DAK DKP Sulsel 2017
4.	Steiger speedboat, 1 unit	Pulau Lae Lae Kec. Ujung Tanah	DAK DKTPP Makassar 2014
5.	Pos Pengawas, masing-masing 1 unit	1. Pulau Lumu Lumu Kec. Ujung Tanah 2. Kel. Gusung Kec. Ujung Tanah	DAK DKTPP Makassar 2015 DAK DKTPP Makassar 2011
6.	Speedboat, masing-masing 1 unit	1. Pulau Samalona Kec. Mariso 2. Kel. Gusung Kec. Ujung Pandang 3. Pulau Barrang Lompo Kec. Ujung Tanah 4. Pulau Lanyukang Kec. Ujung Pandang 5. Pulau Kodingareng Kec. Ujung Pandang 6. Pulau Lae Lae Kec. Ujung Tanah	DAK DKTPP Makassar 2013 DAK DKTPP Makassar 2014 DAK DKTPP Makassar 2015

d. Rekomendasi :

Dengan adanya kegiatan identifikasi dan inventarisasi sarana prasarana pengawasan sumber daya perikanan di Kab/kota diharapkan dapat mengupdate sarana prasarana pengawasan sumber daya perikanan di daerah.

5. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pengawasan di Kabupaten Wajo

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 11 s/d 13 September 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Kab. Wajo
- c. Hasil yang dicapai :

Data sarana dan prasarana pengawasan Kab. Wajo :

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Sumber Dana
1.	Handphone SMS Gateway	5	APBN 2015
2.	Perlengkapan Pokmaswas	3	DAK 2017
3.	Perahu Pokmaswas	2	DAK 2017

d. Rekomendasi :

Dengan adanya kegiatan identifikasi dan inventarisasi sarana prasarana pengawasan sumber daya perikanan di Kab/kota diharapkan dapat mengupdate sarana prasarana pengawasan sumber daya perikanan di daerah.

KEGIATAN APBN

A. Pertemuan Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Takalar

- Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2017
- Tempat : PPI Beba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
- Peserta : sebanyak 25 orang yang terdiri dari pengurus/anggota Pokmaswas dan aparatur Dinas Perikanan Kab. Takalar
- Hasil Kegiatan :
 - Pertemuan diikuti oleh pengurus dan anggota Pokmaswas Sejahtera, pengurus/anggota Pokmaswas Sitalassi, aparat Dinas Perikanan Kab. Takalar dan penyuluh perikanan dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
 - Peserta diberikan pemahaman, motivasi dan bimbingan teknis untuk dapat mewujudkan partisipasi dan kerjasama pengawasan melalui kelembagaan pengawasan yang berbasis masyarakat di daerah.
 - Sampai tahun 2017, Kab. Takalar telah mengukuhkan 18 Pokmaswas aktif yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan pesisir. Disampaikan oleh Ir. Nasaruddin (Kabid Pemberdayaan Kelompok Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kab. Takalar) bahwa selama ini Pokmaswas selalu berkoordinasi dan melaporkan ke Dinas Perikanan Kab. Takalar dan aparat penegak hukum terkait apabila ditemukan pelanggaran di wilayah perairannya.

4. Kebijakan Dinas Perikanan Kab. Takalar akan tetap mendukung eksistensi kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat, bahkan telah menyalurkan bantuan sarana penangkapan ikan kepada anggota Pokmaswas. Selanjutnya tetap konsen mendukung Pokmaswas memerangi peraktek *destructive fishing* serta tetap membina dan memperkuat peran kelembagaan pengawasan berbasis masyarakat.
5. Saharuddin (Ketua Pokmaswas Very Sejahtera) mengharapkan agar pengawas perikanan baik yang bertugas di Pos PSDKP Beba maupun DKP Prov. Sulsel untuk melakukan pencegahan terhadap aktivitas illegal fishing dan destruktif fishing di wilayah perairannya.
6. Pokmaswas Sitalassi berharap adanya bantuan sarana operasional berupa perahu Pokmaswas dan dapat diberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan/keterampilan pengurus/anggota Pokmaswas dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP di wilayahnya.
7. Tugas Pokmaswas yaitu melakukan pengawasan terhadap penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Anggota Pokmaswas dapat melakukan pengawasan penggunaan bom, pengawasan areal penangkapan dan mangrove. Jika Pokmaswas menemukan adanya pelanggaran, mereka dapat melakukan peringatan bahkan melaporkan hal tersebut kepada aparat Dinas Perikanan atau aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti

b. Pertemuan Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Barru

- a. Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
- b. Tempat : Sekretariat Pokmaswas Nirwana Bahari Kel. Mallawa
Kec. Mallusetasi
- c. Peserta : Pertemuan Pokmaswas dihadiri oleh peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari pengurus/anggota Pokmaswas Nirwana Bahari, pengurus/anggota Pokmaswas Batu Loange, penyuluh perikanan dan aparatur Dinas Perikanan Kab. Barru
- d. Hasil Kegiatan :

- 1) Pertemuan diikuti oleh pengurus/anggota Pokmaswas Nirwana Bahari, pengurus/anggota Pokmaswas Batu Loange, aparat Dinas Perikanan Kab. Barru dan penyuluh perikanan dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
- 2) Peserta diberikan pemahaman, motivasi dan bimbingan teknis untuk dapat mewujudkan partisipasi dan kerjasama pengawasan melalui kelembagaan pengawasan yang berbasis masyarakat di daerah.
- 3) Sampai tahun 2017, Kab. Barru telah mengukuhkan 25 Pokmaswas yang tersebar di 5 (lima) kecamatan pesisir, namun yang aktif hanya 3 (tiga) Pokmaswas. Pokmaswas tersebut telah berperan aktif untuk melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing dan melaporkan setiap kejadian pelanggaran yang terjadi kepada PPNS perikanan dan Polair, serta selalu dilibatkan dalam operasi terpadu pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Barru dan Polair.
- 4) Pembentukan UPT P3SKP WP Selat Makassar dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasan di kabupaten/kota di wilayah Selat Makassar yang merupakan imbas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Diharapkan mantan pelaku illegal fishing ikut terlibat dalam penyadaran masyarakat.
- 5) Diharapkan nelayan/anggota masyarakat yang belum tergabung dalam Pokmaswas dapat diajak untuk bergabung sehingga memudahkan sosialisasi bahaya destruktif fishing.
- 6) Pokmaswas dapat menjalankan fungsi pengawasan SDKP di wilayahnya masing-masing, dan pemerintah pusat/provinsi memfasilitasi dengan bantuan perahu dan perlengkapan Pokmaswas.
- 7) Baktiar (Pengurus Pokmaswas Batu Loange) mengharapkan agar Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel untuk lebih gencar melakukan pengawasan di wilayah perairan Barru guna meminimalisir aktivitas bus dan bom yang sedang marak terjadi di wilayah ini, hal ini telah dilaporkan kepada Dinas Perikanan Kab. Barru, namun belum ditindaklanjuti karena terkendala dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kewenangan

pengawasan laut 0 – 12 mil berada di provinsi. Selama ini Pokmaswas secara rutin melakukan pengawasan bersama-sama PPNS dan Babinsa setempat, serta sering terlibat dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan SDKP.

- 8) Sarifudin (Pengurus Pokmaswas Nirwana Bahari) meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel untuk lebih memperhatikan nelayan Mallusetasi yang semakin kecil areal penangkapan dan transportasi nelayan akibat perluasan areal budidaya mutiara oleh PT. Toms.
9. Drs. Ramli Laca (Kabid Pemberdayaan Kelompok Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kab. Barru) menyatakan bahwa pada awalnya PT. Toms (pembudidaya mutiara) mendapatkan 3 titik, kemudian diberikan rekomendasi untuk membuka 2 titik sehingga menjadi 5 titik. Menanggapi keluhan nelayan tentang perluasan areal budidaya mutiara, Dinas Perikanan Kab. Barru akan menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan peninjauan areal budidaya mutiara tersebut guna mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi.

b. Kegiatan Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Posisi strategis ini menyimpan potensi kekayaan laut yang cukup besar dan keanekaragaman, yang mendorong terjadinya eksploitasi besar-besaran oleh kapal-kapal ikan Indonesia maupun penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing. Kekayaan laut yang cukup melimpah ini perlu dijaga kelestariannya demi tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran dimasa sekarang dan masa akan datang.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, masih banyak permasalahan yang dialami seperti kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir termasuk kerusakan terumbu karang, pencemaran di berbagai kawasan pesisir dan laut, penangkapan ikan yang berlebihan, keterbatasan dana, rendahnya kualitas SDM, kurangnya koordinasi dan kerjasama antara stake holder, lemahnya penegakan hukum dan kemiskinan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu sebagai bagian dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki fungsi menertibkan, mengatur dan menindak bagi mereka yang melanggar dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan . Dengan demikian diharapkan segera terwujud sebuah pengelolaan yang tertib dan bertanggung jawab sehingga sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kepelaksanaan kegiatan tahun 2017 maka dapat dilaporkan kegiatan seksi pengawasan sumberdaya kelautan dari bulan januari s/d Desember sebagai berikut :

I. Kegiatan Workshop Siswasmas Kelautan.

Kegiatan Workshop siswasmas kelautan tahun 2017 dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu :

- Workshop Siswasmas Kelautan
- Fieldtrip Siswasmas Kelautan

Dari hasil kegiatan dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Pertemuan Workshop Siswasmas Kelautan

- waktu pelaksanaan : 22 s/d 24 Maret 2017
- Tempat pelaksanaan : Hotel Grand Celino, Jl.Lanto Dg. Pasewang No. 20 Makassar.
- Peserta : 40 orang (staf DKP provinsi dan masyarakat pengawas kab/kota)
- Hasil yang dicapai :
 - a. Pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan berbasis masyarakat merupakan salah satu pembagian tanggungjawab dan atau otorisasi antara pemerintah dengan penggunaan sumberdaya local untuk mengelola yaitu Pengelolaan berbasis masyarakat.
 - b. Guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi selatan secara baik, bertanggungjawab, berkelanjutan dan lestari sehingga perlu dikembangkan pengawasan system

berbasis masyarakat sehingga pengawasan pemanfaatan serta pengelolaannya dapat terjangkau lebih luas.

- c. Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan diharapkan agar setiap pokmaswas mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya. Kemudian melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau dugaan tindak pidana di bidang perikanan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum yang selanjutnya melalui aparat tersebut selanjutnya pihak yang berwenangan menindak lanjuti dengan penyelidikan atau indikasi yang terjadi.

2. Perjalanan dinas Luar Daerah

Kegiatan workshop siswasmas kelautan disertai kegiatan field trip di provinsi Bali pada tanggal 22 s/d 24 Maret 2017 dengan Tujuan utama sebagai berikut:

- a. Mengunjungi dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan agenda untuk mengetahui peran dan program pemerintah setempat dalam memajukan kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Provinsi Bali, saling bertukar informasi tentang permasalahan dan solusi lapangan dari aparat pemerintah terhadap Kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) dan mengetahui peran Dinas dalam mengurangi kegiatan ilegal dan destructive Fishing di Provinsi Bali.
- b. Mengunjungi kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berprestasi di Tingkat nasional Hasil yang dicapai :
 - ✓ Kelompok Masyarakat Pengawas yang telah dibina / terdaftar dan masih aktif berjumlah 70 kelompok kab/kota yang terdiri dari Badung: 9 kelompok, Tabanan 12 kelompok, Jembara 12 kelompok, Buleleng 10 kelompok, Karangasem 6 kelompok, Klungkung 4 kelompok, Ganyar 5 kelompok, Bangli 6 kelompok dan Denpasar 6 kelompok.
 - ✓ Pokmaswas yang dikunjungi adalah Pokmaswas Zona Bahari di Kelurahan Gili Manuk Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Ketua Pokmaswas adalah bapak Selamat Hariyanto,

pokmaswas ini terbentuk pada tanggal 26 Mei 2012. Kunjungan di media toroleh pemerintah kabupaten dan dinas kelautan dan perikanan provinsi bali

- ✓ Pokmaswas Zona Bahari adalah Pokmaswas yang berprestasi dan menerima penghargaan tingkat nasional.

II. Kegiatan Patroli Terpadu Pengawasan Sumberdaya Kelautan

a. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Bulukumba

- Waktu pelaksanaan: 05-07 April 2017.
- Hasil yang dicapai :
 - Tim mulai bergerak menuju wilayah pangkalan yang dicurigai rawan terhadap praktik illegal fishing yang terletak antara pulau selayar, pantai bira dan perairan bulukumba dengan titik Koordinat S 05 ° 33 215 ° dan E 120 ° 11 426 ° dimana daerah tersebut rawan terhadap kegiatan pembiusan yang dilakukan oleh nelayan dari kab. Sinjai , pulau –pulau di Makassar dan dari Kab. Selayar. Namun dari beberapa penelusuran dan pemantauan oleh kami tim patroli masih dijumpai nelayan tradisional menggunakan alat tangkap pancing.
 - Dari pemantauan dilakukan pemeriksaan terhadap dua kapal nelayan tangkap pancing dengan data hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Identifikasi Kapal
 - Nama Kapal : Kmn. Bahari
 - Jenis Kapal : Purse seine
 - Ukuran Kapal : 26 GT
 - Pemilik Kapal : Syamsul
 - Nama Nakhoda : Syamsul
 - Jumlah ABK : 10 Orang
 - No. SIPI/SIKPI : 02.16.01.7398.0067

- Hasil Pemeriksaan ditemukan :
 - Dokumen kapal lengkap serta tidak ditemui barang yang mencurigakan.

Selanjutnya dilakukan pemantauan pemeriksaan kapal lain dengan data Sebagai berikut :

Identifikasi Kapal

- Nama Kapal : Kmn. Aman Jaya
- Ukuran Kapal : 1 GT
- Pemilik Kapal : H.Amran
- Nama Nakhoda : Basri
- Jumlah ABK : 10 Orang

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dokumen data lengkap dimana pemilik dari kapal tersebut anggota Pokmaswas.

b. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Maros

- Waktu pelaksanaan: 26-27 April 2017.
- Hasil yang dicapai :
 - Tim mulai bergerak menuju perairan Kabupaten Maros pada Pukul 07.00 yang selanjutnya mengarah ke perairan Maros di mana ditemukan pada titik Koordinat S 04 ° 57 ° 08 ° dan E 119 ° 27°14 ° selanjutnya perjalanan patroli dilakukan yang mengarah ke wilayah perairan dicurigai yang marak dengan tindakan/pelanggaran illegal fishing seperti pembiusan ikan yang dilakukan oleh nelayan, dan kemudian dilanjutkan penelusuran serta pemantauan pada perairan tersebut yang dilakukan oleh tim pengawas beberapa di jumpai nelayan tradisional saat mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing.
 - Tim pengawas patroli melanjutkan perjalanan pada lokasi penelusuran dimana ditemukan /dicurigai terhadap kapal nelayan alat tangkap pancing, dengan beberapa hasil pemeriksaan yang kami

lakukan pada kapal nelayan tersebut maka diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Kapal

- Nama Kapal : Bunga Biraena
- Jenis Kapal : Tangkap
- Ukuran Kapal : 3 GT
- Pemilik Kapal : Hamzah
- Nama Nakhoda : Hamzah
- Jumlah ABK : 2 orang
- No. SIPI/SIKPI : -
- Hasil Pemeriksaan ditemukan :
 - Kapal tersebut ditemukan tidak membawa dokumen/data yang lengkap.

c. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Pangkep.

- Waktu pelaksanaan : 26-27 April 2017.
- Hasil yang dicapai:
 - Tim mulai bergerak menuju perairan Kabupaten Pangkep pada Pukul 07.00 yang selanjutnya mengarah ke perairan Pangkep di mana ditemukan pada titik Koordinat S 04 ° 58 ' 14 " dan E 119 ° 24 ' 164 " selanjutnya perjalanan patroli dilakukan yang mengarah ke wilayah perairan dicurigai yang marak dengan tindakan/pelanggaran illegal fishing seperti pembiusan ikan yang dilakukan oleh nelayan, dan kemudian dilanjutkan penelusuran serta pemantauan pada perairan tersebut yang dilakukan oleh tim pengawas beberapa di jumpai nelayan tradisional saat mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing.
 - Tim pengawas patroli melanjutkan perjalanan pada lokasi penelusuran dimana ditemukan /dicurigai terhadap kapal nelayan alat tangkap pancing, dengan beberapa hasil pemeriksaan yang kami

lakukan pada kapal nelayan tersebut maka diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Identifikasi Kapal

- Nama Kapal : Seroja
 - Jenis Kapal : Tangkap (Jokloro)
 - Ukuran Kapal : 3 GT
 - Pemilik Kapal : Samsuddin
 - Nama Nakhoda : Samsuddin
 - Jumlah ABK : 2 orang
 - No. SIPI/SIKPI : -
- Hasil Pemeriksaan ditemukan :
 - Kelengkapan dokumen/data kapal tidak ada saat pemeriksaan
 - Dan tidak ditemui adanya barang yang mencurigakan / penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya diwilayah perairan kab. Pangkep.

d. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Takalar.

- Waktu pelaksanaan: 26-27 April 2017.
- Hasil yang dicapai :
 - Tim mulai bergerak menuju perairan Kabupaten Takalar pada Pukul 07.00 yang selanjutnya mengarah ke perairan Takalar di mana ditemukan pada titik Koordinat S 05 ° 09 ' 59,8 " dan E 119 ° 22 ' 43,6 " selanjutnya perjalanan patroli dilakukan yang mengarah ke wilayah perairan dicurigai yang marak dengan tindakan/pelanggaran illegal fishing seperti pembusukan ikan yang dilakukan oleh nelayan, dan kemudian dilanjutkan penelusuran serta pemantauan pada perairan tersebut yang dilakukan oleh tim pengawas beberapa di jumpai kapal nelayan tradisional saat mencari ikan .
 - Tim pengawas kemudian melakukan pemeriksaan dan beberapa hasil pemeriksaan yang kami lakukan pada kapal nelayan tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Identifikasi Kapal
 - Nama Kapal : Km. Dedes
 - Jenis Kapal : Cantrang
 - Ukuran Kapal : 5 GT
 - Pemilik Kapal : Dg. Rappo
 - Nama Nakhoda : Dg. Rappo
 - Jumlah ABK : 6 orang
 - No. SIPI/SIKPI : Ada
- Hasil Pemeriksaan ditemukan :
 - Dokumen/data Kapal yang lengkap.
 - Masih ditemukan penggunaan alat tangkap cantrang yang dilarang karena dapat merusak ekosistem biota laut pada wilayah perairan tersebut.
- Selanjutnya tim pengawas patroili melanjutkan perjalanan pada lokasi perairan Takalar guna penelusuran lebih lanjut kewilayah perairan Takalar dengan titik koordinat S 05 °10 ' 40,8 " dan E 119 ° 22 ' 34,7 " , juga dimana ditemukan /dicurigai terhadap kapal nelayan yang juga menggunakan alat tangkap cantrang , tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai dengan beberapa hasil pemeriksaan yang kami lakukan pada kapal nelayan tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut :
- Identifikasi Kapal
 - Nama Kapal : Bunga Desa
 - Jenis Kapal : Tangkap
 - Ukuran Kapal : 3 GT
 - Pemilik Kapal : Hamzah Dg. Sikki
 - Nama Nakhoda : Hamzah Dg. Sikki
 - Jumlah ABK : 4 orang
 - No. SIPI/SIKPI : -

- Hasil Pemeriksaan ditemukan :
 - Kapal tersebut ditemukan tidak membawa dokumen/data yang lengkap.
 - Juga ditemukan penggunaan alat tangkap cantrang yang dilarang karena dapat merusak ekosistem biota laut pada wilayah perairan tersebut.
- e. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Luwu Utara
 - Waktu Pelaksanaan : 18- 21 Juli 2017.
 - Hasil yang dicapai :
 - Berdasarkan laporan dari kelompok masyarakat pengawas dan aparat TNI AL yang berada di kec. Bone-Bone telah terjadi kerusakan terumbu karang diperairan Luwu Utara (Kawasan teluk Bone) hal ini disebabkan oleh kegiatan pemboman, bus dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggungjawab.
 - Patroli pengawasan terpadu dilakukan oleh tim DKP Provinsi yang bersama-sama dengan TNI AL, DKP Lutra, HSNI dan Pokmaswas yang ada diwilayah tersebut.
 - Tim menuju ke wilayah penangkapan pada wilayah titik rawan terhadap illegal fishing, dimana jalur yang dilalui merupakan wilayah budidaya rumput laut yang perlu dilakukan pengaturan tata ruang pengelolaan rumput laut yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dikemudian hari. Pengawasan tim patroli berada pada titik koordinat S : 02 40 ° 961 ° dan E 120 36 ° 199.
 - Selanjutnya ke lokasi terumbu karang yang sudah mengalami kerusakan namun diwilayah ini tidak dijumpai adanya kegiatan penangkapan dengan titik koordinat S : 02 42 ° 979 ° dan E 120 36 ° 692 ° kemudian pengawasan ke arah timur dengan titik koordinat S : 02 42 ° 154 ° dan E 120 40 ° 038 ° ditemukan salah satu kapal yang melakukan kegiatan

penangkapan ikan dengan menggunakan kapal purse seine dengan hasil pemeriksaan data sebagai berikut :

Identifikasi Kapal :

- Nama Kapal : Kmn. Mufti
 - Asal : Luwu Utara, Sulsel
 - Jumlah ABK : 8 Orang
 - Pemilik : Marsuki
 - Alat Tangkap : Purse seine
 - Ukuran kapal : 6 GT (15 x 2.20 x 1.2)
 - SIUP : 897/P2T-BKPMMD/4.11.P/VII/10/2015
 - SIPI : 896/ P2T-BKPMMD/4.11.P/VII/10/2015
- Dengan hasil pemeriksaan :
 - Dokumen kapal yang dimiliki sudah habis masa berlakunya.
 - Penyitaan dokumen kapal untuk memberikan efek jera bagi pelaku dengan ketentuan akan diberikan surat pernyataan akan mengurus kelengkapan dokumen baru dan juga berdasarkan pengamatan dimana ukuran kapal tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya sehingga perlu dilakukan pengukuran ulang.

f. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan di Perairan Kab. Pangkep

- Waktu Pelaksanaan : 01- 03 Agustus 2017
- Hasil yang dicapai :
 - Pengawasan tim patroli menuju perairan kecamatan liukang, tupabbiring disekitar perairan podang-podang dengan titik koordinat S : 04 53 ° 04,1 ° dan E 119 20 ° 27,3 ° bahwa di pulau ini mayoritas nelayannya menggunakan alat tangkap cantrang yang penggunaannya sangat mengganggu bahkan merugikan nelayan kecil.
 - Kemudian dilanjutkan penelusuran pengawasan menuju perairan pulau bontosua tepatnya dititik Koordinat S : 04 56 ° 34,9 ° dan E 119 19 ° 22,8 ° ditemukan kapal nelayan dengan menggunakan alat tangkap

pursesine. Adapun hasil pemeriksaan kapal diperoleh data sebagai berikut :

- Nama Kapal : Kmn. Sinar Baru 02
 - Alamat : Pulau Bontosua
 - Asal : Luwu Utara, Sulsel
 - Jumlah ABK : 10 Orang
 - Pemilik/Nakhoda : nasrullah
 - Alat Tangkap : Purse seine
 - Ukuran kapal : 28 GT
 - SIUP : 02.16.01.7398.0021
 - SIPI : 02.16.01.7398.0067
- Pengawasan terkait dengan pemeriksaan terhadap dokumen kapal sebagai wujud pemantauan terhadap nelayan yang taat aturan serta mengetahui permasalahan nelayan dalam pengurusan surat izin yang telah ditentukan dalam kegiatan penangkapan ikan.

g. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab.Bone

Waktu Pelaksanaan : 04 s/d 06 September 2017

Hasil yang dicapai :

- Pelaksanaan operasi/ patrol pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan diwilayah perairan Kab. Bone yang difokuskan diwilayah perairan pedalaman Tellu Siattinge hingga perairan Tanete Riattang Timur dan sekitarnya yang cenderung taat dan patuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Namun berdasarkan pengakuan nelayan setempat masih sering ditemukan adanya praktek penangkapan ikan secara destructive dan illegal (tanpa dokumen) khususnya bagi nelayan kecil yang biasanya tidak memiliki dokumen kapal perikanan , akibatnya secara statistic, kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil tidak terdaftar dan tidak mendapat control pengawasan pengendalian dari pemerintah daerah.

- Selama pemantauan patrol pengawasan di perairan teluk bone dengan posisi titik koordinat S : 4° 49'15.76" dan T 120 ° 30'35.01" kondisi ombak agak tinggi, sehingga agak kami agak sulit mendekati kapal dan juga beberapa kali terjadi benturan antara kapal pengawas dan kapal nelayan. Adapun kapal nelayan yang di jumpai :
 - Nama Kapal : Km. Mardin Jaya
 - Ukuran Kapal : 6 GT
 - Hasil pemeriksaan : penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang.
 - Dilakukan pembinaan dan batas waktu pada nelayan tersebut terkait dengan alat tangkap yang digunakan .
- Dan juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sebagai perpanjangan tangan pemerintah khususnya DKP Provinsi terkait maraknya praktek penangkapan ikan ilegal dan destruksi yang dapat merusak wilayah pemanfaatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

h. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Sinjai

- Waktu Pelaksanaan : 13 s/d 15 September 2017
- Hasil yang dicapai :
- Pengawasan patroli terpadu oleh Tim dimana perjalanan mulai bergerak menuju perairan Pulau sembilan Kabupaten Sinjai yang dicurigai bahwa wilayah penangkapan dan wilayah titik rawan illegal fishing dimana disinyalir masih terdapat kegiatan bom dan bus yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dengan titik koordinat S 05 06 592 ° dan E 120 17 39.8 ° selanjutnya pengawasan patrol perjalanan kearah selatan tepatnya di perairan pulau Kambuna(Pulau harapan) dititik koordinat S 05 06 591 ° dan E 120 20 438 ° selama pelayaran dijumpai kapal nelayannya dengan hasil pemeriksaan bahwa kapal tersebut melakukan pembelian ikan dikeramba nelayan seperti ikan

kakap merah , ikan kerapu dan jenis ikan ekonomis tinggi namun tidak dijumpai komoditas ikan yang dilindungi (Ikan Napoleon).

- Sebagian penggunaan keramba bagi nelayan yang terdapat dipulau Kambuna sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan biaya operasional yang tinggi dan sebagai alternative mata pencaharian
Dikawasan pulau tersebut nelayan melakukan budidaya rumput laut dengan hasil yang cukup memuaskan bagi nelayan sehingga ini juga bias memutus mata rantai kegiatan bom bus ikan yang dilakukan oleh sebagian warga pulau tersebut.
- Pelaku illegal fishing dengan cara penggunaan alat tangkap trawl yang berasal dari nelayan kabupaten Bone dimana sangat meresahkan nelayan kecil yang berada dikabupaten Sinjai.
- Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang sudah terbentuk dipulau Kambuno sangat diharapkan perannya untuk mengurangi aktifitas illegal fishing diwilayah ini.

i. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Teluk Bone

- Waktu Pelaksanaan : 06 - 08 November 2017.
- Hasil yang dicapai :
 - Wilayah Kabupaten Bone mempunyai luas sekitar 4.599 km² dengan garis pantai sepanjang 138 km yang memanjang dari utara keselatan dipesisir teluk Bone . Pengembangan potensi sector kelautan dan perikanan yang ada di kabuapten Bone untuk penangkapan ikan, budidaya laut dan budidaya tawar (air payau).
 - Patroli pengawasan yang di mulai dan tim berkumpul di pelabuhan penyeberangan Bajoe siap meneleusuri wilayah perairan teluk Bone dengan posisi berada pada titik koordinat S : 04 ° 33 ' 040 " dan E 120 ° 23 ' 620 " mengarah ke wilayah muara sungai kecamatan Barebbo dicurigai marak dengan tindakan/pelanggaran illegal fishing seperti pembiusan ikan yang dilakukan nelayan.

- Selama dalam penelusuran tim pengawasan melakukan patrol menjumpai beberapa kapal nelayan tradisional yang ukuran rata-rata ≤ 6 GT dan sebagian kapal kecil ada yang mengangkut penumpang juga beberapa tanaman hias dan perlengkapan peralatan lainnya.
- Selanjutnya tim patrol melanjutkan penelusuran ditemukan kapal KM. Sibell yang terparkir tidak ditemukan nakhoda dan ABK kapal dan tim melakukan pemeriksaan ditemukan dalam kapal tersebut terdapat alat tangkap cantrang untuk mendangkap ikan. Namun sayangnya kami mau memberikan teguran namun tidak ditemukan satu orang pun yang ada didalam kapal tersebut.
- Selanjutnya Penelusuran menuju wilayah perairan pedalaman kecamatan Tonra pada titik koordinat S : $09^{\circ} 23' 653''$ dan E $120^{\circ} 24' 500''$, dijumpai Kapal KM, Amal yang berukuran ≤ 3 GT hasil pemeriksaan hanya ditemukan kapal tersebut mengangkut ikan-ikan pelagis seperti kakap, kerapu dll dan menurut Awak kapal bahwa ikan tersebut akan dijual disekitar pelabuhan Bone atau dipasar dan tidak ditemukan alat tangkap yang dilarang (spt. Cantrang/trawl).

j. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan di Perairan Kab. Sinjai

- Waktu Pelaksanaan : 13 s/d 15 november 2017
- Hasil yang dicapai :
 - Pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan kab. Sinjai yang dicurigai marak/ terjadi tindakan pelanggaran. Tim patroli mulai berkumpul pelabuhan penyebrangan Lappa dengan mempersiapkan kapal, bahan bakar dan akomodasi lainnya. Tim bergerak menuju perairan yang dicurigai/marak terjadi tindakan pelanggaran dengan posisi titik koordinat S : $05^{\circ} 05' 888''$ dan E $120^{\circ} 24' 889''$ dalam penelusuran tim tidak menjumpai kapal nelayan dalam mencari ikan,
 - kemudian tim melanjutkan penelusuran patrol ke wilayah perairan kecamatan tongke-tongke dengan titik koordinat S : $05^{\circ} 05' 938''$ dan E $120^{\circ} 25' 055''$ dalam penelusuran tim patrol menjumpai kapal

nelayan yang sedang mengangut ikan dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan menggunakan alat tangkap yang dilarang.

- Selanjutnya penelusuran patrol mengarah ke wilayah pedalaman perairan Sinjai namun tidak dijumpai kapal nelayan hanya beberapa kegiatan penangkapan ikan/keramba seperti keramba Lobster serta budidaya rumput laut sebagai alternative mata pencaharian bagi nelayan setempat.

K. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kota.Pare-Pare dan Kab. Pinrang

Waktu Pelaksanaan : 20 s/d 23 November 2017

Hasil yang dicapai :

- Tim mulai bertolak dari pedalaman pesisir ujung lero kecamatan Suppa dengan titik koordinat S : 03 ° 97 ' 950 " dan E 119 ° 59 ' 816 " selama dalam penelusuran/ pemantauan pengawasan dijumpai beberapa nelayan mencari ikan dengan menggunakan pancing tidak ditemukan adanya dengan tindakan/pelanggaran illegal fishing seperti pembiusan ikan yang dilakukan oleh nelayan, dan kemudian dilanjutkan penelusuran serta pemantauan pada perairan tersebut yang dilakukan oleh tim pengawas beberapa di jumpai kapal nelayan tradisional saat mencari ikan .
- Selama dalam penelusuran patroli pengawasan di wilayah perairan suppa dijumpai beberapa kapal nelayan namun tidak ada yang mencurigakan dimana hasil pemeriksaan kapal tidak ditemukan penggunaan alat tangkap /obat bius yang dilarang hanya menggunakan dengan pancing saat menangkap ikan.
- Menurut informasi dinas setempat bahwa ternyata untuk kapal-kapal besar diatas 10 GT , dalam pencarian ikan tidak dilakukan penangkapan diwilayah Pare-pare dan Pinrang dikarenakan kondisi angin laut mengarah ke timur sehingga nelayan tersebut mencari ikan ke wilayah Sulawesi Tenggara di mana ikan tersebut ber-migrasi /berkumpul. Untuk itu dalam pengawasan patroli hanya dijumpai kapal-kapal kecil dibawah 2 GT yang

mencari ikan hanya dengan alat tangkap tradisional/pancing yang ramah lingkungan.

- Dalam patroli pemantauan selama penelusuran dijumpai kapal penangkapan ikan antara lain KM. Almubarak dan km. Cahaya tanete, kapasitas 5GT, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti /penggunaan alat tangkap atau bahan kimia berbahaya(KCN) seperti bius/bom ikan.
- Serta beberapa tambak-tambak ikan maupun rumput laut sebagai pengganti mata pencaharian bagi masyarakat nelayan diwilayah sekitarnya.
- Jumlah Kelompok pengawasa (Pokmaswas) kab.Pare-pare sebanyak 2 kelompok yang masih aktif yang bersama2 dengan Dinas setempat bekerja sama untuk membantu Pemerintah dalam mengawasi pemanfaatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Serta Jumlah Kelompok pengawas yang masih aktif di Kabupaten Pinrang sebanyak 6 kelompok yang bekerjasama dengan Dinas Setempat/PPNS yang ada sebanyak 2 orang untuk membantu pemerintah dalam mengoptimalkan dan memperketat pengawasan dilaut dalam mengurangi kejahatan penangkapan ikan secara illegal.

L. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Selayar.

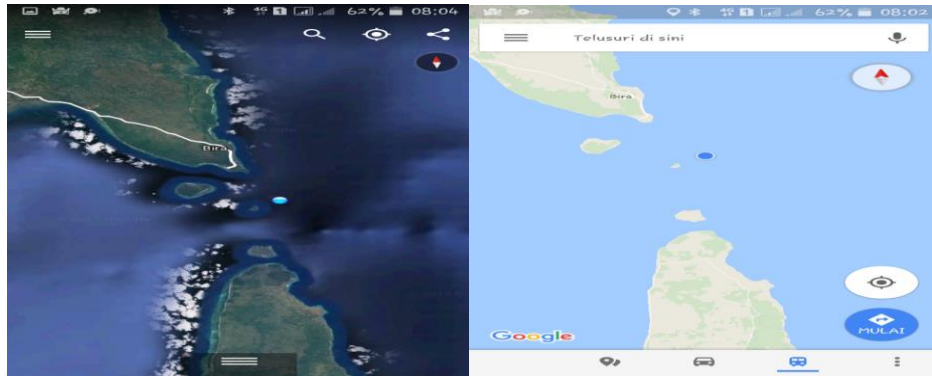
- Waktu Pelaksanaan : 27 s/d 30 November 2017

- Hasil yang dicapai :

- Secara geografis kab. Selayar terletak antara 5°42' - 7° 35' LS dan 120°15' – 122° 30' BT, Kab. Selayar dibatasi oleh sebelah utara kab. Bulukumba, Sebelah Timur laut Flores, sebelah barat laut flores dan selat Makassar dan sebelah selatan NTT. Secara administrasi kab kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 kecamatan 6 kecamatan daratan dan 5 kecamatan kepulauan.
- Kab kepulauan selayar memiliki 130 gususan pulau yang tersebar pada lima kecamatan kepulauan yang ada. Luasnya wilayah kepulauan ini menjadi potensi Kelautan dan perikanan dan juga menjadi potensi yang

besar untuk dirusak dan dijadikan sentra kegiatan *ILLEGAL FISHING* baik oleh nelayan lokal maupun oleh nelayan dari luar kab. Kepulauan Selayar.

- Tim berkumpul di pangkalan kapal pengawas DKP kab. Selayar Titik koordinat S : 05.33°.953 ° E : 120 11 ° 548 ° Titik S : 05° 50° 093° dan E : 120° 31° 022



- Patroli dilanjutkan kelokasi yang di perairan pamatata yang merupakan daerah atau lokasi pemancingan dari nelayan Bulukumba, Sinjai dan Selayar sehingga merupakan perairan yang rawan terhadap kegiatan bom dan bius baik nelayan lokal maupun nelayan pendatang titik rawannya adalah S : 05° 50° 008 dan E : 120° 30 996° , menurut nelayan pamatata lokasi ini adalah lokasi pemancingan dengan aktivitas malam hari.
- Lokasi selanjutnya yang merupaka lokasi pemantauan adalah teluk tanete yang merupakan perairan laut flores titik rawannya adalah S : 05° 47 197 dan E : 120° 33 677 lokasi ini kondisi terumbu karangnya masih bagus sehingga sangat rawan bagi kegiatan illegal Fishing.
- Berdasarkan wawancara dan laporan masyarakat kegiatan destructive fishing biasanya dilakukan pada malam hari baik nelayan lokal maupun nelayan dari luar baik dari Bulukumba maupun Sinjai.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap kapal Perikanan yaitu “KM. Inka Mina yang beroperasi di kab. Selayar maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. KM. Inka Mina tidak memiliki kelengkapan Dokumen Kapal baik Pas Besar maupun SIPU/SIPI sehingga sangat rawan untuk dikenakan pidana.
- b. Untuk wilayah operasi KM. Inka Mina hanya beroperasi diperairan Selayar dikarenakan ketidakadaan Dokumen kapal.
- c. Pemilik kapal sangat mengharapkan solusi agar kapal tersebut bisa segera memiliki Dokumen sehingga bisa melakukan kegiatan penangkapan secara legal.

M. Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengawasan Terpadu SDK Kab. Bulukumba.

- Waktu Pelaksanaan : 05 s/d 08 Desember 2017
- Hasil yang dicapai :
 - Kegiatan pengawasam dilakukan di kab. Bulukumba sedikit terkendala dengan keadaan cuaca yang kurang bersahabat sehingga menghambat kegiatan pengawasan di perairan herlang kab. Bulukumba.
 - Tim berkumpul di pangkalan pendaratan ikan (PPI) herlang kab. Bulukumba dengan posisi titik koordinat S 05 21° 951 ° dan E 120 24 ° 252 °
 - Pukul 08.00 wita tim bergerak menuju wilayah penangkapan dan wilayah titik rawan illegal fishing. Titik rawan berada diperairan herlang yang berada didaerah teluk Bone sehingga sangat rawan terjadi pengeboman ikan dan bus. Adapun pelaku berasal dari wilayah bulukumba sendiri maupun dari wilayah lain seperti dari kab. Sinjai.
 - Dikab. Bulukumba kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) belum ada terbentuk sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan belum berjalan , untuk itu diharapkan Dinas terkait untu memfasilitasi pembentukan POKMASWAS di daerah kec. Herlang.
 - Berdasarkan pengamatan kapal yang ada didermaga herlang didominasi oleh kapal nelayan dengan alat tangkap Purse seine (pukat cincin) dengan wilayah penangkapan berada didaerah perairan teluk Bone dan laut Flores. Berdasarkan pemeriksaan terhadap salah satu kapal nelayan maka diperoleh data pemeriksaan sebagai berikut :

- Nama kapal : Kmn. Edi Putr 01
- Alat tangkap : Purse seine
- Pemilik : Patiroid
- Dokumen : SIUP dan SIPI
- Wilayah tangkapan : teluk Bone dan laut Flores (WPP 713)

- Wilayah pengawasan di perairan Herlang beada dititik Koordinat S 05 22° 420 ° dan E 120 24 ° 313 ° pada titik ini berpotensi ikan karang yang masih bagus mengingat masih adanya karang yang belum rusak sehingga kegiatan pengawasan dan pelestarian terumbu karang sangat penting.

c. Kegiatan Seksi Penanganan Pelanggaran

1. Penyusunan Peta Rawan Illegal Fishing

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 01 Juli s/d 10 Desember 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Hasil yang dicapai :

Kegiatan penyusunan peta rawan illegal fishing diawali dari kegiatan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Propinsi Sulawesi Selatan guna menyusun agenda atau rencana yang akan dilakukan baik ditingkat lapangan maupun dalam rangka cetak peta rawan illegal fishing. Kegiatan selanjutnya adalah pengambilan data daerah rawan illegal fishing di Kabupaten/Kota di wilayah perairan pesisir provinsi Sulawesi Selatan, dan pembuatan/pencetakan peta rawan illegal fishing sebanyak 7 (tujuh) buah.

2. Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan

a. Kabupaten Bone.

- ✓ Maksud dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bone adalah agar masyarakat pelaku perikanan (nelayan penangkap ikan) di Kabupaten Bone lebih memahami dan sadar hal-hal seperti apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan ikan di laut dan

kemudian menangkap ikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- ✓ Tujuan dilaksanakan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka perlindungan Sumber Daya Ikan agar masyarakat pelaku perikanan di Indonesia sadar tentang hukum dan tahu aturan serta tata cara menangkap ikan yang sesuai dan benar dengan yang dianjurkan oleh pemerintah lewat kebijakan yang dikeluarkan. Dan harapan kita bersama antara masyarakat pelaku perikanan dan pemerintah dapat terapai atas kerja sama yang baik.
- ✓ Sasaran atau penerima manfaat dari kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone adalah masyarakat nelayan di Desa Letangpatue Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone sebagai pemanfaat langsung dari sumberdaya kalautan dan perikanan, sebab dengan penyuluhan hukum dan peraturan di bidang kelautan dan perikanan ini diharapkan masyarakat di daerah tersebut dapat mengawal dan menjaga keberlanjutan sumberdaya di bidang kalautan dan perikanan.
- ✓ Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka perlindungan Sumber Daya Ikan dilaksanakan di Kabupaten Bone di Mesjid Desa Letangpatue Usto Kecamatan Mare, pada tanggal 18 Mei 2017.
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka perlindungan Sumber Daya Ikan di Mesjid Desa Letangpatue Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang terdiri dari 25 Orang dari nelayan Letangpatue Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone dan 5 Orang dari nelayan Lappa Kabupaten Sinjai.
- ✓ Dari hasil pelaksanaan pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka perlindungan Sumber Daya Ikan ini dapat dilihat bahwa masyarakat nelayan penangkap ikan di Letangpatue Usto Kecamatan Mare Kabupaten Bone ini sangat antusias dan sadar bahwa penggunaan

alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat nelayan penangkap ikan di daerah tersebut untuk mengganti alat tangkap trawl atau cantrang yang selama ini mereka pergunakan untuk menangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Meskipun demikian mengingat Kabupaten Bone memiliki potensi perikanan yang cukup besar, maka dipandang perlu untuk dilakukan Pengawasan yang lebih Intensif dan berkelanjutan lewat Patroli laut oleh PPNS Provinsi dan PPNS Kab/Kota bekerja sama dengan beberapa Instansi terkait dan kelompok Pengawas (Pokmaswas) yang telah di SK kan oleh Bupati atau Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

- ✓ Diharapkan setelah selesai dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bone dapat memberi dampak positif serta nilai tambah untuk masyarakat kelompok nelayan penangkap ikan di daerah ini dengan harapan dapat mengurangi kasus pelanggaran penangkapan ikan dalam hal Illegal Fishing yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan perairan sebagai habitat tempat kelangsungan hidup ikan.

b. Kabupaten Sinjai

- ✓ Sasaran dari kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Sinjai ini adalah masyarakat nelayan / wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang berdomisili di Kabupaten Sinjai dan sekitarnya yang bermata pencaharian nelayan dan setiap harinya menangkap ikan yang di harapkan Sadar dan Paham tentang Peraturan Perundang – Undangan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.
- ✓ Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Sinjai Tahun 2017

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Perundang-Undang Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Sinjai Tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone.
- ✓ Berdasarkan hasil pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2017 adalah dijelaskan bahwa Pembangunan laut dan perikanan mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, mengingat tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia masih rendah dan sarana geografis Kabupaten Sinjai berada pada posisi yang strategis baik dari segi usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, industri pengolahan ikan maupun pemasarannya. Beberapa fasilitas menunjang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai antara lain: Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Teluk Bone memiliki sumber daya ikan yang cukup besar dengan produksi mencapai 27 ribu ton pertahun. Sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki armada dan produksi yang besar, Kabupaten Sinjai harus memiliki tempat pendaratan ikan. Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Sinjai dikategorikan sebagai pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe D yang terletak di kelurahan Lappa. Pangkalan Pendaratan Ikan yang terdapat di Lappa dengan luas sekitar 2 Ha memiliki fasilitas kolam labuh dengan kapasitas sampai 200 unit kapal. Fasilitas lain yang dimiliki oleh PPI Lappa antara lain: Tempat pelelangan ikan 1 buah, Balai Pertemuan dan Shelter Nelayan 1 buah, kantor 1 buah, SPDN 1 buah, Pabrik es curah 1 unit, Pos Pengawasan 1 buah, Menara Pengawas 1 buah, Garasi Speed. Selain Di Lappa Kabupaten Sinjai juga memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tongke-tongke Kecamatan

Sinjai Timur memiliki fasilitas kolam labuh berkapasitas 75 unit kapal, SPDN 1 unit. Pangkalan Pendaratan Ikan yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai merupakan salah satu PPI yang ramai di kunjungi baik oleh kapal-kapal dari luar kabupaten Sinjai untuk membongkar muat ikan maupun oleh pengusaha dari luar Sinjai yang akan membeli hasil tangkapan ikan yang di bongkar PPI.

- ✓ Sebagai Daerah yang memiliki wilayah laut, tentunya laut di Kabupaten Sinjai tidak terlepas dari adanya perusakan-perusakan laut dan habitatnya yang di lakukan oleh pihak-pihak yang akan menangkap ikan dengan cara yang di larang baik dengan cara pemboman ataupun dengan menggunakan pembius. Oleh itu Pemerintah Kabupaten Sinjai selalu mengadakan patroli untuk melindungi habitat dari kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara Destructiv Fishing. Hal ini untuk menjamin keamanan di perairan Kabupaten Sinjai. Dari beberapa kegiatan operasi yang di lakukan di perairan Sinjai sudah banyak kasus yang di dapatkan, ada yang di proses sampai ke polisisan bahkan pengadilan, ada juga yang di lakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- ✓ Sebagai Informasi dari Polisi Perairan dan Udara yang bertugas di sekitar perairan Kabupaten Sinjai adalah bahwa Nelayan di Kabupaten Sinjai masih ada yang menggunakan Kompresor sebagai alat bantu pada saat melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut, pada hal sudah disampaikan tentang larangan menggunakan alat bantu tersebut seperti kompresor, Jaring Trawl atau Pukat Harimau. Melalui kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumberdaya Ikan ini, dijelaskan juga UU Nomor 45 tahun 2009 adalah perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan larangannya kepada peserta pertemuan.
- ✓ Harapan kita bersama setelah selesai mengikuti Pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan

yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai ini bahwa masyarakat nelayan tidak lagi melakukan Penangkapan ikan yang menyalahi Peraturan Perundang Undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pada Prinsipnya bahwa para Nelayan diharapkan Paham dan Sadar akan Hukum

c. Kotamadya Pare-Pare

- ✓ Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kota Pare-Pare Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pare-Pare.
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Perundang-Undang Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kota Pare-Pare Tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang.
- ✓ Berdasarkan hasil pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kota Pare-Pare Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2017 dijelaskan bahwa Pembangunan laut dan perikanan mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare, mengingat tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia masih rendah dan sarana geografis Kota Pare-Pare berada pada posisi yang strategis baik dari segi usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, industri pengolahan ikan maupun pemasarannya. Beberapa fasilitas menunjang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare antara lain: Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pare-Pare sebagai salah satu daerah yang terletak di Selat Makassar yang memiliki sumber daya ikan yang cukup besar. Sebagai salah satu daerah yang merupakan daerah transit antar Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan, Kota Pare-Pare memiliki tempat pendaratan ikan yang dikategorikan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe D yang terletak di kelurahan Cempae.

Pangkalan Pendaratan Ikan yang terdapat di Kelurahan Cempae ini memiliki fasilitas kolam labuh, dan 1 buah SPDN.

- ✓ Sebagai Informasi dari Kepolisian Resort Pare-Pare bahwa di Kota Pare-Pare masih ada masyarakat nelayan yang menggunakan Kompresor sebagai alat bantu pada saat melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut, pada hal sudah disampaikan tentang larangan menggunakan alat bantu tersebut seperti compresor tersebut. Melalui kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumberdaya Ikan ini, dijelaskan juga UU Nomor 45 tahun 2009 adalah perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan larangannya kepada peserta pertemuan.

d. Kabupaten Pinrang

- ✓ Sasaran dari kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Pinrang ini adalah masyarakat nelayan / wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang berdomisili di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten/Kota disekitarnya yang bermata pencaharian nelayan dan setiap harinya menangkap ikan yang di harapkan Sadar dan Paham tentang Peraturan Perundang – Undangan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.
- ✓ Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 bertempat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Wiring Tasi’ – Ujung Lero, Kabupaten Pinrang.
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Perundang-Undang Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten / Kota disekitarnya.

- ✓ Berdasarkan hasil pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2017 dijelaskan bahwa Pembangunan laut dan perikanan mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, mengingat tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia masih rendah dan sarana geografis Kabupaten Pinrang berada pada posisi yang strategis baik dari segi usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, industri pengolahan ikan maupun pemasarannya. Beberapa fasilitas menunjang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang antara lain: Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Pinrang sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Selat Makassar memiliki sumber daya ikan yang cukup besar dengan produksi mencapai 30 ribu ton pertahun. Sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki armada dan produksi yang besar, Kabupaten Pinrang harus memiliki tempat pendaratan ikan. Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Pinrang dikategorikan sebagai pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe D yang terletak di kelurahan Wiring Tasi' dan Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Pangkalan Pendaratan Ikan yang terdapat di Wiring Tasi' dengan luas sekitar 2 Ha memiliki fasilitas kolam labuh dengan kapasitas sampai 150 unit kapal. Fasilitas lain yang dimiliki oleh PPI Wiring Tasi' antara lain: Tempat pelelangan ikan 1 buah, Balai Pertemuan dan Shelter Nelayan 1 buah, kantor 1 buah, Pabrik es curah 1 unit, Pos Pengawasan 1 buah, Menara Pengawas 1 buah. Selain di Wiring Tasi, Kabupaten Pinrang juga memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Ujung Lero Kecamatan Suppa.
- ✓ Sebagai Informasi dari Kepolisian Resort Pinrang, bahwa di Kabupaten Pinrang masih ada masyarakat nelayan yang menggunakan kompressor sebagai alat bantu pada saat melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut, padahal sudah disampaikan tentang larangan menggunakan alat

bantu tersebut seperti kompressor, Jaring Trawl atau Pukat Harimau. Melalui kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumberdaya Ikan ini, dijelaskan juga UU Nomor 45 tahun 2009 adalah perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan larangannya kepada peserta pertemuan.

e. Kabupaten Bantaeng

- ✓ Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 bertempat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Birea Kec. Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Perundang-Undang Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Bantaeng sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan Kabupaten Bantaeng dan nelayan Kabupaten Takalar.
- ✓ Berdasarkan hasil pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 dijelaskan bahwa Pembangunan laut dan perikanan mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah Kabupten Bantaeng, mengingat tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia masih rendah dan sarana geografis Kabupaten Bantaeng berada pada posisi yang strategis baik dari segi usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, industri pengolahan ikan maupun pemasarannya. Beberapa fasilitas menunjang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng antara lain: Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Perairan Laut Flores memiliki sumber daya ikan yang cukup besar.

- ✓ Sebagai Informasi dari Kepolisian Resort Bantaeng, bahwa di wilayah ini masih ada masyarakat nelayan yang menggunakan kompressor sebagai alat bantu pada saat melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut, padahal sudah disampaikan tentang larangan menggunakan alat bantu tersebut seperti kompressor, Jaring Trawl atau Pukat Harimau. Melalui kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumberdaya Ikan ini, dijelaskan juga UU Nomor 45 tahun 2009 adalah perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan larangannya kepada peserta pertemuan.

f. Pulau Sanane Kabupaten Pangkep

- ✓ Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Pulau Sanane Kabupaten Pangkep Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 bertempat di Kantor Desa Mattiro Adae Kecamatan Liukang Tupfabiring Kabupaten Pangkep.
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Perundang-Undang Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Pulau Sanane Kabupaten Pangkep Tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan Desa Mattiro Adae Kecamatan Liukang Tupfabiring Kabupaten Pangkep.
- ✓ Harapan kita bersama setelah selesai mengikuti Pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan di Pulau Sanane Kabupaten Pangkep ini bahwa masyarakat nelayan tidak lagi melakukan Penangkapan ikan yang menyalahi Peraturan Perundang Undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pada Prinsipnya bahwa para Nelayan diharapkan Paham dan Sadar akan Hukum.

g. Kabupaten Bulukumba

- ✓ Sasaran dari kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bulukumba ini adalah masyarakat nelayan/wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten/Kota disekitarnya yang bermata pencaharian nelayan dan setiap harinya menangkap ikan yang di harapkan Sadar dan Paham tentang Peraturan Perundang – Undangan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.
- ✓ Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 bertempat di Sekretariat Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Batu Mesu di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Perundang-Undang Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan Kabupaten Bulukumba.
- ✓ Sebagai Daerah yang memiliki wilayah laut, tentunya laut di Kabupaten Bulukumba tidak terlepas dari adanya permasalahan pengrusakan-pengrusakan laut dan habitatnya yang di lakukan oleh pihak-pihak yang akan menangkap ikan dengan cara yang di larang baik dengan cara pemboman ataupun dengan menggunakan pembius. Oleh karena itu, Pemerintah selalu mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk melindungi habitat dari kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara destructive fishing. Hal ini untuk menjamin keamanan di perairan wilayah ini bebas dari beberapa kegiatan operasi yang di lakukan di perairan ini.

h. Pulau Bontosua Kabupaten Pangkep

- ✓ Sasaran dari kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan dalam rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Pulau Bontosua Kabupaten Pangkep

ini adalah masyarakat nelayan yang berdomisili di Pulau Bontosua Kabupaten Pangkep yang setiap harinya menangkap ikan dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman tentang Peraturan Perundang – Undangan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

- ✓ Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Pulau Bontosua Kabupaten Pangkep Tahun 2017 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 bertempat di Rumah Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan “Komando” di Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep.
- ✓ Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Perundang-Undang Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Pulau Bontosua Kabupaten Pangkep Tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep.
- ✓ Harapan kita bersama setelah selesai mengikuti Pertemuan Sosialisasi Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan di Pulau Bontosua Kabupaten Pangkep ini bahwa masyarakat nelayan tidak lagi melakukan Penangkapan ikan yang menyalahi Peraturan Perundang Undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pada Prinsipnya bahwa para Nelayan diharapkan Paham dan Sadar akan Hukum.

3. Pertemuan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a) Pertemuan Penganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

- ✓ Tujuan dari Pertemuan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
 - Menyamakan persepsi dan pemahaman antar aparat penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perikanan oleh aparat di wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan guna mempercepat penyelesaian tindak pidana perikanan

- Terjalannya komunikasi antar aparat penegakan hukum, tukar menukar data dan informasi, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan penyelesaian tindak pidana perikanan.
 - ✓ Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 November 2017, bertempat di Grand Celino Hotel Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 27 Makassar
 - ✓ Peserta pertemuan Pertemuan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dihadiri oleh Peserta sebanyak 30 Orang.
 - ✓ Adapun kesimpulan dari Pertemuan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan direkomendasikan saran tindak lanjut sebagai berikut :
 - Pertemuan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan perlu terus dilakukan dengan fokus penanganan terhadap permasalahan teknis lintas sektor, yang seyogyanya dilakukan secara rutin baik dilingkup Provinsi maupun tingkat Nasional.
 - Meminta dukungan secara teknis dan juridis dari Instansi Penegakan Hukum terkait dalam upaya Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Sulawesi Selatan
- b) Perjalanan Dinas dalam rangka Field Trip dalam rangkaian pelaksanaan Pertemuan Penganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tanggal 29 November – 01 Desember 2017**
- ✓ Tujuan kegiatan field trip ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengawas Perikanan dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.
 - ✓ Manfaat kegiatan field trip ini adalah agar peserta dapat mengetahui dan menanyakan langsung bagaimana penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

- ✓ Lokasi field trip yaitu Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta dan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta

4. Monitoring, Evaluasi, dan penanganan kasus di wilayah laut kewenangan Provinsi

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penanganan kasus di wilayah laut kewenangan provinsi dimaksudkan untuk melaksanakan pemantauan penanganan kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten / Kota.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan mulai berlaku efektif pada tahun 2017 ini. Jika semula kewenangan provinsi dari 4-12 mil kini diperluas menjadi 0-12 mil. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. Pada aturan lama memang terdapat pembagian kewenangan pengelolaan dan pengawasan laut, di mana untuk jarak 0 – 4 mil kewenangannya ada di kabupaten/kota, sementara untuk 4-12 km dikelola oleh provinsi, dan 12 mil ke atas kewenangannya ada di pemerintah pusat. Kebijakan ini juga secara otomatis menghapus kewenangan kabupaten/kota.

4.4.5. UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat besar jika dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan pengelolaan sumberdaya perairan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan harus searah dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah suatu kebutuhan dasar dan merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan.

Monitoring dan evaluasi juga dapat memberikan gambaran lengkap tentang implementasi program/kegiatan dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang terjadi sehingga dapat membantu aparaturnya mengambil keputusan untuk penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaannya.

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU KECIL SERTA KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Kegiatan Workshop Mata Pencanharian Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir

■ **Workshop Mata Pencanharian Alternatif bagi Masyarakat Pesisir (Angkatan I)**

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 30-31 Maret 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Grand Palace, Makassar
- c. Peserta : 35 (Tiga puluh lima) orang terdiri atas 18 (Delapan belas) orang dari Dinas Perikanan Kab./Kota dan 17 (Tujuh belas) orang dari Kelompok Masyarakat Pesisir Kab./Kota.
- d. Tujuan : Tercapainya mata pencanharian alternatif bagi masyarakat pesisir
- e. Hasil yang dicapai : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir tentang mata pencanharian alternatif.
- f. Rekomendasi : Kegiatan workshop mata pencanharian alternatif ini perlu dijadwalkan di kabupaten/kota masing-masing agar lebih banyak pelaku utama yang bisa mengikuti kegiatan ini.

■ **Workshop Mata Pencanharian Alternatif bagi Masyarakat Pesisir (Angkatan II)**

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19 – 21 April 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Same Resort Bulukumba
- c. Peserta : 35 (Tiga puluh lima) orang terdiri atas 18 (Delapan belas) orang dari Dinas Perikanan Kab./Kota dan 17 (Tujuh belas) orang dari Kelompok Masyarakat Pesisir Kab./Kota.
- d. Tujuan : Tercapainya mata pencanharian alternatif bagi masyarakat pesisir
- e. Hasil yang dicapai : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir tentang mata pencanharian alternatif.
- f. Rekomendasi : Kegiatan workshop mata pencanharian alternatif ini perlu dijadwalkan di kabupaten/kota masing-masing agar lebih banyak pelaku utama yang bisa mengikuti kegiatan ini. Selain itu waktu pelaksanaan

kegiatan ini juga perlu ditambah dan juga untuk melakukan kegiatan tambahan seperti *Field Trip* ke lokasi usaha perikanan yang telah berkembang/maju untuk membuka wawasan bagi para pelaku utama.

■ **Workshop Mata Pencaharian Alternatif bagi Masyarakat Pesisir (Angkatan III)**

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 8 – 10 Agustus 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Continent Centerpoint, Makassar
- c. Peserta : 35 (Tiga puluh lima) orang terdiri atas 18 (Delapan belas) orang dari Dinas Perikanan Kab./Kota dan 17 (Tujuh belas) orang dari Kelompok Masyarakat Pesisir Kab./Kota.
- d. Tujuan : Tercapainya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir
- e. Hasil yang dicapai : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir tentang mata pencaharian alternatif.

■ **Workshop Mata Pencaharian Alternatif bagi Masyarakat Pesisir (Angkatan IV)**

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 19-20 September 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Lynt, Makassar
- c. Peserta : 35 (Tiga puluh lima) orang terdiri atas 18 (Delapan belas) orang dari Dinas Perikanan Kab./Kota dan 17 (Tujuh belas) orang dari Kelompok Masyarakat Pesisir Kab./Kota.
- d. Tujuan : Tercapainya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir
- e. Hasil yang dicapai : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir tentang mata pencaharian alternatif.
- f. Rekomendasi : Kegiatan workshop mata pencaharian alternatif ini perlu dijadwalkan di kabupaten/kota masing-masing agar lebih banyak pelaku utama yang bisa mengikuti kegiatan ini.

■ **Workshop Mata Pencaharian Alternatif bagi Masyarakat Pesisir (Angkatan V)**

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 5 – 7 Desember 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Grand Asia, Makassar
- c. Peserta : 70 (Tujuh puluh) orang terdiri atas 20 (Dua Puluh) orang dari Dinas Perikanan Kab./Kota dan 30 (Tiga Puluh) orang dari Kelompok Masyarakat Pesisir Kab./Kota, 14 (Empat belas) orang dari Bidang dan UPTD Lingkup

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta 6 (Enam) orang mahasiswa dari perguruan tinggi.

- d. Tujuan : Tercapainya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir

2. Kegiatan Pembinaan Kawasan Potensi Wisata Bahari

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 13 Juli 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Pulau Panikiang Kab. Barru
- c. Peserta : 30 (Tiga puluh) orang terdiri atas Nelayan/Kelompok Masyarakat Pesisir Kab. Barru, Tokoh Masyarakat dan Instansi Terkait.
- d. Tujuan : Tercapainya pembinaan kawasan potensi wisata bahari di Kab. Barru
- e. Hasil yang dicapai : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir tentang pemeliharaan kawasan tinggal menjadi kawasan potensi wisata bahari.
- f. Rekomendasi : Kegiatan pembinaan kawasan potensi wisata bahari ini perlu dijadwalkan di kabupaten/kota masing-masing agar lebih banyak pelaku utama yang bisa mengikuti kegiatan ini.

3. Kegiatan Pembinaan dan Perlindungan Biota Terancam Punah

- a. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 7 – 9 November 2017
- b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Aswin Jl. Gunung Latimojong No.144 Makassar
- c. Peserta : 70 (Tujuh puluh) orang terdiri atas 20 (Dua Puluh) orang dari Dinas Perikanan Kab./Kota dan 30 (Tiga Puluh) orang dari Kelompok Masyarakat Pesisir Kab./Kota, 14 (Empat belas) orang dari Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta 6 (Enam) orang dari perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa.
- d. Tujuan : Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar dapat menyadarkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi serta memanfaatkan dan mengambil faedah secara ekonomis dari spesies-spesies tersebut dalam bentuk kegiatan wisata.

- e. Hasil yang dicapai : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan melindungi serta memanfaatkan dan mengambil faedah secara ekonomis dari spesies-spesies tersebut dalam bentuk kegiatan wisata.
- f. Rekomendasi : Kegiatan pembinaan dan perlindungan biota terancam punah ini perlu dijadwalkan di kabupaten/kota masing-masing agar lebih banyak pelaku utama yang bisa mengikuti kegiatan ini.

4. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan (DAK)

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan berupa perencanaan, pengawasan dan pembangunan gedung kawasan konservasi serta perencanaan, pengawasan dan pembangunan tambatan perahu beton merupakan kegiatan yang pelaksanaannya harus dilakukan melalui proses lelang. Pelaksanaan kegiatan ini harus dilakukan secara matang. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung kepada kesiapan pelaksana, panitia lelang, kelengkapan dokumen dari Kabupaten/Kota, serta kelengkapan lainnya.

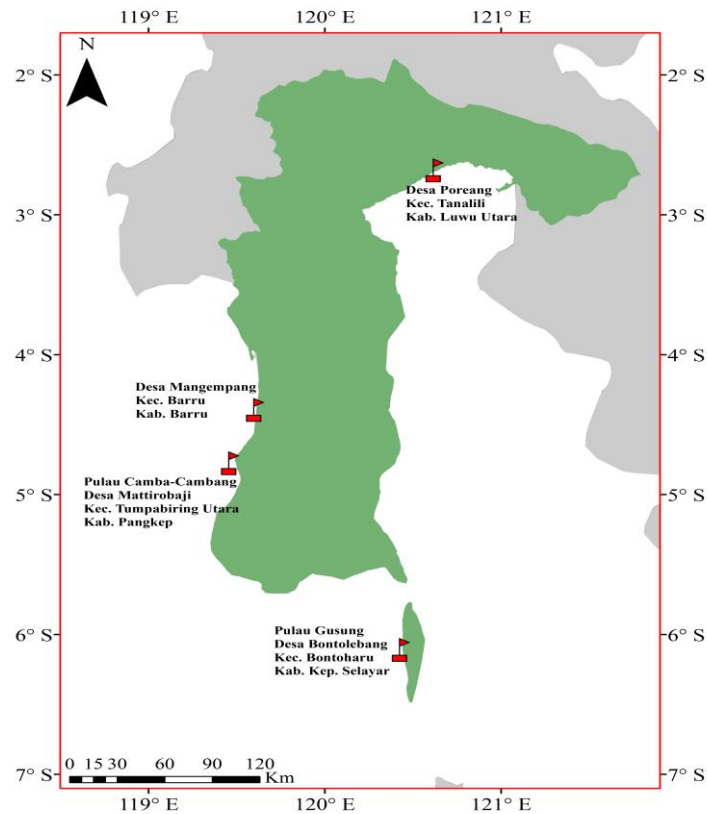
Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, dan Pengawasan gedung kawasan konservasi dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten yaitu di Desa Bontolebang Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar, Desa Mangempang Kec. Barru Kab. Barru, Desa Mattirobaji Kec. Liukang Tumpabiring Kab. Pangkep, dan Desa Poreang Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat dirampungkan yaitu di Desa Bontolebang Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar dengan persentase fisik pada saat selesai kontrak sebesar 67,342% dan di Desa Mattirobaji Kec. Liukang Tumpabiring Kab. Pangkep dengan persentase fisik pada saat selesai kontrak sebesar 41,395%.

Selain itu di lokasi gedung kawasan konservasi yang telah selesai (Kab. Barru dan Kab. Luwu Utara) juga telah dilakukan penataan pelataran dan pembangunan Talud serta Tambatan Perahu Kayu.

Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, dan Pengawasan Tambatan Perahu Beton di 4 (empat) Kabupaten yaitu di Pulau Karumpa Desa Karumpa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar, Pulau Liukang Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba, Pulau Kodingare Desa Padaele Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai, dan Pulau Tana Keke Desa Tompo Tanah Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar.

LAPORAN TAHUNAN 2017

Selain itu kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu perjalanan dinas dalam daerah untuk tujuan monitoring dan evaluasi kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kawasan konservasi perairan untuk pembangunan Gedung Kawasan Konservasi dan pembangunan Tambatan Perahu Beton serta kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Pembangunan Tambatan Perahu Kayu dan dan Pembangunan Saluran Tambak Air Garam.



A.1. Lokasi Pembangunan Gedung Kawasan Konservasi



Gedung Kawasan Konservasi di Desa Mangempang
Kec. Barru Kab. Barru



Gedung Kawasan Konservasi di Desa Poreang
Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara



Gedung Kawasan Konservasi di Desa Bontolebang
Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar



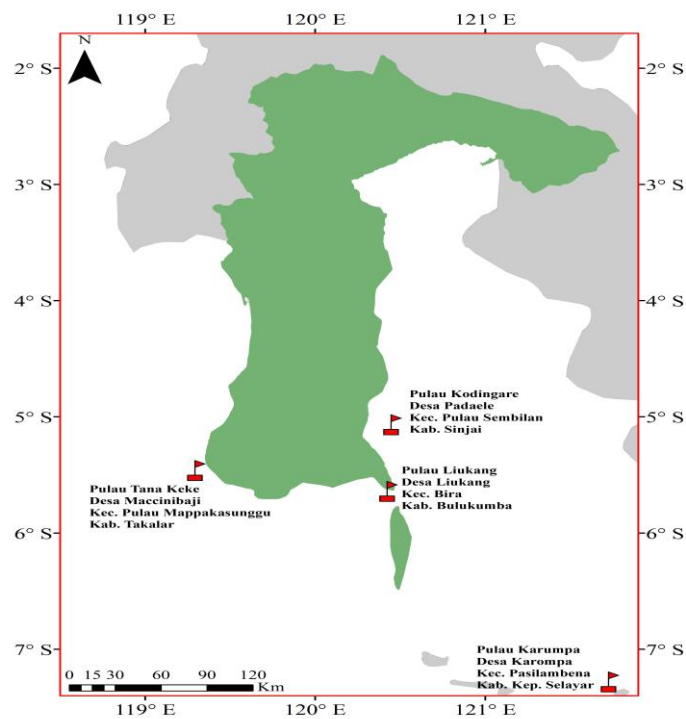
Gedung Kawasan Konservasi di Desa Mattirobaji
Kec. Liukang Tumpabiring Kab. Pangkep



Tambatan Perahu Kayu di Gedung Kawasan Konservasi
Desa Mangempang Kec. Barru
Kab. Barru



Penataan Pelataran Gedung Kawasan Konservasi
Desa Mangempang Kec. Barru
Kab. Barru



B.1. Lokasi Pembangunan Tambatan Perahu Beton



*Tambatan Perahu Beton di Pulau Liukang
Desa Bira Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba*



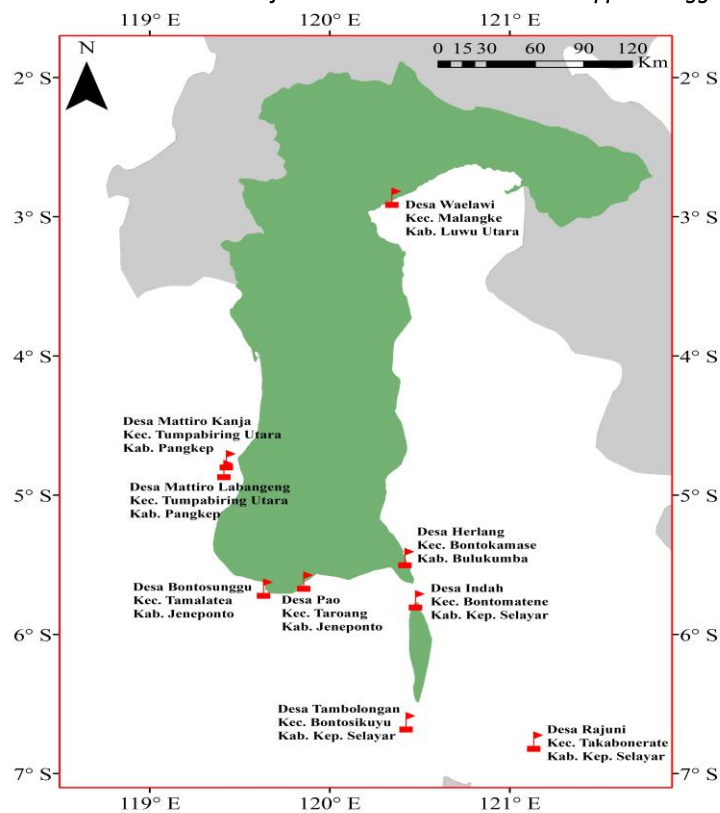
*Tambatan Perahu Beton di Pulau Karumpa
Desa Karumpa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar*



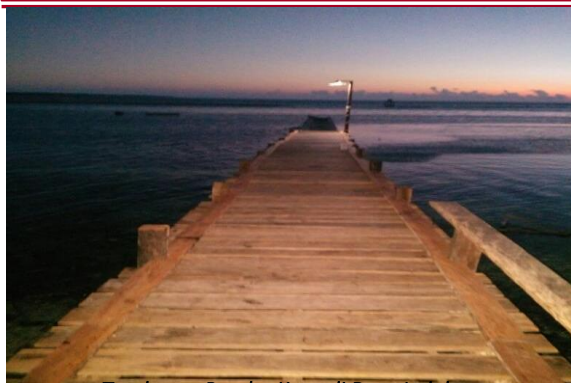
*Tambatan Perahu Beton di Pulau Kodingare
Desa Padaele Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai*



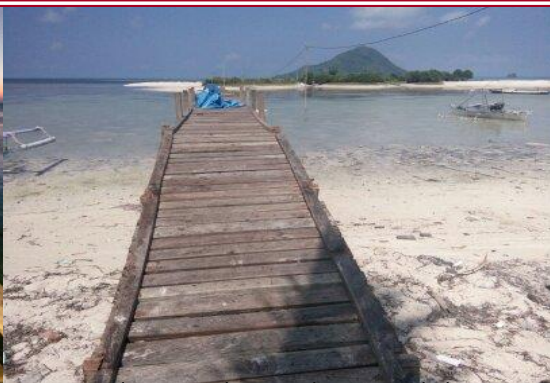
*Tambatan Perahu Beton di Pulau Tana Keke Desa Tompo
Tanah Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar*



C.1. Lokasi Pembangunan Tambatan Perahu Kayu



*Tambatan Perahu Kayu di Desa Indah
Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar*



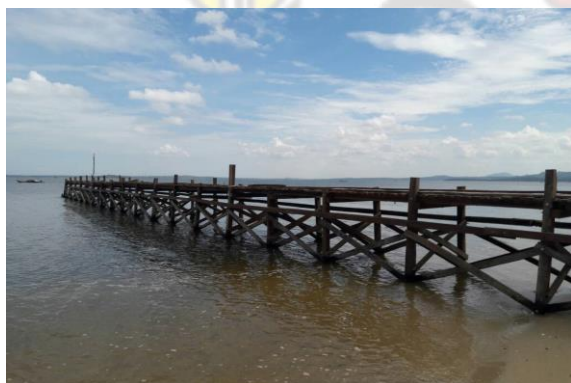
*Tambatan Perahu Kayu di Desa Tambolongan
Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar*



*Tambatan Perahu Kayu di Desa Herlang
Kec. Bontokamase Kab. Bulukumba*



*Tambatan Perahu Kayu di Desa Bontosunggu
Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto*



*Tambatan Perahu Kayu di Desa Pao
Kec. Taroang Kab. Jeneponto*



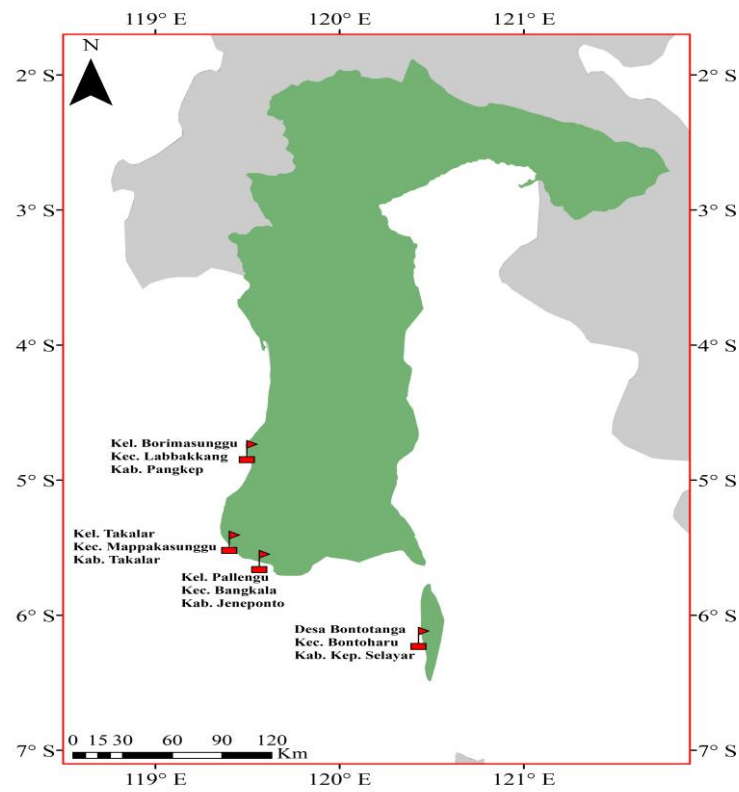
*Tambatan Perahu Kayu di Desa Mattiro Iabbangeng
Kec. Tumpabiring Utara Kab. Pangkep*



*Tambatan Perahu Kayu di Desa Mattiro Kanja
Kec. Tuppabiring Utara Kab. Pangkep*



*Tambatan Perahu Kayu di Desa Mattiro Kanja
Kec. Tuppabiring Utara Kab. Pangkep*



c.1. Lokasi Pembangunan Saluran Tambak Air Garam



Saluran Tambak Air Garam di Kab. Jeneponto



Saluran Tambak Air Garam di Kab. Pangkep



Saluran Tambak Air Garam di Kab. Takalar



Saluran Tambak Air Garam di Kep. Selayar

4.4.6. UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Selat Makassar

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengawasan pada wilayah perairan 1 sampai dengan 4 mil yang sedianya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan tersebut beralih ke Pemerintah Propinsi, dan hal ini telah diantisipasi dalam mengisi kekosongan pengawasan perairan oleh Pemerintah Propinsi dalam hal ini Dinas Kelautan Dan Perikanan dengan membentuk UPTD Pengawasan yang bernama UPTD Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P3SDKPWP) di tiga wilayah perairan, masing masing wilayah perairan, sebb. :

- Teluk Bone
- Selat Makassar
- Laut Flores

Secara khusus Unit kerja eselon III UPTD PPSKP Wilaya Selat Makassar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan bertanggung jawab dalam sub urusan di Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. UPTD PPSKP Wilayah Selat Makassar tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi Seksi sebagai berikut : 1) Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 3) Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 4) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT; 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian pengelolaan SDKP berdasarkan wilayah kerja; 6) Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian pengelolaan SDKP berdasarkan wilayah kerja; 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan dan pengendalian pengelolaan SDKP berdasarkan wilayah kerja; 8) Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pengendalian

pengelolaan SDKP berdasarkan wilayah kerja; 9) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

UPTD P3SDKPWP Selat Makassar memiliki kewenangan pengawasan perairan di wilayah perairan selat mengasar pada wilayah perairan 1 sampai dengan 8 mil yang meliputi, pengawasan perairan di Kabupaten/Kota, sebb. :

- Kabupaten Gowa
- Kota Makassar
- Kabupaten Maros
- Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Kabupaten Barru
- Kabupaten Pinrang

Dalam pelaksanaan pengawasan yang kurang lebih sudah berjalan satu tahun, UPTD telah melaksanakan pembinaan pengawasan didaerah wilayah kerjanya, namun pelaksanaannya masih dirasakan belum optimal, namun demikian operasi-operasi pengawasan perairan berdampak mengurangi intensitas Destructive Fishing (DF) serta penangkapan ilegal yang menggunakan alat tangkap terlarang.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD P3SDKPWP Selat Makassar selama tahun 2017 meliputi :

1. SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN OPERASI PENGAWASAN

■ Sosialisasi, Pembinaan dan Pelibatan Pokmaswas

Luasnya jangkauan operasional pengawasan pada UPTD P3SDKPWP Selat Makassar disisi lain terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, SDM Pengawasan serta dukungan operasional Pengawasan yang terbatas mengakibatkan pelaksanaan pengawasan tidak optimal. Dan jika hanya mengadakan UPTD P3SDKPWP Selat Makassar semata maka upaya pengendalian sulit dilakukan. Menyadari kelemahan tersebut UPTD P3SDKPWP Selat Makassar juga melakukan sosialisasi dan pembinaan serta penyadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan khususnya diwilayah Selat Makassar. Pembinaan UPTDP3SDKPWP Selat Makassar di sela-sela operasional Pengawasan di Perairan juga menyempatkan melakukan sosialisasi dan pembinaan di beberapa Pulau

khususnya di Kepulauan yang berada di Daerah Pangkep dan Makassar seperti Pulau Sama Tellu, Pulau Kondo Bali, Pulau Kapopossang, Pulau Jangang-jangang, Pulau Badik, Pulau Sarappo Lompoa, Pulau Podang Podang, Pulau Bontosua, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Kodingareng.

Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan juga dilakukan dimana Kelompok Masyarakat Pengawas yang sudah ada diberdayakan baik sifatnya berupa bantuan sarana pengawasan maupun pengefektifan POKMASWAS melalui dukungannya dalam mengawasi perairan disekitarnya dan melaporkan kejadian Distructive Fishing (DF) ke aparat Pengamanan dan UPTD P3SDKPWP Selat Makassar.



*Pembinaan POKMASWAS di Pulau Sama Tellu
Kab. Pangkep*



*Pembinaan POKMASWAS di Pulau Kondong
Bali Kab. Pangkep*



*Pembinaan POKMASWAS di Pulau Jangang-jangang
Kab. Pangkep*



*Pembinaan POKMASWAS di Pulau Pala
Kab. Pangkep*

Untuk Tahun 2017 POKWASMAS yang dibantukan dengan sarana pengawasan, adalah sbb. :

- POKMASWAS Cinta Bahari Kota Makassar
- POKMASWAS Barakuda Kota Makassar
- POKMASWAS Bahari Kota Makassar
- POKMASWAS Sipakatau Kab. Maros
- POKMASWAS Minasa Baji Kab. Maros
- POKMASWAS Sejahtera Kab. Maros
- POKMASWAS Mattiro Ujung Kab. Pangkep
- POKMASWAS Mattiro Dolangeng Kab. Pangkep
- POKMASWAS Mattiro Bone Kab. Pangkep
- POKMASWAS Mattiro Deceng Kab. Pangkep
- POKMASWAS Nirwana Bahari Kab. Barru
- POKMASWAS Batu Loange Kab. Barru
- POKMASWAS Balanak Kab. Barru
- POKMASWAS Labalasse Kota Pare Pare
- POKMASWAS Bagang Lolo Kota Pare Pare
- POKMASWAS Bina Bahari Kab. Pinrang
- POKMASWAS Anugrah Ilahi Kab. Pinrang
- POKMASWAS Harapan Indah Kab. Pinrang



*Bantuan Sarana Pengawasan pada Pokmaswas
Minasa baji Kab. maros*



*Bantuan Sarana Pengawasan pada
Pokmaswas Bahari*



*Bantuan Sarana Pengawasan pada Pokmaswas
Barakuda Kota Makassar*



*Bantuan Sarana Pengawasan pada Pokmaswas Mattiri
Deceng (Pokwasamas Komando) Kab. Pangkep*



Bantuan Sarana Pengawasan pada Pokmaswas Nirwana Bahari Kab. Barru



Bantuan Sarana Pengawasan pada Pokmaswas Bagang Lolo Kota Pare-Pare



Bantuan Sarana Pengawasan pada Pokmaswas Bina Bahari Kab. Pinrang



Bantuan Sarana Pengawasan pada Pokmaswas Anugrah Ilahi Kab. Pinrang

Bantuan paket sarana pengawasan yang diberikan kepada masing-masing POKMASWAS sebagaimana dimaksud diatas, berupa : rompi pokwasmas 10 buah, senter 10 buah, GPS 1 buah, Kamera Digital 1 buah, Teropong 1 buah dan HT 2 buah. Selain itu juga satu POKMASWAS mendapatkan perahu pengawasan yaitu POKMASWAS Nirwana Bahari di Kabupaten Barru



Bantuan Kapal Pengawasan untuk Pokmaswas Nirwana Bahari Kabupaten Barru

Dari beberapa POKMASWAS yang ada tersebut yang sangat aktif dan sering melaporkan kejadian Destructive Fishing (DF) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Operasional Pengawasan adalah sebagai berikut. :

- POKMASWAS KOMANDO Pulau Bontosua (Mattiro Bone) Pangkep
- POKMASWAS Pulau Badik (Mattiro Deceng) Pangkep
- POKMASWAS Barakuda Pulau Samalona Makassar
- POKMASWAS Nirwana Bahari Barru
- POKMASWAS Bina Bahari Pinrang

Dan bisa dikatakan pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh POKMASWAS ditindaklanjuti oleh UPTD P3SDKPWP Selat Makassar dengan melaksanakan operasional pengawasan pada daerah lokasi kejadian pengaduan tersebut. Namun demikian UPTD P3SDKPWP Selat Makassar juga menerima beberapa pengaduan nelayan yang tidak tergabung dalam POKMASWAS dan ditindaklanjuti dengan menggelar operasional diperairan sebagaimana pelaporan masyarakat nelayan tersebut.

Dalam mengantisipasi Keterbatasan SDM, Sarana Pengawasan dan Pembiayaan operasi pengawasan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas pengawasan dengan POLAIRUT, LANTAMAL, dan Satker Pengawasan agar keterbatasan operasional yang dilakukan UPTD P3SDKP WP Selat Makassar dapat dilaksanakan oleh Instansi Instansi Penegakan Hukum lainnya dalam menjaga dan mengendalikan Destructive Fishing yang terjadi di Perairan Selat Makassar.

■ OPERASI PENGAWASAN

➤ Pengawasan Perairan

Realisasi Patroli pengawasan UPTD P3SDKPWP Selat Makassar dalam melaksanakan patrol pengawasan lebih dominan dilakukan pada perairan di kepulauan Pangkep dan perairan Makassar mengingat dilokasi perairan ini Destructive Fishing sering terjadi dan ini sesuai dengan kajian Tim Universitas Hasanuddin tahun 2014 bahwa frekwensi kejadian peledakan bom diperairan

sekitar gugusan kepulauan super monde (Pangkep dan Makassar) terjadi 9 sd 23 kali frekwensi ledakan per hari.

Penangkapan ikan yang dilakukan nelayan dengan Destructive Fishing (DF) yang terjadi di perairan tersebut menggunakan bahan bus dan bahan peledak. Dari target patroli yang dibebangkan kepada UPTD P3SDKPWP Selat Makassar sebanyak 20 kali patroli, UPTD P3SDKPWP Selat Makassar hanya memenuhi target tersebut sebanyak 16 kali patroli, kondisi ini disebabkan belum optimalnya anggaran yang tersedia untuk pemenuhan patroli tersebut.

Patroli secara umum lebih banyak dilakukan pada perairan wilayah Pangkep dan Makassar, oleh karena didaerah ini penangkapan ikan secara ilegal dan tidak ramah lingkungan sering dilakukan. Dalam mengefektifkan pelaksanaan patroli operasional dilakukan setelah ada penyampaian informasi dari POKWASMAS ataupun informasi dari nelayan dimana lokasi perairan yang sering dilakukan Destructive Fishing (DF). Informasi yang kami peroleh dari POKWASMAS bahwa penggunaan bahan terlarang dalam penangkapan (Bom dan Bus) di wilayah selat Makassar, :

- Wilayah perairan Pulau Kodingareng Makassar
- Wilayah perairan Pulau Samalona Makassar
- Wilayah perairan Pulau Kapoposang Pangkep
- Wilayah perairan Pulau Jangang jangang
- Wilayah perairan Pulau Pandangan Pangkep
- Wilayah perairan Pulau Kondong Bali Pangkep
- Wilayah perairan Sabbang Paru PinrangPangkep
- Wilayah perairan Pulau Toara Pangkep
- Wilayah perairan Pulau Pamangangang Pangkep

Umumnya pelaku Destructive Fishing yang dilakukan oknum nelayan menggunakan kapal berukuran kecil (Katinting) yang beroperasi subuh hingga pagi hari. Mereka beroperasi sudah sangat profesional dan dalam bentuk jaringan yang sudah terstruktur, dan khusus pelaku bom sendiri hanya melakukan tugas membuang bom keperairan, sementara untuk mengumpulkan

ikan yang mati hasil bom tersebut dilakukan oleh nelayan bertugas mengumpulkannya dengan kapal yang lebih besar atau kapal pengumpul (Kapal pallaling)

Pemeriksaan Perahu Nelayan yang diduga pelaku DF



Sementara terkait dengan penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti Trawl (Pukat Harimau), ataupun pemanfaatan jalur penangkapan yang tidak sesuai dengan peruntukan alat masih dijumpai di wilayah pengawasan Selat Makassar. Keluhan masyarakat nelayan kami sering terima khususnya nelayan di Pulau pulau Pangkep masih adanya Trawl yang beroperasi diperairan Selat Makassar, serta adanya penggunaan alat tangkap cantrang dan Purse seine yang memasuki Jalur I (1 s/d 4) mil yang seharusnya beroperasi di Jalur II (4 s/d 8) mil

Alat Tangkap Cantrang sebagaimana Permen Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 sudah dilarang namun adanya kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI masih dimungkinkan melakukan penangkapan sampai dengan 30 Desember 2017. Di Wilayah Kerja UPTD P3SDKPWP Selat Makassar Jumlah Kapal Cantrang telah diidentifikasi terkonsentrasi di Pulau Pidang-Podang. Dan dari hasil monitoring pembinaan

kami Nelayan yang masih memanfaatkan cantrang tersebut sebanyak 23 unit Kapal



Alat Tangkap Cantrang Beroperasi di Jalur I (Perairan Pangkep)

Realisasi patroli pengawasan perairan Selat Makassar dapat dijelaskan, sbb. :

- 1) Penangkapan dengan tindak lanjut pembinaan pada 4 (empat) nelayan mini trawl di Perairan Pangkep, dimana keseluruhan Nelayan Berasal dari Desa Pajukukang Maros
- 2) Terkait penggunaan cantrang yang menangkap di Perairan Jalur I (1 s/d 4 mil) dimana di Tahun 2017 kami menemukan 3 (tiga) unit Kapal Cantrang yang beroperasi di Jalur I dan umumnya di Perairan Pangkep dan nelayanpun berasal dari Pulau Podang-Podang Pangkep kami lakukan pembinaan, dengan menjelaskan dan memperingatinya bahwa alat tangkap cantrang tidak bisa beroperasi di Jalur I dan harus mengarahkannya ke Jalur II (4 s/d 8 mil), dan Nelayan pemilik Kapal membuat pernyataan untuk tidak melakukan lagi penangkapan di Jalur I dengan sanksi jika dikemudian hari ditemukan lagi beroperasi di Jalur I maka akan tindak sebagaimana Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku
- 3) Terkait Kapal Ikan Purse Seine yang menangkap pada Jalur I di Perairan Barru, yang tim pengawas Selat Makassar memergokinya dan menangkapnya ternyata tidak memiliki surat-surat kapal yang lengkap. Sehingga Tim menyita kelengkapan Surat kapal tersebut.
- 4) Dalam operasional pengawasan di perairan Pinrang Tim Pengawas memergoki alat Tangkap Bagan Rambo yang beroperasi di Jalur I. Kelompok Nelayan Kapal tersebut berasal dari Sulawesi Barat, dan dari hasil

tangkapan tersebut Tim pengawas menyita surat-surat kapal dan memerintahkan agar kapal tangkap tersebut tidak memasuki perairan Sulawesi Selatan oleh karena dalam operasionalnya tidak didukung kelengkapan surat yang memadai



Kapal Bagang Rambo beroperasi di Jalur I perairan Pinrang

2. PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN

Semakin berkurangnya Sumberdaya ikan dilaut akibat pengelolaan yang over fishing serta penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, pemanfaatan jalur penangkapan yang tidak sesuai, dan kecemburuan sosial mengakibatkan kadang terjadi gesekan antara nelayan. Tahun 2117 Konflik Nelayan di Kawasan Penangkapan Selat Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut :

■ Konflik Nelayan Pulau Kodingareng Kota Makassar dengan Nelayan Pajukukang Maros.

Konflik kedua masyarakat ini sebenarnya merupakan persoalan lama dan kejadian Tahun 2016 pernah difasilitasi dan didamaikan Oleh POLAIRUT POLDA SUL-SEL dan DKP Provinsi SulSel, namun konflik ini masih terjadi di Tahun 2017 bahkan mengarah kearah pidana. Konflik antara masyarakat nelayan tersebut antara Nelayan Purse Seine Desa Pajukukang Maros dengan nelayan Pulau Kodingareng, persoalan masih terkait areal penangkapan dimana nelayan Purse Seine menangkap di perairan sekitar Pulau Kodingareng, namun karena kemungkinan motif kecemburuan social dimana nelayan Maros otomatis tangkapannya lebih besar jumlahnya dibanding nelayan kodingareng dikarenakan alat tangkap nelayan Maros lebih maju teknologinya karena menggunakan Purse Seine sementara nelayan Kodingareng sendiri hanya menggunakan Pancing. Hal inilah sumber konflik

utama dimana masing-masing masyarakat nelayan tersebut merasa benar disatu sisi masyarakat nelayan Pulau Kodingareng menganggap bahwa alat Purse Seine yang digunakan tidak bisa menangkap disekitar pulaunya sementara nelayan Purse Seine Maros menganggapnya bahwa areal perairan lokasi menangkapnya sudah sesuai aturan karena jauh dari pulau kodingareng dan sudah masuk di Jalur II. Konflik kali ini sudah mengarah ketindakan kriminal atau pidana karena masyarakat nelayan Pulau Kodingareng melakukan pengusiran dan pengejaran beramai ramai bahkan perahu Purse Seine nelayan Maros dilempari bom molotof dan untung saja tidak terjadi adanya korban jiwa. Dan persoalan pengejaran dan pelemparan bom molotof telah dilaporkan Kelompok nelayan Purse Seine Maros ke Kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian. Namun saja persoalan inti terjadinya konflik untuk difasilitasi dan mendamaikan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Rencana Dinas Kelautan Dan Perikanan akan memfasilitasi untuk mendamaikan kedua masyarakat nelayan tersebut belum terealisasi di Tahun 2017, karena mendengar saran dari Ketua HNSI Sulawesi Selatan untuk sementara mendingkan dulu masalah tersebut sampai suasana cair yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan fasilitasi yang akan melibatkan Pihak PEMDA setempat, Ketua HNSI di masing-masing Kabupaten, Perwakilan Dewan yang mewakili daerah di lokasi masing-masing konflik, POLAIRUT, LANTAMAL serta beberapa anggota nelayan dan sesepuh masyarakat di lokasi konflik tersebut. Sehingga nantinya persoalan dapat diselesaikan sampai kepersoalan pokok agar kedepannya tidak lagi terjadi masalah atau konflik yang sama diantara kedua masyarakat nelayan tersebut.

■ **Konflik Nelayan Pulau Sama Tellu Kab. Pangkep dengan Nelayan Kab. Barru**

Konflik nelayan diantara kedua daerah ini disebabkan pemanfaatan atau penangkapan sumberdaya perairan pada komoditi ikan teri, dimana masing-masing nelayan menggunakan alat tangkap seser (sero) dengan

menggunakan kapal kecil (katinting) yang disalah satu sisinya dilengkapi lampu LED. Teknologi ini berkembang pada masyarakat nelayan di Kabupaten Barru, yang kemudian mentransfer teknologinya kepada masyarakat Pangkep khususnya pada nelayan di beberapa pulau di Pangkep diantaranya Pulau Sama Tellu dan Kondong Bali. Ketergangungan mulai terjadi sejak mulai banyaknya nelayan kepulauan Pangkep yang menggunakan alat ini. Sehingga pada kawasan penangkapan terutama disekitar perairan Pulau Jangang-jangang dan konsentrasi nelayan penangkap ikan teri tersebut terfokus di wilayah tersebut, dan mau tidak mau terjadi persaingan yang akan menjurus ketindak pengusiran, pelarangan ataupun kekerasan yang akan dilakukan oleh sekelompok nelayan Pulau Sama Tellu terhadap nelayan yang berasal dari Kabupaten Barru untuk menangkap disentra penangkapan ikan teri tersebut. Dari hasil fasilitasi dan rembuk dengan nelayan kedua tersebut penekanan dari rembuk nelayan agar persoalan focus dan dapat terselesaikan, bahwa :

- Nelayan Pulau Sama Telu tidak boleh melarang nelayan seser yang berasal dari Kabupaten Barru untuk menangkap ikan di wilayah perairan Pangkep;
- Nelayan Pulau Sama Telu untuk meningkatkan hasil tangkapannya perlu mengupayakan tambahan lampu LED, sebagaimana umumnya teknologi pencahayaan yang digunakan nelayan kab. Barru;
- Nelayan Barru cukup membatasi jumlah nelayannya yang ada sekarang ini saja tanpa mengajak nelayan-nelayan lainnya yang berasal dari kab. Barru untuk menangkap di wilayah pulau Jangang-jangang dan sekitarnya terutama untuk komoditi ikan teri;
- Pemerintah Daerah setempat perlu membatasi penggunaan alat tangkap seser tersebut baik Pemda Kabupaten Barru maupun Pangkep;
- Nelayan Kab. Barru harus berupaya mencari sentra-sentra penangkapan ikan teri di daerah lain, tanpa terfokus pada wilayah perairan disekitar pulau Jangang Jangang;

- Masing-masing Nelayan di kedua daerah tersebut menjaga kelestarian perairannya dari pemanfaatan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan terutama penggunaan Bom dan Bius karena akan merusak lingkungan perairan

■ **Konflik Pokwasmas Komando Pulau Bontosua dengan Nelayan Pulau Sarappo Lompoa Pangkep**

Konflik terjadi antara nelayan Pulau Sarappo Lompoa dan Pokwasmas Komando Pulau Bonto Sua yang keduanya bertetangga pulau di kepulauan Pangkep, penyebab dari konflik tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman antara kedua kelompok, dimana Nelayan pulau Sarappo Lompoa melakukan penangkapan ikan dengan menyelam dan membawa panah ikan. Namun lokasi arealnya menangkap berdekatan dengan lokasi budidaya lobster kelompok pengawas Komando pulau Bonto Sua menyebabkan Pokwasmas yang ada tersebut mendatangi dan melakukan penyitaan alat dan tindakan ini tidak diterima masyarakat nelayan pulau Sarappo Lompoa. Sehingga kedua masyarakat Nelayan di kedua pulau saling berselisih dan akan bentrok terutama nelayan Pulau Sarappo Lompoa yang akan melakukan penyerangan terhadap ketua Pokwasmas Komando. Konflik ini dapat teratasi dengan melibatkan Polairut Polres Pangkep dan kepala Desa di masing masing Pulau tersebut, dengan mendamaikan kedua masyarakat Nelayan untuk tidak saling berselisih dan menyerahkan kembali alat tangkap nelayan Sarappo Lompoa yang disita serta memberikan pemahaman kepada Pokwasmas Komando Pulau Bonto Sua untuk tidak bertindak melebihi batas kewenangannya.

4.4.7. IPTD Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Teluk Bone

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa urusan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah kewenangan provinsi sejauh 12 NM diukur dari titik pasang terendah. Sebagai konsekuensi logisnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menindak lanjuti melalui Peraturan Gubernur Sulawesi

selatan Nomer 10 Tahun 2016, dimana salah satu Unit Pelaksana Teknis tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Pengembangan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Perairan Teluk Bone UPT P3SDKP WP TB). Dengan cakupan wilayah kerja meliputi kabupaten/kota administratif Bone, Wajo, Palopo, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur yang meliputi 1.093.000 hektare wilayah pengawasan perairan dalam Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) 713.

Selaku unit kerja baru setingkat administrator dalam struktur Jabatan Aparatur Sipil Negara UPT P3SDKP Wilayah Teluk Bone bertanggung jawab dalam sub urusan di Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. UPTD P3SDKP Wilayah Teluk Bone tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi Seksi sebagai berikut :

1. Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian pengelolaan SDKP berdasarkan wilayah kerja;
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian pengelolaan SDKP berdasarkan wilayah kerja;
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan dan pengendalian pengelolaan SDKP berdasarkan wilayah kerja;
8. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pengendalian pengelolaan SDKP berdasarkan wilayah kerja;
9. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;

Adapun kegiatan pemantauan kapal perikanan di wilayah Teluk Bone (UPTD) yang telah dilaksanakan oleh UPTD P3SDKP Wilayah Teluk Bone selama tahun 2017 yaitu :

Tabel 15. Data Hasil Pengawasan / Pemantauan Terhadap Armada Kapal Perikanan di Kabupaten Luwu Periode Februari. 2017

NO	Nama Perusahaan / Pemilik Kapal	Nama Kapal	GT	Alat Tangkap	Daerah Penangkapan	Pelabuhan Pangkalan	Keterangan
1	H. Sjahruddin N	KM. Sumber Bahari-2	29	Huhate	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone dan Laut Bali	Kab Luwu dan Sinjai	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
2	Ikhsan Sanusi, SH	KM. Rajawali-02	27	Huhate	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone	PPI Kab Luwu	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
3	Hasbih Arifin	KM. Bintang Samudera	28	Huhate	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone	PPI Kab Luwu	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
4	Muh. Harwan	KM. Mitra Fomario Moi	22	Huhate	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone	PPI Kab Luwu	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
5	Saparuddin	KM. Hikmah Kurnia	29	Huhate	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone	PPI Kab Luwu	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
6	-	KM. Arung Samudera	29	-	-	-	Telah diukur ulang, Dokumen sementara proses
7	-	KM. Lapawawoi 02	29	-	-	-	Dokumen sementara proses balik nama selaku pemilik kedua
8	Rudi	KM. Inkamina 16	-	-	-	-	Sementara berpangkalan di Kendari, dokumen belum diperiksa
9	-	KM. Inkamina 17	-	-	-	-	Sementara berpangkalan di Kendari, dokumen belum diperiksa
10	-	KM. Inkamina 232	-	-	-	-	Sementara berpangkalan di Kendari, dokumen belum diperiksa

Tabel 16. Data Hasil Pengawasan/Pemantauan Terhadap Armada Kapal Perikanan di Kota Palopo Periode Bulan Agustus 2017

NO	Nama Perusahaan / Pemilik Kapal	Nama Kapal	GT	Alat Tangkap	Daerah Penangkapan	Pelabuhan Pangkalan	Keterangan
1	Abdul Majid M	KM. Camar Putih	7	Purse Seine	Perairan Teluk Bone	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
2	Alfian Nombong	KM. Bunga Waru	6	Purse Seine	WPP RI 713	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
3	Milawati	KM. Fanesa	5	Purse Seine	WPP RI 713 & 714	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
4	Adi Kusuma	KM. Bintang Laut	6	Purse Seine	WPP RI 713	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
5	Fandi M. Mansyur	KM. Kehidupan Malimpo	6	Purse Seine	Perairan Teluk Bone	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
6	Jabbar	KM. Pengorbanan	6	Purse Seine	WPP RI 713	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
7	Jamaluddin	KM. Hikmah	6	Purse Seine	WPP RI 713	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
8	Laute	KM. Usaha Baru	6	Purse Seine	Perairan Teluk Bone	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
9	M. Mansur DM	KM. Panji	6	Purse Seine	WPP RI 713	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
10	M. Yunus	KM. Firda	6	Purse Seine	WPP RI 713	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
11	M. Yahya	KM. Berkah	6	Purse Seine	WPP RI 713	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
12	Agus	KM. Noval	6	Purse Seine	Perairan Teluk Bone	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
13	Makmur, S.Pd	KM. Nur Afia	5	Purse Seine	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
14	H. Sjahruddin N	KM. Sumber Bahari-02	29	Huhate	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone	Luwu, Sinjai	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
15	Awaluddin	KM.A. Afif	6	Purse Seine	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
16	Syamsuddin	KM. Reso Temmangingi	6	Purse Seine	Perairan Teluk Bone	PPI Pontap, Kota Palopo	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
17	Saparuddin	KM. Hikma Kurnia	29	Huhate	Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone	Kab Luwu	Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan
18	Andi Mappaleppui	KM. Mutiara Bahari	25	-	-	Sumbawa - Kota Palopo	Kapal Pengangkut Ikan (Dokumen lengkap, sah & masih berlaku serta taat berpangkalan)

Tabel 17 . Data Hasil Pengawasan / Pemantauan Terhadap Kapal Perikanan di Kecamatan Angkona-Malili, Kab Luwu Timur periode Oktober TA. 2017

NO	Nama Perusahaan / Pemilik Kapal	Nama Kapal	GT	Alat Tangkap	Daerah Penangkapan	Pelabuhan Pangkalan	Keterangan
1	Awaluddin	KM. Naruto	10	Purse seine	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Dokumen lengkap, sah & habis masa berlakunya tetapi taat berpangkalan
2	Bardis	KM. Weja Sakeni	9	Jaring insang	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Dokumen lengkap, sah & habis masa berlakunya tetapi taat berpangkalan
3	Ebit	Tanpa nama	5	Rawai dasar	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal
4	Harmonis	Tanpa nama	4	Pancing	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal
5	Herman	Tanpa nama	4	Jaring permukaan	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal
6	Ihwan Supardi	Tanpa nama	6	Rawai dasar	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal
7	Irfan S.	Tanpa nama	3	Pancing	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal
8	Iwan	Tanpa nama	6	Rawai dasar	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal
9	Jamil	Tanpa nama	5	Rawai dasar	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal
10	Junardi	Tanpa nama	3	Pancing	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal
11	Kaso	Tanpa nama	5	Rawai dasar	Perairan Teluk Bone	TPI Malili, Wotu, Burau	Kapal tanpa nama, Dokumen tidak ada diatas kapal

Lampiran 18 . Kegiatan Operasional Patroli PSDKP selama onboat di perairan Kota Palopo 27 Maret 2017

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Jam Layar	Hasil Patroli	Keterangan
1	27 Maret 2017	Melakukan perjalanan darat dari Kab Bone menuju Kota Palopo.	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pukul (07.30 WIT) Bertolak dari Kantor UPTD PPSKP WTB (Kab Bone) menuju dermaga TPI Pontap Kota Palopo.
		Koordinasi dengan Sekretaris Dinas, DKP Kota Palopo	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pukul (15.30 WIT) Koordinasi penggunaan speed boat DKP Palopo Perencanaan gelar operasi, penentuan target dan sasaran operasi (IF, DF, Alat Tangkap Terlarang, Dokumen perijinan)
		Persiapan operasional kapal pengawas (speed boat DKP Palopo).	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Check laik operational kapal dan safety regulation. Persiapan deck-mesin, pengisian BBM, Pelumas dan logistik di pel TPI Pontap Palopo. Uji manuver (test olah gerak kapal)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Jam Layar	Hasil Patroli	Keterangan
	28 Maret 2017	Patroli di Perairan Kota Palopo	2 Jam Layar	Riksa : 1 unit Kapal berbendera Indonesia, yaitu : KM. BWR 02 (6 GT),	<ul style="list-style-type: none"> Pukul (07.00 WIT) Bertolak dari TPI Pukul (09.00 WIT) Sandar di Bagang Perahu Nelayan melakukan pemantauan diperaian sekitar, disertai wawancara dan sosialisasi penyadaran hukum dengan nelayan bagang. Pukul (11.00 WIT) Patroli dilanjutkan. Pukul (11.40 WIT) Sandar di Pos Pengawas DKP Kota Palopo, sosialisasi penyadaran dengan para pengunjung wisata di Pos Pengawas DKP Palopo, dan rehat. Pukul (16.40 WIT) Patroli dilanjutkan dan kembali menuju ke fishing base.

Tabel 19. Data Hasil kegiatan pelaksanaan operasional pengawasan SDKP selama onboat di perairan Kota Palopo 27- 30 Maret 2017

No	Tanggal	NAMA KAPAL	GT	PELABUHAN PANGKALAN	JENIS KAPAL / ALKAP	T / W HENRIKAN	POSISI		NAMA PEMILIK	JUMLAH ABK	KETERANGAN
							LINTANG (LS)	BUJUR (BT)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	078/D.02a.P/P2T /08 / 2016	KM. BWR 02	6	PPI Pontap, Palopo	Purse Seine	8 Maret 2017 /16.50 WITA	3° 0' 29.9592" S	120°14'26.3832" E	ABD KADIR	5 WNI	DOKUMEN KAPAL LENGKAP, NAKHODA DISILAHKAN LANJUT
2	78/D.02a.P/P2T / 11 / 2016	KM. A. AFIF	6	PPI Pontap, Palopo	Purse Seine	9 Maret 2017 /15.40 WITA	2° 59' 27.546" S	120°14'37.014"E	AWALUDIN	5 WNI	Surat ukur tidak sesuai fisik kapal, diperintahkan menghadap Syahbandar Palopo utk difasilitasi ukur ulang
3	510/P2T-BKPM/4.11. P/7/C4/ 2015	KM. PUTRI TUNGGAL	6	PPI Pontap, Palopo	Bagang Perahu	0 Maret 2017 /06.50 WITA	2° 59' 26.801" S	120°14' 37.368" E	CHAEUL ASHAR	4 WNI	Izin habis masa berlakunya, diperintahkan menghadap DKP Palopo utk difasilitasi

Tabel 20. Pelaksanaan operasional patroli gabungan kegiatan pengawasan SDKP selama onboat di wilayah perairan pedalaman kepulauan Kab.Bone tanggal 25-28 April 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari pertama 25 April 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa dan menangkap 1 unit kapal perikanan berbendera RI (Perahu Tanpa Nama)	
2	Hari kedua 26 April 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI (KM. Qisya & KM. Minasa Mekkah 022)	
3	Hari ketiga 27 April 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI (KM. Addam Jaya & KM. Cipta Karya)	
4	Hari keempat 28 April 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 1 unit kapal perikanan berbendera RI (Perahu tanpa nama)	

Tabel 21. Hasil pelaksanaan operasional patroli gabungan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wil perairan kab Bone tanggal 25-28 April 2017

N o	Hari ke / Tanggal	Titik Koordinat	Nama Kapal	GT	Pelanggaran	Tindakan	Ket
1	Hari pertama 25 April 2017	4°33'29.00" S 120°27'21.00" T	(tanpa nama)	-	Membawa, memiliki, menguasai bahan peledak/ bom ikan, serta tidak memiliki dokumen kapal perikanan	Henti, riksa geledah kapal dan amankan 1 nakhoda & 2 ABK serta BB lainnya dan dititip/diserahkan ke Satpolair Bone untuk TL	Membuang bahan peledak ketika hendak diperiksa, namun tidak dapat ditemukan BB handak yang dibuang kecuali BB ikan di dek kapal
2	Hari kedua 26 April 2017	4°27'56.45" S 120°28'13.27" T	KM. Qisya	-	Tidak memiliki dokumen kapal perikanan (Bukti Pencatatan Kapal) alias Surat Tanda Daftar	Henti, riksa kapal, catat identitas nakhoda, menghimbau melengkapi surat tanda daftar kapal (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan). Lepas kapal melanjutkan kegiatan	Ukuran kapal terindikasi nelayan kecil, memerintahkan hadap pejabat DKP Kab Bone
3	Hari kedua 26 April 2017	4°23'34.85" S 120°25'6.58" T	KM. Minasa Mekka 022	29	Menggunakan alkap cantrang / alat tangkap yang dilarang	Henti, riksa akapal, Peringatan keras kpd nakhoda batas waktu penggunaan cantrang / lepas kapal melanjutkan kegiatan	Dokumen kapal lengkap, sah dan masih berlaku
4	Hari ketiga 27 April 2017	4°39'49.27" S 120°32'20.21" T	KM. Addam Jaya	6	-	Henti, Riksa, lepas kapal melanjutkan kegiatan	Dokumen kapal lengkap, sah dan masih berlaku
5	Hari ketiga 27 April 2017	4°44'56.35" S 120°28'16.65" T	KM. Cipta Karya	3	-	Henti, Riksa, lepas kapal melanjutkan kegiatan	Dokumen kapal lengkap, sah dan masih berlaku
6	Hari ke empat 28 April 2017	4°36'30.96" S 120°29'54.88" T	(tanpa nama)	-	Melarikan diri ketika dihentikan, serta Tidak memiliki dokumen kapal perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengejar, henti, riksa kapal, - Catat identitas nakhoda - Menghimbau melengkapi surat tanda daftar kapal (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) 	Ukuran kapal terindikasi nelayan kecil, memerintahkan menghadap pejabat DKP Kab Bone

Tabel 22. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di wilayah perairan pedalaman Kab Bone periode tanggal 3-5 Mei 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari pertama 3 Mei 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa dan menangkap 2 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Jaya Putra 03 2. Mardin Jaya	
2	Hari kedua 4 Mei 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	4 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Samudra Mattoanging 2. Setia Kawan 07	
3	Hari ketiga 5 Mei 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	4 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI 1. (Tanpa Nama) 2. Harapanku 3. Fajar	

LAPORAN TAHUNAN 2017

Tabel 22. Hasil pelaksanaan operasional patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wil perairan pedalaman kab Bone periode 3- 5 Mei 2017

N o	Hari ke / Tanggal	Titik Koordinat	Nama Kapal	GT	Pelanggaran	Tindakan	Ket
1	Hari pertama 3 Mei 2017	4°49'15.76" S 120°30'35.01" T	KM. Jaya Putra 03	6	Menggunakan alkap cantrang	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diberikan peringatan keras batas waktu penggunaan cantrang
	Hari pertama 3 Mei 2017	4°55'16.93" S 120°22'36.87" T	KM. Mardin Jaya	6	-	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal melanjutkan kegiatan	Dokumen lengkap sah dan masih berlaku / diizinkan melanjutkan kegiatan
2	Hari kedua 4 Mei 2017	5° 2'13.45"S 120°25'53.54" T	KM. Samudra Mattoanging	9	Menggunakan alkap cantrang	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diberikan peringatan keras batas waktu penggunaan cantrang
	Hari kedua 4 Mei 2017	4°43'12.50" S 120°30'40.85" T	KM. Setia Kawan 07	30	-	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal melanjutkan kegiatan	Dokumen lengkap sah dan masih berlaku / diizinkan melanjutkan kegiatan
3	Hari ketiga 5 Mei 2017	4°59'27.24" S 120°22'51.77" T	KM. (Tanpa Nama)	-	Tidak memiliki dokumen kapal perikanan (BPKP)	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diperintah hadap pejabat DKP Bone utk lengkapi dokumen (BPKP)
	Hari ketiga 5 Mei 2017	4°51'32.16" S 120°29'54.32" T	KM. Harapanku	-	Tidak memiliki dokumen kapal perikanan (BPKP)	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diperintah hadap pejabat DKP Bone utk lengkapi dokumen (BPKP)
	Hari ketiga 5 Mei 2017	4°42'37.54" S 120°31'55.98" T	KM. Fajar	-	Tidak memiliki dokumen kapal perikanan (BPKP)	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diperintah hadap pejabat DKP Bone utk lengkapi dokumen (BPKP)

Tabel 23. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di perairan pedalaman Kab Luwu Utara periode 24- 27 Juli 2017

NO	HARI ke / TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari I 24 Juli 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa dan menangkap 1 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Timur Laut	
2	Hari II 25 Juli 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Perdamaian 01 2. Merah Putih	<ul style="list-style-type: none"> Tim operasi disekitar perairan pedalaman Tokke dengan metode garis lurus menuju perairan Cappasolo, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Perdamaian 01 kemudian balik haluan menuju perairan pedalaman Amasang, juga telah Melaksanakan henti & riksa terhadap kapal perikanan Merah Putih.
3	Hari III 26 Juli 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Cahaya Laut 2. Perdamaian 02	
4	Hari IV 27 Juli 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Sinar Family 2. Sumber Rezeki 03	<ul style="list-style-type: none"> Tim patroli bertolak dari Pelabuhan Rakyat Desa Tokke, Malangke, Luwu Utara (pukul 09.00 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Tokke dengan metode garis lurus menuju perairan Cappasolo, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Sinar Family, selanjutnya balik haluan menuju perairan pedalaman Amasang, dengan menghentikan & memeriksa KM. Sumber Rezeki 03.

Tabel 24. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di perairan pedalaman Kabupaten Wajo periode 22-25 Agustus 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari I 22-08-2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa dan menangkap 1 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Minasa Madina 01	- Tim patroli bertolak dari Pelabuhan Rakyat Desa Akkajeng, Kec Sajoanging, Wajo (pukul 09.30 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Sajoanging dengan metode garis lurus sepanjang perairan Akkajeng, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Minasa Madina 01.
2	Hari II 23-08-2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 4 unit kapal perikanan berbendera RI 1.Minasa Madina 02 2.Tanpa Nama 3.Cahaya Doping 4.Tanpa Nama	- Tim patroli bertolak dari Pelabuhan Rakyat Desa Akkajeng, Kec Sajoanging, Wajo (pukul 10.30 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Sajoanging dengan metode garis lurus sepanjang perairan Akkajeng, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Minasa Madina 02, Kapal Tanpa nama, Cahaya Doping, Kapal Tanpa Nama
3	Hari III 24-08-2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 3 unit kapal perikanan berbendera RI 1.Cinta Damai 02 2.Tanpa Nama 3.Usaha Baru	- Tim patroli bertolak dari Pelabuhan Rakyat Desa Akkajeng, Kec Sajoanging, Wajo (pukul 10.00 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Sajoanging dengan metode garis lurus sepanjang perairan Akkajeng, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Cinta Damai 02, Kapal Perikanan Tanpa Nama, KM. Usaha Baru.
4	Hari IV 25-08-2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI Tanpa Nama	- Tim patroli bertolak dari Pelabuhan Rakyat Desa Akkajeng, Kec Sajoanging, Wajo (pukul 10.25 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Sajoanging dengan metode garis lurus sepanjang perairan Akkajeng, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Kapal Perikanan Tanpa Nama, KM. Kapal Perikanan Tanpa Nama

Tabel 25. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di wilayah perairan pedalaman Kab Bone periode 7-10 September 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari pertama 7 September 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa dan menangkap 3 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Aska Jaya 4 GT 2. Dua Putra 6 GT 3.Cahaya Indah 6 GT	- Tim gelar patroli disekitar perairan Salomekko dan sekitarnya, telah menghentikan dan memeriksa kapal KM. Aska Jaya, KM. Dua Putra dilanjutkan ke perairan Mare. - Tim patroli melanjutkan patroli ke perairan Barebbo, dengan menghentikan dan memeriksa KM. Chaya Indah - Tim patroli kembali dan sandar di Pelabuhan Rakyat/TPI Barebbo Bone (15.00 WITA).
2	Hari kedua 8 September 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	4 Jam Layar	Memeriksa 4 unit kapal perikanan berbendera RI 1.Gandhi Saputra 6 GT 2. Karya Agung 6 GT 3. Hikmah 30 GT 4.Kembali Muda 5 GT	- Tim Patroli diperaikan Barebbo hingga perairan Sibulue, telah menghentikan dan memeriksa kapal KM. Gandhi Saputra, KM. Karya Agung, KM. Hikmah 01, KM. Kembali Muda
3	Hari ketiga 9 September 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	4 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI 1. Andika Putra 29 GT 2.Ahmad Fauzi 29 GT	- Tim Patroli diperaikan Lamuru hingga perairan Tanete Riattang Timur dengan menghentikan dan memeriksa 2 unit kapal perikanan KM. Andika Putra, KM. Ahmad Fauzi. - Tim patroli rehat / lego jangkar di sekitar perairan Cendrana sambil melakukan pemantauan terumbu karang.

LAPORAN TAHUNAN 2017

Tabel 26. Hasil pelaksanaan operasional patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wil perairan Kab Luwu Utara periode 7- 10 September 2017

N o	Hari ke / Tanggal	Titik Koordinat	Nama Kapal	GT	Pelanggaran	Tindakan	Ket
1	Hari I 7 Sept 2017	5°0'12.1824" S 120°19'34.392" T	KM. Aska Jaya	4	-	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Kapal perikanan lengkap dan taat hukum
	Hari I 7 Sept 2017	5°0'2.356" S 120°20'26.5344" T	KM. Dua Putra	6	Izin habis masa berlakunya, alat tangkap tdk sesuai	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diberikan peringatan keras batas waktu penggunaan kompresso
	Hari I 7 Sept 2017	5°1'13.782" S 120°20'9.3624" T	KM. Cahaya Indah	6	Penyalahgunaan ijin, Menggunakan alkap trawl	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diberikan peringatan keras, alkap disita, membuat pernyataan
2	Hari II 8 Sept 2017	4°40'6.175"S 120°28'23.948"	KM. Gandhi Saputra	6	Ijin habis masa berlakunya	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diberikan peringatan keras segera ukur ulang kapal
	Hari II 8 Sept 2017	4°38'48.8688"S 120°27'45.79925"	KM. Karya Agung	6	Ijin habis masa berlakunya	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diberikan peringatan keras segera ukur ulang kapal
	Hari II 8 Sept 2017	4°34'2.463"S 120°27'6.735"	KM. Hikmah 01	30	Ijin habis masa berlakunya	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diberikan peringatan keras segera ukur ulang kapal
	Hari II 8 Sept 2017	4°34'24.729"S 120°24'6.811"	KM. Kembali Muda	5	Penyalahgunaan ijin, Menggunakan alat bantu yg dilarang	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Pembinaan : Diberikan peringatan keras, alat bantu disita disita, membuat pernyataan
3	Hari III 9 Sept 2017	4°22'28.300"S 120°25'20.107"T	KM. Andika Putra 04	29	-	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Kapal perikanan lengkap dan taat hukum
	Hari III 9 Sept 2017	4°24'45.997"S 120°21'48.290"T	KM. Ahmad Fauzi	29	-	Henti, riksa kapal dan alat tangkap / melepas kapal untuk melanjutkan kegiatan	Kapal perikanan lengkap dan taat hukum

Tabel 27. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di perairan pedalaman Angkona-Malili Kab Luwu Timur periode 21-24 Nopember 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
	Hari I Tanggal 21 Nopember 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 4 unit kapal perikanan berbendera RI yaitu : 1.KM. METRO 02 2. KM. Nirwan 3.KM. Harapan Baru 01 4.KM. Pelangi 02	- Tim patroli bertolak dari Sungai Tampinna, Angkona , Kab Luwu Timur (pukul 12.45 WITA). Tim operasi dengan metode garis lurus menuju ke arah perairan Karambua, Kec Wotu, telah menghentikan & memeriksa terhadap kapal perikanan antara lain : KM. METRO 02 dan KM. Nirwan. Tim Lego jangkar di perairan Karambua sambil rehat melakukan pemantauan kapal perikanan. - Tim kemudian balik haluan menuju perairan pedalaman Sungai Tampinna, Angkona, dengan menghentikan & memeriksa kapal perikanan antara lain : KM. Harapan Baru 01 & KM. Pelangi 02
	Hari II Tanggal 22 Nopember 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbendera RI, yaitu : 1. KM. Lembuh Putih 2. KM. Mario	Tim patroli bertolak dari Sungai Tampinna, Angkona , Kab Luwu Timur (pukul 12.00 WITA). Tim operasi diperairan pedalaman dengan metode garis lurus ke arah perairan Malili, Luwu Timur, telah menghentikan & memeriksa terhadap kapal perikanan KM. Lembuh Putih dan KM. Mario

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
3	Hari III Tanggal 23 Nopember 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 1 unit kapal perikanan berbedera RI, yaitu : 1. KM. Perak	Tim patroli bertolak dari Sungai Tampinna, Angkona , Kab Luwu Timur (pukul 12.45 WITA). Tim operasi dengan metode garis lurus menuju ke arah perairan Karambua, Kec Wotu telah menghentikan & memeriksa terhadap kapal perikanan antara lain : KM. Perak
4	Hari IV Tanggal 24 Nopember 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli		Memeriksa 1 unit kapal perikanan berbedera RI, yaitu : 1.KM. Tiga Putra 04	Tim patroli bertolak dari Sungai Tampinna, Angkona , Kab Luwu Timur (pukul 12.00 WITA). Tim operasi diperairan pedalaman dengan metode garis lurus ke arah perairan Malili, Luwu Timur, telah menghentikan & memeriksa terhadap kapal perikanan KM. Tiga Putra 04

Tabel 28. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di wilayah perairan pedalaman Kota Palopo periode 28 Nopember – 1 Desember 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari I, tanggal 28 Nopember 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa dan menangkap 3 unit kapal perikanan berbedera RI 1.BWR 06 2.Rahmat Ilahi 3.Fortuna 4.Merpati	<ul style="list-style-type: none"> Tim gelar patroli disekitar perairan Walenrang Timur dan sekitarnya, telah menghentikan dan memeriksa kapal KM. BWR 06; KM. Rahmat Ilahi; Tim patroli melanjutkan patroli ke perairan Wara Selatan, dengan menghentikan dan memeriksa KM. KM. Fortuna; KM. Merpati
2	Hari II, tanggal 29 Nopember 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 4 unit kapal perikanan berbedera RI 1. Pengorbanan 2.Ratnah	<ul style="list-style-type: none"> Tim gelar patroli disekitar perairan Wara Selatan, telah menghentikan dan memeriksa kapal KM. Ratnah; KM. Pengorbanan. Tim patroli kembali dan sandar di Pelabuhan Pontab, Ponjlae, Wara Timur, (17.00 WITA).
3	Hari III, tanggal 30 Nopember 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbedera RI 1. Faneza	<ul style="list-style-type: none"> Tim gelar patroli disekitar perairan Walenrang Timur dan sekitarnya, telah menghentikan dan memeriksa kapal KM. Faneza; Tim patroli kembali dan sandar di Pelabuhan Pontab, Ponjlae, Wara Timur, (17.00 WITA).
4	Hari IV tanggal 1 Desember 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 1 unit kapal perikanan berbedera RI 1. Fadillah	<ul style="list-style-type: none"> Tim gelar patroli disekitar perairan Wara Selatan, telah menghentikan dan memeriksa kapal KM. Fadillah.

Tabel 29. Hasil pelaksanaan operasional patroli pengawasan SDKP di wil perairan Kota Palopo periode 28 Nopember – 1 Desember 2017

No	Hari ke /Tanggal	Titik Koordinat	Nama Kapal	GT	Pelanggaran	Tindakan	Ket
1	Hari I 28 Nop 2017	2°59'14.8956" S 120°12'37.7604" T	KM. BWR 06	6	Dokumen lengkap, sah dan masih berlaku,	Henti, riksa dokumen, kapal dan alat tangkap / alat bantu, kapal dilepas	Nakhoda taat hukum melakukan usaha perikanan
		2°58'21.7344" S 120°13'8.6628" T	KM. Rahmat Ilahi	6	Dokumen lengkap, Ijin habis masa berlakunya,	Henti, riksa dokumen, kapal dan alat tangkap / alat bantu, kapal dilepas	Ijin habis masa berlakunya, diberikan pembinaan
		2°57'55.0944" S 120°14'21.2568" T	KM. Fortuna	13	Dokumen lengkap, sah dan masih berlaku,	Henti, riksa dokumen, kapal dan alat tangkap / alat bantu, kapal dilepas	Nakhoda taat hukum melakukan usaha perikanan
		2°57'47.1348"S 120°14'57.138" T	KM. Merpati	13	Dokumen lengkap, Ijin habis masa berlakunya,	Henti, riksa dokumen, kapal dan alat tangkap / alat bantu, kapal dilepas	Ijin habis masa berlakunya, diberikan pembinaan

No	Hari ke / Tanggal	Titik Koordinat	Nama Kapal	GT	Pelanggaran	Tindakan	Ket
2	Hari II 29 Nop 2017	2°58'59.7504"S 120°14'14.5932"E	KM. Pengorbanan	7	Dokumen lengkap, Izin habis masa berlakunya,	Henti, riksa dokumen, kapal dan alat tangkap / alat bantu, kapal dilepas	Ijin habis masa berlakunya, diberikan pembinaan
		2°59'15.1584"S 120°15'7.5024"E	KM. Ratnah	6	Dokumen lengkap, Izin habis masa berlakunya,	Henti, riksa dokumen, kapal dan alat tangkap / alat bantu, kapal dilepas	Ijin habis masa berlakunya, diberikan pembinaan
3	Hari III 30 Nop 2017	3°0'9.162"S 120°16'5.6892"E	KM. Faneza	6	Dokumen lengkap, Izin habis masa berlakunya,	Henti, riksa dokumen, kapal dan alat tangkap / alat bantu, kapal dilepas	Ijin habis masa berlakunya, diberikan pembinaan
4	Hari IV 1 Des 2017	3°0'30.168"S 120°15'59.22"E	KM. Fadillah	6	Dokumen lengkap, Izin habis masa berlakunya,	Henti, riksa dokumen, kapal dan alat tangkap / alat bantu, kapal dilepas	Ijin habis masa berlakunya, diberikan pembinaan

Tabel 30. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di perairan pedalaman Kab Luwu periode 5-8 Desember 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari I 5 Des 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 4 unit kapal perikanan RI 1.Nurmandar 02 2.Alam 3.Munandar I 4.Mitra Fomariomoi	- Tim patroli bertolak dari Pelabuhan TPI Bone Pute Kecamatan Larompong Selatan, Kab Luwu (pukul 12.45 WITA). Tim operasi diperairan pedalaman Bone Pute dan sekitarnya dengan metode garis lurus ke arah perairan Temboe telah menghentikan & memeriksa kapal perikanan antara lain : KM. Nurmandar 02; KM. Alam; KM. Munandar I; KM. Mitra Fomariomoi
2	Hari II 6 Des 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbedera RI 1.Nur Afia 2.Hikma Kurnia 3.Three D	Tim patroli bertolak dari Pelabuhan TPI Bone Pute Kecamatan Larompong Selatan, Kab Luwu (pukul 11.40 WITA). Tim operasi diperairan pedalaman Bone Pute dan sekitarnya dengan metode garis lurus ke arah perairan Temboe telah menghentikan & memeriksa kapal perikanan antara lain : KM. Nur Afia; KM. Hikma Kurnia; KM. Three D.
3	Hari III 7 Des 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 1 unit kapal perikanan berbedera RI Fahri II	Tim patroli bertolak dari Pelabuhan TPI Bone Pute Kecamatan Larompong Selatan, Kab Luwu (pukul 11.40 WITA). Tim operasi diperairan pedalaman Bone Pute, Temboe dan Babang dengan metode garis lurus telah menghentikan & memeriksa kapal perikanan / Bagang perahu KM. Fahri II.
4	Hari IV 8 Des 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 1 unit kapal perikanan berbedera RI KM. Reso Temangingi	Tim patroli bertolak dari Pelabuhan TPI Bone Pute Kecamatan Larompong Selatan, Kab Luwu (pukul 12.30 WITA). Tim operasi diperairan pedalaman Bone Pute, Temboe dan Babang dengan metode garis lurus telah menghentikan & memeriksa terhadap kapal perikanan antara lain : KM. Reso Temangingi.

Tabel 31. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di perairan pedalaman Kabupaten Wajo periode 12-15 Desember 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari I 12-12-2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa dan menangkap 4 unit kapal perikanan berbendera RI	<ul style="list-style-type: none"> Tim patroli bertolak dari Pelabuhan Rakyat Akkajeng, Kec Sajoanging, Wajo (pukul 12.30 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Sajoanging dengan metode garis lurus sepanjang perairan Sajoanging - Takalala, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Tanpa Nama sebanyak 4 unit.
2	Hari II 13-12-2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbedera RI	<ul style="list-style-type: none"> Tim patroli bertolak dari di pelabuhan rakyat/tangkahan Takkalala, Wajo (pukul 10.30 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Takalala dengan metode garis lurus sepanjang perairan Penrang, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Tanpa Nama sebanyak 2 unit
3	Hari III 14-12-2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbedera RI 1. KM.Tanpa nama 2.KM. Anggur Merah	<ul style="list-style-type: none"> Tim patroli bertolak dari di pelabuhan rakyat/tangkahan Takkalala, Wajo (pukul 10.00 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Takalala dengan metode garis lurus sepanjang perairan Sajoanging-Keera, telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Tanpa Nama 1 unit dan KM. Anggur Merah 1 unit,
4	Hari IV 15-12-2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Memeriksa 2 unit kapal perikanan berbedera RI KM.Iham	<ul style="list-style-type: none"> Tim patroli bertolak dari Pelabuhan Rakyat Keera Wajo (pukul 10.25 WITA). Tim operasi disekitar perairan pedalaman Keera dengan metode garis lurus sepanjang perairan Pitumpanua telah menghentikan & memeriksa serta memberikan peringatan keras terhadap kapal perikanan KM. Ilham 1 unit

Tabel 32. Kegiatan operasional patroli pengawasan SDKP selama onboat di wilayah perairan pedalaman Kab Bone periode 19-22 Desember 2017

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
1	Hari I 19 Des 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Riksa 3 Jolloro berbendera Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Berolak dari PPI Lonrae Bone untuk operasi (09.00 WITA). Patroli di sekitar perairan kec. Tanete Riattang Timur memeriksa Jolloro tanpa nama 1, Jolloro tanpa nama 2, Jolloro tanpa nama 3 lanjut menuju utara perairan Kec. Awang Pone, perairan Kec. Tellusiatinge, perairan Kec. Cenrana.
2	Hari II 20 Des 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Riksa 2 Jolloro berbendera Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Berolak dari PPI Lonrae Bone untuk operasi (09.00 WITA). Patroli di sekitar perairan kec. Tanete Riattang Timur menuju ke Selatan, perairan Kec. Barebbo, perairan Kec. Sibulue memeriksa 2 Jolloro tanpa nama dan melanjutkan ke perairan Kec. Mare dan lanjut ke perairan Kec. Tonra, perairan Kec. Kajuara, P. Beta
3	Hari III 21 Des 2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Riksa 2 Jolloro berbendera Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Patroli di sekitar perairan Kec. Cenrana memeriksa 2 Jolloro tanpa nama dan lanjut ke Perairan Kec. Tellu Siatinge, perairan Kec. Awang Pone, perairan Kec. Tanete Riattang Timur, perairan Kec. Sibulue, perairan Kec. Barebbo, perairan Kec. Tanete Riattang Timur.

NO	HARI ke /TANGGAL	KEGIATAN	JAM LAYAR	HASIL PATROLI	KETERANGAN
4	Hari IV 22 Des2017	Persiapan deck – mesin, bekal logistik / BBM dan Pelaksanaan patroli	5 Jam Layar	Riksa Kapal berbendera Indonesia 1.HOTEL MANDAR 08 2.Jolloro tanpa nama 5 buah	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli di sekitar perairan kec. Tanete Riattang Timur menuju ke Selatan, perairan Kec. Barebbo, perairan Kec. Sibulue, lanjut ke perairan Kec. Mare, perairan Kec. Tonra, perairan Kec. Kajuara, P. Beta. - Patroli di sekitar pulau Betta dan memeriksa Jolloro tanpa nama 5 dan lanjut ke perairan pulau Kodingare dan beolk ke Utara perairan Kec. Salomeko, Perairan Kec. Tonra memeriksa, dan lanjut ke perairan Kec. Mare, perairan Kec. Sibulue, perairan Kec. Barebbo dan kembali perairan Kec. Tanete Riattang Timur.

➤ **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pengawasan dan pengendalian SDKP di dukung oleh beberapa sub output, masing-masing adalah Penerimaan bantuan perlengkapan POKMASWAS dan bantuan berupa perahu untuk kelompok POKMASWAS.

Adapun uraian tugas yang terealisasi adalah sebagai berikut :

Penerimaan bantuan Perlengkapan POKMASWAS UPT.P3SDKP WPT-Bone

Bantuan Perlengkapan POKMASWAS yang diberikan kepada kelompok di wilayah UPT.P3SDKP WPT-Bone yaitu berupa

No	URAIAN	JUMLAH
1	Rompi	10 Buah
2	Senter	10 Buah
3	Handy Talky	2 Buah
4	GPS	1 Paket
5	Teropong	1 Paket
6	Kamera	1 Paket

Nama- nama kelompok yang menerima bantuan paket POKMASWAS di setiap Wilayah UPT.P3SDKP WPT-Bone adalah

1. **Kabupaten Bone**
 - a. Sipatokkong
 - b. Bahari
 - c. Mallari Ade
 - d. Mabbarakkae
2. **Kabupaten Wajo**
 - a. Bina Lestari
 - b. Siparengerang
 - c. Masseddie

3. **Kota Palopo**
 - a. Baja Pole
 - b. Retona
 - c. Salu Karo
4. **Kabupaten Luwu**
 - a. Pasir Putih
 - b. Bilongka
5. **Luwu Utara**
 - a. Bajak Laut
 - b. Bunga Karang
 - c. Pulau Indah
 - d. Mamminasae
6. **Kabupaten Luwu Timur**
 - a. Angkona
 - b. Burau Pantai
 - c. Lampia

A. Penerimaan Bantuan Perahu Pada Kelompok POKMASWAS

Nama- nama kelompok yang menerima bantuan Perahu POKMASWAS di setiap Wilayah UPT.P3SDKP WPT-Bone adalah :

1. **Kabupaten Bone**
 - a. Mattiro Deceng Desa Kajuara Kec. Pajukukang
2. **Kabupaten Wajo**
 - a. Bina Lestari Kel. Akkajeng Kec. Sajoangin
 - b. Siparenggerang Kel. Watanglipue Kec. Tempe
3. **Kota Palopo**
 - a. Salu Karo Kel. Takalala Kec. Wara Selatan
4. **Kabupaten Luwu**
 - a. Pasir Putih Desa Babang Kec. Larompong Selatan
5. **Kabupaten Luwu Utara**
 - a. Kuda Laut Desa Munte Kec. Tana Lili

V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

5.1. Ekonomi

5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro ekonomi untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut selama kurun waktu 2013 - 2017 data produksi total perikanan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan rata - rata sebesar 10,4 %. Peningkatan tersebut terjadi akibat peningkatan produksi dari usaha budidaya rumput laut baik yang diusahakan di laut (*Eucheuma spp*) maupun di tambak (*Gracillaria spp*).

5.1.2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 total tercatat sebesar 4.262.553,6 ton. Dibanding dengan hasil yang dicapai tahun 2016 sebesar 3.941.648,8 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 320.904,7 ton atau kenaikan sebesar 8,14 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 33. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2016 - 2017

No.	Sumber Daya	Tahun		%
		2016	2017	
1	Penangkapan (Ton)	312.380,8	359.770,1	15.17
	a. Laut	297.406,3	330.502,0	11.13
	b. Perairan Umum	14.974,5	29.268,1	95.45
2	Budidaya (Ton)	3,629,268.0	3,902,783.4	7,54
	a. Tambak	1,255,018.6	1,217,638.3	(2.98)
	b. Laut	2,357,244.7	2,667,719.6	13.17
	c. Kolam	10,501.7	11,480.6	9.32
	d. Sawah	5,991.8	5,433.2	(9.32)
	e. KJA (Laut)	130.9	32,7	(75.02)
	f. KJA (Tawar)	380.3	479,0	25.95
	Jumlah (Ton)	3.941.648,8	4.262.553,6	8,14

a. Budidaya

Ada 2 (dua) komoditi utama yang dipacu dalam menunjang ekspor perikanan yaitu udang dan rumput laut, disamping itu komoditi kepiting bakau juga memiliki prospek untuk diekspor.

Udang

Di Sulawesi Selatan ada beberapa jenis udang yang hidup di tambak, tetapi yang dibudidayakan ada 2 (dua) jenis yaitu udang Windu dan Vannamei.

Produksi udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 tercatat sebesar 45.342,4 ton yang terdiri dari udang windu 12.046,2 ton, udang vannamei 20.644,0 ton, dan udang lainnya 12.652,2 ton, Jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun 2016 sebesar 41.686 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 8,8 %.

Produksi udang di Sulawesi Selatan terbanyak terdapat di kabupaten Pinrang sebesar 9.935,7 ton (21,9 %), Kabupaten Bone sebesar 4.885,9 ton (10,8 %), Kabupaten Takalar sebesar 4.516 ton (9,9 %), Kabupaten Bulukumba sebesar 3.990,3 ton (8,8 %) dan Kabupaten Luwu sebesar 3.847,6 ton (8,5 %).

Rumput Laut

Di Sulawesi Selatan ada 3 (tiga) jenis rumput laut yang diusahakan oleh pembudidaya yaitu jenis *Eucheuma spp*, *Spinosium spp* dan *Gracillaria spp* , jumlah produksi ketiga jenis rumput laut tersebut pada tahun 2017 sebesar 3.662.970,0 ton (basah), yang terdiri dari *Eucheuma spp* sebesar 2.488.581,3 ton basah, *Gracillaria spp* sebesar 995.250,4 ton basah dan *Spinosium spp* sebesar 179.138,3 ton basah. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2016 sebesar 3.409.048,2 ton basah, maka terjadi peningkatan sebesar 7,5 %.

Produksi rumput laut jenis *Eucheuma spp* di Sulawesi Selatan adalah Luwu, Luwu Utara, wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Luwu Timur dan Kota palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Eucheuma cottonii* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 760.726 ton basah (30,6 %), Kabupaten Wajo sebesar 386.998 ton (15,6 %), Kabupaten luwu sebesar 318.499,5 ton (12,8 %), Kabupaten Pangkep sebesar 273.135 ton (10,9 %) dan Kabupaten Bulukumba sebesar 167.850 ton (6,7 %).

Daerah produksi *Gracillaria spp* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Maros, Pangkep, Luwu Timur, Pinrang dan Kota Palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Gracillaria sp* terbesar terdapat di kabupaten Luwu sebesar 303.751,7 ton (30,5%), Kabupaten Luwu Utara sebesar 155.285 ton (15,6 %), kabupaten Luwu Timur sebesar 144.314 ton (14,5 %), Kabupaten Takalar sebesar 105.130 ton (10,6 %) dan Kabupaten Bone sebesar 97.850 ton (9,8%).

Daerah produksi *Spinosium spp* yaitu Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Bantaeng. Produksi Rumput laut untuk jenis *Spinosium spp* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 130.694 ton (72,9 %), Sinjai sebesar 19.465,3 ton (10,9 %), Bantaeng sebesar 15.467,8 ton (8,6 %) dan Jeneponto sebesar 13.511,2 ton (7,5 %).

Kepiting Bakau (*Scylla serrata*)

Adapun komoditi lainnya melalui usaha budidaya yaitu kepiting bakau (*Scylla serrata*). Produksi pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.397,3 ton sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.306,9 ton atau terjadi kenaikan produksi sebesar 6,9 %.

Selain komoditi udang, rumput laut dan kepiting bakau, ada beberapa komoditi ikan hasil budidaya yang dipacu untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat meliputi ikan bandeng, ikan mas, ikan nila dan ikan lainnya.

Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Produksi ikan bandeng dari hasil budidaya pada tahun 2017 tercatat sebesar 170.135,8 ton dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 155.762,4 ton, maka terjadi peningkatan produksi sebesar 14.373,4 ton atau 9,2 %. Penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan terdapat di kabupaten Bone sebesar 68.950,8 ton (40,5%), Kabupaten Wajo sebesar 21.640 ton (12,7%), kabupaten Pinrang sebesar 19.714,7 ton (11,6%), kabupaten Pangkep sebesar 13.593 ton (7,9 %) dan kabupaten Luwu Timur sebesar 10.412 ton (6,1 %).

Ikan Mas (*Cyprinus carpio*)

Produksi ikan Mas dari hasil budidaya di kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2017 tercatat sebesar 9.792,4 ton, dibanding dengan tahun 2016 tercatat sebesar 9.829,5 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 37,1 ton atau 0,4 %. Daerah - daerah yang selama ini andalan produksi ikan Mas yaitu Kabupaten Toraja Utara sebesar 2.539,5 ton (25,9 %), Kabupaten Pinrang sebesar 2.217,3 ton (22,6 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 986,4 ton (10,1 %), Kabupaten Luwu sebesar 616,3 ton (6,3 %) dan Kabupaten Sidrap sebesar 585 ton (5,9 %).

Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Produksi ikan Nila dari hasil budidaya kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2017 tercatat sebesar 7.058,8 ton, dibanding dengan tahun 2016 tercatat sebesar 5.711,2 ton, maka terjadi peningkatan produksi produksi sebesar 1.347,6 ton atau 23,6 %. Kabupaten penghasil ikan Nila di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep sebesar 2.064 ton (29,2 %), Kabupaten Pinrang sebesar 1.661,5 ton (23,5%), Kabupaten Luwu Utara sebesar 574,5 ton (8,1%), Kabupaten Maros sebesar 569,2 ton (8,1 %) dan Kabupaten Enrekang sebesar 436,6 ton (6,2 %).

b. Penangkapan

Ikan Tuna /Cakalang/Tongkol

Dimaksudkan dengan ikan tuna/cakalang/tongkol adalah ikan-ikan pelagis besar dalam hal ini meliputi : Albakora, Madidihang, Tuna Mata Besar, Setuhuk Loreng, Setuhuk Biru, Setuhuk Hitam, Ikan Layaran, Ikan pedang, Tongkol Komo, Tongkol Krai, Tongkol Abu-Abu, Lisong, Kenyar, Cakalang.

Pada tahun 2017 produksi tangkapan ikan tuna/Cakalang/Tongkol di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 59.075 ton, sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebesar 57.273,3 ton hal tersebut berarti terjadi kenaikan produksi tangkapan ikan tuna/cakalang/tongkol sebesar 3.432,8 ton atau sebesar 3,1 %.

5.1.3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2017 tercatat sebesar 55,2 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2016 tercatat sebesar 52,5 kg/kapita/tahun dengan penduduk Sulawesi Selatan mencapai 8.771.970 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2016 terjadi kenaikan konsumsi perkapita sebesar 4,9 %.

5.1.4. Pemasaran

Komoditi hasil perikanan Sulawesi Selatan dipasarkan tujuan ekspor, antar Provinsi dan lokal. pada tahun 2016 tercatat sebesar 118.256,3 ton dengan nilai US\$ 210.317.700 dan pada tahun 2017 tercatat sebesar 126.245 ton dengan nilai US\$ 251.777.900 atau terjadi kenaikan volume sebesar 6,8 % dan kenaikan nilai 19,7 %.

5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya

Tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sangat bervariasi besarnya, dimana sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dikelola dan komoditi yang diusahakan.

Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 tercatat antara Rp. 6.307.236 sampai Rp. 33.023.980. Secara berurutan tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah di Budidaya KJA Air Tawar Rp. 6.307.236, Budidaya Sawah Rp. 11.887.797, Budidaya KJA Laut Rp. 14.630.344, Budidaya Kolam Rp. 16.347.289, Budidaya tambak Rp. 26.167.835 dan Budidaya laut (Rumput Laut) Rp. 33.023.980 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 19.262.468 dan nelayan perairan umum Rp. 28.918.980.

5.1.6. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat pada Tahun 2017 sebanyak 441.630 orang atau 1,9 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 279.748 orang (63,3 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 161.882 orang (37,7 %).

5.2. Proyek dan Pembiayaan**5.2.1. Dekonsentrasi (APBN)**

Pada tahun 2017 jumlah dana dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan pada 6 (Enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.765.362.000. Realisasi pembiayaan sampai dengan akhir Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 4.543.929.850 atau sebesar 99,02 %, dengan sisa anggaran sebanyak Rp. 221.432.150,- Adapun rincian alokasi dan realisasinya terlihat tabel di bawah ini.

Tabel 34. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Masing-Masing Satuan Kerja, Tahun 2017

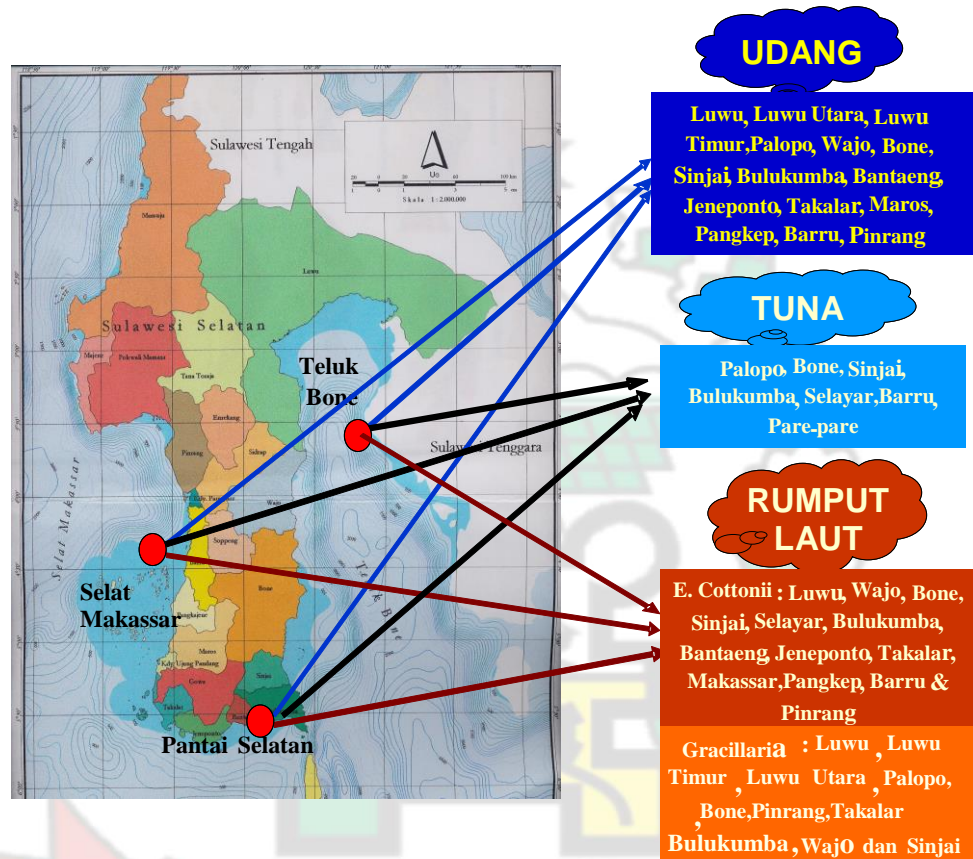
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Sekretariat Jenderal (01)	792.750.000	787.714.600	5.035.400	99,4
2	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	1.145.235.000	1.052.665.850	92.569.150	91,9
3	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	1.127.935.000	1.052.711.100	75.223.900	99,6
4	Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05)	400.428.000	397.017.200	3.410.800	99,2
5	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) (06)	444.290.000	413.250.200	31.039.800	93,0
6	Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (07)	304.724.000*	297.710.900	7.013.100	98,0
Jumlah		4.765.362.000	4.543.929.850	221.432.150	95,35

Sumber: Sub Bagian Program

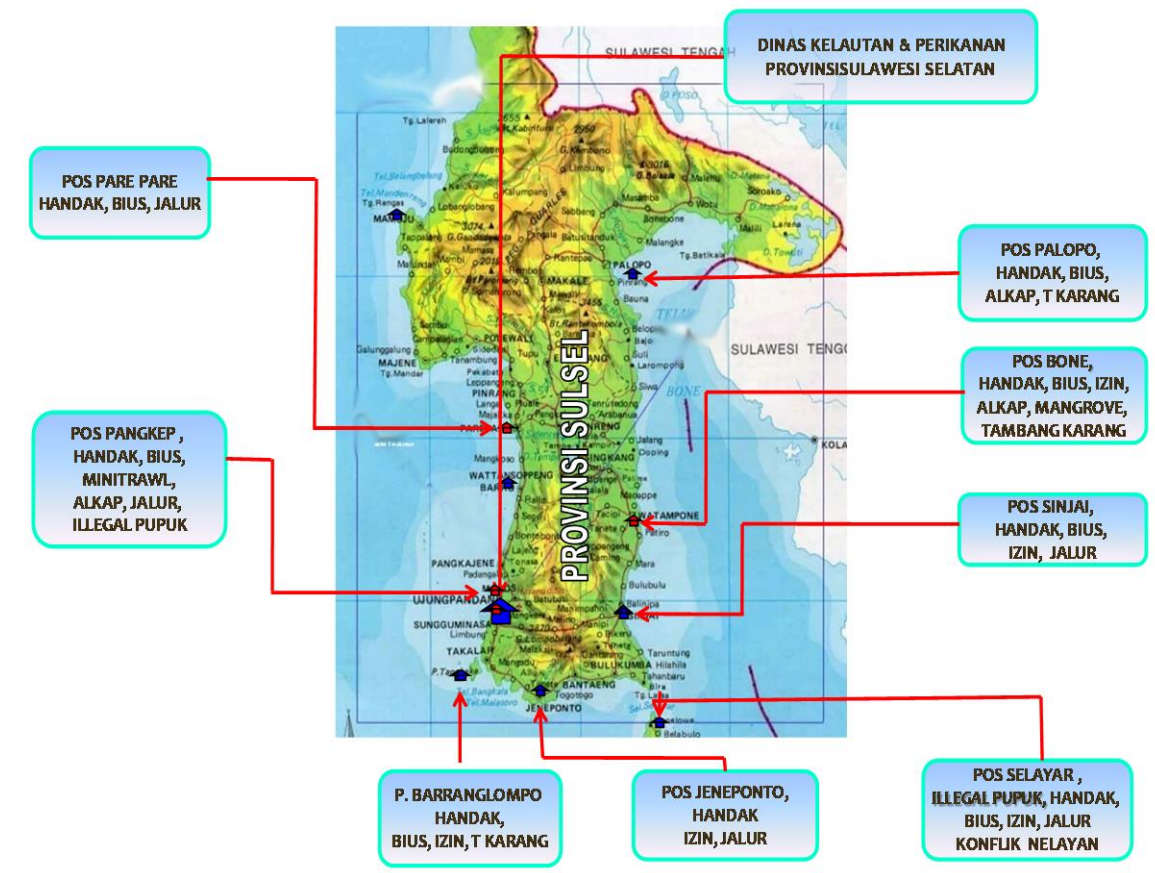
* Pagu setelah pengurangan



Lampiran 1. Wilayah Peta Penangkapan Udang, Tuna dan Rumput Laut



Lampiran 2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Subsie Pengembangan SDM Pengawasan KP Sulsawesi Selatan Tahun 2017



**Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan,
Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Selayar	134,280
2	Bulukumba	418,326
3	Bantaeng	186,612
4	Jeneponto	361,793
5	Takalar	295,892
6	Gowa	760,607
7	Sinjai	242,672
8	Maros	349,822
9	Pangkep	332,674
10	Barru	173,623
11	Bone	754,894
12	Soppeng	226,770
13	Wajo	396,810
14	Sidrap	299,123
15	Pinrang	374,583
16	Enrekang	204,827
17	Luwu	359,209
18	Tana Toraja	232,821
19	Luwu Utara	310,470
20	Luwu Timur	293,822
21	Toraja Utara	229,798
22	Makassar	1,508,154
23	Pare-Pare	143,710
24	Palopo	180,678
	J u m l a h	8,771,970

Sumber : BPS prov. SulSel

Lampiran 4. Daftar Usaha Pengolahan Ikan/Undang dan Rumput Laut Skala Kecil dan Menengah di Sulawesi Selatan

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
1.	Lampu Toaei	Bone	- Pengeringan/ pengasapan ikan
2.	Angkue	Bone	- Pengeringan/ pengasapan ikan
3.	Cenrana	Bone	- Pengeringan/ pengasapan ikan
4.	Barakke	Bone	- Pengeringan/ pengasapan ikan
5.	Mina Utama	Bone	- Pengolahan abon
7.	Bumi Tirta	Bone	- Pengeringan ikan
8.	Melati	Bone	- Pengasapan
9.	Teratai	Bone	- Pengeringan
10.	Bunga Mawar	Bone	- Pengeringan
11.	Asa Salwa	Bone	- Pengeringan
12.	Bunga Mawar	Bone	- Pengeringan
13.	Mario Rialau	Bone	- Pengasapan
14.	Batu Lembang	Bone	- Pengasapan
15.	Abbekkae	Bone	- Pengasapan
16.	Cahaya Usto	Bone	- Pengasapan
17.	Bintang Timur	Bone	- Pengasapan
18.	Siporennu	Bone	- Pengasapan
19.	Putri Pantai	Bone	- Pengeringan
20.	Mare Pantai	Bone	- Pengeringan
21.	Sinar Jaya	Bone	- Pengasapan
22.	Mekar Sari	Bone	- Pengasapan
23.	Sipudalle	Bone	- Pengeringan
24.	Pakkasalo	Bone	- Pengeringan
25.	Appakireng II	Bone	- Pengeringan
26.	Ujung	Bone	- Pengeringan
27.	Kessie Pute	Bone	- Pengeringan
28.	Batu Iorong	Bone	- Pengeringan
29.	Cahaya Bintang	Bone	- Pengumpul Rajungan
30.	Sipakainge	Bone	- Pengumpul Rajungan
31.	Maseh- Maseh	Bone	- Pengumpul Rajungan
32.	Mamminasae	Bone	- Pengeringan
33.	Fatir	Bone	- Pengumpul Rajungan
34.	Setia Kawan	Bone	- Pengeringan
35.	Sipakainge	Bone	- Pengeringan
36.	Barbon	Bone	- Pengumpul Rajungan
37.	Fatir	Bone	- Pengumpul Rajungan
38.	Barbon	Bone	- Pengumpul Rajungan
39.	Kub. Siamasei	Bone	- Pengumpul Rajungan
40.	Fajar Bahari II	Bone	- Olahan teripang
41.	Siamasei	Bone	- Bandeng presto
42.	Karangtina	Bone	- Dendeng ikan
43.	Mandiri Bersama	Bone	- Kerupuk ikan
44.	Rompe Bersatu	Bone	- Tepung ikan/pengerikan
45.	Ramadhani	Bone	- Abon ikan
46.	Melati	Bone	- Bakso ikan
47.	Berkah Utama	Bone	- Kerupuk ikan, Abon Ikan
48.	Melati II	Bone	- Bakso ikan
49.	Sipakkario	Bone	- Pengeringan ikan
50.	Ayu Karya	Bone	- Pengasapan
51.	Londrae Plus	Bone	- Abon ikan
52.	Topacking	Bone	- Penggaraman ikan/dempo

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
53	Melati	Bone	- Penggaraman ikan/dempo
54	Mattiro Deceng	Bone	- Pengumpul rajungan
55	Aha Food	Bone	- Olahan surmin/nuget
56	Bidadari	Bone	- Ikan peda/dempo
57	Kembang Melati	Bone	- Bandeng tanpa duri
58	Melati Putih	Bone	- Ikan asap
59	Mawar	Bone	- Ikan asap
60	Damai Sejahtera	Bone	- Dodol rumput laut
61	Generasi baru	Bone	- Bakso ikan
62	Branjangan	Bone	- Abon ikan lele
63	Tipulu	Sinjai	- Pengering teripang
64	Sipakatuo	Sinjai	- Pengasapan ikan
65	Mutiara	Sinjai	- Pengeringan ikan
66	Samaturu	Sinjai	- Pengeringan teripang
67	Daun Bambu	Sinjai	- Pengeringan ikan
68	Mutiara Laut	Sinjai	- Kerupuk ikan
69	Samataring Jaya	Sinjai	- Pengasapan ikan
70	Sinar Bangko	Sinjai	- Bakso ikan
71	Massahaku	Sinjai	- Pengeringan ikan
72	Sipakalebby	Sinjai	- Kerupuk ikan
73	Mabbulosipeppa	Sinjai	- Pengeringan ikan
74	Usaha Baru	Sinjai	- Kerupuk ikan
75	Wanita Citra Sejati	Sinjai	- Bakso ikan
76	Wanita Sejati	Sinjai	- Pengeringan ikan
77	Mawar Merah	Sinjai	- Pengasapan ikan
78	Usaha Maju	Sinjai	- Abon ikan, Bakso Ikan
79	Bina Putri	Sinjai	- Abon ikan, Bakso Ikan
80	Burung Camar	Sinjai	- Abon ikan, Bakso Ikan
81	Harapan Baru	Sinjai	- Kerupuk ikan
82	Telu Mario	Sinjai	- Pengasapan ikan
83	Bunga Mekar	Sinjai	- Pemasaran ikan segar
84	Sumber Laut	Sinjai	- Pengeringan ikan
85	Sabar Menanti	Sinjai	- Pengeringan ikan
86	Sinar Mutiara	Sinjai	- Pengeringan ikan
87	Buhung Pitue II	Sinjai	- Abon ikan, Amplang
88	Masenge	Sinjai	- Pengeringan ikan
89	Maseddin Bulu Sipeppa	Sinjai	- Pemasaran ikan segar
90	Sari Laut	Sinjai	- Pengeringan ikan
91	Mutiara Bersama	Sinjai	- Pengeringan ikan
92	Rayhana Rezki Food	Sinjai	- Bakso ikan, Otak-Otak
93	Cahaya Mutiara II	Sinjai	- Pengeringan ikan
94	Hasil Laut	Sinjai	- Pengeringan ikan
95	Komila	Sinjai	- Pengeringan ikan
96	Bintang Laut	Sinjai	- Pengeringan ikan
97	Putra Mandiri	Sinjai	- Pemasaran ikan segar
98	Mekar Abadi	Sinjai	- Abon, Kerupuk Rumput Laut
99	Bintang Samudra	Sinjai	- Pemasaran ikan segar
100	Teri Lappa	Sinjai	- Pengeringan ikan

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
101.	Tenggiri	Sinjai	- Bakso ikan, Otak-Otak, Nuget, Abon
102.	Tunas Inti	Sinjai	- Pemasaran ikan segar
103.	Sumber Mitra	Sinjai	- Pengolahan ikan segar (fillet)
104.	Lamadang	Sinjai	- Pemasaran ikan segar
105.	Surya Terang I	Sinjai	- Pemasaran ikan segar
106.	Lengkong I	Sinjai	- Pengeringan ikan
107.	Wanita Mekar	Sinjai	- Pengeringan ikan
108.	Kaloling	Sinjai	- Pemasaran ikan segar
109.	Kalampeto	Sinjai	- Pengeringan ikan
110.	Fortuna fish	Pare pare	- Abon, Terasi
111.	Bersahaja	Pare pare	- Teri kering
112.	Sejahtera	Pare pare	- Abon ika marlin
113.	Mandiri	Pare pare	- Abon ikan marlin, Abon Ikan Tuna
114.	Latulip	Pare pare	- Amplang
115.	Bonsai	Pare pare	- Abon ikan lele
116.	Seruni	Pare pare	- Nuget
117.	Indosiar	Pare pare	- Abon, Stick, Bakso, Nuget, Bandeng tanpa Duri
118.	Mawar	Pare pare	- Abon ikan tuna
119.	Bersahaja	Pare pare	- Abon ikan tuna
120.	Restu Ibu	Pare pare	- Abon ikan tuna, Bandeng tanpa duri
121.	Masagenae	Pare pare	- Abon ikan tuna
122.	Usaha Bersama	Pare pare	- Bakso, Bandeng tanpa duri
123.	Kessi Pute	Pare pare	- Abon, Keripik ikan
124.	Doaku Harapanku	Pare pare	- Nuget, Bakso, Kerupuk
125.	Wae Tompe	Pare pare	- Kerupuk ikan
126.	Kartini	Pare pare	- Abon ikan tuna, Abon Ikan Lele
127.	Bersahaja	Pare pare	- Teri kering
128.	Kedai Pesisir	Pare pare	- Abon pedas, Abon Manis
129.	Rezki Jemmer	Pare pare	- Bakso, Kerupuk, Abon, Tahu Bakso, Nuget
130.	Mammesa	Pare pare	- Peyek ikan, Bandeng cabut duri
131.	Syafira	Pare pare	- Bakso ikan, Kerupuk Ikan
132.	Seroja star	Pare pare	- Abon ikan, Hanter Crispy, Pastel Abon, Kue Kering, Abon, Nugget
133.	Melati Lasinrang	Pare pare	- Abon ikan, Sambusa, Nuget, Kerupuk Ikan
134.	Putri Zasilia	Pare pare	- Kerupuk ikan
135.	Bunda	Pare pare	- Abon ikan
136.	Sinar Mentari	Pare pare	- Amplang, Abon Ikan
137.	Putri	Pare pare	- Abon ikan tuna
138.	Sirenuang	Pare pare	- Otak otak, Bakso Ikan
139.	Sipakalebby	Pare pare	- Kerupuk ikan, Bakso Ikan
140.	Amin Lengke	Pare pare	- Abon ikan, Kerupuk Ikan
141.	Istiqlal	Pare pare	- Abon ikan tuna
142.	Rambutan	Pare pare	- Lemper isi ikan
143.	Cahaya Makerennu	Pare pare	- Abon ikan, Kerupuk Ikan, Bandeng tanpa duri
144.	Wanita Sejahtera	Pare pare	- Abon ikan

Lanjutan.....			
No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
145	H. Teggang	Pare pare	- Teri kering
146	Herman	Pare pare	- Teri kering
147	Bahtiar	Pare pare	- Teri kering
148	Gustiana	Pare pare	- Teri kering
149	Gusti	Pare pare	- Teri kering
150	Bustamin	Pare pare	- Teri kering
151	Nurbia	Pare pare	- Cakalang kering
152	Abdul Salam	Pare pare	- Cakalang kering
153	Rahma	Pare pare	- Cakalang kering, Layang kering
154	Sappe	Pare pare	- Teri kering
155	Semma	Pare pare	- Cakalang kering, Layang kering
156	Rustam	Pare pare	- Teri kering
157	Nur Asiking	Pare pare	- Teri kering
158	Dawiah	Pare pare	- Abon ikan tuna
159	Rudi	Pare pare	- Teri kering
160	Anas	Pare pare	- Teri kering
161	H. Hambari	Pare pare	- Teri kering
162	Agustina	Pare pare	- Teri kering
163	Rusman	Pare pare	- Teri kering
164	Zaki Bontoa	Pangkep	- Bakso ikan
165	Parikatte Melati	Pangkep	- Amplang bandeng
166	Sahabat Bandeng	Pangkep	- Bandeng presto
167	Terasi Usman	Pangkep	- Terasi
168	Mandiri	Pangkep	- Rempeyek udang
169	Diva	Pangkep	- Bandeng presto
170	Pindang Yola	Pangkep	- Pindang ikan
171	Mentari Citra Lestari	Pangkep	- Bandeng tanpa duri
172	Hafidz	Pangkep	- Ikan kering
173	Cinde Malise	Pangkep	- Abon ikan bandeng
174	Sikamaseang	Pangkep	- Abon ikan bandeng
175	Melati	Pangkep	- Keripik rumput laut
176	Agrofish Lassang	Pangkep	- Bakso ikan, Bandeng tanpa duri
177	H. Teggang	Pare pare	- Teri kering
178	Herman	Pare pare	- Teri kering
179	Caow Katojoa	Pangkep	- Caow ikan
180	Baji Gau	Pangkep	- Ikan kering
181	Baji Pamai	Pangkep	- Ikan kering
182	Mattoanging	Pangkep	- Nugget bandeng
183	Semangat Cambayya	Pangkep	- Ikan kering
184	Anugerah	Pangkep	- Abon ikan bandeng
185	Cahaya	Pangkep	- Abon ikan bandeng
186	Pasir Putih	Pangkep	- Kerupuk rumput laut
187	Melatih	Pangkep	- Abon ikan bandeng
188	Violet	Tana Toraja	- Abon ikan
189	Matari Allo	Tana Toraja	- Abon ikan, Bandeng tanpa duri
190	St.Marwiah	Tana Toraja	- Abon ikan
191	H.Lengkong	Tana Toraja	- Belut hidup
192	H. Marzuki	Tana Toraja	- Belut hidup

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
193	Marthen Luter	Tana Toraja	- Lele hidup
194	Petrus	Tana Toraja	- Ikan mas
195	Marthen	Tana Toraja	- Bandeng segar
196	Arman	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
197	Aris	Tana Toraja	- Ikan laut segar
198	Papa Suci	Tana Toraja	- Ikan laut segar
199	Makmur	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
200	Usman	Tana Toraja	- Bandeng segar
201	Ringgo	Tana Toraja	- Bandeng segar
202	Ambo Intang	Tana Toraja	- Layang
203	Palimpo	Tana Toraja	- Mujair, Bandeng
204	Anwar	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
205	Zainal	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
206	Azis	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
207	Suka	Tana Toraja	- Ikan laut segar
208	Aceng	Tana Toraja	- Ikan laut segar
209	Hermansah	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
210	Suriyanto	Tana Toraja	- Ikan laut segar
211	Sihir	Tana Toraja	- Ikan laut segar
212	Asri	Tana Toraja	- Bandeng
213	Uttu	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
214	Lili	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
215	Bahar	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
216	Hikman	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
217	Burhan	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
218	Arman	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
219	Anto	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
220	Mansa	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
221	Usman	Tana Toraja	- Bandeng dan ikan laut
222	Ambo Tang	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
223	Rusman	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
224	Jufri	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
225	Suryadi	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
226	Papa Ela	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
227	Obed	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
228	Pa Eka	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
229	Kahar	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
230	Papa Rina	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
231	Iwan	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
232	Alimuddin	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
233	Aswar	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
234	Aco'	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
235	Epi	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
236	Abang	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
237	Yos	Tana Toraja	- Ikan kering
238	Artng	Tana Toraja	- Ikan kering
239	H.Mahmuddin	Tana Toraja	- Ikan kering
240	H.Codding	Tana Toraja	- Ikan kering
241	H.Taha	Tana Toraja	- Ikan kering
242	Norma	Tana Toraja	- Ikan kering

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
243	Nanna	Tana Toraja	- Ikan kering
244	Hj.lfa	Tana Toraja	- Ikan kering
245	Ambo Asse	Tana Toraja	- Ikan kering
246	Cumanang	Tana Toraja	- Ikan kering
247	La Rembon	Tana Toraja	- Ikan kering
248	H. Mammi	Tana Toraja	- Ikan kering
249	Lina	Tana Toraja	- Ikan kering
250	Ida	Tana Toraja	- Ikan kering
252	Dorce	Tana Toraja	- Ikan kering
253	Yohana	Tana Toraja	- Ikan kering
254	Yospin	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
255	Febrian	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
256	Petrus Karang	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
257	Silas Pakiding	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
258	Thomas Patto	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
259	Hendrik	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
260	Cumanang	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
261	Artin	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
262	Daniel Rombe	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
263	Mama Enjel	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
264	Attong	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
265	Udin	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
266	Mansa	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
267	Darmin	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
268	Erzas	Tana Toraja	- Bandeng, Ikan Laut Lainnya
269	Camang	Tana Toraja	- Bandeng segar
270	Erwin	Tana Toraja	- Bandeng segar
271	Kamisi	Tana Toraja	- Ikan kering
272	Samman	Tana Toraja	- Ikan kering
273	Mariama	Tana Toraja	- Ikan kering
274	Dammin	Tana Toraja	- Ikan kering
275	Samrah	Tana Toraja	- Ikan kering
276	Sabil	Tana Toraja	- Ikan kering
277	Raisa	Tana Toraja	- Ikan kering
278	Simon	Tana Toraja	- Ikan kering
279	Abdul Hamid	Tana Toraja	- Ikan kering
280	Ibrahim	Tana Toraja	- Ikan kering
281	Ruggaya	Tana Toraja	- Ikan kering
282	Jumaria	Tana Toraja	- Ikan kering
283	Miki	Tana Toraja	- Ikan kering
284	Jumardi	Tana Toraja	- Ikan kering
285	Agustam	Tana Toraja	- Ikan kering
286	Ateng	Tana Toraja	- Ikan laut segar
287	Junman	Tana Toraja	- Ikan laut segar
288	Azis	Tana Toraja	- Ikan laut segar
289	Daeng Bali	Tana Toraja	- Bandeng segar
290	Fajar	Tana Toraja	- Bandeng segar
291	Ardi	Tana Toraja	- Bandeng segar
292	Titin	Tana Toraja	- Ikan kering
293	Usman	Tana Toraja	- Ikan kering

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
294	Seni	Tana Toraja	- Ikan kering
295	H.Samsuddin	Tana Toraja	- Ikan kering
296	Makmur	Tana Toraja	- Ikan laut segar
297	Mulyadi	Tana Toraja	- Ikan laut segar
298	Rustam	Tana Toraja	- Bandeng segar
299	Azis	Tana Toraja	- Bandeng segar
300	Suardi	Tana Toraja	- Bandeng segar
301	Abdul Hamid	Tana Toraja	- Ikan laut segar
302	Ose	Tana Toraja	- Bandeng segar
303	Uttu	Tana Toraja	- Bandeng segar
304	Lili	Tana Toraja	- Ikan kering
305	Bake	Tana Toraja	- Ikan laut segar
306	Jumardi	Tana Toraja	- Ikan laut segar
307	Piri	Tana Toraja	- Bandeng segar
308	Mama Yan	Tana Toraja	- Bandeng segar
309	Baso	Tana Toraja	- Bandeng segar
310	Tato	Tana Toraja	- Bandeng segar
311	Linu	Tana Toraja	- Bandeng segar
312	Sattu	Tana Toraja	- Bandeng segar
313	Syahril	Tana Toraja	- Bandeng segar
314	Useng	Tana Toraja	- Bandeng segar
315	Arif	Tana Toraja	- Bandeng segar
316	Sumardi	Tana Toraja	- Bandeng segar
317	Petrus	Tana Toraja	- Bandeng & layang
318	Pittu	Tana Toraja	- Bandeng & layang
319	Mali	Tana Toraja	- Bandeng & layang
320	Sulaiman	Tana Toraja	- Ikan kering
321	Muh. Kore	Tana Toraja	- Ikan kering
322	Samsuddin	Tana Toraja	- Ikan kering
323	Yeheskial	Tana Toraja	- Ikan kering
324	Irvansah	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
325	Paulus	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
326	Yusuf	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
327	Mama Ecce	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
328	Tato	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
329	Irfan	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
330	Rembon	Tana Toraja	- Ikan kering
331	Sulaiman	Tana Toraja	- Ikan kering
332	Nober	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
333	Raya	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
334	Natan	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
335	Sent	Tana Toraja	- Bandeng segar
336	Papa Pika	Tana Toraja	- Bandeng segar
337	Jumading	Tana Toraja	- Ikan kering
338	Papa Wati	Tana Toraja	- Ikan kering
339	Komar	Tana Toraja	- Ikan kering
340	H. Laso	Tana Toraja	- Ikan kering
341	Panggalo	Tana Toraja	- Ikan kering
342	Komar	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
343	Rante Menduruk	Tana Toraja	- Lele

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
344	Asse Nurdin	Tana Toraja	- Bandeng segar
345	H.Hatta	Tana Toraja	- Ikan laut, bandeng, mujair
346	Alimuddin	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut lainnya
347	Rosmiati	Tana Toraja	- Ikan laut, bandeng, mujair
348	Rahman	Tana Toraja	- Ikan laut, bandeng, mujair, lele
349	Bahri	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
350	Damianus Mianto	Tana Toraja	- Ikan laut, bandeng, mujair, lele
351	Petrus Lande	Tana Toraja	- Ikan mas
352	Marthinus	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
353	Alex Mangera	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
354	Santo kala Padang	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
355	Syahril	Tana Toraja	- Ikan laut, bandeng, mujair
356	Runtung	Tana Toraja	- Ikan lele
357	Rahman Liling	Tana Toraja	- Ikan lele
358	Herianto	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
359	Lintang	Tana Toraja	- Belut
360	Agustam	Tana Toraja	- Belut
361	Yuni Barrung	Tana Toraja	- Ikan mas
362	Mandiri Karappe	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
363	Daniel Rombe	Tana Toraja	- Ikan bandeng, Ikan Laut Lainnya
364	Alfrida	Tana Toraja	- Bandeng, tuna, kakap
365	Kalvein Masuang	Tana Toraja	- Ikan mas
366	Eltisyah	Makassar	- Bakso seafood
367	Ilo Mandiri	Makassar	- Abon ikan tuna
368	Mangga Tiga	Makassar	- Abon ikan lele
369	Wanita Mandiri	Makassar	- Bakso ikan
370	Wn. Untia	Makassar	- Otak otak tenggiri
371	Djuku Roa	Makassar	- Sambal ikan roa
372	Khansa Gaza	Makassar	- Keripik cumi
373	Sinar Lae-lae	Makassar	- Keripik rumput laut
374	Anggur	Makassar	- Bakso, Permen Rumput Laut
375	Asoka I	Makassar	- Keripik ikan, Sosis Ikan
376	Buyang Sejahtera	Makassar	- Abon ikan tuna
377	Flamboyan	Makassar	- Bandeng cabut duri
378	Anugerah	Makassar	- Abon ikan cakalang
379	Barugaku	Makassar	- Abon ikan tuna
380	Fatimah AZ Zahra	Makassar	- Abon ikan tuna
381	Barokah 01	Makassar	- Bakso ikan
382	Baji Ati	Jeneponto	- Abon ikan
383	Melati	Jeneponto	- Dodol rumput laut
384	Baji Pa'mae	Jeneponto	- Abon ikan
385	Sinar Boyong	Jeneponto	- Abon ikan
386	Terumbu Karang	Jeneponto	- Snack ikan / kriuk bandeng
387	Baji Gau	Jeneponto	- Abon ikan
388	Cahaya	Jeneponto	- Bakso ikan
389	Chanos	Jeneponto	- Nugget ikan
390	Balolang Pesisir	Jeneponto	- Bandeng tanpa duri, Bandeng Presto
391	Pari Indah	Jeneponto	- Pari asap
392	Anggrek Putih	Jeneponto	- Snack rumput laut
393	Harapan Jaya	Jeneponto	- Pemasaran produk olahan

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
394	Assalama	Jeneponto	- Kerupuk rumput laut
395	Mulia	Jeneponto	- Selai rumput laut
396	Julukana	Jeneponto	- Kerupuk rumput laut
397	Melati	Wajo	- Ikan kering
398	Kuncup Mekar	Wajo	- Abon ikan, Bakso Ikan
399	Terkini	Wajo	- Pengolah rumput laut
400	Karya Murni	Wajo	- Ikan kering
401	Padaidi I	Wajo	- Abon ikan
402	Sipakalebbi	Wajo	- Ikan kering
403	Megafaika	Wajo	- Abon ikan
404	UD. Ratu	Wajo	- Abon ikan, Bakso Ikan
405	Harapan Baru	Wajo	- Ikan kering
406	Sinar Harapan	Wajo	- Abon ikan
407	Padaidi	Wajo	- Pengolah rebon
408	Anugrah	Wajo	- Ikan kering
409	Sinar Harapan	Wajo	- Pengolah rumput laut
410	Melati	Wajo	- Ikan kering
411	Alimbangenge	Wajo	- Ikan kering
412	Anugrah Mina	Wajo	- Ikan kering
413	Waji Koi	Wajo	- Ikan kering
414	Sinar Rembulan	Wajo	- Pemasaran ikan segar
415	Sinar Mentari	Wajo	- Pemasaran ikan segar
416	Sinar Mujur	Wajo	- Pemasaran ikan segar
417	Sipakaenre	Wajo	- Pemasaran ikan segar
418	Kembar	Wajo	- Pemasaran ikan segar
419	Mekar Sari	Selayar	- Abon ikan
420	Merpati	Selayar	- Abon ikan
421	Maju Bersama	Selayar	- Ikan kering
422	Akkaletutu	Selayar	- Terasi
423	Kembang Dahlia	Selayar	- Abon ikan
424	Assamaturu	Selayar	- Ikan kering
425	Maju Bersama	Selayar	- Ikan kering
426	Bajo Bersinar	Selayar	- Ikan kering
427	Bintang Laut	Selayar	- Ikan kering
428	Baronang	Selayar	- Ikan kering
429	Lintas Lautan	Selayar	- Ikan kering
430	Kalumbe Jaya	Selayar	- Ikan kering
431	Rahmat	Selayar	- Ikan kering
432	Pasianak	Selayar	- Ikan kering
433	Nyiur Melambai	Selayar	- Ikan kering
434	Sunu	Selayar	- Ikan kering
435	Tembang Manis	Selayar	- Ikan kering
436	Bintang Laut	Selayar	- Ikan kering
437	Tamalate	Selayar	- Bakso ikan
438	Mandiri	Selayar	- Ikan kering
439	Pelita Lestari	Selayar	- Bakso ikan
440	Abbaji Pakmai	Selayar	- Terasi
441	Mawar	Selayar	- Abon ikan
442	Rembulan	Selayar	- Abon ikan
443	Mawar Indah	Selayar	- Abon ikan

Lanjutan.....			
No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
444	Srikandi	Selayar	- Abon ikan
445	Melati	Selayar	- Abon ikan
446	Ingin Maju	Selayar	- Abon ikan
447	Hati Mulia	Soppeng	- Amplang
448	Mentari	Soppeng	- Abon ikan
449	Alfurqan	Soppeng	- Abon ikan
450	Mamase	Soppeng	- Abon ikan
451	Syafa'ah	Soppeng	- Abon ikan, Bakso Ikan
452	Mawar	Soppeng	- Bakso ikan
453	Anugrah	Soppeng	- Kerupuk ikan
454	Madani	Soppeng	- Abon ikan
455	Lestari	Soppeng	- Abon ikan
456	Sinar Mentari	Soppeng	- Abon ikan
457	Matahari	Soppeng	- Abon ikan
458	Kayangan	Soppeng	- Abon ikan
459	Mattanreng	Soppeng	- Pemasaran ikan
460	Karya Mandiri	Soppeng	- Pemasaran ikan
461	Harapan Buah	Soppeng	- Pemasaran ikan
462	Mariomarennu	Soppeng	- Pemasaran ikan
463	Harapan Jaya	Soppeng	- Pemasaran ikan
464	Mappasitujue	Soppeng	- Pemasaran ikan
465	Sipatuju	Soppeng	- Pemasaran ikan
466	Mamminasae	Soppeng	- Pemasaran ikan
467	Bina Sejahtera	Soppeng	- Pemasaran ikan
468	Padaidi	Soppeng	- Pemasaran ikan
469	Mujair Sejahtera	Soppeng	- Pemasaran ikan
470	Ipatokong	Soppeng	- Pemasaran ikan
471	Cottoni Panrita	Bulukumba	- Permen rumput laut
472	Cottoni Bahari	Bulukumba	- Dodol rumput laut
473	Cakalang para-para	Bulukumba	- Abon ikan
474	Tuna Asap	Bulukumba	- Pengasapan ikan
475	Nur Mutiara Biru	Bulukumba	- Abon ikan
476	Sukma Jaya	Bulukumba	- Pengasapan ikan
477	Pindang Bina Mandiri	Bulukumba	- Pemindangan ikan
478	Turungan Beru	Bulukumba	- Pengasapan ikan
479	Usaha Ikan Pindang	Bulukumba	- Pemindangan ikan
480	Tikungan Batua	Bulukumba	- Pengasapan ikan
481	Tuna Jaya	Bulukumba	- Pengasapan ikan
482	Nur Mutiara Biru	Bulukumba	- Abon ikan
483	Sukma Jaya	Bulukumba	- Pengasapan ikan
484	Pindang Bina Mandiri	Bulukumba	- Pemindangan ikan
485	Turungan Beru	Bulukumba	- Pengasapan ikan
486	Usaha Ikan Pindang	Bulukumba	- Pemindangan ikan
487	Tuna Jaya	Bulukumba	- Pengasapan ikan
488	Kalumpang Lohe	Bulukumba	- Pemindangan ikan
489	Harapan Jaya	Bulukumba	- Pemindangan ikan
490	Batu Raga	Bulukumba	- Pengasapan ikan
491	Berlianna Tanjung Bira	Bulukumba	- Pengolah kerajinan kerang-kerangan
492	Tude-tudena Tu Birayya	Bulukumba	- Pengolah kerajinan kerang-kerangan

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
493	Aura Bokasel	Gowa	- Ikan bandeng asap
494	Anugrah Koi	Gowa	- Ikan hias
495	Barokah Koi	Gowa	- Ikan hias
496	Bina Mandiri	Gowa	- Ikan bandeng
497	Taeng Mas	Gowa	- Bakso ikan tuna, Kaki Naga
498	Mutiara Reski	Gowa	- Ikan pindang
499	Baji Mammuji	Gowa	- Ikan kambing
500	Mawang	Gowa	- Ikan pindang
501	Dini Sejahtera	Gowa	- Abon ikan gabus
502	Rahmat Abadi	Gowa	- Kerupuk ikan
503	Minasa Bone	Gowa	- Ikan asin
504	Annisa	Gowa	- Lammang ikan
505	Baji Ati	Gowa	- Ikan pindang
506	Daanjunfa	Gowa	- Abon ikan lele
507	Tirta Punaga	Gowa	- Abon ikan
508	Malino Jaya	Gowa	- Ikan pindang
509	Perempuan Kreatif	Gowa	- Nila presto
510	Marala Food	Gowa	- Otak otak, Bakso Ikan
511	Idamas	Gowa	- Abon ikan tuna
512	Minasa Maupa	Gowa	- Ikan pindang
513	Bajiminasa	Gowa	- Abon ikan tuna
514	Naya's Food	Gowa	- Bakso ikan tuna, Nugget Ikan Tuna
515	Resky Koi	Gowa	- Ikan hias
516	Bunga Mawar	Gowa	- Ikan pindang
517	Masagena	Gowa	- Bandeng presto
518	Wanita Hasanuddin	Gowa	- Bakso ikan
519	Berkah Mandiri	Gowa	- Ikan segar
520	Karya Mandiri	Gowa	- Ikan segar
521	Teratai Pallu Ce'la	Gowa	- Ikan pindang
522	Angin Mammiri	Barru	- Kepiting
523	Hazirat Community	Barru	- Keripik rumput laut
524	Pancana Lagaligo	Barru	- Ikan kering
525	Sumber Lautan	Barru	- Ikan kering
526	Lagaligo	Barru	- Abon ikan
527	Sipurennu	Barru	- Ikan kering
528	Istana Sunu	Barru	- Ikan kering
529	Armada Laut	Barru	- Keripik rumput laut
530	Sejahtera	Barru	- Abon ikan
531	Mattirotsi	Barru	- Ikan kering
532	Mega Rejeki	Barru	- Ikan segar
533	Mattirodeceng	Barru	- Ikan kering
534	Minasa Baji	Barru	- Ikan segar
535	Madeceng	Barru	- Ikan segar
536	Kerapu Jaya	Barru	- Ikan segar
537	Sipammase-mase	Barru	- Ikan kering
538	Mattirowalie	Barru	- Ikan segar
539	Syukur Mandiri	Barru	- Ikan segar
540	Munajat	Barru	- Ikan kering
541	Pada-Padamua	Barru	- Ikan kering

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
542	Sabar	Barru	- Ikan kering
543	Cahaya Ompo	Barru	- Ikan kering
544	Konya	Barru	- Abon ikan
545	Masagenae	Barru	- Abon ikan
546	Nurul Yaqin	Barru	- Dodol rumput laut
547	Katapang	Barru	- Ikan kering
548	Pakkaresoe	Barru	- Ikan kering
549	Segar	Barru	- Kerang-kerangan
550	Pakkamase	Barru	- Ikan kering
551	Asoka	Barru	- Abon ikan
552	Berkah	Barru	- Ikan kering
553	Cahaya Mutiara	Barru	- Kerang-kerangan
554	Zaki Bontoa	Pangkep	- Bakso ikan
555	Parikatte Melati	Pangkep	- Amplang bandeng
556	Sahabat Bandeng	Pangkep	- Bandeng presto
557	Terasi Usman	Pangkep	- Terasi
558	Mandiri	Pangkep	- Rempeyek udang
559	Diva	Pangkep	- Bandeng presto
560	Pindang Yola	Pangkep	- Ikan pindang
561	Mentari Citra Lestari	Pangkep	- Bandeng tanpa duri
562	Hafidz	Pangkep	- Ikan kering
563	Cinde Malise	Pangkep	- Abon ikan bandeng
564	Sikamaseang	Pangkep	- Abon ikan bandeng
565	Melati	Pangkep	- Keripik rumput laut
566	Agrofish Lassang	Pangkep	- Bakso ikan, Bandeng Tanpa duri
567	Caow Katojoa	Pangkep	- Caow ikan
568	Baji Gau	Pangkep	- Ikan kering
569	Baji Pamai	Pangkep	- Ikan kering
570	Mattoanging	Pangkep	- Nugget bandeng
571	Semangat Cambayya	Pangkep	- Ikan kering
572	Anugerah	Pangkep	- Abon ikan bandeng
573	Cahaya	Pangkep	- Abon ikan bandeng
574	Pasir Putih	Pangkep	- Kerupuk rumput laut
575	Melati	Pangkep	- Abon ikan bandeng
576	Akilah Mutia (H. Nambung)	Takalar	- Kepiting
577	Mp.Abadi (Hj.Erni)	Takalar	- Kepiting
578	Galesong Ridwan	Takalar	- Kepiting
579	Mawar (dg. Pati)	Takalar	- Bakso ikan, Abon Ikan
580	dg. Nai	Takalar	- Kakap, cumi, katombo
581	dg. Salle	Takalar	- Cakalang
582	H. Arsyad dg. Tutu	Takalar	- Katamba, ikan merah
583	H.Hamsah	Takalar	- Cakalang, katombo, mairo, sibula
584	Herman Leo	Takalar	- Udang, bandeng, ikan laut
585	Maliang dg. Pole	Takalar	- Lawi-lawi
586	Darwin dg. Ngunjang	Takalar	- Cakalang, layang, bete bete
587	ABD. Kadir dg Tutu	Takalar	- Layang, sibula, lure
588	B. dg. Sibali	Takalar	- Ikan merah, cilala, layang, katombo
589	dg. Tagang	Takalar	- Bandeng, banyara, cumi cumi, kepiting
590	dg. Siala	Takalar	- Katombo, sibula

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
591.	dg. Tika	Takalar	- Katombo, baronang
592.	dg. Ngemba	Takalar	- Bete bete, cakalang
593.	Abdulla dg. Siala	Takalar	- Cakalang, udang, bandeng, nila, layang
594.	dg. Rapi	Takalar	- Katombo, lamuru, cumi cumi
595.	dg. Lalang	Takalar	- Cakalang, katombo, tembang
596.	dg. Rapi	Takalar	- Cumi cumi, udang, nila
597.	dg. Naba	Takalar	- Bandeng, cakalang, sibula, katombo
598.	Saharuddin Dg Kulle	Takalar	- Buntalan durian, cilala, bete bete, baronang
599.	Parawansa	Takalar	- Katamba, ikan merah
600.	dg. Buang	Takalar	- Bandeng, bete bete, cakalang
601.	Idris	Takalar	- Cakalang
602.	H.Samang	Takalar	- Ikan pari, katamba, sunu, ikan merah
603.	dg. Nambung	Takalar	- Katamba, ikan merah, sunu
604.	H. Jabar dg. Ngella	Takalar	- Telur ikan terbang
605.	H. Hasan dg. Tawang	Takalar	- Telur ikan terbang
606.	H. Gasali dg. Ngewa	Takalar	- Telur ikan terbang
607.	H. Sulaeman	Takalar	- Telur ikan terbang
608.	H. Patahuddin dg Sijaya	Takalar	- Telur ikan terbang
609.	H. Suaib dg. Pasang	Takalar	- Telur ikan terbang
610.	H. Doraja dg. Rurung	Takalar	- Telur ikan terbang
611.	H. M. dg. Ngunjung	Takalar	- Telur ikan terbang
612.	H. Rijal dg. Tawang	Takalar	- Telur ikan terbang
613.	H.Tasa	Takalar	- Telur ikan terbang
614.	H. Sampara dg. Gau	Takalar	- Telur ikan terbang
617.	H. Nai	Takalar	- Telur ikan terbang
618.	H.M.Dg Narang	Takalar	- Telur ikan terbang
619.	H. Mappa	Takalar	- Telur ikan terbang
620.	H. Sija	Takalar	- Telur ikan terbang
621.	dg. Ngago	Takalar	- Telur ikan terbang
622.	H. Nassa	Takalar	- Telur ikan terbang
623.	H. Ancu dg. Gassing	Takalar	- Telur ikan terbang
624.	dg. Sattu	Takalar	- Telur ikan terbang
625.	H. Rasia	Takalar	- Telur ikan terbang
626.	dg. Se're	Takalar	- Telur ikan terbang
627.	H. Tombong	Takalar	- Telur ikan terbang
628.	Songgoa Dg mangun	Takalar	- Telur ikan terbang
629.	H.Tutu dg. Ngantung	Takalar	- Telur ikan terbang
630.	H. Lallo	Takalar	- Telur ikan terbang
631.	Abdul Hamid Dg Mangun	Takalar	- Telur ikan terbang
633.	H. Rapi dg Gassing	Takalar	- Telur ikan terbang
633.	H. Yahe dg. Rurung	Takalar	- Telur ikan terbang
634.	H. Samsuddin	Takalar	- Telur ikan terbang
635.	Hardian	Takalar	- Telur ikan terbang
636.	H. Sau	Takalar	- Telur ikan terbang
637.	H. Idris dg. Talli	Takalar	- Telur ikan terbang
638.	dg. Tola	Takalar	- Telur ikan terbang
639.	H. Sese	Takalar	- Telur ikan terbang
640.	H. Abdullah	Takalar	- Telur ikan terbang

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
641.	H. Opo	Takalar	- Teripang
642.	H. Pasang	Takalar	- Teripang
643.	H. Rijal dg. Tawang	Takalar	- Teripang
644.	H. Mapparessa dg. Ngunjung	Takalar	- Teripang
645.	Samag dg. Laju	Takalar	- Teripang
646.	Edi dg. Sijaya	Takalar	- Teripang
647.	Harul	Takalar	- Teripang
648.	Hardian dg. Nyau	Takalar	- Teripang
649.	Muh. Ali dg. Nai	Takalar	- Teripang
650.	dg. Nyarang		- Udang, bandeng, katamba
651.	dg. Jamadu	Takalar	- Udang, bandeng, katamba
652.	dg. Sangnga	Takalar	- Bandeng
653.	dg. Limpo	Takalar	- Baronang, cepak, kepiting
654.	Abd.Samad	Takalar	- Bandeng, baronang, cepak, kepiting
655.	Julu Ati	Takalar	- Bandeng, mujair
656.	dg. Ngeppe	Takalar	- Baronang
657.	dg. Sija	Takalar	- Katamba, baronang, cumi cumi
658.	Anto	Takalar	- Bandeng
659.	Hj. Tayu	Takalar	- Bandeng
660.	dg. Sikki	Takalar	- Bandeng
661.	dg. Mangung	Takalar	- Kepiting, udang, lawi lawi
662.	Topejawa Bersatu	Takalar	- Udang, kepiting
663.	dg. Salihong	Takalar	- Udang, kepiting
664.	dg. Sore	Takalar	- Bandeng
665.	dg. Leo	Takalar	- Udang
666.	dg. Jarre	Takalar	- Bandeng
667.	H. Bung	Takalar	- Rumput laut
668.	Basir	Takalar	- Bandeng
669.	Lamangkia Indah	Takalar	- Ikan sunu, tenggiri
670.	Bunga Desa	Takalar	- Rumput laut kering
671.	Mutiara Putih	Takalar	- Rumput laut kering
672.	Topejawa Bersatu	Takalar	- Kepiting
673.	Usaha Bersama	Takalar	- Bandeng, sunu, kakap
674.	Julu Ati	Takalar	- Kepiting
675.	Cahaya Abadi	Takalar	- Rumput laut basah, Ikan Laut, Teripang - Rumput laut kering
676.	Suka Maju	Takalar	- Rumput laut
677.	Aroma Katonik	Luwu	- Dodol rumput laut
678.	Tunas Abadi	Luwu	- Ikan asap
679.	Selalu Jaya Bersama	Luwu	- Bandeng tanpa duri
680.	Sari Laut	Luwu Utara	- Sosis bandeng
681.	Sejahtera Mandiri	Luwu Utara	- Kerupuk, Sirup, Selai rumput laut
682.	Siporennu	Luwu Utara	- Dodol rumput laut
683.	Sijollokeng Deceng	Luwu Utara	- Permen rumput laut, Karaginan
684.	Mawar	Luwu Utara	- Dodol rumput laut
685.	Setia Budi	Luwu Utara	- Amplang ikan tenggiri
686.	Usaha Ikan Asap	Luwu Utara	- Ikan asap cakalang
687.	Senang Hati	Luwu Utara	- Kerupuk, Bagea, Sirup Rumput Laut
688.	Aisa Afika	Luwu Utara	- Abon bandeng, Abon Tuna

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
689.	Angin Mamiri	Luwu Utara	- Kerupuk rumput laut
690.	Sipatuo	Luwu Timur	- Abon ikan
691.	Balacan Amanah	Luwu Timur	- Terasi bubuk
692.	Hamsina	Luwu Utara	- Abon ikan
693.	Asmawati	Luwu Timur	- Terasi udang
694.	Sri Widiastuti	Luwu Timur	- Selai, Bakso Ikan
695.	Indra	Luwu Timur	- Ikan kering
696.	Rahmawati	Luwu Timur	- Kerupuk keju rumput laut
697.	Hasna Hamid	Luwu Timur	- Pengasapan ikan
698.	Hudiawati	Luwu Timur	- Dodol rumput laut
699.	Ivo Karya	Sidrap	- Abon tenggiri
700.	Tuju Wali-Wali	Sidrap	- Pengeringan ikan
701.	Marlina	Sidrap	- Bakso ikan
702.	Padaidi	Sidrap	- Abon ikan
703.	Anggrek	Sidrap	- Abon ikan
704.	Kuliner Aneka Rasa	Sidrap	- Abon ikan
705.	Kuliner Putri	Sidrap	- Abon ikan
706.	Bina Perempuan Pesisir	Palopo	- Abon ikan
707.	Cakalang Mas	Palopo	- Teri gurih
708.	Tenggiri	Palopo	- Amplang
709.	Prima Mandiri	Palopo	- Dendeng ikan
710.	Matutue	Palopo	- Kepiting beku
711.	Kamboja	Palopo	- Olahan rumput laut
712.	Peda-peda	Palopo	- Kerupuk ikan
713.	Wanita Sipatuo	Palopo	- Abon ikan
714.	Sea Shells	Palopo	- Olahan rumput laut
715.	Sango-sango	Palopo	- Olahan rumput laut
716.	Melati	Palopo	- Pengeringan ikan
717.	Karya Sipatuo	Palopo	- Pengeringan ikan
718.	Tri	Palopo	- Pengeringan ikan
719.	Karya Mandiri	Palopo	- Pengeringan ikan
720.	Bunga Karang	Palopo	- Pengolahan ikan
721.	TB7	Palopo	- Pemasaran ikan
722.	Karya Bahari	Palopo	- Pemasaran ikan
723.	Usaha Resky Bersama	Palopo	- Pemasaran ikan
724.	Karya Bahari	Palopo	- Pemasaran ikan
725.	Tentram Jaya	Palopo	- Pemasaran ikan
726.	Paccatu TPI	Palopo	- Pemasaran ikan
727.	Bintang Laut Timur	Palopo	- Pemasaran ikan
728.	Kembali Mekar	Palopo	- Pemasaran ikan
729.	Kakap Merah	Palopo	- Pemasaran ikan
730.	Samudra Atlantik	Palopo	- Pemasaran ikan
731.	Anugrah Laut	Palopo	- Pemasaran ikan
732.	PNP	Palopo	- Pemasaran ikan
733.	Andi Tadda	Palopo	- Pemasaran ikan
734.	Kebersamaan	Palopo	- Pemasaran ikan
735.	Arung Samudra	Palopo	- Pemasaran ikan
736.	Sipatuo	Palopo	- Pemasaran ikan
737.	Wisnu	Palopo	- Pemasaran ikan

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
738.	Surya Mandiri	Palopo	- Pemasaran ikan
739.	Sejahtera	Palopo	- Pemasaran ikan
740.	Fitrah (sentra pengolahan RL)	Bantaeng	- Rulika, Kaktus Rumput Laut
741.	Aroma Laut	Bantaeng	- Kerupuk rumput laut
742.	Sinar Laut	Bantaeng	- Olahan rumput laut
743.	Kamboja	Bantaeng	- Olahan rumput laut
744.	Lemoa berkarya	Bantaeng	- Olahan rumput laut
745.	Karya Mandiri	Bantaeng	- Olahan rumput laut, Pemasaran Ikan
746.	Melati	Bantaeng	- Abon ikan, Dodol dan Snack RL
747.	Bunga Laut	Bantaeng	- Olahan rumput laut
748.	Mega Anugerah	Bantaeng	- Olahan rumput laut
749.	Mutiara Pantai	Bantaeng	- Kerupuk rumput laut
750.	Algae	Bantaeng	- Olahan rumput laut
751.	Sekar Sari	Bantaeng	- Bakso ikan
752.	Wanita Mandiri	Bantaeng	- Kerupuk/snack rumput laut
753.	Usaha Adni	Bantaeng	- Olahan rumput laut
754.	Mekar Sari	Bantaeng	- Olahan rumput laut
755.	Selera Mahkota	Bantaeng	- Abon ikan
756.	Usaha Baru	Bantaeng	- Olahan rumput laut
757.	Sehati	Bantaeng	- Abon ikan
758.	Rezky	Bantaeng	- Olahan rumput laut
759.	Bina Bahari	Bantaeng	- Olahan rumput laut
760.	Teratai	Bantaeng	- Stik keju rumput laut/keribi
761.	Karya Laut	Bantaeng	- Olahan rumput laut
762.	Bialo	Bantaeng	- Pemasaran ikan
763.	Usaha Ikan Asap	Bantaeng	- Ikan asap
764.	Marina	Bantaeng	- Abon ikan
765.	Paraikatte	Bantaeng	- Olahan rumput laut
766.	Anugerah	Bantaeng	- Abon ikan
767.	Srikandi	Bantaeng	- Abon ikan
768.	Jiwa Mandiri	Bantaeng	- Ikan pindang
769.	Mekar Sari	Bantaeng	- Olahan rumput laut
770.	Allu Bersinar	Bantaeng	- Snack rumput laut
771.	Reski Laut	Bantaeng	- Abon ikan
772.	Mati'no	Bantaeng	- Snack rumput laut, Bandeng Presto
773.	Tunas Muda	Bantaeng	- Bakso ikan
774.	Juku Ejayya	Bantaeng	- Olahan rumput laut
775.	Wanita Pesisir	Bantaeng	- Kerupuk rumput laut, Bandeng Presto
776.	Ballallompoa	Bantaeng	- Kerupuk amplang ikan, Teri Krispi
777.	Al-Ummahat	Bantaeng	- Bakso ikan
778.	Pantai Selatan	Bantaeng	- Nugget ikan, Rumput Laut
779.	Wanita Jujur	Bantaeng	- Dodol rumput laut
780.	Mawar	Bantaeng	- Olahan rumput laut
781.	At Taufiq	Pangkep	- Abon ikan
782.	Masengereng	Pangkep	- Abon ikan
783.	Rahmatullah	Pangkep	- Abon ikan
784.	Mawar	Pangkep	- Abon ikan
785.	Teratai	Pangkep	- Ikan kering/asin
786.	Paraikatte Melati	Pangkep	- Amplang bandeng
787.	Maghfirah	Pangkep	- Keripik rumput laut

No.	UPI / Kelompok / Perorangan	Alamat	Jenis Produk
788.	Sipadecengi	Pangkep	- Keripik rumput laut
789.	Berkah	Pangkep	- Keripik rumput laut
790.	Nurathirah	Pangkep	- Bandeng tanpa duri
791.	Cahaya Rembulan	Pangkep	- Keripik rumput laut
792.	Saromase	Pangkep	- Keripik rumput laut
793.	Khadijah	Pangkep	- Olahan bandeng
794.	Cahaya Desa	Pangkep	- Keripik rumput laut
795.	Ujung Parappa	Pangkep	- Kerupuk rumput laut
796.	Tegar Mandiri	Pangkep	- Bakso ikan, Abon Ikan, Bandeng Tanpa duri
797.	Flamboyan	Pangkep	- Ikan kambu
798.	Annisa	Pangkep	- Bakso ikan
799.	Murlisa	Pangkep	- Bakso ikan, Nugget Ikan
800.	Baju Bodoa	Pangkep	- Bakso ikan
801.	Azzahra	Pangkep	- Abon ikan
802.	Perempuan pengolah	Pangkep	- Bakso ikan
786.	Paraikatte Melati	Pangkep	- Amplang bandeng
787.	Maghfirah	Pangkep	- Keripik rumput laut
788.	Sipadecengi	Pangkep	- Keripik rumput laut
789.	Berkah	Pangkep	- Keripik rumput laut
790.	Nurathirah	Pangkep	- Bandeng tanpa duri
791.	Cahaya Rembulan	Pangkep	- Keripik rumput laut
792.	Saromase	Pangkep	- Keripik rumput laut
793.	Khadijah	Pangkep	- Olahan bandeng
794.	Cahaya Desa	Pangkep	- Keripik rumput laut
795.	Ujung Parappa	Pangkep	- Kerupuk rumput laut
796.	Tegar Mandiri	Pangkep	- Bakso ikan, Abon Ikan, Bandeng tanpa duri
797.	Flamboyan	Pangkep	- Ikan kambu
798.	Annisa	Pangkep	- Bakso ikan
799.	Murlisa	Pangkep	- Bakso ikan, Nugget Ikan
800.	Baju Bodoa	Pangkep	- Bakso ikan
801.	Azzahra	Pangkep	- Abon ikan
802.	Perempuan pengolah	Pangkep	- Bakso ikan
786.	Paraikatte Melati	Pangkep	- Amplang bandeng
787.	Maghfirah	Pangkep	- Keripik rumput laut
788.	Sipadecengi	Pangkep	- Keripik rumput laut
789.	Berkah	Pangkep	- Keripik rumput laut
790.	Nurathirah	Pangkep	- Bandeng tanpa duri
791.	Cahaya Rembulan	Pangkep	- Keripik rumput laut
792.	Saromase	Pangkep	- Keripik rumput laut
793.	Khadijah	Pangkep	- Olahan bandeng
794.	Cahaya Desa	Pangkep	- Keripik rumput laut
795.	Ujung Parappa	Pangkep	- Kerupuk rumput laut
796.	Tegar Mandiri	Pangkep	- Bakso ikan, Abon Ikan, Bandeng tanpa duri
797.	Flamboyan	Pangkep	- Ikan kambu
798.	Annisa	Pangkep	- Bakso ikan
799.	Murlisa	Pangkep	- Bakso ikan, Nugget Ikan
800.	Baju Bodoa	Pangkep	- Bakso ikan
801.	Azzahra	Pangkep	- Abon ikan
802.	Perempuan pengolah	Pangkep	- Bakso ikan

Lampiran 5. Data Tindak Pidana Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Laporan Polisi	Tersangka	Barang Bukti	Ket.
1	LP.A/01/I/2017/RES PANGKEP/SEK LT BIRING, Tgl. 15 Januari 2017	Muh. Natsir, 32 thn, Nelayan, Pulau Karangrang Kec. LT. Biring Kab. Pangkep = Pelaku meninggal dunia =	- 1 (satu) unit Jolloro - 1 (satu) buah handak habis terpakai	
2	LP/01/III/2017/Sulsel/Res Bone, Tgl. 20 Maret 2017	Baco Tang alias Cotang bin Manre, 67 thn, nelayan, Dusun Kampung Bajo Kel. Bajoe Kec. T. Riatang Timur Kab. Bone	Bom ikan	
3	LP/02/III/2017/Sulsel/Res Bone, Tgl. 23 Maret 2017	Kundarwanto Bin Raufung, 38 thn, nahkoda KMN ADDAM JAYA, Lingk. Awangsalo Kel. Panyula Kec. T. Riatang Timur Kab. Bone	1 (satu) unit kapal	
4	LP.A/01/IV/2017/RES PANGKEP/ SAT POLAIR, Tgl. 02 April 2017	Hasbullah, 18 thn, Pulau Lamputang Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep	- 3 (tiga) biji detenator - 1 (satu) lembar switer	
5	LP/60/IV/2017/Sulsel/RES PANGKEP, Tgl. 10 April 2017	Ardi, 46 thn, nelayan, Pulau Papandangan Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep	- 1 (satu) buah jerigen yang berukuran 2 liter berisi pupuk. - 1 (satu) buah jerigen yang berukuran 1,3 liter berisi pupuk	
6	LP/17/XII/2017/ Ditpolair Tgl. 11 Desember 2017	H. Abd. Kadir Bin H. Muhlis, 38 thn, nelayan, Jl. Barukang 3 Kel. Pattilongang Kec. Ujung Tanah Kota Makassar	1. 1 (satu) buah pelampung gabus 2. 3 (tiga) buah jerigen ukuran 1 ltr diduga berisi amonium nitrate 3. 1 (satu) jerigen ukuran 5 ltr diduga berisi amonium nitrate 4. 3 (tiga) buah detenator terangkai sumbu api 5. 3 (tiga) buah sumbu api	P21
7	LP//01/I/2017/ Ditpolair Tgl. 19 Januari 2017	Jufri Bin Alkad, 32 thn, nelayan, Nahkoda KMN TIGER 2000, Pulau Kambuno Kec. Harapan Kab. Sinjai	- 1 (satu) unit KMN TIGER 2000 - 1 (satu) rol selang - 1 (satu) buah kacamat selam - 1 (satu) buah regulator - 1 (satu) pasang sepatu bebek - 1 (satu) botol bekas vixal ukuran 500 ml, cairan diduga cairan Potassium sianida siap pakai - 1 (satu) unit kompresor	Tahap II
8	LP/02/III/2017/Dit. Polair Tgl. 22 Maret 2017	- Irwan Bin Daming, 39 thn, nelayan/ nahkoda perahu jolloro, Pulau Baranglombo Kec. Ujung Tanah Kota Makassar - Zainal Bin Dg Daming - Irzal Bin Dg Daming - Hendra Bin Dg. Rate	- 1 (satu) unit perahu jolloro - 1 (satu) rol selang - 2 (dua) buah kacamat selam - 1 (satu) buah dakor/ regulator - 2 (dua) pasang sepatu bebek - 1 (satu) biji detonator terangkai sumbu api - 1 (satu) unit kompresor - 1 (satu) buah botol bekas aqua ukuran 1500 ml diduga berisi pupuk ammonium nitrate - Sebanyak ± 20 kg ikan jenis campuran	
9	LP/58/IV/2017/Dit. Polair Baharkam Tgl. 25 April 2017	Arsak Bin Dg Naba, 33 thn, nelayan/nahkoda perahu jolloro tanpa nama, Pulau Lumu-lumu Kel. Sangkarang Kota Makassar	- 1 (satu) unit perahu jolloro - 2 (dua) rol selang - 2 (dua) buah kacamat selam - 1 (satu) unit tabung kompresor - 3 (tiga) buah detonator terangkai sumbu api - 1 (satu) gulung sabut kelapa - 6 (enam) botol bom ikan diduga Ammonium nitrate - ± 25 kg ikan jenis campuran	P21 Tahap II

No	Laporan Polisi	Tersangka	Barang Bukti	Ket.
10	LP/05/V/2017/Dit. Polair Tgl. 31 Mei 2017	H. Haris Bin Da'ba, 48 th, nakhoda, Pulau Barang Lompo Kec. Ujung Tanah	- 1 (satu) unit KMN BERKAT RESKY - 1 (satu) Bundel dokumen kapal - 5 (lima) zak ukuran 25 kg berisi pupuk ammonium nitrate - 6 (enam) jerigen ukuran 2 liter berisi ammonium nitrate - 1 (satu) unit kompresor - 2 (dua) rol selang - 2 (dua) buah dakor - 2 (dua) buah sepatu katak - 2 (dua) gulung serabut kelapa	P21 Tahap II
11	LP/09/VII/2017/Dit. Polair Tgl. 26 Juli 2017	Basri Palaguna Bin Bado Dg. Ngawing, 31 thn, nelayan, Pulau Barang Caddi Kec. Sangkarang Kota Makassar	- 1 (satu) botol bekas vixal 800 ml berisi potassium sianida - 1 (satu) botol bekas aqua 1500 ml berisi ammonium nitrate - 1 (satu) botol bekas maizon 600 ml berisi potassium sianida - Rekaman kamera HP pada saat pengejaran	P21 Tahap II
12	LP/103/VIII/2017/Dit. Polair Tgl. 21 Agustus 2017	H. Ancu, 41 thn, nelayan, Pulau Podang Podang Kab. Pangkep	- 1 (satu) unit KM. PANDANG LOLOA - ± 600 kg ikan campuran	Pelimpahan perkara ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel
13	LP/115/VIII/2017/Dit. Polair Tgl. 30 Agustus 2017	Sirajuddin Bin Kalu, 49 thn, Pulau Kodingareng Kel. Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar	- 1 (satu) unit perahu - 1 (satu) unit perahu lepa lepa - 1 (satu) roll selang - 2 (dua) botol bahan peledak - 3 (tiga) kotak korek api kayu - 40 kg ikan campuran - 1 (satu) unit kompresor - 3 (tiga) kaca mata selam - 3 (tiga) buah dakor/ regulator - 1 (satu) pasang sepatu bebek/fin	Tahap II
14	LP/11/X/2017/Ditpolair Tgl. 9 Oktober 2017	Muslimin alias H. selli Bin Rappe	- 1 (satu) buah jolloro warna putih milik H. Muslimin alias H. Selli - 1 (satu) set kompresor dengan selang berwarna kuning - 1 (satu) botol soda diduga berisi amonium nitrate - 2 (dua) botol bensin diduga berisi amonium nitrate - 1 (satu) jerigen 2 liter diduga berisi amonium nitrate - 1 (satu) jerigen 5 liter diduga berisi amonium nitrate	Tahap II
15	LP/12/X/2017/Ditpolair Tgl. 09 Oktober 2017	Aco Bin Ngore, nelayan	- 1 (satu) buah jolloro warna putih milik Aco Ngore - 1 (satu) set kompresor dengan selang berwarna kuning - 12 (dua belas) botol soda diduga berisi amonium nitrate - 2 (dua) botol bir yang diduga berisi amonium nitrate - 2 (dua) botol aqua 1,5 liter diduga berisi amonium nitrate - 3 (tiga) jerigen 5 liter diduga berisi amonium nitrate	Tahap II
16	LP/146/X/2017/Dit. Polair Tgl. 16 Oktober 2017	Jamuddin Bin Sahed, 50 thn, nelayan, Pulau Rajuni Kab. Kepulauan Selayar	- 1 (satu) unit perahu - 2 (dua) unit mesin Dong Feng - 5 (lima) botol bahan peledak - 4 (empat) buah sumbu rakitan - 4 (empat) buah detonator rakitan - 2 (dua) rol selang ± 100 m - ± 10 kg ikan campuran - 1 (satu) unit kompresor - 4 (empat) kaca mata selam - 2 (dua) psg sepatu bebek	

No	Laporan Polisi	Tersangka	Barang Bukti	Ket.
17	LP/13/XI/2017/Dit. Polair Tgl. 09 November 2017	M. Said Bin Dg Sabang, 52 thn, nelayan, Jl Barukang Utara Lr. 3 RT/RW 003/004 Kel.Cambaya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar	- 1 (satu) unit KMN CAHAYA MAKKAH - 1 (satu) bundel dokumen KMN CAHAYA MAKKAH - ± 2 (dua) kg potasium sianida	SIDIK
18	LP/14/XI/2017/Dit. Polair Tgl. 09 November 2017	M. Nasrullah R Bin Dg. Rapi, 32 thn, nelayan, Pulau Lae Lae Kec. Ujung Tanah Kota Makassar	- 1 (satu) unit KMN DUA PUTRA - 1 (satu) unit kompresor - 1 (satu) unit roll selang - 1 (satu) buah kacamata selam - 1 (satu) buah regulator - 1 (satu) pasang sepatu bebek - ± 40 kg ikan campuran	SIDIK
19	LP/15/XI/2017/Dit. Polair Tgl. 09 November 2017	M. Bakri Dg. Nappa Bin Dg. Said, 41 thn, nelayan, Pulau Lae Lae Kota Makassar	- 1 (satu) unit KMN RESKI BAHARI - 1 (satu) unit kompresor - 1 (satu) roll selang - 1 (satu) buah kacamata selam - 1 (satu) buah regulator - 1 (satu) pasang sepatu bebek - 2 (dua) botol bekas merk vixal diduga berisi cairan potasium sianida - ± 34 kg ikan campuran	SIDIK
20	LP/16/XI/2017/Dit. Polair Tgl. 11 November 2017	H. Abd. Muis Bin Sangkala, nelayan, 44 thn, Pulau Kodingareng Kel. Kodingareng Kec. Ujung Tanah Kota Makassar	- 2 (dua) buah botol aqua ukuran 1500 ml diduga berisi amonium nitrate - 1 (satu) buah jerigen 5 liter diduga berisi amonium nitrate - 22 (dua puluh dua) batang diduga detonator belum dirangkai - 10 (sepuluh) detonator sudah terangkai - 10 (sepuluh) sumbu api - ± 40 cm sumbu api - 3,5 biji TNT	Tahap II
21	LP/17/XII/2017/Dit. Polairud Tgl. 11 Desember 2017	H. Abd. Kadir Bin H. Muhlis, nelayan, 38 thn, Barukang 3 Kel. Patingaloang Kec. Ujung Tanah Kota Makassar	- 1 (satu) buah pelampung gabus - 2 (dua) buah jerigen ukuran 1 liter diduga berisi amonium nitrate - 3 (tiga) buah detonator terangkai sumbu api - 3 (tiga) buah sumbu api	SIDIK
22	LP/190/XII/2017/Dit. Polairud Tgl. 12 Desember 2017	H. Bahri Bin Sahid, 42 thn, nelayan, Pulau Gondong Bali Desa Masirumasae	- 1 (satu) unit perahu tanpa nama - 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter diduga berisi amonium nitrate - 2 (dua) buah botol aqua ukuran 1,5 liter diduga berisi amonium nitrate - 5 (lima) buah sumbu api - 1 (satu) unit mesin kompresor - 2 (dua) pasang sepatu katak - 2 (dua) roll selang - ± 5 (lima) gram potasium sianida - 1 (satu) buah botol penyemprot potasium sianida - uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 1.050.000,- - 1 (satu) buah kacamata selam	SIDIK
23	LP/199/XII/2017/Ditpolairud Baharkam tgl. 30 Desember 2017	Zaenal Bin Tompo, 56 thn, nelayan, Dusun Dopa RT 001 RW 001 Desa Kahu Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar		Pelimpahan perkara ke Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Sulsel

Lampiran 6. Rekapitulasi Hasil Monitoring Formalin Tahun 2017

NO	TANGGAL	LOKASI/ KABUPATEN	NAMA SAMPEL	ASAL BAHAN	FORMALIN	Keterangan
1	02-04 Maret 2017	TPI Bentenge PPI Labuang Koro Pasar Sentral Kab. Bulukumba	Ikan Merah Segar	Bulukumba	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Gallara Segar	Bulukumba	0 ppm	-
			Ikan Katombo Segar	Bulukumba	0 ppm	-
			Ikan Kembung Segar	Bulukumba	1 ppm	Terdeteksi
			Ikan Sibula Segar	Bulukumba	0 ppm	-
			Ikan Teri Segar	Bulukumba	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Pindang	Bulukumba	0 ppm	-
			Ikan Teri Besar Kering	Selayar	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Katamba Bogor Kering	Selayar	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Teri Kecil Kering	Kalimantan	0 ppm	-
2	02-04 Maret 2017	PPI Lappa Kab. Sinjai	Tembang Segar	Perairan Kupang	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Perairan Kupang	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Perairan Baubau	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Layang Segar	Perairan Selayar	0 ppm	-
			Ikan Katamba Segar	Perairan Selayar	0 ppm	-
			Ikan Baronang (Tahasang)	Perairan Selayar	0 ppm	-
			Ikan Kasok Segar	Perairan Selayar	0 ppm	-
			Ikan Teri Kecil Kering	Sinjai	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Sinjai	0,6 ppm	Terdeteksi
			Tiko Bolong Kering	Sinjai	1,5 ppm	Terdeteksi
3	02-04 Maret 2017	PPI Lanroe Pasar Bajoe Kab. Bone	Ikan Layang Segar	KM.Buah Harapan Teluk Bone	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	KM.Buah Harapan Teluk Bone	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	KM.Buah Harapan Teluk Bone	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	KM.Hasni Jaya Teluk 05 Baubau	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Layang Segar	KM.Hasni Jaya Teluk 05 Baubau	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Cakalang Segar	KM.Hawa Surga Kabaena	1 ppm	Terdeteksi
			Ikan Sarsinau Segar	KM.Hawa Surga Kabaena	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	KM.Hawa Surga Kabaena	0 ppm	-
			Ikan Kerapu Kering	Kab. Bone	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Kerapu Kering	Kab. Bone	0,6 ppm	Terdeteksi
4	16-17 Maret 2017	Ps.Sidrap Kab. Sidrap	Ikan Gabus Segar	Batu-batu	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Tongkol Segar	Bone	0 ppm	-
			Cumi Segar	Pare-pare	0 ppm	-
			Layang Kecil Segar	Pare-pare	0,4 ppm	Terdeteksi
			Udang Putih Segar	Siwa	0 ppm	-
			Cakalang Segar	Sinjai	0 ppm	-
			Cakalang Kecil Segar	Pare-pare	0 ppm	-
			Bandeng Segar	Siwa	0 ppm	-
			Ikan Merah Segar	Pare-pare	0 ppm	-
			Ikan Mairo Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Sinrilik Segar	Pare-pare	0 ppm	-
			Teri Hitam Besar Kering	Pare-pare	0,6 ppm	Terdeteksi
			Teri Putih Kecil Kering	Kendari	0 ppm	-
			Teri Putih Kecil Kering	Pare-pare	0 ppm	-
			Teri Putih Kecil Kering	Kendari	0 ppm	-
			Betebete Kering	Wotu	0 ppm	-
			Ebi Kering	Pinrang	0 ppm	-

NO	TANGGAL	LOKASI/ KABUPATEN	NAMA SAMPEL	ASAL BAHAN	FORMALIN	Keterangan
5	16-17 Maret 2017	Ps. Kampung Jaya Kab. Pinrang	Ikan Kembung Segar	Jampue, Pinrang	0 ppm	-
			Cakalang Segar	Suppa	0 ppm	-
			Ikan Katombo Segar	Suppa	0 ppm	-
			Ikan Biu-biu Segar	Kendari	0 ppm	-
			Ikan Sinrilik Segar	Makassar	0 ppm	-
			Ikan Katombo Segar	Makassar	0 ppm	-
			Bandeng Segar	Makassar	0 ppm	-
			Cakalang Segar	Barro	0 ppm	-
			Ikan Mujair Segar	Paria	0 ppm	-
			Ikan Sepat Segar	Sidrap	0 ppm	-
			Ikan Mairo Segar	Polewali	0 ppm	-
			Ikan Merah Segar	Polewali	0 ppm	-
			Betebete Kering	Lasinrang, Jampue	0 ppm	-
			Bandeng Kering	Langga	0 ppm	-
			Teri Putih Kering	Lasinrang, Ujulero	0 ppm	-
			Teri Hitam Kering	Lasinrang, Ujulero	0 ppm	-
			Ikan Merah Kering	Lasinrang, Ujulero	0 ppm	-
			Ikan Dolo-dolo Kering	Lasinrang, Ujulero	0 ppm	-
			Ikan Layang Kering	Lasinrang, Ujulero	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Kering	Lasinrang, Ujulero	0 ppm	-
6	16-17 Maret 2017	Ps. Kampung Jaya Kota. Parepare	Ikan Kembung Segar	Luar Parepare	0 ppm	-
			Ikan Merah Segar	Luar Parepare	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Kering	Bone	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Bulukumba	0 ppm	-
			Ikan Cepak Segar	Makassar	0 ppm	-
			Ikan Merah Segar	Makassar	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Mairo Segar	Pare-pare	0 ppm	Terdeteksi
			Ikan Mairo Segar	Pare-pare	0 ppm	-
			Ikan Lauro Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Katamba Kecil Segar	Pare-pare	0 ppm	-
			Ikan Merah Segar	Barro	0 ppm	-
			Ikan Bandeng Segar	Siwa	0 ppm	-
			Cakalang Segar	Kendari	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering Besar	Banjarmasin	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Teri Kering Kecil	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering Kecil	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering Kecil	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Palopo	0 ppm	-
			Cakalang Kering	Ujung Lero	0 ppm	-
			Teri Kering	Barro	0 ppm	-
7	30 Maret - 01 April 2017	Ps. Tradisional Bonohalabg Ps. Sentral Bonea Kab. Selayar	Tembang Segar	Padang, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Kembung Segar	Borong-borong, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Batang Mata Selayar	0 ppm	Terdeteksi
			Ikan Teri Segar	Padang, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Bandeng Segar	Desa Appatana, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Bandeng Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Kerapu Segar	Gusung, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Sinrilik Kering	Selayar	0 ppm	-
			Ikan Katombo Segar	Borong-borong, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Katamba Kering	Tambolongan, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Kerapu Kering	Tambolongan, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Lure Kering	Pulau Latundo, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Pamatata, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Baebae Kering	Pulau Latundo, Selayar	0 ppm	-

NO	TANGGAL	LOKASI/ KABUPATEN	NAMA SAMPEL	ASAL BAHAN	FORMALIN	Keterangan
			Ikan Teri Kering	Pulau Latundo, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Baebae Kering	Batang Mata Selayar	0 ppm	-
			Ikan Kakatua Kering	Batang Mata Selayar	0 ppm	-
			Ikan Sunu Kering	Padang, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Borong-borong, Selayar	0 ppm	-
			Ikan Bandeng Segar	Siwa	0 ppm	-
			Udang Rebon Kering	Kalimantan	0 ppm	-
8	18 - 20 April 2017	Pasar Tanjunge Pasar Mini To Kampu Kab. Wajo	Ikan Baloso Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Gabus Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Batutu Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Sepat Siam Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Terbang Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Rambeng Kering	Wajo	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Gabus Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Bete-bete Kering	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Sinrili Segar	Bajoe Bone	0 ppm	-
			Ikan Katamba Segar	Bajoe Bone	0 ppm	-
			Ikan Sinrili Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Katamba Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Sepatsiam Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Baloso Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Terbang Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Bete-bete Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Sepat Siam Kering	Wajo	0 ppm	-
			Ikan Baloso Kering	Wajo	0 ppm	-
9	18-20 April 2017	Pasar Sentral Soppeng Kab. Soppeng	Ikan Mujair Segar	Soppeng	0 ppm	-
			Ikan Kembung Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Sinjai	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Selar Segar	Sinjai	0 ppm	-
			Ikan Teri Segar	Sinjai	0 ppm	-
			Ikan Sinrilik Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Terbang Segar	Barro	0 ppm	-
			Ikan Tawes Segar	Soppeng	0 ppm	-
			Ikan Bandeng Segar	Bone	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Layang Segar	Sinjai	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Sepat Siam	Soppeng	0 ppm	-
			Ikan Tembang Kering	Bone	0 ppm	-
			Ikan Dolo-dolo Kering	Bone	0 ppm	-
			Ikan Bete-bete Kering	Bone	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Teri Kering	Bone	0 ppm	-
			Ikan Bungo Kering	Soppeng	0 ppm	-
			Ikan Rambe Kering	Bulukumba	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Soppeng	0 ppm	-
			Ikan Dolo-dolo Kering	Barro	0 ppm	-
			Ikan Kande Kering	Soppeng	0 ppm	-
10	18-21 April 2017	PPI/TPI Pontap Palopo Pasar Rakyat Andi Tadda Pusat Niaga Palopo (Pasar Sentral) Kota Palopo	Ikan Sibula Segar	Pare-pare	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Sulawesi Tengah	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Sibula Segar	Makassar	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Poso, Sulteng	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Cakalang Segar	Poso, Sulteng	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Kembung Prp Segar	Ponrang Luwu	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Ponrang Luwu	1 ppm	Terdeteksi

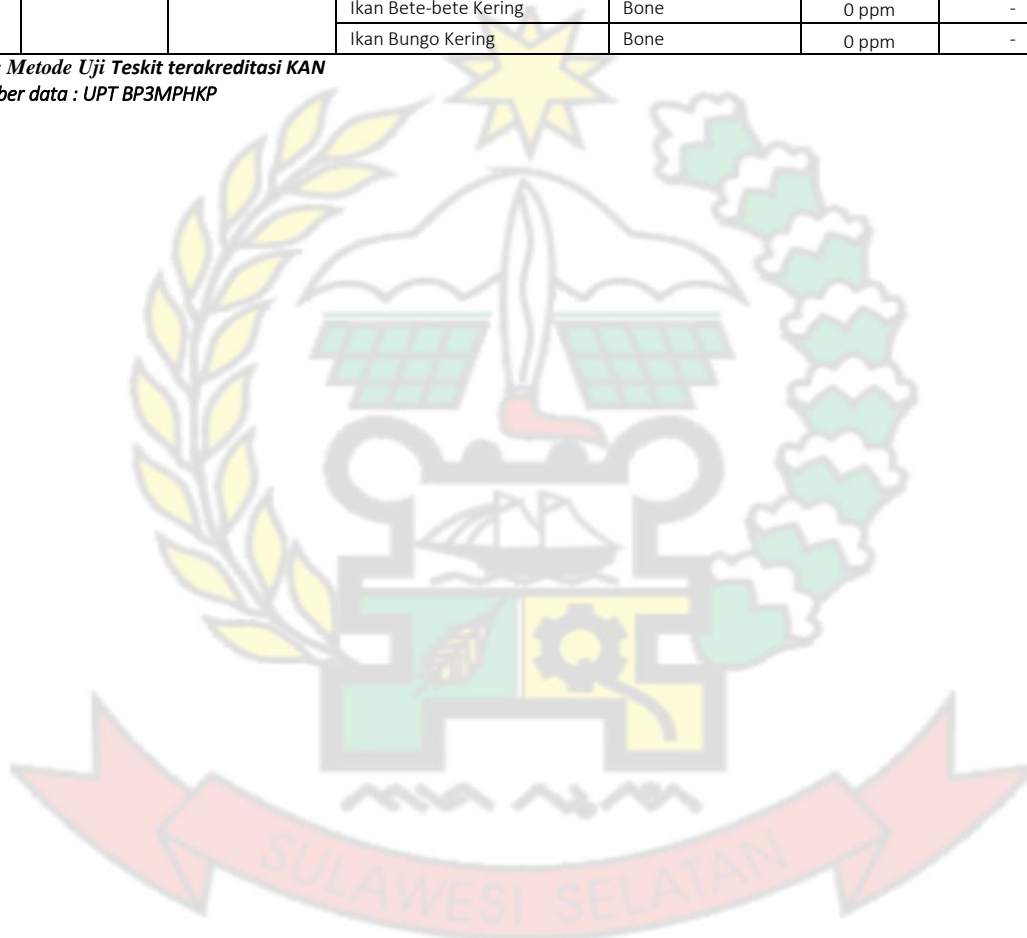
NO	TANGGAL	LOKASI/ KABUPATEN	NAMA SAMPEL	ASAL BAHAN	FORMALIN	Keterangan
			Ikan Layang Segar	Poso, Sulteng	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Rakapang Segar	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Sarden Segar	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Teri Segar	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Carede Segar	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Ekor Kuning Segar	Palopo	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Kembung Segar	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Peperek Segar	Palopo	0 ppm	-
			Cumu-cumi Segar	Palopo	0 ppm	-
			Cumu-cumi Segar	Palopo	0 ppm	-
			Bahan Pembantu (Es)	Pabrik Es PPI Pontap Palopo	0 ppm	-
			Bahan Baku Es (Air)	Pabrik Es PPI Pontap Palopo	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	PPI/TPI Pontap Palopo	1 ppm	Terdeteksi
			Kerang Segar	Luwu	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Palopo	0 ppm	-
			Ebi Kering	Polmas	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Terbang Kering	Pare-pare	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Sulawesi Tengah	0 ppm	-
			Ikan Katombo Segar	Bungku, Sulteng	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Layang Segar	Bungku, Sulteng	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Cakalang Segar	Bungku, Sulteng	4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Layang Segar	Bone Pute, Luwu	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Larompong, Luwu	4 ppm	Terdeteksi
			Bahan Pembantu (Es)	Larompong, Luwu	0 ppm	-
			Ikan Lure Segar	Ponrang Luwu	0 ppm	-
			Ikan Teri Segar	Ponrang Luwu	0 ppm	-
			Ikan Tongkol Segar	Sulawesi Tengah	3,2 ppm	Terdeteksi
			Ikan Cakalang Segar	Malangke	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Kembung Segar	PPI/TPI Pontap Palopo	0 ppm	-
			Cumu-cumi Segar	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Kendari	1 ppm	Terdeteksi
			Ikan Teri Kering	Kendari	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Teri Kering	Kendari	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Sinrilik Kering	Kendari	0 ppm	-
			Cumu-cumi Kering	Kendari	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Bungku, Sulteng	0 ppm	-
			Teri Basah	Palopo	0 ppm	-
11	18-21 April 2017	Pasar Tradisional Cilallang Pasar Tradisional Modern Belopa Pasar Sentral Lama Belopa Kab. Luwu	Ikan Kembung Segar	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Marante	0 ppm	-
			Ikan Teri Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Tembang Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Bahan Baku Ikan Asap	Desa Cimpu	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Bone Pute	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Cakalang Segar	Marante	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Marante	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Sinrilik Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	TPI Ulo-ulo	0,6 ppm	Terdeteksi
			Ikan Sinrilik Kering	Tambuno	0 ppm	-
			Ikan Teri Kecil Kering	Kamanre	0 ppm	-
			Ikan Asap	Desa Cimpu	0 ppm	-
			Ikan Terbang Kering	Pare-pare	0 ppm	-
			Ebi Kering	Cilallang	0 ppm	-

NO	TANGGAL	LOKASI/ KABUPATEN	NAMA SAMPEL	ASAL BAHAN	FORMALIN	Keterangan
			Udang Kecil Kering	Tobbia	0 ppm	-
			Ikan Tembang Segar	Ponrang	0 ppm	-
			Ikan Sule-sule Segar	Ponrang	0 ppm	-
			Ikan Teri Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Bete-bete Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Tembang Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Tembang Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Kembung Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Marante	0 ppm	-
			Ebi Kering	Tobbia	0 ppm	-
			Teri Madan Kering	Palopo	0 ppm	-
			Ikan Bandeng Segar	Larompong	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Marante	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Kecil Segar	Pare-pare	1 ppm	Terdeteksi
			Ikan Carede Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Tiko-tiko Segar	Siwa	0 ppm	-
			Ikan Tenggiri (Steak) Kering	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Marante	0 ppm	-
			Ikan Passe-passe Segar	Keppe, Larompong	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Ponrang	0 ppm	-
			Ikan Teri Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Commo-commo Segar	Ponrang	0 ppm	-
			Ikan Cakalang segar	Desa Cimpu	0 ppm	-
			Ikan Teri Segar	TPI Ulo-ulo	0 ppm	-
			Ikan Teri Kering	Palopo	0 ppm	-
12	10-12 Juli 2017	PPI Lanroe Kab. Sinjai	Baby Tuna Ekor Kuning	Selayar	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Selayar	1 ppm	Terdeteksi
			Ikan Layang Segar	Kendari	0 ppm	-
			Ikan Sarsinau Segar	Kendari	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Perairan Sulteng	1 ppm	Terdeteksi
			Ikan Cakalang Segar	Perairan Sulteng	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Layang Segar	Perairan Sulteng	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Perairan Sulteng	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Perairan Sulteng	1 ppm	-
			Ikan Sinrilik Segar	Selayar	0 ppm	-
13	10-12 Juli 2017	PPI Lanroe Ps. Tradisional Bajoe Ps. Sentral Lama Kab. Bone	Ikan Baronang Segar	Selayar	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Kabaena	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Sarsinau Segar	Kabaena	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Bau-bau	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Bau-bau	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Perairan Rekke	0,4 ppm	Terdeteksi
			Ikan Tuna Asap	Tippulue Bone	1 ppm	Terdeteksi
			Ikan Cakalang Dampo	Marante	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Banyarak Segar	Bone	0 ppm	-
14	02-04 Nov 2017	Ps. Sentral Kab. Pinrang	Ikan Mujair Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Cakalang Segar	Pinrang	0 ppm	-
			Iksn Banyara Segar	Pinrang	0 ppm	-
			Ikan Gabus Segar	Pinrang	0 ppm	-
			Ikan Sinrili Segar	Pinrang	0 ppm	-
			Ikan Merah Segar	Pinrang	0 ppm	-
			Ikan Bollamata Segar	Pinrang	0 ppm	-
			Ikan Cepa Segar	Pinrang	0 ppm	-
14	02-04 Nov 2017	Ps. Sentral Kab. Pinrang	Ikan Mairo Segar	Pinrang	0 ppm	-

NO	TANGGAL	LOKASI/ KABUPATEN	NAMA SAMPEL	ASAL BAHAN	FORMALIN	Keterangan
			Ikan Layang Kecil Segar	Langnga Pallamea	0 ppm	-
			Ebi Kering	Jampue, Pinrang	0 ppm	-
			Ikan Teri Putih Kering	Jampue, Pinrang	0 ppm	-
15	10 Nov 2017	PPI Lanroe Ps. Tradisional Bajoe Kab. Bone	Ikan Cakalang Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Katambak Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Bete-bete segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Bungo Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Bandeng Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Layang Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Merah Segar	Bone	0 ppm	-
			Ikan Bete-bete Kering	Bone	0 ppm	-
			Ikan Bungo Kering	Bone	0 ppm	-

Ket : Metode Uji Teskit terakreditasi KAN

Sumber data : UPT BP3MPHKP



Lampiran 7. Rekapitulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2017

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Tanggal		No Urut	No. SKP
						Terbit	valid		
1	CV. Persada Semesta	Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec Mangarabombang Takalar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	29/12/2016	29/12/2018	1	5660/73/ISKPIKRI/2016
2	PT. AIKI Megah Jaya	Jl. Perintis Kemerdekaan, KIMA 2 No3 Daya, Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Pelagic Fish	18/04/2017	18/04/2019	2	6277/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	18/04/2017	18/04/2019	3	6278/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Baru	Segar	Fresh Cephalopods	18/04/2017	18/04/2019	4	6279/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Baru	Segar	Fresh Shrimp	18/04/2017	18/04/2019	5	6280/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Baru	Beku	Frozen Pelagic Fish	18/04/2017	18/04/2019	6	6281/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Baru	Beku	Frozen Demersal Fish	18/04/2017	18/04/2019	7	6282/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Baru	Beku	Frozen Cephalopoda	18/04/2017	18/04/2019	8	6283/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Baru	Beku	Frozen Shrimp	18/04/2017	18/04/2019	9	6284/73/ISKPI/SG/IV/2017
3	PT. Ocean Champ Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2, Kawasan Industri Makassar, Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Pasteurized	Pasteurized Canned Crabmeat	21/04/2017	21/04/2019	10	6333/73/ISKPI/IV/2017
4	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima raya Blok D-2b Makassar, Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Flying Fish Roe	21/04/2017	21/04/2019	11	6340/73/ISKPI/IV/2017
5	CV. Jaya Indah Cemerlang	Jl. Poros Makassar - Maros No 138, Maros, Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	03/05/2017	03/05/2019	12	6352/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish	03/05/2017	03/05/2019	13	6353/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Perpanjangan	Kering	Dried Abalone, Sea Cucumber, Shark Fin, Flying Fish Roe	03/05/2017	03/05/2019	14	6354/73/ISKPI/IV/2017
6	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No 24 kompleks Pergudangan Kawasan Logistik Terpadu Blok A No 15 Sulawesi Selatan	Baru	Kering	Dried Seaweed	03/05/2017	03/05/2019	15	6355/73/ISKPI/IV/2017
7	PT. Mina Timur Indonesia	Jl. Abd. Kuddus Barombong, Kec. Tamalate Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	03/05/2017	03/05/2019	16	6356/73/ISKPI/IV/2017
8	CV. Guna Bahari Indonesia	Pergudangan Parangloe Indah Blok I-1 No 3, Jl. Ir. Sutami, Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	03/05/2017	03/05/2019	17	6357/73/ISKPI/IV/2017
9	PT. Parleviet Paraba Seafood	Jl. Jembatan tua No 89, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna	03/05/2017	03/05/2019	18	6358/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	03/05/2017	03/05/2019	19	6359/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	03/05/2017	03/05/2019	20	6360/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	03/05/2017	03/05/2019	21	6361/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish	03/05/2017	03/05/2019	22	6362/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	03/05/2017	03/05/2019	23	6363/73/ISKPI/SG/IV/2017
10	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima 3 Kav. 5, Makassar	Perpanjangan	Pasteurized	Pasteurized Canned Crabmeat	9/5/2017	9/5/2019	24	6419/73/ISKPI/IV/2017
11	UD. Anugerah	Jl. Serui No 11. A/33 Makassar	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	9/5/2017	9/5/2019	25	6420/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Kering	Dried Sea Cucumber	9/5/2017	9/5/2019	26	6421/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Kering	Dried Shark Fin	9/5/2017	9/5/2019	27	6422/73/ISKPI/IV/2017
12	PT. Sukses Hasil Alam Nusaindo	Jl. Kima 9 Kav. L-11C, Makassar	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna	24/5/2017	24/5/2019	28	6451/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	24/5/2017	24/5/2019	29	6452/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	24/5/2017	24/5/2019	30	6453/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	24/5/2017	24/5/2019	31	6454/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp	24/5/2017	24/5/2019	32	6455/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Shrimp	24/5/2017	24/5/2019	33	6456/73/ISKPI/SG/IV/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	24/5/2017	24/5/2019	34	6457/73/ISKPI/IV/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopoda	24/5/2017	24/5/2019	35	6458/73/ISKPI/IV/2017

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Tanggal		No Urut	No. SKP
						Terbit	valid		
			Perpanjangan	Beku	Frozen Slipper Lobster	24/5/2017	24/5/2019	36	6459/73/SKP/IBK/VI/2017
13	PT. Bumi Menara Internusa	JL. Kima 15 Kav. R4 Makassar	Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp	24/5/2017	24/5/2019	37	6460/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopoda	24/5/2017	24/5/2019	38	6461/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	24/5/2017	24/5/2019	39	6462/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	24/5/2017	24/5/2019	40	6463/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	24/5/2017	24/5/2019	40	6463/73/SKP/IBK/VI/2017
14	CV. Persada Semesta	JL. Sultan Hasanuddin No. 193 Desa Ballo, Kelurahan Sombalabella Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	8/6/2017	8/6/2019	41	6580/73/SKP/IKR/VI/2017
15	PT. Kemilau Bintang Timur	JL. Kima 3K, 2A Daya Makassar	Perpanjangan	Beku	Frozen Crabmeat	9/6/2017	9/6/2019	42	6581/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Pasteurized	Pasteurized Canned Crabmeat	10/6/2017	10/6/2019	43	6582/73/SKP/IKL/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	11/6/2017	11/6/2019	44	6583/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish	12/6/2017	12/6/2019	45	6584/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopoda	13/6/2017	13/6/2019	46	6585/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	14/6/2017	14/6/2019	47	6586/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	15/6/2017	15/6/2019	48	6587/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Raw Shrimp	16/6/2017	16/6/2019	49	6588/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Aquaculture Fish	17/6/2017	17/6/2019	50	6589/73/SKP/IBK/VI/2017
16	CV. Putri Laut Biru	JL. Cakalang II No. 2 Makassar	Baru	Segar	Fresh Pelagic Fish	22/6/2017	22/6/2019	52	6591/73/SKP/SG/VI/2017
			Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	22/6/2017	22/6/2019	53	6592/73/SKP/SG/VI/2017
			Baru	Beku	Fresh Shrimp	22/6/2017	22/6/2019	54	6593/73/SKP/SG/VI/2017
			Baru	Beku	Fresh Lobster	22/6/2017	22/6/2019	55	6594/73/SKP/SG/VI/2017
17	CV. Basma Bahari	JL. Komp Pasar Grosir Daya Modern Blok D1 No. 15 Rt. 04/Rw. 05 Makassar	Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish	7/7/2017	7/7/2019	56	6727/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	7/7/2017	7/7/2019	57	6728/73/SKP/SG/VI/2017
			Baru	Segar	Fresh Shrimp	7/7/2017	7/7/2019	58	6729/73/SKP/SG/VI/2017
18	CV. INTIMAKMUR	JL. Kima 6 Blok F1A2, Kawasan Industri Makassar, Makassar Sulawesi selatan	Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	7/7/2017	7/7/2019	59	6730/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna	7/7/2017	7/7/2019	60	6731/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	7/7/2017	7/7/2019	61	6732/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	7/7/2017	7/7/2019	62	6733/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopods	7/7/2017	7/7/2019	63	6734/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Shrimp	7/7/2017	7/7/2019	64	6735/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp	7/7/2017	7/7/2019	65	6736/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish	7/7/2017	7/7/2019	66	6737/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	7/7/2017	7/7/2019	67	6738/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Farm Raised Fish	7/7/2017	7/7/2019	68	6739/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Farm Raised Fish	7/7/2017	7/7/2019	69	6740/73/SKP/SG/VI/2017
19	PT. BANTIMURUNG INDAH	JL. Sam Ratulangi No. 163 Maros Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Alkali Treated Contonil Chips	7/7/2017	7/7/2019	70	6741/73/SKP/IRD/VI/2017
			Perpanjangan	Kering	Semi Refined Carrageenan	7/7/2017	7/7/2019	71	6742/73/SKP/IRD/VI/2017
			Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	7/7/2017	7/7/2019	72	6743/73/SKP/IKR/VI/2017
20	PT. USAHA CENTRAL JAYA SAKTI	JL. Kima V Kav. E No. 3A, Makassar	Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	7/7/2017	7/7/2019	73	6744/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	7/7/2017	7/7/2019	74	6745/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Milkfish	7/7/2017	7/7/2019	75	6746/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Milkfish	7/7/2017	7/7/2019	76	6747/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna	7/7/2017	7/7/2019	77	6748/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	7/7/2017	7/7/2019	78	6749/73/SKP/SG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopods	7/7/2017	7/7/2019	79	6750/73/SKP/IBK/VI/2017

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Tanggal		No Urut	No. SKP
						Terbit	valid		
21	PT. BIRU LAUT NUSANTARARA	JL. Kima 8 Kav. SS No. 23A, Kawasan Industri Makassar Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna	7/7/2017	7/7/2019	80	675173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	7/7/2017	7/7/2019	81	6752173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopods	7/7/2017	7/7/2019	82	6753173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Boneless Milkfish	7/7/2017	7/7/2019	83	6754173/SKP/ISG/VI/2017
			Baru	Beku	Frozen Pelagic Fish	7/7/2017	7/7/2019	84	6755173/SKP/IBK/VI/2017
			Baru	Segar	Fresh Pelagic Fish	7/7/2017	7/7/2019	85	6756173/SKP/ISG/VI/2017
			Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	7/7/2017	7/7/2019	86	6757173/SKP/ISG/VI/2017
			Baru	Beku	Frozen Milkfish	7/7/2017	7/7/2019	87	6758173/SKP/IBK/VI/2017
			Baru	Segar	Fresh Milkfish	7/7/2017	7/7/2019	88	6760173/SKP/ISG/VI/2017
			Baru	Beku	Frozen Demersal Fish	15/8/2017	15/8/2019	89	6973173/SKP/IBK/VI/2017
22	PT. BONTOLALLING BAOJI INDONESIA	JL. Karaeng Pantingalloang No. 350 (Tol Reformasi) Makassar Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	7/7/2017	7/7/2019	90	6761173/SKP/IKR/VI/2017
23	PT. RIKA RAYHAN MANDIRI	JL. KIMA 4 Kav. P3A, Makassar	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	13/7/2017	13/7/2019	91	6804173/SKP/IKR/VI/2017
24	PT. KARYA LAUTAN JAYA UTAMA	JL. Lantebung No. 7 Makassar	Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish	13/7/2017	13/7/2019	92	6805173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	13/7/2017	13/7/2019	93	6806173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	13/7/2017	13/7/2019	94	6807173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	13/7/2017	13/7/2019	95	6808173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Cephalopods	13/7/2017	13/7/2019	96	6809173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopoda	13/7/2017	13/7/2019	97	6810173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Kering	Dried Flying Fish Roe	13/7/2017	13/7/2019	98	6811173/SKP/IKR/VI/2017
25	PT. SIND SERENE INTERNATIONAL	JL. Ir. Sutami No. 19 A Makassar	Perpanjangan	Kering	Dried Seaweed	13/7/2017	13/7/2019	99	6812173/SKP/IKR/VI/2017
26	PT. Tobiko Utama	JL. Sultan Alauddin No. 47-51 Makassar	Perpanjangan	Kering	Dried Flying Fish Roe	3/8/2017	3/8/2019	100	6921173/SKP/IKR/VI/2017
27	CV. Haruka	JL. Kapasa No. 1 Makassar Sul-Sel	Baru	Kering	Dried Sea Cucumber	3/8/2017	3/8/2019	101	6922173/SKP/IKR/VI/2017
28	PT. Prima Bahari Inti Lestari	JL. Kima 12 Kav. 5C Makassar	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna	3/8/2017	3/8/2019	102	6863173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	3/8/2017	3/8/2019	103	6864173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	3/8/2017	3/8/2019	104	6865173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	3/8/2017	3/8/2019	105	6866173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	3/8/2017	3/8/2019	106	6866173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Octopus	3/8/2017	3/8/2019	107	6867173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Octopus	3/8/2017	3/8/2019	108	6868173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Milk Fish	3/8/2017	3/8/2019	109	6869173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Milk Fish	3/8/2017	3/8/2019	110	6870173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp	3/8/2017	3/8/2019	111	6871173/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Shrimp	3/8/2017	3/8/2019	112	6872173/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagis Fish	3/8/2017	3/8/2019	113	6873173/SKP/IBK/VI/2017
29	CV. Ome Trading Coy	JL. Poros Kanjilo Kec. Barombong Gowa	Perpanjangan	Kering	Katsuobushi	3/8/2017	3/8/2019	114	6901173/SKP/IKR/VI/2017
30	PT. Omereso Foods	JL. Poros Kanjilo Kec. Barombong Gowa	Perpanjangan	Kering	Hana Katsuobushi / Powder Katsuobushi	3/8/2017	3/8/2019	115	6902173/SKP/IKR/VI/2017

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Tanggal		No Urut	No. SKP
						Terbit	valid		
31	CV. Reski Bahari	JL. Poros Makassar - Maros KM 24 Ballu-ballu Maros	Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	3/8/2017	3/8/2019	116	6903/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	3/8/2017	3/8/2019	117	6904/73/SKP/IBK/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	3/8/2017	3/8/2019	118	6905/73/SKP/ISG/VI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish	3/8/2017	3/8/2019	119	6906/73/SKP/ISG/VI/2017
			Baru	Beku	Frozen Cephalopoda	3/8/2017	3/8/2019	120	6907/73/SKP/IBK/VI/2017
			Baru	Segar	Fresh Shrimp	3/8/2017	3/8/2019	121	6908/73/SKP/ISG/VI/2017
			Baru	Segar	Fresh Lobster	3/8/2017	3/8/2019	122	6909/73/SKP/ISG/VI/2017
32	PT. Biru Laut Nusantara	JL. Kima 8 Kav. SS No. 32 A Kawasan Industri Makassar	Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	15/8/2017	15/8/2019	123	6973/73/SKP/IBK/VI/2017
33	PT. Maju Awanindo Berjaya	Dusun Padangalla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Maros	Perpanjangan	Beku	Frozen tuna	6/9/2017	6/9/2019	124	7123/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Fresh Tuna	6/9/2017	6/9/2019	125	7124/73/SKP/IBK/IX/2017
			Baru	Segar	Frozen Demersal Fish	6/9/2017	6/9/2019	126	7125/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	6/9/2017	6/9/2019	127	7126/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Fresh Pelagic Fish	6/9/2017	6/9/2019	128	7127/73/SKP/IBK/IX/2017
34	CV. Simpul Agro Globalindo	JL. Gusung Makmur No. 13 RT 003 RW 008 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate, Kota. Makassar	Baru	Kering	Dried Seaweed	6/9/2017	6/9/2019	129	7128/73/SKP/IBK/IX/2017
35	PT. Mina Maju Sejahtera	JL. Cenranae No. 1 Bulu-Bulu RT. 003 RW. 002 Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	6/9/2017	6/9/2019	130	7129/73/SKP/ISG/IX/2017
			Baru	Segar	Fresh Pelagic Fish	6/9/2017	6/9/2019	131	7130/73/SKP/ISG/IX/2017
			Baru	Segar	Fresh Shrimp	6/9/2017	6/9/2019	132	7131/73/SKP/ISG/IX/2017
			Baru	Segar	Fresh Lobster	6/9/2017	6/9/2019	133	7132/73/SKP/ISG/IX/2017
			Baru	Segar	Fresh Octopus	6/9/2017	6/9/2019	134	7133/73/SKP/ISG/IX/2017
36	PT. Kelola Mina Laut	JL. Kima 17 Blok DD 15-16 Makassar	Perpanjangan	Beku	Frozen Tuna	6/9/2017	6/9/2019	135	7134/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Pelagic Fish	6/9/2017	6/9/2019	136	7135/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopods	6/9/2017	6/9/2019	137	7136/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	6/9/2017	6/9/2019	138	7137/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Shrimp	6/9/2017	6/9/2019	139	7138/73/SKP/IBK/IX/2017
37	PT. Celebes Asmak Indonesia	JL. Sabutung No. 38 Makassar Indonesia	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	20/10/2017	20/10/2019	140	7355/73/SKP/ISG/IX/2017
			Baru	Segar	Fresh Pelagic Fish	20/10/2017	20/10/2019	141	7356/73/SKP/ISG/IX/2017
38	UD. Makassar Lestari	JL. Poros Makassar KM 24 Gudang 78 Ballu - ballu depan patung polwan Maros Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	20/10/2017	20/10/2019	142	7357/73/SKP/ISG/IX/2017
			Baru	Segar	Fresh Pelagic Fish	20/10/2017	20/10/2019	143	7358/73/SKP/ISG/IX/2017
			Baru	Segar	Fresh Cephalopods	20/10/2017	20/10/2019	144	7359/73/SKP/ISG/IX/2017
39	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kimaraya 1 Blok D-2b Makassar, Sulawesi Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Raw Shrimp	20/10/2017	20/10/2019	145	7360/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cooked Shrimp	20/10/2017	20/10/2019	146	7361/73/SKP/IBK/IX/2017
40	CV. Prima Indo Tuna	JL. Dr. Ir. Sutami No. 32 Makassar, Sulawesi - Selatan Indonesia	Perpanjangan	Segar	Frozen Tuna	20/10/2017	20/10/2019	147	7362/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Fresh Tuna	20/10/2017	20/10/2019	148	7363/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal	20/10/2017	20/10/2019	149	7364/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal	20/10/2017	20/10/2019	150	7365/73/SKP/IBK/IX/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopoda	20/10/2017	20/10/2019	151	7366/73/SKP/IBK/IX/2017
41	CV. Anugerah Lestari	JL. Klabat No. 40 Perumahan Bukit Baruga, Makassar	Baru	Kering	Teripang Kering	16/10/2017	16/10/2019	152	7275/73/SKP/IKR/IX/2017
42	PT. Lautan Sakti Jaya	JL. Kima 19 Kawingan DD3A Makassar	Baru	Segar	Fresh Shrimp	16/10/2017	16/10/2019	153	7276/73/SKP/ISG/IX/2017
			Baru	Beku	Frozen Shrimp	16/10/2017	16/10/2019	154	7277/73/SKP/IBK/IX/2017
			Baru	Beku	Frozen Milk Fish	16/10/2017	16/10/2019	155	7278/73/SKP/IBK/IX/2017
			Baru	Beku	Frozen Pelagis	16/10/2017	16/10/2019	156	7279/73/SKP/IBK/IX/2017

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Tanggal		No Urut	No. SKP
						Terbit	valid		
43	PT. Prima Global Sukses	JL. Dr. Ir. Sutami No. 32 A Makassar, Sulawesi - Selatan, Indonesia	Perpanjangan	Segar	Frozen Tuna	16/10/2017	16/10/2019	157	7280/73/SKP/IBK/XI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Demersal Fish	16/10/2017	16/10/2019	158	7281/73/SKP/IBK/XI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Tuna	16/10/2017	16/10/2019	159	7282/73/SKP/ISG/XI/2017
			Perpanjangan	Beku	Fresh Demersal Fish	16/10/2017	16/10/2019	160	7283/73/SKP/ISG/XI/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopoda	16/10/2017	16/10/2019	161	7284/73/SKP/IBK/XI/2017
44	CV. Miranti	Griya Batas Kota Blok D 27 No. 10 Kabupaten Maros	Baru	Hidup	Kepiting Hidup	21/11/2017	21/11/2019	162	7540/73/SKP/ILN/XI/2017
45	UD. Makassar Ocean 97	JL. Barukang Utara LR. 13 ORW. 02/DRT. A, Makassar Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	21/11/2017	21/11/2019	163	7541/73/SKP/ISG/XI/2017
46	PT. Agro Mina Dewata	JL. Sungai Saddang Baru No. 9 Makassar	Perpanjangan	Segar	Fresh Demersal Fish	21/11/2017	21/11/2019	164	7542/73/SKP/ISG/XI/2017
			Perpanjangan	Segar	Fresh Pelagic Fish	21/11/2017	21/11/2019	165	7543/73/SKP/ISG/XI/2017
46	PT. Lontara Jaya Sakti	JL. Pasar Ikan Beba' Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar	Baru	Beku	Frozen Cephalopods	21/11/2017	21/11/2019	166	7544/73/SKP/IBK/XI/2017
			Baru	Beku	Frozen Demersal Fish	21/11/2017	21/11/2019	167	7545/73/SKP/IBK/XI/2017
			Baru	Beku	Frozen Pelagic Fish	21/11/2017	21/11/2019	168	7546/73/SKP/IBK/XI/2017
47	UD. Semangat Kawan Sejati	JL. Gatot Subroto V No. 6 Makassar	Baru	Kering	Sirip Ikan Hiu	21/11/2017	21/11/2019	169	7549/73/SKP/IKR/XI/2017
48	PT. Agarindo Sakti	JL. Bonto Tiro No. 16, Bulukumba	Perpanjangan	Kering	Rumput Laut	21/11/2017	21/11/2019	170	7550/73/SKP/IKR/XI/2017
49	CV. Anugerah Bahari Mandiri	JL. Kapasa Raya No. 39 Makassar	Baru	Segar	Fresh Shrimp	28/11/2017	28/11/2019	171	7581/73/SKP/ISG/XI/2017
			Baru	Beku	Frozen Shrimp	28/11/2018	28/11/2020	172	7582/73/SKP/IBK/XI/2017
			Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	28/11/2019	28/11/2021	173	7583/73/SKP/ISG/XI/2017
			Baru	Beku	Frozen Demersal Fish	28/11/2020	28/11/2022	174	7584/73/SKP/IBK/XI/2017
			Baru	Segar	Fresh Pelagic Fish	28/11/2021	28/11/2023	175	7585/73/SKP/ISG/XI/2017
			Baru	Beku	Frozen Pelagic Fish	28/11/2022	28/11/2024	176	7586/73/SKP/IBK/XI/2017
			Baru	Segar	Fresh Cephalopods	28/11/2023	28/11/2025	177	7587/73/SKP/ISG/XI/2017
			Baru	Beku	Frozen Cephalopods	28/11/2024	28/11/2026	178	7588/73/SKP/IBK/XI/2017
			Baru	Beku	Frozen Milk Fish	28/11/2025	28/11/2027	179	7589/73/SKP/IBK/XI/2017
50	AHA Food	JL. Sungai Musi KM 8, Kel. Waetuo, Kec. Tanete Riattang Timur Bone	Baru	Beku	Bakso Ikan, Nugget Ikan, Otak	6/12/2017	6/12/2019	180	7639/73/SKP/ILN/XII/2017
51	PT. Maju Awanindo Berjaya	JL. Poros Makassar - Maros KM 23 No 88 Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros, Sul-Sel	Perpanjangan	Beku	Frozen Cephalopods	13/12/2017	13/12/2019	181	7711/73/SKP/IBK/XII/2017
52	UD. Generasi baru	JL. Andi Malla Poros Pattiro Bajo, Kel. Biru Kec. Tanete Riattang, Bone	Perpanjangan	Beku	Bandeng Duri Lunak	13/12/2017	13/12/2019	182	7707/73/SKP/ILN/XII/2017
			Perpanjangan	Beku	Bandeng Asap	13/12/2017	13/12/2019	183	7708/73/SKP/ILN/XII/2017
			Perpanjangan	Beku	Bandeng Tanpa Duri	13/12/2017	13/12/2019	184	7709/73/SKP/IBK/XII/2017
			Baru	Beku	Olahan Surimi	13/12/2017	13/12/2019	185	7710/73/SKP/ILN/XII/2017
53	PT. Mitra Kartika Sejahtera	JL. Kima Raya I Kav. D-18 Kawasan Industri Makassar, Sulawesi-Selatan	Perpanjangan	Beku	Frozen Cooked Shrimp	21/12/2017	21/12/2019	186	7806/73/SKP/IBK/XII/2017
			Perpanjangan	Beku	Frozen Raw Shrimp	21/12/2017	21/12/2019	187	7807/73/SKP/IBK/XII/2017
54	PT. Prima Global Sukses	JL. Dr. Ir. Sutami No. 32 Makassar, Sulawesi - Selatan Indonesia	Baru	Beku	Frozen Pelagic Fish	21/12/2017	21/12/2019	188	7837/73/SKP/IBK/XII/2017
55	KSM Tenggiri	JL. Kalampeto Lingkungan Lengkong Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Sulawesi-Selatan	Baru	Beku	Bakso Ikan, Nugget Ikan, Otak	21/12/2017	21/12/2019	189	7835/73/SKP/ILN/XII/2017
			Baru	Kering	Abon Ikan	21/12/2017	21/12/2019	190	7836/73/SKP/ILN/XII/2017
56	PT. Wahyu Pradana Binamulia	JL. Kima 10 Kav. C-3A Makassar	Baru	Beku	Frozen Cooked Shrimp	21/12/2017	21/12/2019	191	7833/73/SKP/IBK/XII/2017
			Baru	Beku	Frozen Raw Shrimp	21/12/2017	21/12/2019	192	7834/73/SKP/IBK/XII/2017

Lanjutan.....

No	Nama UPI	Alamat	Jenis SKP	Jenis Olahan	Jenis Produk	Tanggal		No Urut	No. SKP
						Terbit	valid		
57	PT. Biota Laut Ganggang	JL. Kebangkitan No. 8 Dusun Belawela, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang	Baru	Kering	Karagenan	21/12/2017	21/12/2019	193	7831/73/SKP/ID/XIII/2017
			Baru	Kering	Tepung Agar-Agar	21/12/2017	21/12/2019	194	7832/73/SKP/ID/XIII/2017
58	PT. Chen Woo Fishery	JL. Kima 4 Blok K9/Kav B2, Kawasan Industri Makassar	Baru	Beku	Bakso Ikan, Nugget Ikan, Otak	21/12/2017	21/12/2019	195	7830/73/SKP/ILN/XIII/2017
59	CV. Sukses Makmur Timur Abadi	JL. Banda No 20/17 (Baru) Makassar - Sulawesi Selatan	Baru	Segar	Fresh Demersal Fish	21/12/2017	21/12/2019	196	7838/73/SKP/SG/XIII/2017
			Baru	Segar	Fresh Pelagic Fish	21/12/2017	21/12/2019	197	7839/73/SKP/SG/XIII/2017
			Baru	Hidup	Live Crab	21/12/2017	21/12/2019	198	7840/73/SKP/ILN/XIII/2017



Lampiran 8. Data Produksi Pembelian Udang Windu pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai Tahun 2017

A. Data Produksi selama tahun 2017 persiklus Perbenihan Udang Vannamei dan Udang Windu

➤ **Siklus I Mei 2017**

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	130.000	Vannamei	30	3.900.000	H. Munsida	Pangkep
2	100.000	Vannamei	30	3.000.000	Tunrung	Pinrang
3	80.000	Vannamei	30	2.400.000	Abdul Latief	Pare Pare
4	120.000	Vannamei	30	3.600.000	Muis	Pare Pare
5	70.000	Vannamei	30	2.100.000	Hasanuddin	Pangkep
	500.000			15.000.000		

➤ **Siklus II Juni 2017**

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	27.000	Vanamei	30	810.000	Jabir	Mamuju
	27.000			810.000		

➤ **Siklus III Juli 2017**

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	100.000	Vanamei	30	3.000.000	Faizal	Pangkep
2	100.000	Vanamei	30	3.000.000	Muh. Aras	Mamuju
3	134.000	Vanamei	30	4.020.000	Latunrung	Pinrang
	334.000			10.020.000		

➤ **Siklus IV Agustus 2017**

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	200.000	Vanamei	30	6.000.000	Jabir	Mamuju ps.Kayu
2	150.000	Vanamei	30	4.500.000	Tunrung	Pinrang
3	250.000	Vanamei	30	7.500.000	H. Sudirman	Pinrang
4	100.000	Vanamei	30	3.000.000	Latuf	Pare pare
5	150.000	Vanamei	30	4.500.000	Kaisal	Pangkep
6	100.000	Vanamei	30	3.000.000	Yusuf	Barru
7	50.000	Vanamei	30	1.500.000	Apong	Pinrang
	1.000.000			30.000.000		

➤ **Siklus IV Agustus 2017**

NO	Jumlah Induk (kg)	Jenis Induk	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	17.5	Udang Windu Apkir	80.000	1.400.000	Ardi	Barru
				1.400.000		

LAPORAN TAHUNAN 2017

➤ Siklus V September 2017

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	60.000	Udang Windu	25	1.500.000	Bapak Ulfa	Pinrang
2	40.000	Udang Windu	25	1.000.000	Muis	Pare pare
3	65.000	Udang Windu	25	1.625.000	H. Sudirman	Pinrang
4	35.000	Udang Windu	25	875.000	Tunrung	Pinrang
	200.000			5.000.000		

➤ Siklus VI November 2017

No	Jumlah Benur (Ekor)	Jenis Benur	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Nama Konsumen	Asal Konsumen
1	150.000	Udang Windu	25	3.750.000	Jabir	Mamuju ps.Kayu
2	100.000	Udang Windu	25	2.500.000	Tunrung	Pinrang
3	100.000	Udang Windu	25	2.500.000	H. Sudirman	Pinrang
4	150.000	Udang Windu	25	3.750.000	Latuf	Pare pare
5	160.000	Udang Windu	25	4.000.000	Yusuf	Barru
	660.000			16.500.000		

Berdasarkan data tersebut di atas, maka jumlah produksi benur udang vanname sebanyak 1.861.000 ekor, dan produksi benur udang windu sebanyak 860.000 ekor. Sehingga total produksi keseluruhan sebanyak 2.721.000 ekor dan induk udang windu apkir 17,5 kg.

Dari jumlah produksi tersebut di atas, maka didapatkan PAD dari produksi perbenihan udang sebanyak Rp. 78.730.000,00.

B. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hasil Pengujian Kesehatan Lingkungan Budidaya Tahun 2017

Bulan: Mei 2017

NO	JUMLAH PENGUJIAN	JENIS PENGUJIAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp)	NAMA KONSUMEN	ASAL KONSUMEN
1	7 ekor Ikan Mas	Uji PCR (KHV)	125,000	875,000	BBI Lewaja	Enrekang
2	6 ekor Ikan Mas	Uji PCR (KHV)	125,000	750,000	BBI Karrang	Enrekang
3	3 ekor Induk udang windu	Uji PCR WSSV)	125,000	375,000	UPT.PPPUKL	Barru
Jumlah				2,000,000		

Lampiran 9. Daftar Unit Pengolahan Ikan/ Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
1	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N. 4-B1 Makassar Telp (0411)513378 Fax (0411) 513373	Frozen cooked shrimp Frozen Breaded shrimp Frozen Raw Shrimp
2	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. Kima Raya I Kav. D-1b , Makassar Telp (0411) 514515,514782 Fax (0411) 515430	Frozen Shrimp Frozen cooked shrimp
3	CV. Bone Agung Mina Persada	Jl. Wiyatamandala Kel. Lonrae Timur. Telp(0481)26555 Fax (0418) 26776 081 355 087 788	Frozen Shrimp Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Chepalopods
4	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima raya I Blok D-2B Telp(0411) 514515, 514782 Fax (0411) 515430 085 255 103 877	Frozen cooked shrimp Frozen Raw Shrimp Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods Frozen Tuna (loin, steak) Frozen Farm Raised Fish (lele) Dried Flying Fish Roe
5	PT. South Suco	Jl. Kima VI Blok G/IV B Telp(0411) 510201, 510215 Fax (0411) 510049	Frozen Shrimp
6	PT. Wahyu Pradana BM	Jl. Kima raya I Blok D No. 2C Telp(0411) 4720895, 870760 (0411) 6191011	Frozen shrimp Dried flying fish roe Frozen Demersal Fish Frozen Chepalopods Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Cookedshrimp
7	CV. Prima Indo Tuna	Jl. Ir. Sutami No. 32 0811442826	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen Demersal Fish
8	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No. 59 0816256106 (0411) 6074710 (Johan)/085 342 536 1093 081 356 152 866 (Indri)	Frozen Pelagic Fish Frozen Slipper Lobster Frozen Octopus Frozen Fish Fillet
9	PT. Perikanan Nusantara	Jl. Sabutung 1 No.1. Telp.)411-21625	Frz Demersal & Pelagic Fish Frozen Chepalopods
10	PT. Prima Bahari Inti lestari	Jl. Kima 12 Kav. 5C Telp (0411) 512688 Fax (0411) 514163	Fresh tuna, Frozen Tuna Fresh chepalopods Frozen Chepalopods Fresh fillet fish Frozen Chepalopods Fresh fish Frozen Demersal Fish Frozen Boneless Milkfish

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
11	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K. 9/B2 Telp (0441) 515555 Jl.Kima 4 Kav.P-28,Makassar	Fresh tuna Frozen tuna Ikan Demersal Beku Ikan Demersal Segar
12	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamellang No. 42 kel. Bojo baru Kec. Mallusetasin Kab. Barru Fax (0411) 21105 Telp (0411) 21625	Chilled pasteurized crab meet Frozen Pasteurized crabmeat Can Frozen demersal fish Ikan Scombroid Beku
13	CV.Ome tradingcoy	Jl. Poros kanjilo gowa 085243020588 Fax (0411) 8216946 085 243 020 588, 081 355 468 790	Hana katsuobushi
14	PT. Donglim Jireh	Komp kima square blok B. 1-2, 0816251276	Dried Flying Fish Roe
15	PT. Dunia Marine Product	Jl. Kima 3 Kav. 4b Telp (0411) 512619 Fax (0411) 512625,081241629172	Dried flying fish roe Frozen Shrimp FrzCephalopods, Teripang krg
16	PT. Kawa Gutti	Jl. Tool lama no.22 Telp (0411) 512615 Fax (0411) 514826	Frozen flying fish roe (Dried Flying Fish Roe)
17	PT. Omeresso food	Jl. Poros Kanjilo, Barombong Gowa 085243020588	Katsuo Powder Hana Katsuo
18	CV. Makassar jaya	Jl. Batara bira 6 Komp. PU No. 13 081524424900	Dried sea cucumber
19	PT. Multi Sari Makassar	Jl. Kima 14 Kav. SS 12 Telp (0411)4723232 085 342 729 113	Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Pelagic Fish Frozen chepalopods Fresh chepalopods Frozen Tuna, Fresh Tuna Frozen Shrimp, Fresh Shrimp
20	PT. Parlevliet Paraba	Jln. Jembatan Tua No.89 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros 0812 4219 685 Telp(0411)5439100, fax(0411)550623	Fresh Tuna &Frozen Tuna Fresh Pelagic, & Frz. Pelagic Fresh & Frz. Demersal Fish Fresh Cephalopods
21	PT. Kemilau Bintang timur	Jl. Kima 3 Kav. 2A Telp (0411) 512808, 512828 Fax (0411) 513000 082 193 088 277	Frozen Crabmeat Frozen Pasteurized crabmeat Frozen Raw shrimp Frozen chepalopods Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish Fresh Demersal fissh Frozen Demersal fissh Fresh Farm Raised Fish Frozen Farm Raised Fish

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
22	CV. Usaha Centra Jaya Sakti	Jl. Kima V Kav. E No.31 Telp (0411) 514781 Fax (0411) 514781, 3619169 0811 416 889	Frozen octopus frozen tuna & fresh Tuna Fresh demersal fish Frozen Demersal Fish Fresh Milk Fish
23	UD Resky Bahari	Jl. Perintis kemerdekaan km. 19 Telp (0411) 5787951, fax 4813721 081 385 139 566 (Kasman) 081 397 222 534 (Lena)	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish
24	CV. Jaya Indah Cemerlang	Jl. Buru No. 47 Telp (0411) 6077171 081 342 540 495 (Frans)	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Dried Shark Fin Sea Cucumber
25	PT. Global Seafood International Indonesia	Jl. Poros Bantaeng, Bulukumba Km. 131 Ds. Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng Telp (0413) 2424828 Fax (0413) 2424873 085 256 245 392 (Fandi)	Frozen Surimi
26	PT. Ocean Cham Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Telp(0411) 514827, 510866 Fax (0411) 510686	Pateurized Canned Crab meat
27	PT. Kelola Mina laut	Jl. Kima 17 Blok DD-15-16, Makassar 085242009787 Fax (0411) 4723256	Frozen demersal fish Frozen pelagic fish Frozen cephalopods
28	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 Ruko No. 5 Telp(0411) 510666, 513518 Fax(0411) 511666	Produk kering (Dried Sea Cucumber, sirip Ikan, Perut Ikan, abalone dan rumput laut)
29	CV. Hokky Seafood	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 17 Telp(0411) 48136251, 434018,5030822 Fax (0411)420618	Live Crab Fresh Tuna Fresh Demersal&Pelagic Fish
30	CV. Anugerah Sejati	Jl. Metro Tanjung Bunga A.33 Ruko Somba Opu (0411) 8113919	Dried Flying Fish Roe
31	CV. Udin Jaya	Jl. Komp Perumahan Nusa Indah mas	Frozen pelagic Fish Live fish
32	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinranae No. 1, Bulu-Bulu Kec. Marusu Kab. Maros 081355689123, 081355105171 (Surya) Fax (0411) 555 386	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh hrimp Live Fish
33	PT. Anugerah Bintang Cemerlang	Jl. Bambu runcing No. 99 081343512389	Fresh&Frozen Tuna
34	PT. Nusa Dwipa Citra Tunggal	Jl. Kima VII Blok J. N. 4 Telp (0411)514514,513555 081 342 089 182	Frozen Fish
35	PT. Wahyu Putra BimaSakti	Jl. Kima 10 T-2B Makassar	Carrageenan Chip
36	UD. Atops	Jl. Bahagia No. 2 Telp (0411) 556581 Fax (0411) 556582	Dried flying Fis Roe

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
37	CV. Inti Makmur	Jl. Kima 6 Blok F1/A2 telp (0411) 514242, Fax (0411)514338	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen demersal Fish Frozen Chepalopods Fresh & Frozen Shrimp
38	PT. Mitra Sejahtera Makassar	Jl. Ir. Sutami Blok G2 No.11 (0411) 2606099	Rumput Laut
39	UD. Delton	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Blok C No. 11 Makassar SulSel	Rumput laut Kering
40	CV. Sentosa Bimantara Laut	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Sulawesi Blok C No. 10 makassar SulSel	Rumput laut Kering
41	PT. Giwang Citra Laut	Poros Pabrik Gula Takalar Km 1,5 Ds.Pa'rappunganta,polombangkeng Utara.Kab. Takalar	carrageenan Chips Semi Refined Carrageenan
42	Koperasi Agroniaga	JL. BAKAU NO. 66, KOTA PALOPO Fax (0471) 832513, 0812 4214 301	Dried Seaweed
43	PT. Sumberguna Makassar Nusa	Jl. Ujung Pandang Baru No.17 Makassar	Dried Seaweed
44	PT. Rapid Niaga International	Jl. Ir. Sutami Blok L.5, Makassar	Dried Seaweed
45	CV. Putri Jaya	Kawasan Pergudangan Parang Loe Indah Telp. 085399127997, 081141048815	Dried Seaweed
46	CV. Adi Tirta	Jl. Sabutung No. 123 Makassar (0411) 452782, 45282	Dried Seaweed
47	CV. Benur Rahma	Jl. Tala-Tala Ds. Pattinong, Kec. Galesong Takalar. Telp. 085343822833, (0411) 82326564	Dried Flying fish roe
48	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima 4 Kav.P3A, Makassar	Dried Seaweed
49	UD. Centralindo Agar Utama	Gudang Parangloe Indah Blok E No. 10 Makassar Telp.(0411) 5774648,	Dried Seaweed
50	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A.Mks	Dried Seaweed
51	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Pemuda Pantai Salu Songka Kec. Wara Timur, Kota Palopo.	Dried Seaweed
52	CV. Pelita	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A Mks	Dried Seaweed
53	UD. Baharu	Komplek Pergudangan lantebung Jl.Ir. Sutami Blok A.12 No.5 Makassar	Dried Seaweed
54	CV. Agro Mina Dewata	Jl. Sungai Saddang Baru NO.9A, Makassar	Fresh Demersal Fish
55	PT. Bantimurung Indah	Jl. Sam Ratulangi No. 163, Maros.	carrageenan Chips Semi Refined Carrageenan
56	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima VIII Kav. SS No.23A Kima, Makassa	Frozen Tuna
57	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima 3 Kav.5 Makassar	Daging Rajungan Kaleng Past

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
58	PT. Mitra Timur Nusantara	Jl. Sultan Abdullah Raya Lrg,3 No. 9 Makassar Fax (0411) 428228 081 2413 3739	Ikan Demersal Beku Ikan Pelagis Beku Chephalopoda Beku Tuna Beku
59	PT. Mina Timur Indonesia	Jl.ABD.Kudus barombong kec. Tamalate, Makassar. Telp (0411) 2122637 081 241 333 359 (Sri)	Telur ikan terbang kering.
60	PT. Sentosa Sumber galesong	Komps.Graha Satelit Blok A/20 Jl. Sultan Hasanuddin , Sungguminasa Gowa, Makassar.	Telur ikan terbang kering
61	PT. Sinar Laut Nusantara	Ds Cikoang,DesaLakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish Fresh Chepalopods Frozen Cephalopods Fresh&Frozen Lobster Fresh&Frozen Slipper Lobster, Fresh Milkfish Fresh Shrimp
62	PT. Tujuh Samudera Jaya	Jl. Malino Ds. Nirannuang, kec Bontomarannu, Gowa	Frozen Flying Fish Roe
63	PT. Asia Sejahtera Mina	Jl. Ir. Sutami Kawasan Terpadu Logistik Blok A-1 Makassar	Dried Seaweed
64	UKM "88 Marijo"	Jl. Poros Pinrang-Pare,Kel.Manarang (bulu) Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang	Boneless Milkfish
65	PT. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No. 38 Blok H2-10, Makassar	Dried Seaweed
66	CV. Eltisyah	Jl. Monumen Emmy Zaelan III Komplek BTN Agraria blok q9/24,Makassar	Fish JELLY Product
67	PT. Karya Jaya Mandiri	Jl. Prof.Ir. Sutami no.15A, Makassar	Dried Seaweed
68	PT. Goh Fadel Buana	Jl. Poros Makassar-Maros no. 126 Ballu- Ballu Kel. Taroada, Kec. Turikale, Makassar	Fresh Pelagic Fish Frozen Pelagic Fish fresh Demersal Fish frozen Demersal Fish Frozen Fish Fillet
69	PT. Lintas Antar Nusa	Jl. Poros Kupa , Kec. Mallusetasi, Barru	Ikan Terbang beku
70	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng batu-Batu, Galesong Utara, Kab. Takalar	Frozen Dried Flying fish roe
71	PT. Anugerah Gemilang sukses sedayu	Jl.Poros Macoppa Maros Km.26. No.44 Kab.Maros	Dried Seaweed
72	PT. Galesong	Jl. Baso Dg. BellaDesa Kalukuang Galesong Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
73	PT. Prima Global Sukses	Jl. Prof.Dr.Ir.SutamiNo.32A	Ikan Demersal Segar Ikan Demersal beku Fresh Tuna, Frozen Tuna Cephalopoda Beku

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
74	PT. Boddia Jaya	Jl.Karaeng Salamaka, Dusun Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
75	UD. Generasi Baru	Jl. Andi Malla Poros pattiro Bajo. Kel. Biru kec. Tanete Riattang, Bone sulsel	Bandeng asap Bandeng duri lunak & tanpa duri
76	PT.Jireh Commodity	Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square warehouse 2 No.11,12,13, Makassar	Dried Flying fish roe Frozen Flying fish roe Teripang Kering Teripang Beku
77	PT. Agarindo	Kab. Bone	Rumput Laut Kering
78	CV. Persada Semesta	Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Rumput Laut Kering
79	PT.Sinar Laut Nusantara	Jl.Kima 4.Kav.P-3B, Makassar	Ikan Demersal Segar Ikan Demersal beku Ikan Pelagis segar Ikan Pelagis Beku Udang segar Udang Beku Cephalopoda segar Cephalopoda Beku Udang Kipas Segar Udang Ikan Beku Tuna Segar Tuna Beku
80	Cv. Indah sari	Jl. Dg. Tata IV. Griya Tata Asri Blok E 13 A Takalar	Dried Flying fish roe